

**PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2021-2026**





**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor



- 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;



24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima



Tahun 2011 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 47);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA,  
dan  
BUPATI BIMA,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021-2026.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bima.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.



8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RPJPD Provinsi NTB dan RPJMD Provinsi NTB;
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perangkat Daerah adalah rencana strategis bisnis lima tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bima adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bima;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bima untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang



- modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
25. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu sub unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
  26. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
  27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.

## BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :
  - a. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan
  - b. Tujuan, sasaran , strategi arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud paa ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 di susun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Bab IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



- f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Bab IX : Penutup

#### Pasal 4

- (1) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran RPJMD berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis atau Strategi Bisnis untuk BLUD dan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan apabila:
  - a. terjadi perubahan aturan yang mendasari pembentukan peraturan ini;

- b. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (3) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
  - (4) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun serta sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bima 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (4) Dokumen RPJMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan ditetapkannya RPJMD baru.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal, 29 Oktober 2021

BUPATI BIMA,

TDD

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada tanggal, 29 Oktober 2021

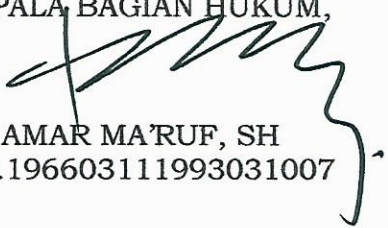
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

TTD

H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 46....  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT : 54. TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMAR MA'RUF, SH  
NIP.196603111993031007

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR        TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 - 2026**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang yang menjadi milik seluruh rakyat Kabupaten Bima.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, disusun perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara berdaulat, adil dan makmur untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kabupaten Bima adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Bima memuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Bima dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Bima. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Bima secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang merupakan periode peningkatan pembangunan Kabupaten Bima yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kabupaten Bima untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Mewujudkan Kabupaten Bima yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah, dan Handal) Tahap II, dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (a) Mewujudkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur kebudayaan Bima, (b) Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia, (c) Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat, (d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, (e) Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima ini terdiri dari 7 bab dan 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 dilakukan secara teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud kebijakan perencanaan RPJMD adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Bab VI lampiran peraturan ini.
- b. Yang dimaksud pelaksanaan RPJMD adalah pelaksanaan dari program yang tertuang dalam Bab VII lampiran peraturan ini.
- c. yang dimaksud hasil RPJMD adalah capaian dari pelaksanaan indikator kinerja daerah yang telah tertuang dalam Bab VIII lampiran peraturan ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR .....





# BUPATI BIMA

---

## Sambutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 ini merupakan lanjutan periode kepemimpinan saya, ditetapkan setelah melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bima dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dokumen RPJMD merupakan dokumen resmi yang akan menjadi acuan rencana pembangunan di Kabupaten Bima untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini memuat secara lengkap dan sistematis, visi dan misi kepala daerah, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan tahapan pencapaian serta gambaran umum pendanaan yang diperlukan. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)”**. Dalam mewujudkannya kita tetap harus menyadari, bahwa tantangan ke depan semakin berat dan pekerjaan kita masih sangat banyak yang harus dituntaskan. Kita dituntut untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar cerdas, bersungguh-sungguh, dan merawat sikap konsisten dalam pencapaian target-target pembangunan.

Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak dan memberikan kinerja yang terbaik demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bima ke depan. Inshaa Allah segenap usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk lima tahun ke depan.

Bima, Oktober 2021

Bupati Bima,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	7
1.3.1 RPJMD Kabupaten Bima dengan RPJPD Kabupaten Bima.....	9
1.3.2 RPJMD Kabupaten Bima dengan Renstra Perangkat Daerah .....	9
1.3.3 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	10
1.3.4 RPJMD Kabupaten Bima dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	11
1.4 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4.1 Maksud .....	12
1.4.2 Tujuan.....	12
1.5 Sistematika Penulisan RPJMD.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDOSI DAERAH .....</b>	<b>15</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	15
2.1.1 Aspek Geografi .....	15
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	15
2.1.1.2 Aspek Pengembangan Wilayah.....	29
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	38
2.1.2 Aspek Demografi .....	41
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	45
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	45
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	52
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	58
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	59



2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar .....	60
2.3.2	Fokus Urusan Wajib Non Dasar .....	78
<b>2.3.3</b>	<b>Fokus Urusan Pilihan.....</b>	<b>95</b>
<b>2.3.4.</b>	<b>Urusan Penunjang .....</b>	<b>106</b>
<b>2.4</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah.....</b>	<b>111</b>
<b>2.5</b>	<b>Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2026 .....</b>	<b>115</b>
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>127</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinerja Keuangan Masa Lalu .....</b>	<b>128</b>
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	129
3.1.2	Neraca Daerah .....	149
<b>3.2</b>	<b>Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu.....</b>	<b>154</b>
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	154
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	155
<b>3.3</b>	<b>Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>157</b>
3.3.1	Proyeksi Keuangan Tahun 2021 – 2026.....	157
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	161
3.4	Alternatif Sumber Pendanaan Lain Pembangunan .....	162
3.4.1	Sumber APBN .....	162
3.4.2	Kerjasama Antar Kabupaten/Kota.....	162
<b>3.4.3</b>	<b>Pinjaman Daerah .....</b>	<b>163</b>
3.4.4	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) .....	164
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>166</b>
<b>4.1</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bima .....</b>	<b>166</b>
<b>4.2</b>	<b>Isu Strategis .....</b>	<b>167</b>
4.2.1	Pertimbangan Penentuan Isu Strategis.....	168
4.2.1.1	Penelaahan Terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026	168
4.2.1.2	Penelaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 .....	169
4.2.1.3	Penelaahan terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023.....	169
4.2.1.4	Penelaahan Terhadap RTRW Kabupaten Bima .....	173
4.2.1.5	Penelaahan terhadap RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006-2025.....	184

4.2.1.6 Penelaahan Terhadap RPJMD Daerah Lain.....	187
4.2.2 Isu Strategis .....	189
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>193</b>
5.1 Visi.....	194
5.2 Misi .....	194
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	196
5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	197
<b>BAB VI STRATEGI,ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>204</b>
6.1 Strategi .....	204
6.1.1 Sategi Umum.....	205
6.1.2 Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran.....	206
6.2 Arah Kebijakan.....	209
6.3 Program Pembangunan Daerah .....	213
6.4 Keterpaduan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program .....	230
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>261</b>
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 .....	204
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>304</b>
8.1. Indikator Kinerja Utama.....	304
8.2. Indikator Kinerja Daerah .....	327
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>304</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah.....	8
Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah .....	10
Gambar 1. 3 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD .....	11
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bima.....	23
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Bima .....	24
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten Bima.....	25
Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bima.....	26
Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Kabupaten Bima.....	27
Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bima .....	28
Gambar 2. 7 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bima .....	36
Gambar 2. 8 Peta Pertambangan Kabupaten Bima.....	37
Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bima .....	40
Gambar 2. 10 Peta Kepadatan penduduk .....	44
Gambar 4. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bima .....	174
Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bima .....	177
Gambar 4. 3 Peta Rencana Penetapan KSK Kabupaten Bima.....	180

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Perbandingan PDRB atas ADHB dan ADHK menurut pengeluaran .....	49
Grafik 2. 2 Pertumbuhan PDRB Perkapita 2016 – 2020 .....	50
Grafik 2. 3 Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2016 – 2020 .....	50
Grafik 2. 4 Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima Tahun 2016-2020.....	52
Grafik 2. 5 Perkembangan IPM (%) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 .....	53
Grafik 2. 6 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	54
Grafik 2. 7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	54
Grafik 2. 8 AHH Kabupaten Bima dan Provinsi NTB Tahun 2016 – 2020 .....	56
Grafik 2. 9 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	57
Grafik 2. 10 Total Produksi Garam Kabupaten Bima .....	96
Grafik 3. 1 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bima .....	136
Grafik 3. 2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp Milyar) .....	138
Grafik 3. 3 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (Rp Milyar) dan Kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 .....	140
Grafik 3. 4 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bima .....	143
Grafik 3. 5 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Bima .....	144
Grafik 3. 6 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Dalam Milyar Rupah).....	145
Grafik 3. 7 Realisasi Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan lainnya) dan Proporsi Terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 .....	145
Grafik 3. 8 Realisasi dan Perubahan Belanja Langsung Kabupaten Bima .....	147
Grafik 3. 9 Realisasi Pos Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.....	149
Grafik 3. 10 Pertumbuhan Aset Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019.....	152
Grafik 3. 11 Perkembangan Kewajiban Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019.....	153
Grafik 3. 12 Perkembangan Ekuitas Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019 .....	154



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Bima .....	16
Tabel 2. 2 Kemiringan Tanah menurut Kecamatan di Kabupaten Bima.....	16
Tabel 2. 3 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bima .....	18
Tabel 2. 4 Sungai-Sungai Yang Mengairi Daerah Irigasi di Kabupaten Bima.....	19
Tabel 2. 5 Luas Areal Irigasi Pekerjaan Umum Se Kabupaten Bima Tahun 2020.....	20
Tabel 2. 6 Sebaran Lokasi Sumber Mata Air, Debit Air dan Penggunaannya di Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	21
Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima Tahun 2020.....	23
Tabel 2. 8 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bima Tahun 2020.....	29
Tabel 2. 9 Luas Panen Sayur-Sayuran di Kabupaten Bima Perkecamatan Tahun 2020.....	30
Tabel 2. 10 Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Bima Perkecamatan Tahun 2020.....	31
Tabel 2. 11 Jumlah Produksi Ikan Basah (Laut) di Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	32
Tabel 2. 12 Potensi Wisata Kabupaten Bima Tahun 2020.....	35
Tabel 2. 13 Lokasi Potensi Bencana Alam di Kabupaten Bima.....	38
Tabel 2. 14 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	41
Tabel 2. 15 Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020.....	42
Tabel 2. 16 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	43
Tabel 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah). 2016–2020 .....	46
Tabel 2. 18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah). 2016–2020 .....	47
Tabel 2. 19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen) 2016–2020.....	47
Tabel 2. 20 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen) 2016–2020.....	48
Tabel 2. 21 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima, 2016-2020 .....	49
Tabel 2. 22 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Dengan Target Daerah Tahun 2016 - 2020 .....	51

Tabel 2. 23 Angka Kemiskinan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	51
Tabel 2. 24 Perkembangan IPM (%) Dengan Target Daerah Tahun 2016 – 2020 .....	52
Tabel 2. 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	53
Tabel 2. 26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	54
Tabel 2. 27 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Bima dan Provinsi NTB Tahun 2016 – 2020 .....	55
Tabel 2. 28 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bima dan Provinsi NTB .....	56
Tabel 2. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	57
Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 ....	57
Tabel 2. 31 Jenis Kesenian tradisional Kabupaten Bima .....	58
Tabel 2. 32 Ketersediaan Fasilitas Olah Raga Kabupaten Bima Tahun 2020.....	59
Tabel 2. 33 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bima dalam Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2020 .....	60
Tabel 2. 34 Target capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2020.....	60
Tabel 2. 35 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	61
Tabel 2. 36 Jumlah Siswa yang Tamat Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	62
Tabel 2. 37 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2019 .....	62
Tabel 2. 38 Rasio Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	63
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 .....	63
Tabel 2. 40 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2020....	63
Tabel 2. 41 Indikator kesehatan di Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	66
Tabel 2. 42 Angka kunjungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 ....	66
Tabel 2. 43 Kinerja pelayanan Rawat Inap Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	67
Tabel 2. 44 Pelayanan langsung kepada keluarga Pasien BPJS RSUD Bima Tahun 2019 .....	67
Tabel 2. 45 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 .....	68
Tabel 2. 46 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	68



Tabel 2. 47 Kondisi Jalan Kabupaten Bima dengan Status Jalan Kabupaten Tahun 2016 - 2020 .....	69
Tabel 2. 48 Jembatan di Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	69
Tabel 2. 49 Luas Areal Daerah Irigasi di Kabupaten Bima Tahun 2020.....	70
Tabel 2. 50 Kondisi Prasarana Irigasi di Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	71
Tabel 2. 51 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bima Tahun 2016-2019.....	72
Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	72
Tabel 2. 53 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat.....	73
Tabel 2. 54 Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	74
Tabel 2. 55 Perkembangan Rasio Polisi Pamong Praja terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 .....	75
Tabel 2. 56 Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Bima Tahun 2016-2020.....	75
Tabel 2. 57 Jumlah Prasarana Sosial Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	76
Tabel 2. 58 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial.....	77
Tabel 2. 59 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	78
Tabel 2. 60 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	79
Tabel 2. 61 Jumlah Perempuan pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	79
Tabel 2. 62 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Bima tahun 2020 .....	80
Tabel 2. 63 Skor Pola Pangan Harapan 2016-2022 Kabupaten Bima .....	81
Tabel 2. 64 Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	82
Tabel 2. 65 Jumlah Desa Mandiri, Berkembang, Maju, Dan Tertinggal .....	85
Tabel 2. 66 Pencapaian peserta KB baru Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2019 .....	86
Tabel 2. 67 Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 .....	87
Tabel 2. 68 Jumlah Koperasi Tahun 2016 - 2020 .....	89
Tabel 2. 69 Struktur Permodalan Koperasi dan PKM Tahun 2016-2020.....	90
Tabel 2. 70 Perkembangan PMTB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2019* (Rp. Ribu) .....	91
Tabel 2. 71 Perkembangan Rencana Investasi Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	91

Tabel 2. 72 Potensi Pemanfaatan Lahan Pugar di Kabupaten Bima.....	96
Tabel 2. 73 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kab. Bima .....	97
Tabel 2. 74 Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	99
Tabel 2. 75 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	100
Tabel 2. 76 Perkembangan Populasi Ternak Besar dan Unggas Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 .....	101
Tabel 2. 77 Perkembangan produksi daging dan telur Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 .....	101
Tabel 2. 78 Populasi Ternak per Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2020 .....	102
Tabel 2. 79 Jumlah Bantuan Ternak Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020.....	103
Tabel 2. 80 Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Sektor Industri Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020.....	104
Tabel 2. 81 Jumlah SIUP yang Diterbitkan Secara Kumulatif di Kabupaten Bima.....	104
Tabel 2. 82 Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Kab. Bima .....	104
Tabel 2. 83 Jumlah ijin usaha yang diterbitkan Kabupaten Bima .....	105
Tabel 2. 84 Unit Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 .....	105
Tabel 2. 85 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Bima.....	108
Tabel 2. 86 Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Bima Tahun 2016- 2020 .....	109
Tabel 2. 87 Jumlah PNS Kabupaten Bima Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2020 .....	110
Tabel 2. 88 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bima dan Provinsi NTB .....	112
Tabel 2. 89 Evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2020.....	117
Tabel 3. 1 Postur APBD Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020.....	130
Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020.....	132
Tabel 3. 3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp Milyar).....	137
Tabel 3. 4 Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Rp Milyar) .....	139
Tabel 3. 5 Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	141
Tabel 3. 6 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 .....	148
Tabel 3. 7 Neraca dan Pertumbuhan Masing-Masing Pos Neraca Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 .....	150
Tabel 3. 8 Proporsi Pos Aset terhadap Total Aset Kabupaten Bima .....	153



Tabel 3. 9 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima	
Tahun 2016 – 2020 .....	155
Tabel 3. 10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020.....	156
Tabel 3. 11 Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bima Tahun 2021 - 2026 .....	159
Tabel 4. 1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan .....	188
Tabel 4. 2 Sinergisitas Isu Strategis Nasional, Provinsi, KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Bima .....	190
Tabel 5. 1 Keterkaitan antara Visi dengan Misi.....	195
Tabel 5. 2 Matriks Konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	197
Tabel 5. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Target .....	199
Tabel 5. 4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target .....	200
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Kabupaten Bima.....	207
Tabel 6. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bima.....	210
Tabel 6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima .....	212
Tabel 6. 4 Keterkaitan Misi, Program Unggulan dan Program Kepmen Nomor 050-3708 Tahun 2020 .....	214
Tabel 6. 5 Keterpaduan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program.....	231
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bima .....	207
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 .....	210
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 .....	305
Tabel 8. 2 Patokan Nilai Koefisien Gini.....	309
Tabel 8. 3 Tabel Indikator Kualitas Lingkungan .....	310
Tabel 8. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 .....	328



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bima yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 telah terpilih **Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE** dan **H. Dahlan M. Noer** sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih periode tahun 2021-2026. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut dilantik di Mataram pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021.

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan Visi dan Misinya pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD disusun melalui pendekatan Teknokratik dan Politik dengan tetap memperhatikan kesesuaian arah kebijakan, tujuan dan sasaran dengan dokumen





perencanaan pembangunan lainnya yang meliputi RPJPD Kabupaten Bima 2006-2025, RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, RPJMN 2020-2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026, bersamaan waktunya dengan berlangsungnya Tahap IV (keempat) dari RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006-2025. Pelaksanaan penyusunan RPJMD dilakukan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan tujuan agar visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dapat dijabarkan ke dalam visi, misi, program prioritas dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Bima tahun 2021-2026. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam penanggulangan Pandemi Covid-19, baik yang meliputi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat maupun usaha pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat dalam periode tahun 2021-2026.

Dalam RPJPD Kabupaten Bima tahun 2006-2025 terdapat 5 (lima) agenda Pokok yang masih memerlukan perhatian dalam penyusunan RPJMD 2021-2026, mengingat periode RPJMD ini bertepatan dengan berakhirnya masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun agenda pokok tersebut adalah sebagai berikut:

**Agenda 1: Perwujudan masyarakat sejahtera dan mandiri**, dengan sasaran penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia;

**Agenda 2: Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama**, dengan sasaran peningkatan kualitas pendidikan agama, kemudahan akses bagi umat beragama, peningkatan dan pemantapan kerukunan hidup umat, peningkatan penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah, peran aktif dan optimalisasi fungsi tokoh-tokoh agama, serta peningkatan dan pemantapan program-program dalam forum kerjasama sosial kemasyarakatan bidang keagamaan.

**Agenda 3: Agenda pemerintahan yang baik**, dengan sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan good governance, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, terciptanya supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum daerah dalam pengawasan pembangunan, dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

**Agenda 4: Agenda pertanian berkelanjutan** dengan sasaran meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, peningkatan nilai tambah hasil produksi



pertanian, meningkatkan akses masyarakat tani terhadap sumber-sumber permodalan baik itu dengan pelibatan lembaga keuangan, bank maupun non bank, meningkatkan akses masyarakat tani terhadap pasar domestik regional, nasional, maupun internasional, dan pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan pedesaan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah, pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga dan peningkatan ketahanan sosial budaya.

**Agenda 5: Agenda pembangunan berwawasan lingkungan** dengan sasaran peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan dan peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam, pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Penyusunan RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bagian keempat yang prosesnya meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan RPJMD; (b) Orientasi mengenai penyusunan RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bima mengacu kepada dasar hukum penyusunan RPJMD. Berikut ini dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);





4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);





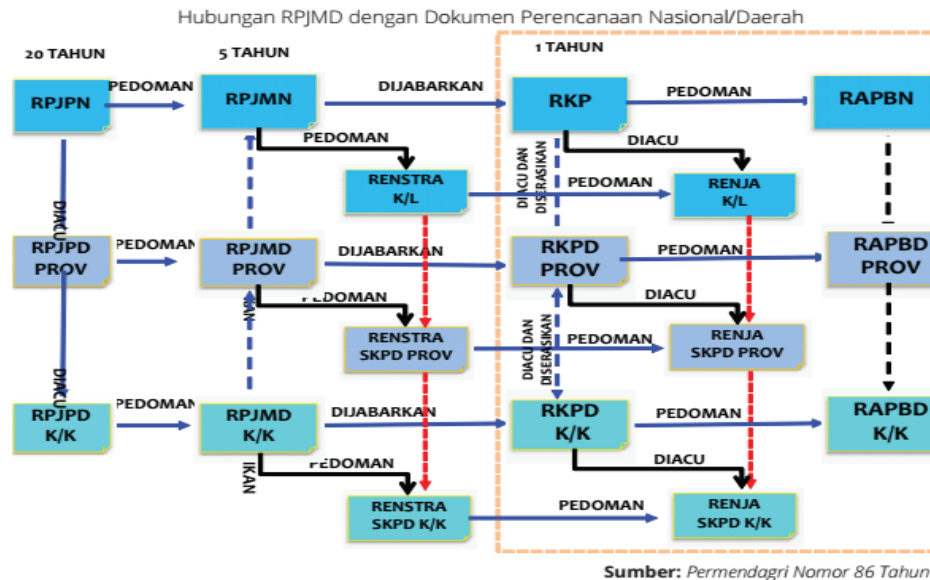
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
38. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 47);
43. Peraturan Daerah kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76);
44. Peraturan Daerah kabupaten Bima No. 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
45. Peraturan Bupati kabupaten Bima No. 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2021.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Rancangan awal merupakan suatu proses dalam perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pada rancangan awal ini mulai dilaksanakan kompilasi dan analisis secara ilmiah terhadap kondisi dan potensi daerah serta isu-isu strategis yang dihadapi 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan

Awal RPJMD menyajikan dan menganalisis data dan fakta dan isu strategis untuk dijadikan pijakan penyusunan RPJMD lima tahun ke depan.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah**

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan RPJMD perlu disusun rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan Rancangan Teknokratik tersebut diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD mencakup beberapa hal antara lain, analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah.



### **1.3.1 RPJMD Kabupaten Bima dengan RPJPD Kabupaten Bima**

RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2006-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2021-2026. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

### **1.3.2 RPJMD Kabupaten Bima dengan Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi perangkat daerah mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten.



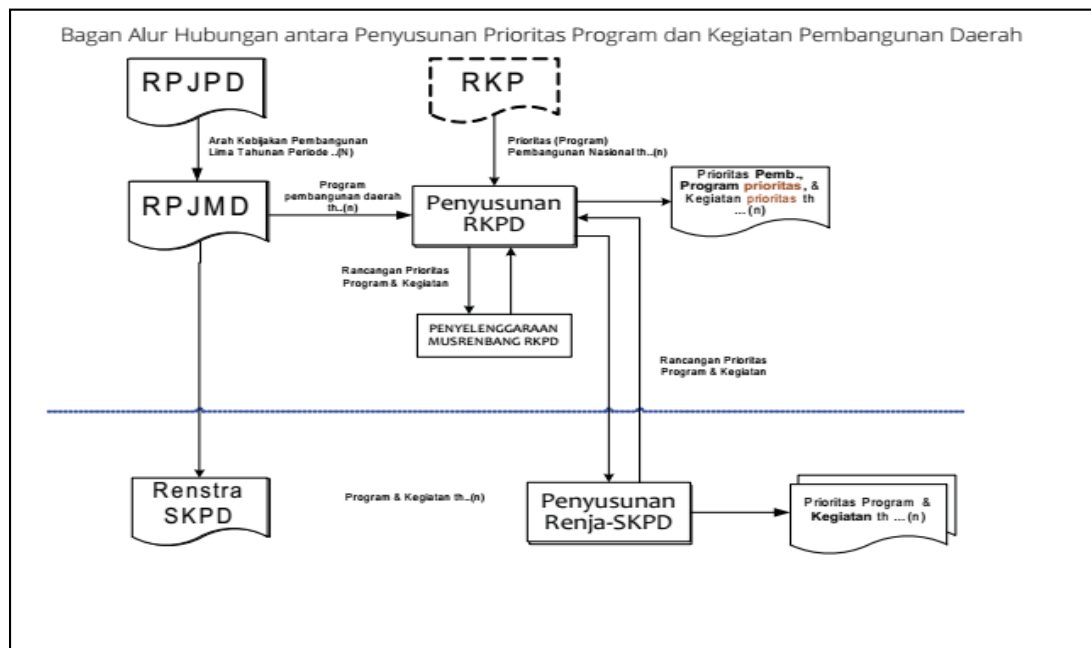


Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

### 1.3.3 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bima yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bima yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bima, RPJMD Provinsi NTB, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1. 3 Hubungan Antara RPJMD dengan RKP

#### 1.3.4 RPJMD Kabupaten Bima dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sub sistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bima, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kota Bima dan Kabupaten Dompu;
5. Dokumen terkait lainnya (dokumen perencanaan sektoral). Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima berpedoman pada RTRW Kabupaten Bima, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Penelaahan



rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
- 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
- 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Kabupaten/Kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan Kabupaten/Kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud**

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan dan memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Bima dengan menggunakan metoda dan pendekatan kerangka fikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bima.

### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan dari disusunnya rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026, yaitu sebagai pedoman dan bahan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.





## **1.5 Sistematika Penulisan RPJMD**

Penyajian dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 (lima) bab dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Bima.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Bima secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) Geografi dan demografi, (2) Kesejahteraan masyarakat, (3) Pelayanan umum, serta (4) Daya saing daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan masa lalu, (2) Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) erangka pendanaan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bima untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Bima dalam jangka menengah.



## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB IX PENUTUP**



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

---

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Aspek Geografi

##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten dari delapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa yang berkedudukan pada  $118^{\circ} 44' - 119^{\circ} 22'$  BT dan  $08^{\circ} 08' - 08^{\circ} 57'$  LS. Batas administrasi wilayah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Adapun peta administrasi Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bima.

Luas wilayah Kabupaten Bima adalah 438.940 Ha atau 4.389 Km<sup>2</sup>. Secara Administrasi Kabupaten Bima terbagi menjadi 18 kecamatan, 191 desa dan 783 dusun. Adapun luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:





**Tabel 2. 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Bima**

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Dusun	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Monta	Tangga	14	45	228
2	Parado	Paradorato	5	71	261
3	Madapangga	Dena	11	63	238
4	Woha	Tente	15	33	106
5	Belo	Cenggu	9	30	45
6	Langgudu	Karumbu	15	70	323
7	Wawo	Maria	9	82	132
8	Sape	Naru	18	46	232
9	Lambu	Sumi	14	22	404
10	Wera	Tawali	14	38	465
11	Ambalawi	Nipa	6	59	181
12	Donggo	O'o	9	40	124
13	Sanggar	Kore	6	41	478
14	Tambora	Labuan Kananga	7	24	628
15	Bolo	Rato	14	52	67
16	Soromandi	Kananta	7	18	342
17	Lambitu	Kuta	6	15	65
18	Palibelo	Teke	12	33	72
<b>Total</b>			<b>191</b>	<b>782</b>	<b>4.389</b>

*Sumber: Kabupaten Bima dalam Angka Tahun 2021 dan DPMDDES Kab. Bim, Tahun 2020*

### ➤ Topografi

Wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-15%, 16-40% dan >40%. Pengelompokkan kelas kemiringan pada setiap kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2.

**Tabel 2. 2 Kemiringan Tanah menurut Kecamatan di Kabupaten Bima**

No	Kecamatan	Kelompok Kemiringan (ha)				Jumlah
		0-2%	3-15%	16 - 40%	> 40%	
1	Monta	3.010	4.200	13.020	7.711	27.941
2	Parado	1.800	2.500	10.200	3.200	17.700
3	Madapangga	980	2.350	9.000	3.800	16.130
4	Woha	4,593	784	2.364	2.715	10.456
5	Belo	4,409	4,108	7.698	2.569	18.784
6	Langgudu	960	600	5.000	4.200	10.760



No	Kecamatan	Kelompok Kemiringan (ha)				Jumlah
		0-2%	3-15%	16 - 40%	> 40%	
7	Wawo	68	8.080	14.480	22.851	45.479
8	Sape	2.760	7.792	2.272	21.813	34.637
9	Lambu	2.500	3.400	6.500	8.100	20.500
10	Wera	1,832	5.700	16.696	23.592	47.820
11	Ambalawi	150	1.400	10.050	12.100	23.700
12	Donggo	1.024	12.100	10.172	13.268	36.564
13	Sanggar	3.500	16.448	13.405	13.023	46.376
14	Tambora	1.800	7.100	8.000	1.400	18.300
15	Bolo	8.100	4.400	8.394	7.457	28.351
16	Soromandi	1.200	3.900	5.050	15.052	25.502
17	Lambitu	100	450	1.700	1.140	3.390
18	Palibelo	2.300	400	3.250	900	6.850
<b>Jumlah</b>		<b>41.086</b>	<b>96.712</b>	<b>174.242</b>	<b>164.391</b>	<b>438.940</b>
<b>%</b>		<b>8,63</b>	<b>20,3</b>	<b>34,5</b>	<b>36,57</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : BPN Kab. Bima, Tahun 2020.*

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, sebagian besar wilayah Kabupaten Bima berada pada kemiringan lereng yang sangat curam, di mana 36,57% wilayah Kabupaten Bima berada pada kemiringan lebih dari 40%, 34,50% berada pada kemiringan 16-40%, hanya 8,63% yang berada pada kemiringan 0-2%.

Adapun peta topografi Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Bima.

### ➤ **Geologi**

Struktur geologi wilayah Kabupaten Bima terdiri dari jenis batuan:

1. Batuan endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir, lempung tua bersusun andesit biasanya jenis batuan ini menyebar dari daerah pegunungan sampai ke pantai;
2. Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api tua;
3. Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat (Qc), yang terdapat di daerah pantai;
4. Batuan terobosan merupakan batuan terobosan yang mempunyai susunan batuan yang tidak dapat dibedakan dan menerobos batuan hasil endapan gunung api, penyebarannya terdapat di daerah Bolo dan Monta.



**Tabel 2. 3 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bima**

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	31,464	70,07
2.	Regosol	98,934	22,02
3.	Litosol	179,481	40,31
4.	Mediteran	116,064	26,07
5.	Lain-lain	19,307	4,34

**Sumber: BPS Kab. Bima dikutip dari Perda RTRW kab. Bima, Tahun 2011-2031.**

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa penyebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

1. Litosol

Jenis tanah ini dicirikan oleh kedalaman efektif tanah sangat dangkal dan langsung berada di atas batuan dan umumnya berada pada daerah pegunungan/perbukitan dengan kemiringan yang terjal ( $> 40\%$ ). Untuk pengembangan, faktor penghambat jenis tanah ini adalah kedalaman efektif tanah yang dangkal dan lereng.

2. Mediteran

Jenis tanah ini terbentuk pada wilayah berombak sampai bergelombang, mempunyai kedalaman efektif relatif dalam, drainase baik dan terbentuk pada itilin mediteran tekstur halus untuk pengembangan pertanian jenis tanah ini potensial untuk dikembangkan tanaman perkebunan/tanaman keras.

3. Regosol

Tanah ini terbentuk dari batuan induk muda hasil letusan gunung berapi, dicirikan oleh adanya batuan yang menyebar baik dipermukaan tanah maupun pada lapisan tanah bagian atas. Tanah regosol mempunyai drainase tanah sangat cepat sehingga tidak potensial untuk pengembangan pertanian. Tanah ini dapat meresapkan air cukup sehingga dapat difungsikan sebagai kawasan lindung untuk resapan air. Di wilayah Bima tanah regosol merupakan hasil letusan gunung api Tambora, sehingga sebarannya sekitar Gunung Tambora.

4. Aluvial

Tanah Aluvial merupakan tanah muda hasil endapan. Tanah ini mempunyai sifat kimia dan fisik relatif baik dari pada ke 3 jenis di atas. Di wilayah Kabupaten Bima jenis tanah ini menyebar di wilayah sekitar (mulai dari wilayah perlembaban). Dalam pemanfaatan jenis tanah ini merupakan lahan potensial untuk pengembangan tanaman pangan.





Adapun peta geologi dan jenis tanah Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Bima dan 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bima.

### ➤ Hidrologi

Wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran antara 5 sampai 35 Km. Adapun sungai-sungai yang sudah dimanfaatkan untuk irigasi dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2. 4 Sungai-Sungai Yang Mengairi Daerah Irigasi di Kabupaten Bima**

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Daerah Irigasi	Panjang Sungai (Km)	Debit Max (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)	Luas Baku	
I.	Madapangga	Campa	Lebo	23	2,20	0,50	632	
			Ncangkai					1.063
			Bontokape					505
		MadaPangga	Madapangga	16	0,23	1,00	459	
			Mori Rade					306
II.	Bolo	Karengo	Ncoha	15			522	
III.	Donggo	Padende	Rora Kecil	21	0,32	1,00	601	
		Kala Donggo	Sori Monca	11	0,03	1,00	300	
		Mbawa	Ndano Rangga	12	0,18	1,00	520	
		Mangge	Diwu Tangiri	15	-		500	
IV.	Sanggar	Kamposi	Taloko	20	0,46	0,50	341	
		Boro Loka	Oi Kawa	6	0,05	0,50	300	
V.	Tambora	Nanga Na'E		6	-			
		Panihi		8	-			
		Katupa		6	-			
VI.	Parado	Parado	Pela Parado	27	3,57	1,00	1.388	
VII.	Monta		Tolotangga	12	0,34	0,50	485	
			Sie				181	
VIII.	Woha		Kalate	10	-		976	
IX.	Belo	Ncera	Embung Ncera	22	0,21	0,25	329	
			Tonggondoa Ngali	22			750	
		Roka	Embung Roi	21	0,28	0,30	803	
X.	Palibelo	Ntonggu	Leka	7	0,61	0,25	350	
			Karanu				566	
XI.	Wera	Tawali	Nae Wera	26	0,36	0,50	600	
		Wora	Embung Wora	15	-		200	
		Oi Tui	Embung Oi Tui	8	-		2.000	
		Pai		5	-			
XII.	Ambalawi	Lumba	Nggaro Rangga	18	0,18	0,25	150	
XIII.	Sape	Sari	Sape	18	1,65	0,50	1.000	
		Kowo	Wuwu	4	0,02	0,25	346	
XIV.	Lambu	Diwu Moro	Sumi	20	0,82	0,25	634	
XV.	Wawo	Lampe		38	-			
		Kuta		8	-			



No.	Kecamatan	Nama Sungai	Daerah Irigasi	Panjang Sungai (Km)	Debit Max (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Min (m <sup>3</sup> /dtk)	Luas Baku
		Teta		12	-		
XVI.	Langgudu	Waworada	Embung Waworada	5	0,10	0,20	125
		Karumbu	Diwu Sadundu	4	-		900
		Rupe		5	-		
		Laju		6	-		
		Doro O'o		5	-		
		Nggira		8	-		
	<b>Jumlah</b>			<b>490</b>			

**Sumber : Dinas PU Kab. Bima, 2021**

Luas areal irigasi Kabupaten Bima mencapai 57,994 Ha, areal irigasi terluas adalah Kecamatan Madapangga seluas 6,304 Ha (10,87%), sedangkan irigasi dengan luas terkecil di Kecamatan Lambitu seluas 85 ha (0,14%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2. 5 Luas Areal Irigasi Pekerjaan Umum  
Se Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	
		Daerah Irigasi	Areal Tanam
1	2	3	4
1	Madapangga	6.304	5.762
2	Bolo	3.761	3.391
3	Donggo	3.106	2.221
4	Sanggar	2.214	1.756
5	Tambora	2.145	1.720
6	Monta	4.055	3.805
7	Parado	2.174	1.553
8	Woha	4.825	4.563
9	Palibelo	3.562	3.412
10	Belo	2.762	2.351
11	Wera	4.378	2.415
12	Ambalawi	2.169	2.119
13	Sape	5.023	4.493
14	Lambu	3.206	3.027
15	Wawo	4.336	2.636
16	Langgudu	3.290	2.710
17	Soromandi	599	599
18	Lambitu	85	85
	<b>Kabupaten</b>	<b>57,994</b>	<b>48,618</b>

**Sumber: Dinas PU Kab. Bima, Tahun 2021.**

Kabupaten Bima juga terdapat 41 mata air, dengan debit terbesar adalah Oi Nanga NaE dengan debit 2000L/dtk. Mata air tersebut tidak semuanya dipergunakan



untuk kebutuhan lahan pertanian tetapi juga untuk kebutuhan air minum. Dari 41 mata air, mata air yang terdapat di Kecamatan Tambora dan Sanggar memiliki debit air yang besar, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Sebaran sumber mata air dan penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2. 6 Sebaran Lokasi Sumber Mata Air, Debit Air dan Penggunaannya di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Nama Sumber Mata Air	Desa	Lokasi Kecamatan	Debit (L/dtk)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Mada Oi Soli	Tonda	Madapangga	150	Pertanian
2	Oi Tede	Campa	Madapangga	57	Pertanian
3	Oi Beringin	Monggo	Madapangga	15	Pertanian
4	Oi Madapangga	Ndano	Madapangga	175	Pertanian & Air Minum
5	Oi Ntana	Bajo	Donggo	5	Pertanian
6	Oi O'o	O'o	Donggo	1	Air Minum
7	Mada Oi Rora	Padende	Donggo	15	Pertanian
8	Oi Mudu	Mbawa	Donggo	17	Pertanian
9	Oi Tampuro	Piong	Sanggar	200	Kelautan
10	Oi Po'on	Piong	Sanggar	25	Pertanian
11	Oi Nanga Na'E	L.Kananga	Tambora	2000	Kelautan
12	Sori Panihi	Kawinda Nae	Tambora	350	Air Minum & Kelautan
13	Oi Wo'bo	Maria	Wawo	10	Permandian/ Pertanian
14	Oi Fanda	Talapiti	Ambalawi	37	Pertanian
15	Oi Ntoke	Ntoke	Wera	55	Pertanian
16	Oi Pai	Pai Dalam	Wera	65	Pertanian
17	Diwu Moro	Rato	Lambu	1	Pertanian
18	Oi Pela	Pelaparado	Monta	1	Pertanian
19	Oi So Wuwu	Tolo Uwi	Monta	7	Pertanian
20	Oi Rade	Rade	Madapangga		
21	Oi Kala Tembaju		Woha	30	
22	Oi Toloribo		Woha	20	
23	Oi Roko	Tangga	Monta	2	
24	Oi Ngawu	Sie	Monta	1	





No	Nama Sumber Mata Air	Lokasi Desa	Kecamatan	Debit (L/dtk)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
25	Oi Sori Kadi	Diha	Monta	4	
26	Oi Panas	Parado	Monta	4	
27	Oi Kambu'u		Monta	30	
28	Oi Karano		Belo	3	
29	Oi Mada Karumbu		Langgudu	20	
30	Oi Kalo Rupe		Langgudu	20	
31	Oi Labolo		Donggo	75	
32	Oi Rora Kecil	Padende	Donggo	50	
33	Oi Nanga Kai		Bolo	15	
34	Oi Ncoha	Woro	Madapangga	5	
35	Oi Monca		Donggo	5	
36	Oi Mada Masa	Kawinda	Sape	15	
37	Oi Witi	Sangia	Sape	25	
38	Oi Ro'o	Bala	Wera	15	
39	Oi Wadukinda		Wawo	20	
40	Oi Fo'o		Wawo	20	
41	Oi Ncinggi	Boke	Sape	10	

**Sumber: Dinas PU Kab. Bima, Tahun 2021.**

### ➤ **Klimatologi**

Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidh dan Ferguson, 1951). Musim hujan relatif pendek, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 83 mm dengan hari hujan 6 hari/Tahun. Selain curah hujan tahunan yang relatif kecil, penyebarannyapun juga tidak merata di mana bulan Mei-Oktobre merupakan bulan yang jarang terjadi hujan. Curah hujan di Kabupaten Bima terjadi sepanjang Tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 263 mm<sup>3</sup> dengan 6 (enam) hari hujan dalam kurun waktu satu bulan. Untuk curah hujan dengan intensitas terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan hanya 39 mm<sup>3</sup>. Pada bulan Agustus jumlah hari hujan rata-rata hanya 6 (enam) hari dalam sebulan.

Adapun peta klimatologi Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 2.5 Peta Klimatologi Kabupaten Bima.

### ➤ **Suhu dan Kelembaban Udara**

Suhu dan kelembaban udara pada pagi hari mencapai rata-rata 26°C, Suhu udara siang hari antara 28 – 32°C, sementara pada sore hari rata-rata 27,6 °C.



### ➤ Penggunaan lahan

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah sebesar 438.940 Ha. Berdasarkan penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Luas lahan sawah Kabupaten Bima sebesar 27.932 Ha atau 6,36% dari luas Kabupaten Bima, sedangkan luas lahan bukan sawah sebesar 411.003 Ha atau 93,64% dari luas Kabupaten Bima. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel 2.7 dan Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bima.

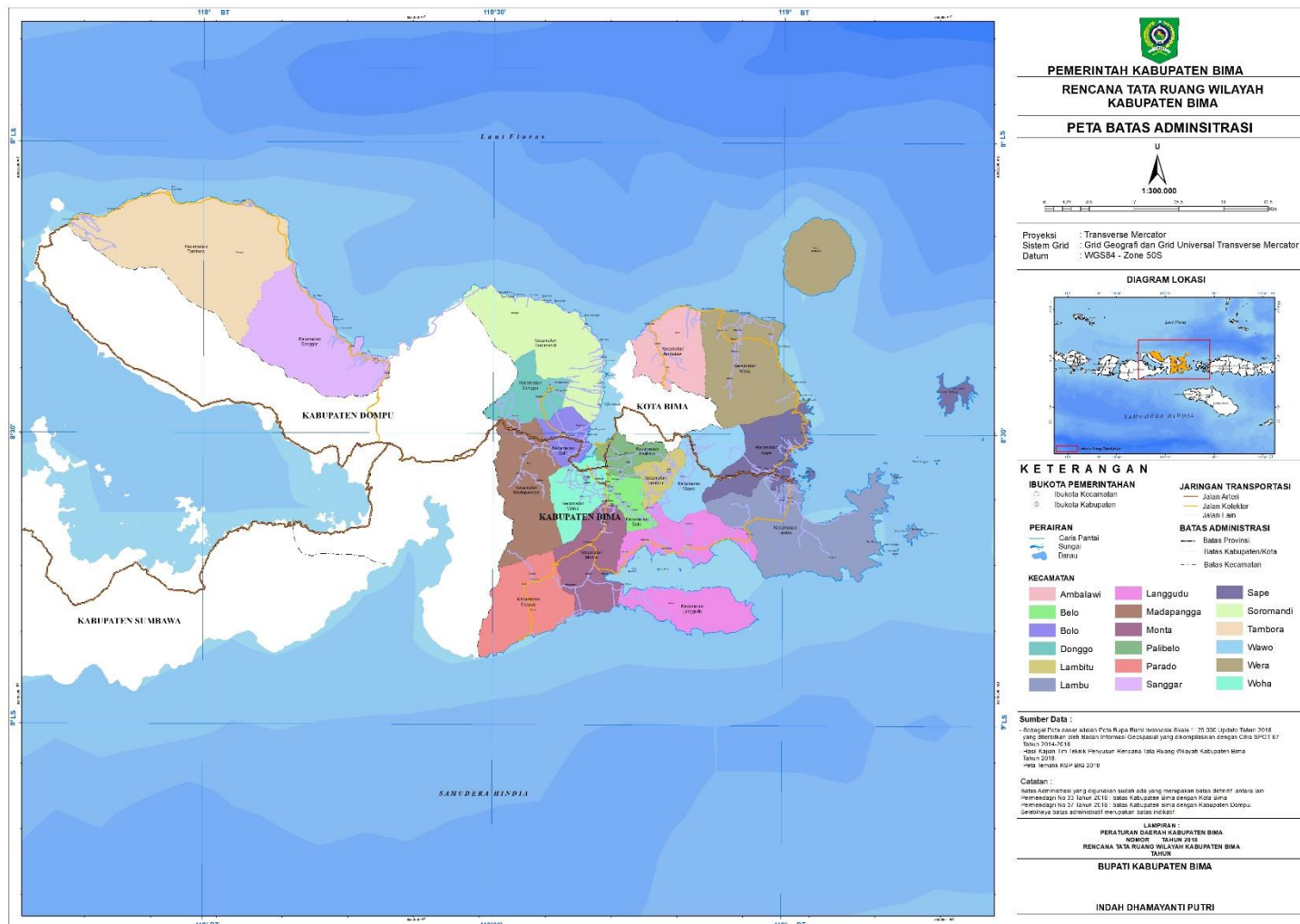
**Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
I.	Lahan Sawah	➤ Sawah Irigasi Teknis	14.161 3,23
		➤ Sawah Irigasi Sederhana	18.78 1,99
		➤ Sawah Tadah Hujan	5,05 1,15
		➤ Sawah Pasang Surut	- -
		<b>Total Luas Lahan Sawah</b>	<b>27.932 6,36</b>
II.	Lahan Bukan Sawah	➤ Tanah Bangunan dan Pekerangan	3.548 0,81
		➤ Tegal/Kebun	38.267 8,72
		➤ Ladang/Huma	6.464 1,47
		➤ Perkebunan	9.930 2,26
		➤ Tanam Kayu-Kayuan/Hutan Rakyat	43.088 9,82
		➤ Padang Pengembalan/Rumput	15.589 3,56
		➤ Hutan Negara	250.396 57,05
		➤ Sementara tidak Usahakan	13.033 2,97



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
	➤ Lainnya (tambak, kolam, empang, rawa, dll)	581.78	13,26
	<b>Luas Bukan Sawah</b>	<b>411.003</b>	<b>93,64</b>
	<b>Total Luas Lahan</b>	<b>438.940</b>	<b>100</b>

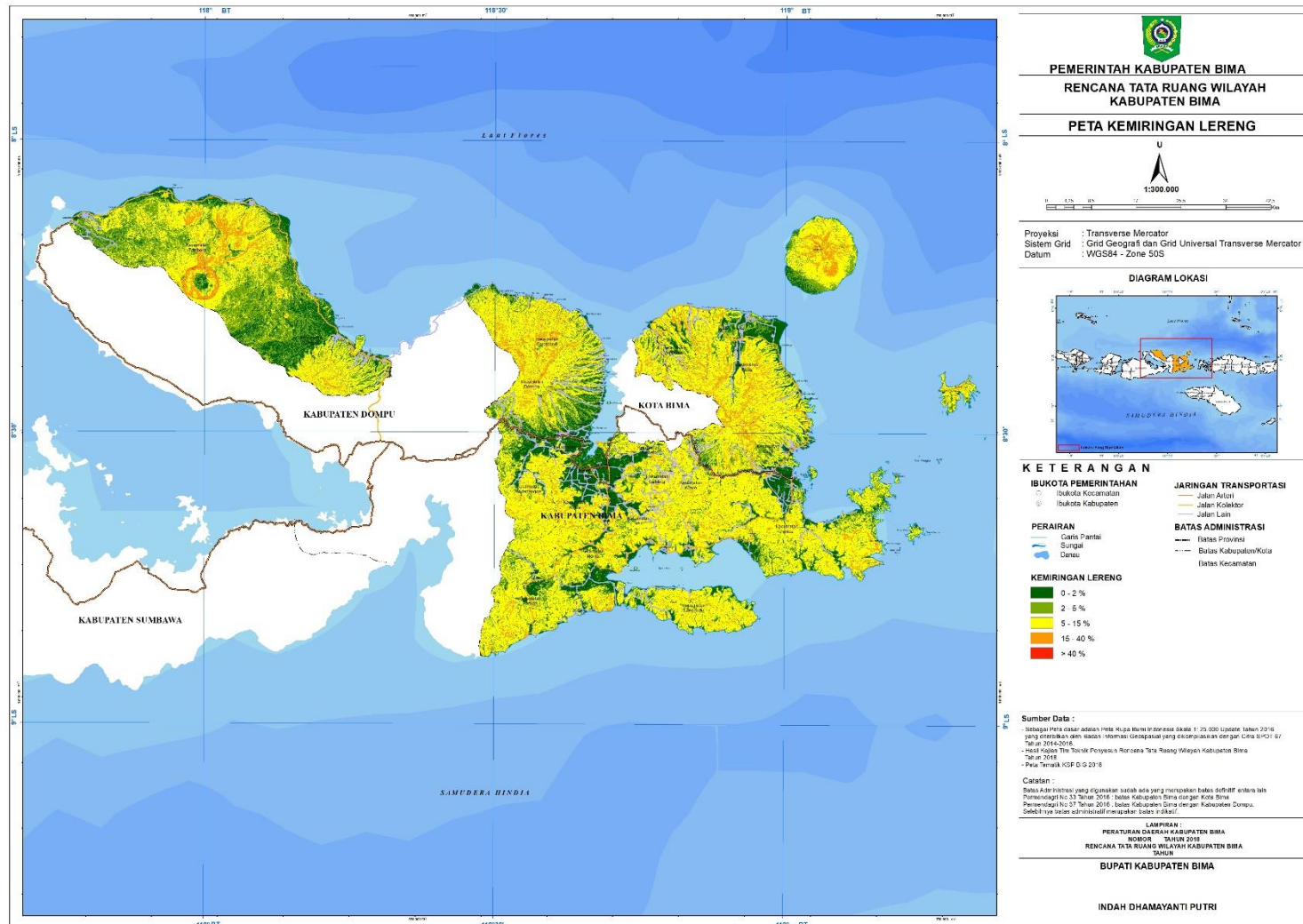
*Sumber: BPN Kab. Bima, Tahun 2020.*



Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

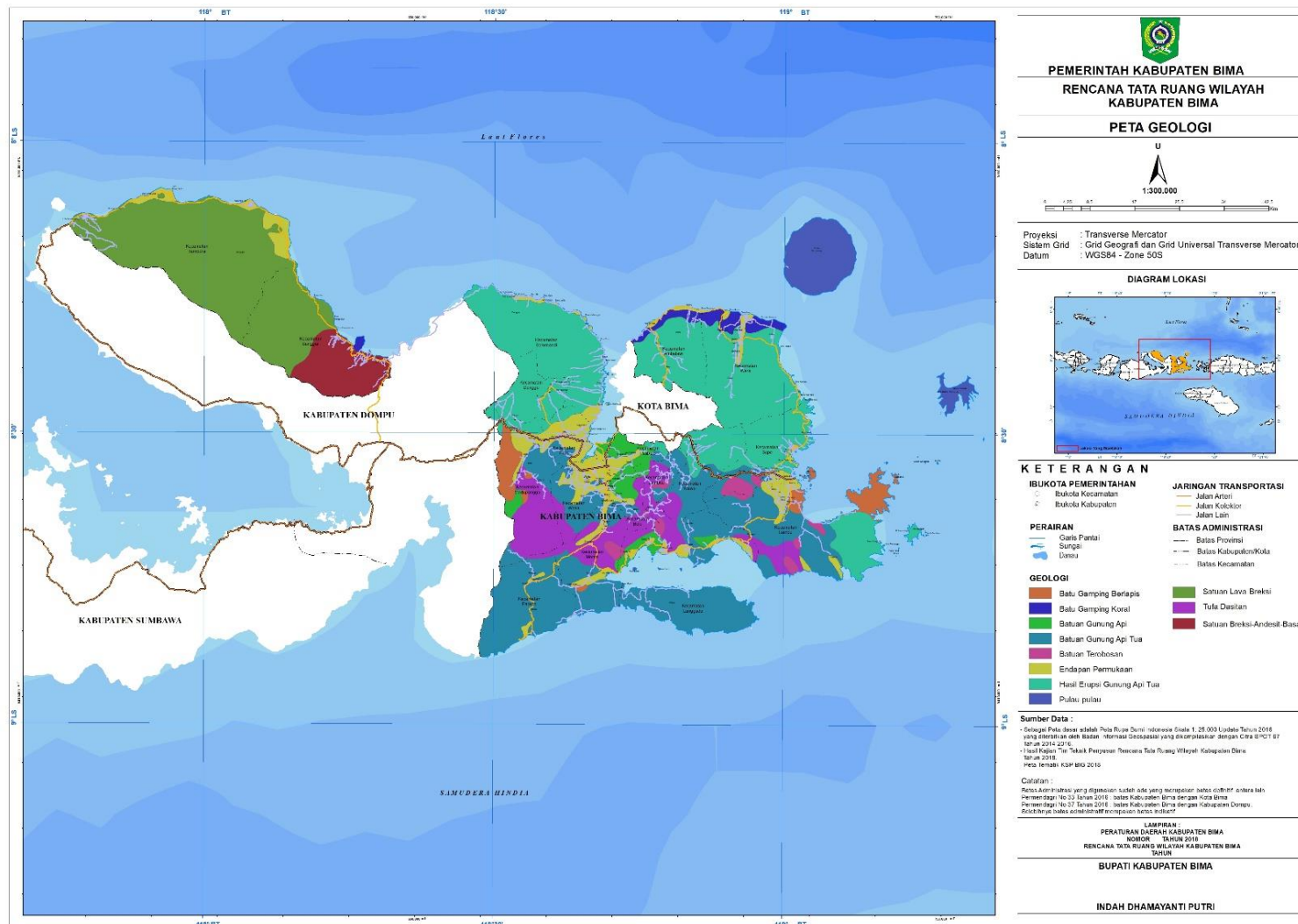
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bima

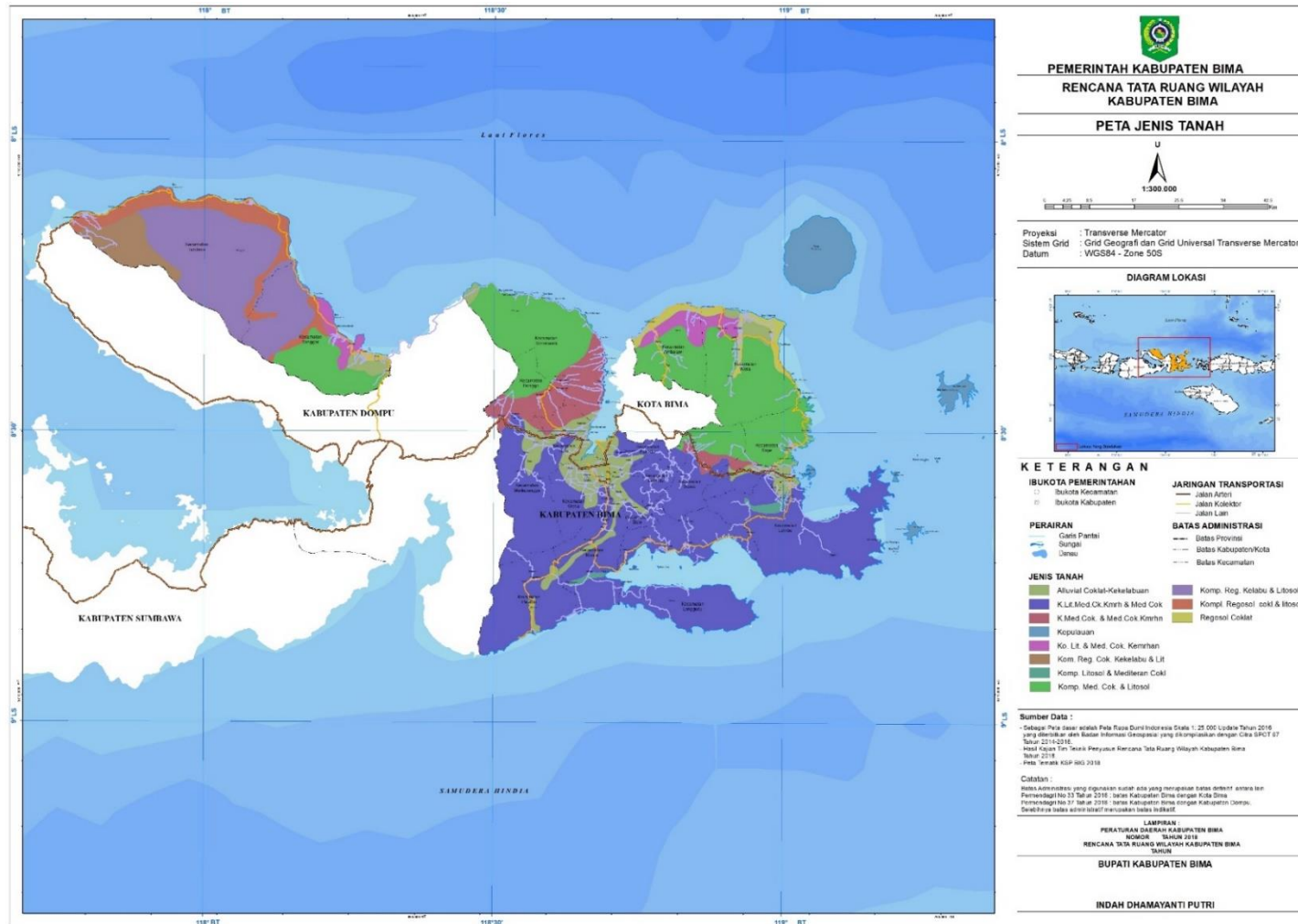




Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

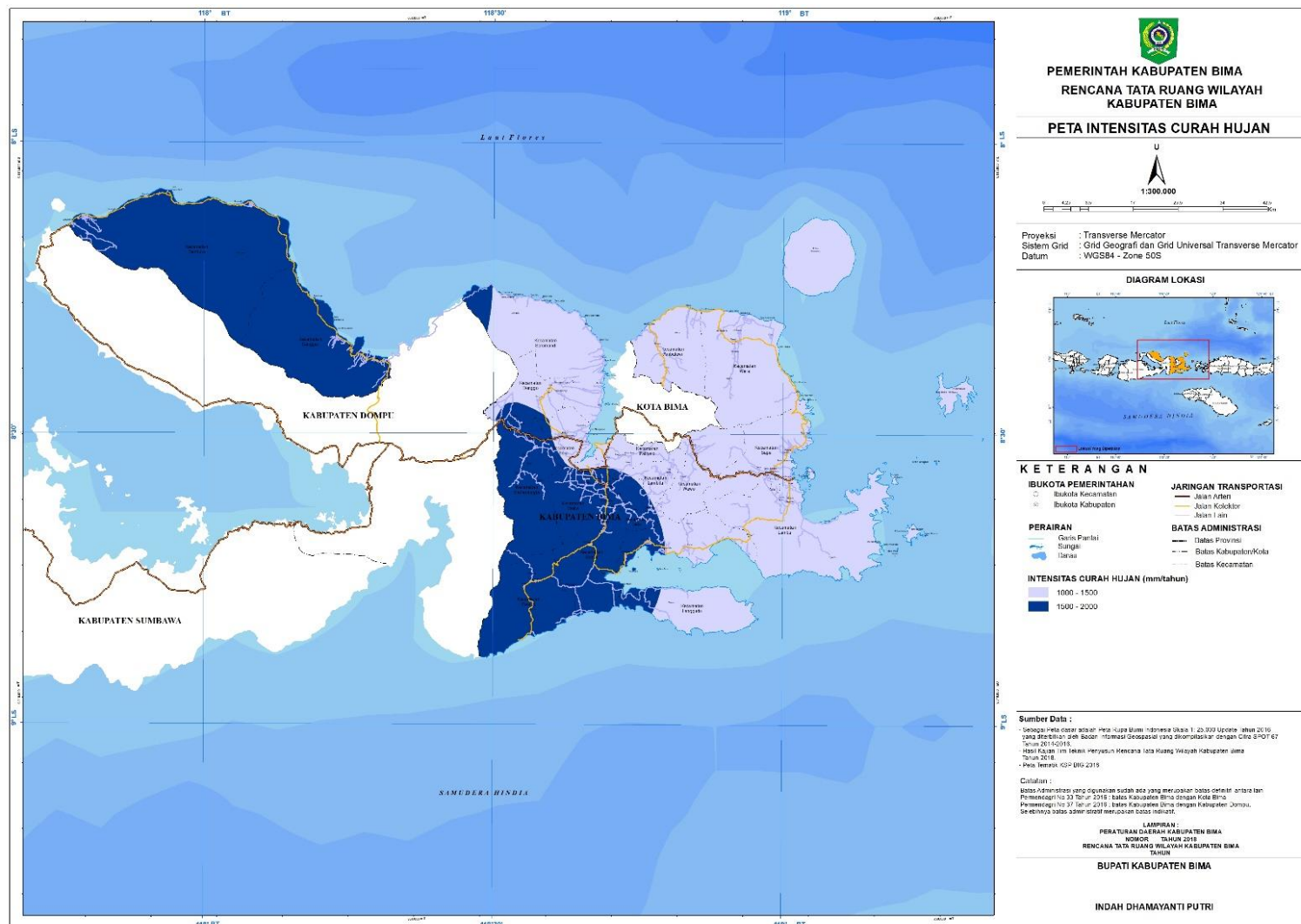
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Bima





Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

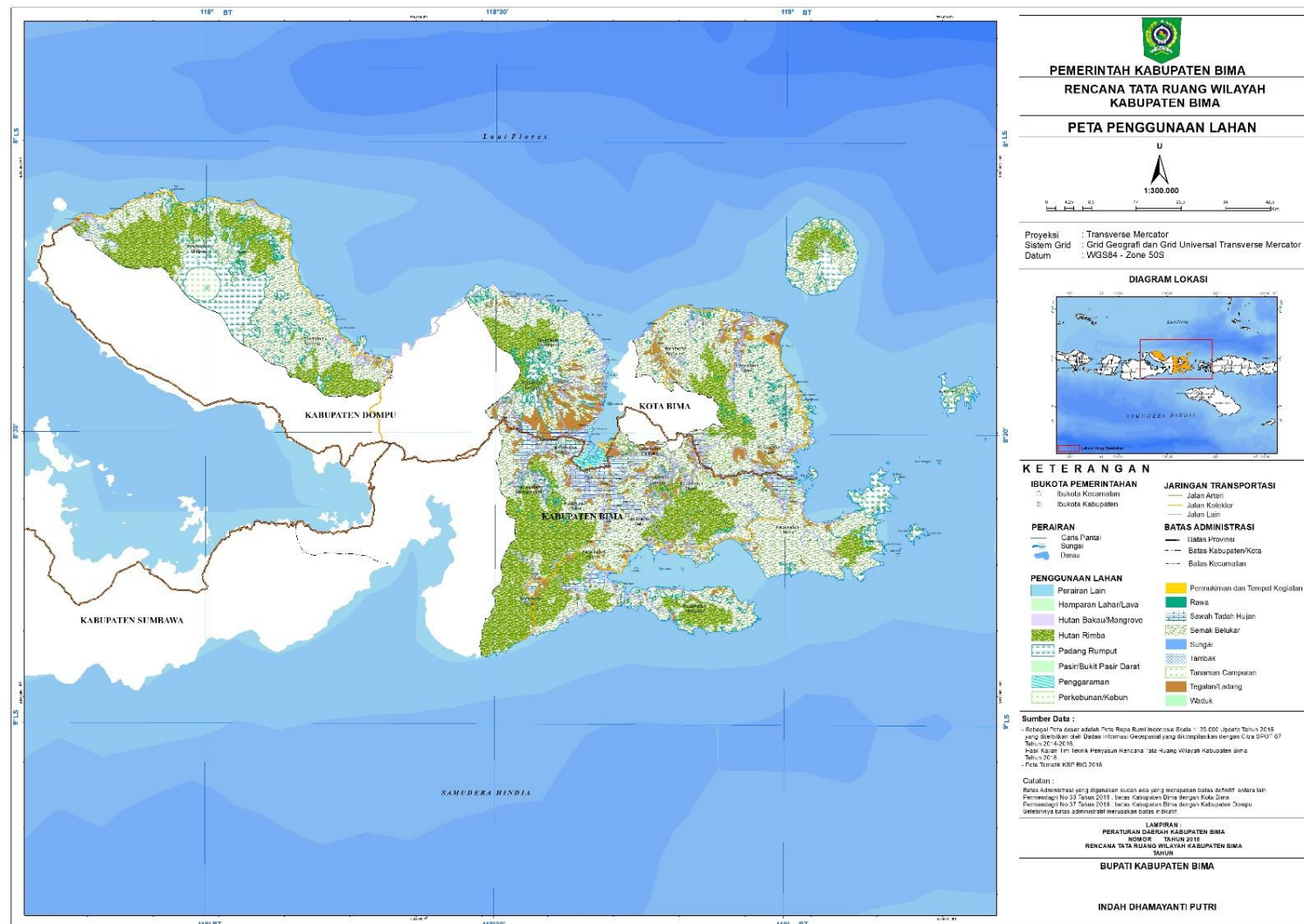
Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bima



Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Kabupaten Bima





Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bima

### 2.1.1.2 Aspek Pengembangan Wilayah

#### ➤ Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor tanaman pangan terutama padi/beras menjadi komoditas yang sangat strategis karena merupakan bahan makanan pokok bagi bangsa Indonesia. Sehingga peningkatan kinerja pertanian tanaman pangan menjadi salah satu andalan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Luas panen di Kabupaten Bima masih didominasi oleh padi seluas 67.516 Ha yang terdiri dari padi sawah seluas 53.994 Ha dan padi ladang/tegal seluas 13.522 Ha. Data luas panen tanaman palawija yang tercatat adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu. Jika dilihat dari luas panen maka jagung masih mendominasi tanaman palawija. Luas panen tanaman jagung adalah 61.677 hektar. Luas panen komoditas ini jauh lebih luas dibandingkan dengan luas panen jenis palawija lain. Untuk lebih jelasnya luas panen pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bima Tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.8.

**Tabel 2. 8 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)						
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	kacang tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu
1	Monta	5.619	300	2.101	0	0	0	0
2	Parado	2.611	1.300	3.570	30	64	0	35
3	Bolo	3.623	0	4.402	960	60	107	0
4	Madapangga	8.477	0	4.356	487	545	925	0
5	Woha	4.098	5	2.113	272	15	42	0
6	Belo	2.698	0	7	263	108	72	0
7	Palibelo	3.168	45	1.698	757	286	31	60
8	Wawo	1.847	812	1.457	0	15	0	12
9	Langgudu	3.061	173	1.485	10	0	0	0
10	Lambitu	1.124	1.900	4.505	0	30	0	0
11	Sape	2.724	444	1.492	70	326	0	0
12	Lambu	4.168	50	1.671	195	508	0	0
13	Wera	3.252	200	3.129	0	5.055	0	0
14	Ambalawi	2.074	730	2.550	49	797	2	50
15	Donggo	1.938	1.290	8.337	0	0	0	0
16	Soromandi	1.198	2.884	9.479	48	130	0	24
17	Sanggar	1.146	0	5.328	0	18	0	0



No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)						
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	kacang tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu
18	Tambora	1.168	3.389	3.998	0	840	150	0
	<b>Kab. Bima</b>	<b>53.994</b>	<b>13.522</b>	<b>61.677</b>	<b>3.142</b>	<b>8.796</b>	<b>1.329</b>	<b>181</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bima, Tahun 2021.

### ➤ Komoditi Sayuran

Komoditi sayuran di Kabupaten Bima meliputi bawang merah, cabai, bawang putih, kubis, petai dan tomat. Komoditi bawang merah merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Bima dengan luas panen 12.028 Ha dengan jumlah produksi 136.292,4 ton/tahun. Produksi bawang merah terbesar adalah di Kecamatan Lambu dan Belo yaitu masing-masing sebesar 25.358,60 ton dengan luas panen 2.187 Ha dan 21.838 dengan luas panen 1.924 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.9 dan table 2.10.

**Tabel 2. 9 Luas Panen Sayur-Sayuran di Kabupaten Bima Perkecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)					
		Bawang Merah	Cabai	Bawang Putih	Kubis	Petai	Tomat
1	Monta	1.540	-	-	-	-	-
2	Parado	44	21	-	-	-	4
3	Bolo	75	-	-	-	-	-
4	Madapangga	3	-	-	-	-	-
5	Woha	1.183	6	-	-	16	12
6	Belo	1.924	27	50	-	-	-
7	Palibelo	31	8	-	11	-	11
8	Wawo	-	9	153	-	-	-
9	Langgudu	-	17	197	-	-	-
10	Lambitu	-	-	803	-	-	-
11	Sape	1.731	2	-	-	-	-
12	Lambu	2.187	2	-	-	-	-
13	Wera	934	-	-	-	-	-
14	Ambalawi	300	1	-	-	-	-
15	Donggo	-	-	-	-	-	-
16	Soromandi	1.714	2	-	-	-	-
17	Sanggar	356	-	-	-	-	-
18	Tambora	6	7	7	-	-	-
	<b>Bima</b>	<b>12.028</b>	<b>102</b>	<b>1.236</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>35</b>

Sumber Data: BPS, Bima dalam Angka 2021

**Tabel 2. 10 Produksi Sayur-Sayuran  
di Kabupaten Bima Perkecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)					
		Bawang Merah	Cabai	Bawang Putih	Kubis	Petai	Tomat
1	Monta	18.195	-	-	-	-	-
2	Parado	513	498,2	-	-	-	83,7
3	Bolo	899,3	-	-	-	-	-
4	Madapangga	36,2	-	-	-	-	-
5	Woha	13.842,5	67,6	-	-	-	205,2
6	Belo	21.838,0	451,8	496,3	-	-	-
7	Palibelo	351,8	59,2	-	181,6	226,8	115,5
8	Wawo	-	75,2	1.523,8	-	-	-
9	Langgudu	-	226,9	1.915,8	-	-	-
10	Lambitu	-	-	8.561,4	-	-	-
11	Sape	19.986,0	23,9	-	-	-	20,8
12	Lambu	25.358,6	16,6	-	-	-	-
13	Wera	11.045,2	-	-	-	-	-
14	Ambalawi	3.372,4	31,5	-	-	-	-
15	Donggo	-	-	-	-	-	-
16	Soromandi	16.577,1	40,3	-	-	-	59,5
17	Sanggar	4.209,3	-	-	-	-	-
18	Tambora	68,0	105,6	68,9	-	-	30
<b>Bima</b>		<b>136.292,4</b>	<b>1.596,8</b>	<b>12.566,2</b>	<b>181,6</b>	<b>226,8</b>	<b>514,7</b>

*Sumber Data: BPS, Bima dalam Angka 2021***➤ Potensi Perkebunan**

Potensi perkebunan selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti pada perekonomian Kabupaten Bima. Pada sektor perkebunan ini, Kabupaten Bima memiliki potensi lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dengan luas lahan potensial mencapai sekitar 16.710,20 Ha dengan komoditi potensial yang dapat dikembangkan antara lain: jambu mete, kelapa, kemiri, kopi.

**➤ Potensi Peternakan**

Potensi peternakan merupakan salah satu sektor potensial di Kabupaten Bima. Populasi ternak besar di Kabupaten Bima pada Tahun 2019 beberapa komoditas mengalami kenaikan. Populasi sapi di Tahun 2019 adalah sebanyak 204.722 ekor, populasi kerbau 10.491 ekor, populasi kuda 3.139, populasi kambing sebanyak 229.271 ekor dan populasi domba sebanyak 8.553 ekor. Selain ternak besar, ternak kecil seperti unggas juga berpotensi. Poduksi unggas terbesar



didominasi ayam pedaging sebesar 2.213.800 ekor. Dengan dukungan lahan yang potensial untuk pengembangan ternak mencapai 12.082 Ha dari luas wilayah Kabupaten Bima, dengan daya tampung sebanyak 15.344 animal unit.

➤ **Potensi Kehutanan**

Wilayah hutan di Kabupaten Bima saat ini meliputi 12 Kelompok Hutan (RTK) dengan total luas kawasan definitif 250,396.42 Ha yang terbagi menurut beberapa fungsi, yaitu terdiri dari hutan lindung seluas 83.189,91 Ha, hutan konservasi seluas 55.599,69 Ha, hutan produksi terbatas seluas 66.866,79 Ha, hutan produksi tetap seluas 44.740,03, Ha dan HPK/IPK seluas 6.800 Ha. Disamping produksi berbagai jenis kayu, terdapat juga produk hasil hutan ikutan non kayu seperti madu, kemiri, rotan, ketak dan bambu. Potensi hasil hutan yang termanfaatkan terdiri dari berbagai jenis hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

➤ **Potensi Perikanan dan Kelautan**

Kabupaten Bima meliputi lahan budidaya seluas 6.814,9 Ha, terdiri dari budidaya perairan umum, perairan payau/tambak, perairan tawar dan perairan laut. Sementara potensi areal pesisir mencakup pantai sepanjang  $\pm$  640 Km. Jumlah produksi ikan basah Kabupaten Bima tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuatif yaitu dari 55.772 ton pada tahun 2016, naik menjadi 215.601 ton di tahun 2017, namun pada tahun 2019 turun menjadi 107.437 ton dan di tahun 2020 menjadi 111.985 ton. Untuk lebih jelasnya jumlah produksi ikan basah di Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.11.

**Tabel 2. 11 Jumlah Produksi Ikan Basah (Laut)  
di Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Resort Perikanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Monta	1.836	7.363	26.966	3.777	3.934
2.	Lambu	622	24.258	13.054	10.205	10.446
3.	Wawo	-	112	4.887	12	12
4.	Bolo	1.315	16.962	5.255	8.384	8.708
5.	Madapangga	-	387	42	40	40
6.	Sanggar	2.210	10.587	3.245	7.119	7.621
7.	Tambora	379	5.971	1.802	4.032	4.316
8.	Belo	-	166	17	17	17



No	Resort Perikanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9.	Sape	13.002	93.884	53.803	43.174	44.676
10.	Donggo	-	104	11	11	11
11.	Wera	1.358	7.578	2.309	5.117	5.478
12.	Langgudu	32.561	19.592	102.900	11.331	11.995
13.	Ambalawi	643	3.598	1.127	2.429	2.600
14.	Woha	-	15.199	4.887	5.749	5.749
15.	Palibelo	178	2.161	673	1.000	1.030
16.	Lambitu	-	49	5	5	5
17.	Parado	169	1.005	301	678	726
18.	Soromandi	1.421	6.625	2.028	4.357	4.621
<b>Jumlah</b>		<b>55.772</b>	<b>215.601</b>	<b>218.433</b>	<b>107.437</b>	<b>111.985</b>

**Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima, Tahun 2021.**

Selain produksi perikanan tangkap dan budidaya di perairan laut dan perairan umum, terdapat juga potensi rumput laut, garam, mutiara, serta perikanan budidaya air payau dan air tawar. Untuk budidaya kerang mutiara di Kabupaten Bima dilakukan oleh 6 (enam) perusahaan dengan luas areal 2.527 Ha dengan total produksi sebesar 150 Kg. Namun demikian masih tersedia lahan potensial untuk pengembangan budidaya mutiara seluas 2.904,5 Ha. Disamping kegiatan penangkapan dan budidaya, terbuka juga investasi industri pengolahan hasil perikanan yang hingga saat ini belum ada di Kabupaten Bima.

Salah satu komoditi yang memiliki keunggulan secara komparatif yaitu garam karena produksinya sangat berlimpah tetapi kebutuhan pasar masih relatif rendah. Luas potensi lahan budidaya garam di Kabupaten Bima lebih kurang 4.068 Ha. Dari luas lahan tersebut, yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 1.733 Ha, dengan produksi rata-rata 150 ton/Ha dan jumlah petani sekitar 7.000 orang. Sampai saat ini, dari rata-rata produksi garam Kabupaten Bima yang mencapai 190.000 ton/tahun, baru sekitar 2.000 - 3.000 ton/tahun yang mampu diserap oleh industri pengolahan garam. Sementara sisanya dijual dalam bentuk aslinya untuk keperluan rumah tangga maupun industri, baik di pasar lokal maupun regional terutama untuk kebutuhan Indonesia Bagian Timur.



Untuk produksi budidaya air tawar tahun 2020 adalah sebesar 250,3 ton dan budidaya air payau 5.707,7 ton. Kecuali garam, produksi komoditas unggulan sektor perikanan dan kelautan masih terbatas dan belum optimal, sementara potensi lahan masih cukup luas yang didukung oleh permintaan pasar lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional masih cukup tinggi.

➤ **Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral**

Potensi energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Bima yang telah diketahui jumlah cadangannya antara lain adalah marmer, pasir besi, emas, perak, mangan dan batu gamping. Cadangan sumberdaya marmer tercatat sebesar 117.625.500 m<sup>3</sup>, cadangan pasir besi, potensi emas, potensi perak, potensi mangan, dan cadangan sumber daya batu gamping.

Potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Bima adalah lahan galian B dan C berupa: emas, mangan, pasir besi, batu gamping, batu apung, gipsum, silikon, lempung kaolin dan sirtu.

➤ **Potensi Industri dan Perdagangan**

Potensi industri dan perdagangan merupakan industri yang berkembang di Kabupaten Bima walaupun masih terbatas dalam kategori industri kecil skala rumah tangga, yang bergerak pada pengolahan komoditi pertanian dan industri kerajinan. Jumlah industri dan usaha perdagangan dalam skala besar memang masih sangat kecil, tetapi sangat potensial untuk terus berkembang karena didukung oleh ketersediaan potensi sumber daya alam, tenaga kerja, wilayah dan potensi-potensi lainnya. Jenis komoditi yang umumnya diperdagangkan disejumlah pasar lokal, regional maupun nasional meliputi komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Jumlah IKM Kabupaten Bima tahun 2020 adalah sebanyak 1.970 unit.

➤ **Potensi Pariwisata dan Kebudayaan**

Kabupaten Bima memiliki sejumlah obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama wisata alam dan wisata budayanya. Potensi tersebut didukung oleh berbagai usaha jasa dan produk wisata yang cukup baik seperti usaha perhotelan, biro perjalanan wisata, serta aneka souvenir berupa tenun



ikat, songket, sarung, kerajinan dan lain-lain. Potensi wisata Kabupaten Bima tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.12.

**Tabel 2. 12 Potensi Wisata Kabupaten Bima Tahun 2020**

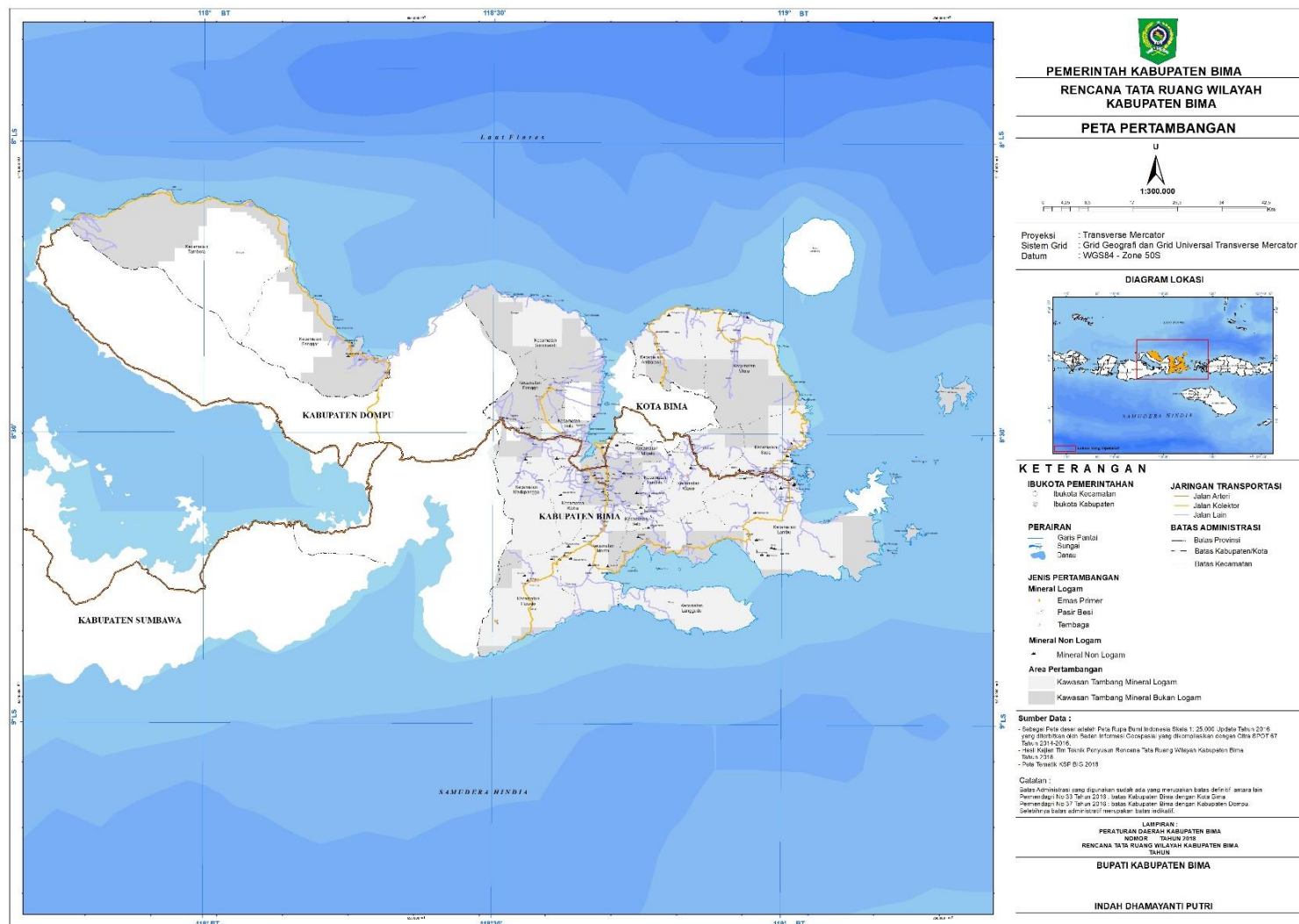
Obyek Wisata	Daya Tarik	Peluang Pengembangan
<b>Wisata alam</b>		
• Pantai Wane dan Rontu	Pasirnya putih dan ombak besar.	Hotel, restoran, dan akomodasi lainnya.
• Pantai Kalaki	Pantai yang indah dan nyaman	Hotel, restoran, taman bermain yang dilengkapi berbagai akomodasi hiburannya.
• Pantai Lamere (Toro Wamba) dan Ujung Kalate	Pantai yang indah dan nyaman, pasirnya putih, dan airnya yang jernih.	Penginapan dan rumah makan.
• Karombo Wera	Gua yang unik	Penataan dan pengemasan acara paket secara profesional.
• Pulau Ular	Terdapat ribuan ular yang tidak pernah mengganggu pengunjung (ramah dan bersahabat), tetapi akan berubah menjadi sangat ganas dan berbisa jika keluar dari pulau tersebut	Penataan dan pengemasan acara paket secara profesional.
• Kawasan Tambora	Air terjun yang memiliki kawah terbesar dan unik	Penginapan, rumah makan, dan akomodasi lainnya.
• Oi Tampuro	Mata air yang sangat jernih dengan debit air yang sangat besar	
• Pantai Lariti		Hotel, restoran, dan akomodasi lainnya.
<b>Wisata budaya</b>		
• Upacara Adat Hanta U'a Pua	Keunikannya karena menjadi warisan sejarah yang tidak ternilai harganya	Promosi dan pengemasan acara/wisata profesional
• Komp Wadu Pa'a I dan II		
• Uma Leme (Rumah Adat)		
• Wadu Tunti (Batu Bertulis)		
• Desa Tradisional Masyarakat Wawo dan Sambori (Lengge)	Unik serta dilengkapi dengan atraksi kesenian adu kepala (Ntumbu)	dan paket secara profesional
• Kuburan Dana Taraha	Kompleks pemakaman raja-raja dan Sultan Bima	
• Pacuan kuda dengan joki belia tanpa pelana	Unik karena berbeda dengan joki-joki pada umumnya	
<b>Kesenian tradisional</b>		
• Tari Soka Sari, Lenggo, Lengsara, Karaenta,	Keunikannya karena menjadi warisan sejarah yang tidak	





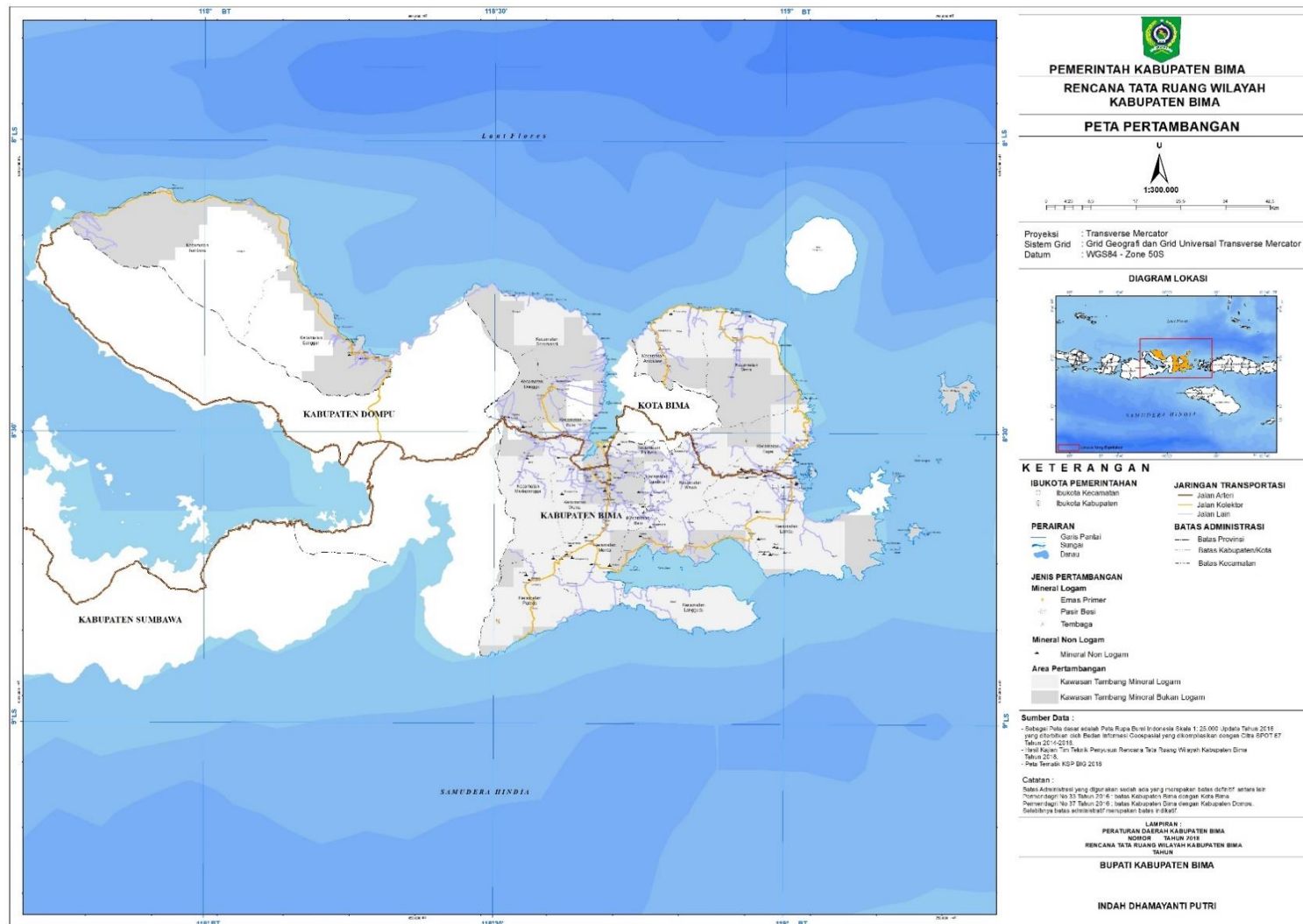
Obyek Wisata	Daya Tarik	Peluang Pengembangan
Ere/Kanja, Katubu, Toja	ternilai harganya	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Permainan rakyat: Mpa'a Manca, Sila, Bango, Lepi Wei, Weha Ani dan Sampari.</li></ul>		

**Sumber data:** Dinas Pariwisata Kab. Bima, Tahun 2020.



Sumber: RTRW Kabupate Bima Tahun 2011-2031

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bima



Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

Gambar 2. 8 Peta Pertambangan Kabupaten Bima

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Bima telah dipetakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima 2011-2031. Wilayah Kabupaten Bima memiliki potensi terjadinya bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bima memiliki dua (2) gunung api yang masih relatif aktif, yaitu gunung Tambora yang terletak diwilayah Kecamatan Tambora dan Sanggar, dan gunung Sangiang terletak diwilayah Kecamatan Wera. Di samping itu wilayah Kabupaten Bima terletak pada daerah pertemuan lempeng Mediterania dan Sirkum Pasifik. Di sisi lain daya dukung lingkungan di Kabupaten Bima sebagai resapan air sudah mulai menurun/rusak yang diakibatkan oleh ulah dari oknum/masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Tingkat erosi tanah yang terjadi pada wilayah Kabupaten Bima relatif tinggi dan luas. Hal ini terjadi di samping kondisi geografis yang memang merupakan daerah kering juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran upaya pelestarian lingkungan di kalangan masyarakat setempat.

Adapun lokasi potensi bencana alam sebagaimana yang telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Bima 2011-2031 dapat dilihat pada tabel 2.13.

**Tabel 2. 13 Lokasi Potensi Bencana Alam di Kabupaten Bima**

No.	Kecamatan	Potensi Bencana
1.	Tambora	Gunung meletus, gempa bumi, Banjir dan abrasi.
2.	Sanggar	Gunung meletus, gempa bumi, abrasi, dan banjir.
3.	Woha	Abrasi, Banjir.
4.	Wera	Gunung meletus, gempa bumi, Banjir dan abrasi.
5.	Ambalawi	Gunung meletus, gempa bumi, Banjir dan abrasi.
6.	Lambitu	Tanah Longsor, Banjir dan Gempa bumi.
7.	Bolo	Gempa bumi, Banjir.
8.	Soromandi	Banjir, Abrasi, Gempa bumi.
9.	Donggo	Longgsor, Banjir, Gempa bumi.
10	Sape	Banjir dan Tanah Longsor.

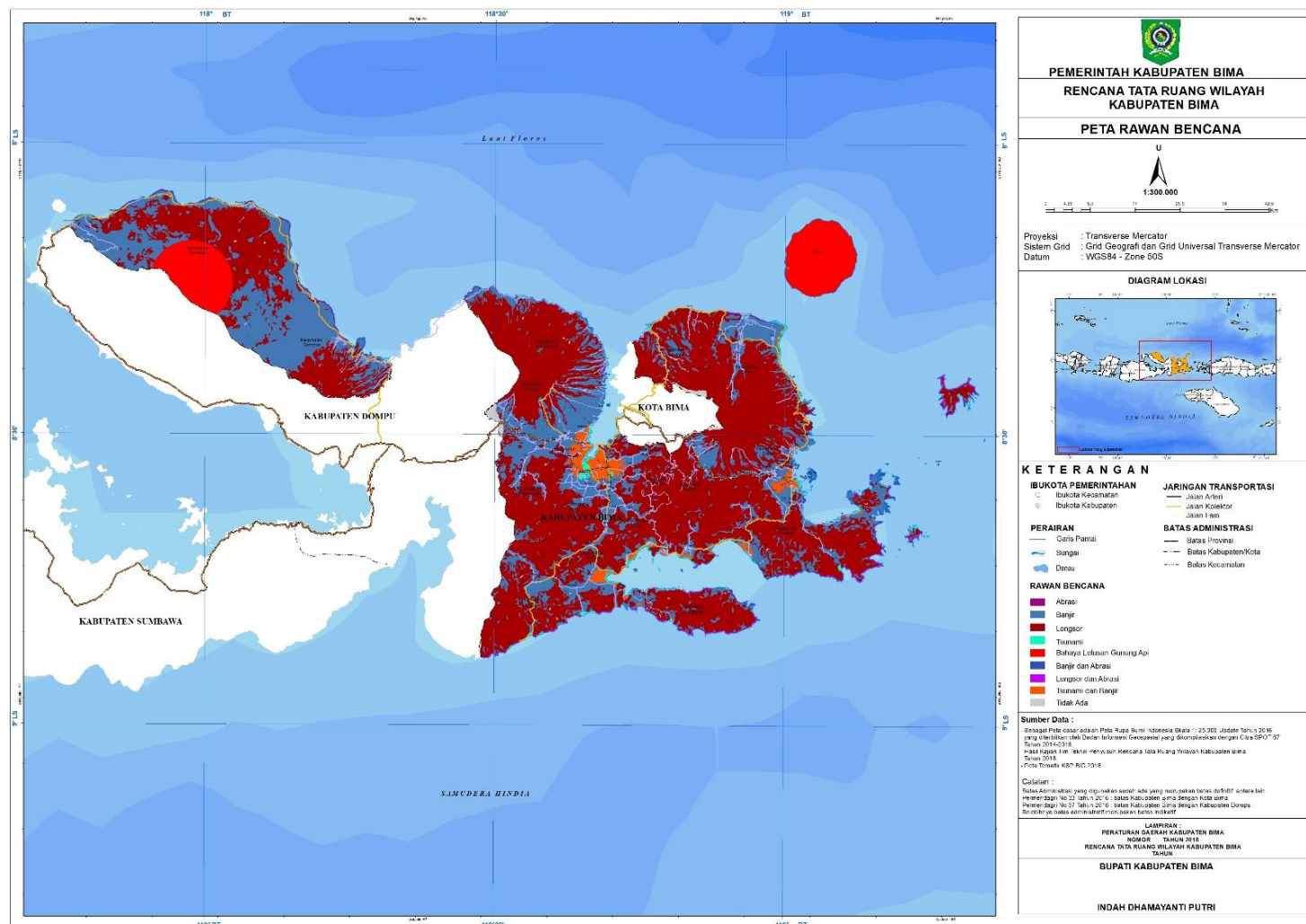




No.	Kecamatan	Potensi Bencana
11.	Monta	Gempa bumi, Tanah Longsor dan Banjir.
12.	Madapangga	Banjir, Gempa bumi.
13.	Lambu	Banjir, Gempa bumi dan Tanah Longsor.
14.	Wawo	Banjir, Tanah Longsor.
15.	Belo	Gempa bumi, Banjir dan Tanah Longsor.
16.	Langgudu	Gempa bumi, Banjir dan Tanah Longsor.
17.	Palibelo	Banjir.
18.	Parado	-

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.**

Disamping adanya potensi bencana di atas wilayah kabupaten bima setiap tahun juga menghadapi ancaman bencana kekeringan yang menyebabkan terjadi kelangkaan air bersih dan terjadi gagal panen yang biasanya terjadi di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Woha, Palibelo, Belo, Madangga, Donggo, Soromandi, Sanggar.



Sumber: RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bima

### 2.1.2 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat peristiwa kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi atau tidak resmi yang diterbitkan oleh badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain. Secara khusus Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bima tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 1,06% yaitu dari 437.890 jiwa pada tahun 2016 menjadi 499.823 jiwa pada tahun 2020. Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada table 2.14.

**Tabel 2. 14 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	2	3	4	5
2016	235.917	237.973	473.890	1,11
2017	238.515	240.452	478.967	1,07
2018	240.993	242.908	483.901	0,97
2019	243.267	245.310	488.577	0,96
2020	244.401	255.422	493.198	1,19
Rata-rata pertumbuhan				1,06

*Sumber: BPS Kab Bima, Tahun 2021.*

#### b. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bima mencapai 117 jiwa/km<sup>2</sup>, namun demikian penduduk Kabupaten Bima menyebar secara tidak merata pada 18 kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Bolo dengan kepadatan 767 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan



Tambora dengan kepadatan 14 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya sebaran dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.15.

**Tabel 2. 15 Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas / Area (Km <sup>2</sup> )	Penduduk		Kepadatan
			Jumlah	%	
1	Monta	227.52	41.965	7.61	172
2	Parado	261.29	9.565	2.08	41
3	Bolo	66.93	50.683	9.99	767
4	Madapangga	237.58	30.995	6.12	132
5	Woha	105.57	49.165	9.95	485
6	Belo	44.76	24.513	5.36	616
7	Palibelo	71.58	26.389	5.41	389
8	Wawo	132.29	20.624	3.66	142
9	Langgudu	322.94	28.067	6.12	97
10	Lambitu	65.4	6.77	1.19	94
11	Sape	232.12	61.547	11.87	263
12	Lambu	404.25	37.858	8.18	104
13	Wera	465.32	35.969	6.32	70
14	Ambalawi	180.65	21.177	4.09	117
15	Donggo	123.83	20.025	3.88	161
16	Soromandi	341.66	17,581	3.74	56
17	Sanggar	477.89	14.006	2.71	29
18	Tambora	627.82	9.017	1.71	14
<b>Jumlah</b>		<b>4.389.40</b>	<b>493.198</b>	<b>100.00</b>	<b>117</b>

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.**

### c. Jumlah Penduduk berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah penduduk di Kabupaten Bima yang termasuk angkatan kerja (usia 15 Tahun keatas) mencapai 241.735 jiwa, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian yaitu sejumlah 114.214 jiwa atau 47,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bima digolongkan sebagai salah satu daerah agraris di Indonesia dengan mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor andalannya. Keadaan ini juga berimplikasi pada struktur perekonomian Kabupaten Bima sangat didominasi oleh sektor pertanian. Sisanya bekerja disektor perdagangan dan jasa sebesar 39,73% dan sektor pertambangan dan pengolahan sebesar 13,02%. Dari jumlah data angkatan kerja diatas terdapat dua kategori pekerja yang perlu mendapat perhatian yaitu tenaga kerja terlatih sebesar 3.786 jiwa atau 1,56%.





Untuk lebih jelasnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut sektor di Kabupaten Bima tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.16.

**Tabel 2. 16 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja*	
		Jiwa	%
1	Pertanian dalam arti luas	114.214	47,25
2	Pertambangan dan pengolahan	31.482	13,02
3	Perdagangan dan jasa	96.039	39,73
<b>Total</b>		<b>241.735</b>	<b>100</b>
4	Tenaga Kerja Terlatih:		
-	Tenaga Kerja Terlatih Basis Kompetensi	2.913	1,20
-	Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	873	0,36
-	Pedagang Yang di Bina	3.325	1,37
-	IKM Yang di Latih	745	3,43
<b>Total</b>		<b>7.856</b>	<b>3,25</b>

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.**



## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi:

1. Aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
2. Aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial;
3. Aspek kesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga.

Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan.

#### **a. Pertumbuhan PDRB**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk



mengatur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada Tahun 2020 dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambil keputusan.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bima dari Tahun 2016 – 2020 menunjukkan tren positif, di mana Tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bima sebesar Rp. 9.130.540.000,- naik menjadi Rp.11.417,670.000,- Tahun 2020. Komponen terbesar pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan yang terkecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Bima dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah). 2016–2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan.	4.031,92	4.428,76	4.793,24	5.065,65	5.169,99
B	Pertambangan dan penggalan.	265,54	295,22	315,98	358,99	338,97
C	Industri pengolahan	188,66	203,89	215,77	232,88	236,65
D	Pengadaan listrik dan gas.	4,94	5,36	5,79	6,02	6,33
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.	4,85	5,20	5,25	5,45	5,70
F	Konstruksi.	557,29	618,53	672,71	769,86	657,64
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor.	1.431,11	1.608,95	1.760,96	1.931,77	1.899,63
H	Transportasi dan pergudangan	772,27	826,51	884,23	954,93	631,18
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum.	29,39	31,85	34,49	37,34	38,35
J	Informasi dan komunikasi.	109,95	122,84	130,72	140,49	157,76
K	Jasa keuangan dan asuransi.	278,58	325,48	352,38	363,42	423,88
L	Real estate	252,25	271,43	291,81	313,19	318,03
M,N	Jasa perusahaan	8,20	8,90	9,65	10,45	10,69
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.	675,08	706,93	746,14	776,04	823,51
P	Jasa pendidikan.	322,91	354,60	382,41	418,46	435,50
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	87,69	94,76	104,84	114,30	116,23
R,S,T,U	Jasa lainnya.	109,92	121,78	132,55	145,47	147,63
	Produk domestik regional bruto.	9.130,54	10.030,69	10.838,92	11.644,71	11.417,67

**Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2021.**





**Tabel 2. 18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah). 2016–2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan.	3.265,19	3.462,60	4 792,97	4 792,97	5 169,99
B	Pertambangan dan penggalian.	230,20	244,29	316,50	316,50	338,97
C	Industri pengolahan.	169,38	178,38	216,48	216,48	236,65
D	Pengadaan listrik dan gas.	5,00	5,23	5,74	5,74	6,33
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.	3,27	3,41	5,22	5,22	5,70
F	Konstruksi.	469,01	504,70	674,01	674,01	657,64
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor.	1,092,93	1.180,48	1 760,96	1 760,96	1 899,63
H	Transportasi dan pergudangan.	538,10	567,84	881,32	881,32	631,18
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum.	19,62	20,80	34,49	34,49	38,35
J	Informasi dan komunikasi.	106,53	114,52	130,72	130,72	157,76
K	Jasa keuangan dan asuransi.	212,73	234,23	352,30	352,30	423,88
L	Real estate.	182,07	191,89	289,27	289,27	318,03
M,N	Jasa perusahaan	6,36	6,68	9,65	9,65	10,69
O	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib.	429,15	435,74	743,93	743,93	823,51
P	Jasa pendidikan.	245,14	261,08	382,41	382,41	435,50
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	75,28	79,63	103,58	103,58	116,23
R,S,T,U	Jasa lainnya.	93,37	99,31	132,55	132,55	147,63
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>7.143,34</b>	<b>7.590,91</b>	<b>10 832,08</b>	<b>10 832,08</b>	<b>11 417,67</b>

*Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2020.*

**Tabel 2. 19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen) 2016–2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	44,16	44,15	44,22	43,50	45,28
B	Pertambangan dan penggalian	2,91,	2,94	2,92	3,08	2,97
C	Industri pengolahan	2,07	2,03	1,99	2,00	2,07
D	Pengadaan listrik dan gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,10	6,17	6,21	6,61	5,76
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	15,67	16,04	16,25	16,59	16,64
H	Transportasi dan pergudangan	8,46	8,24	8,16	8,20	5,53
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34
J	Informasi dan komunikasi	1,20	1,22	1,21	1,21	1,38



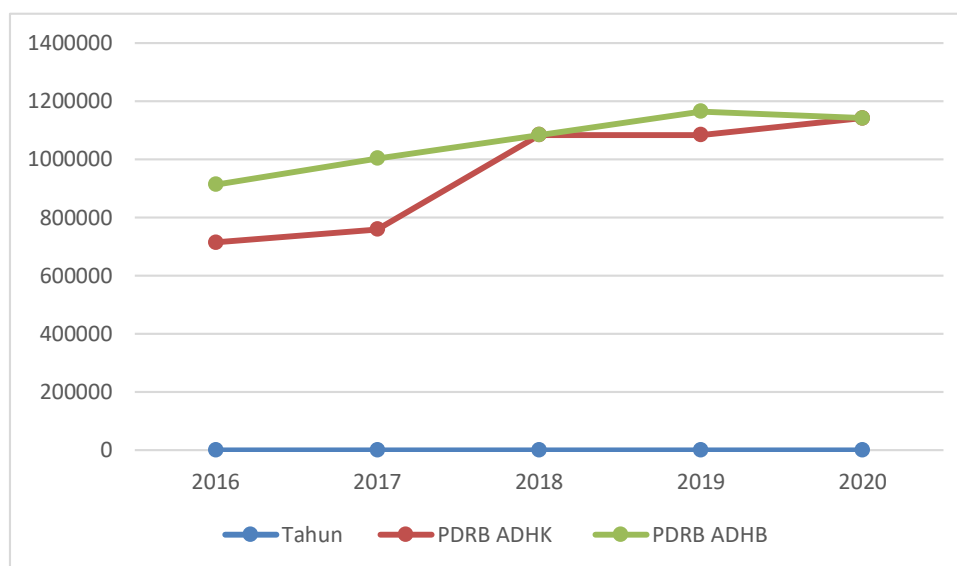
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa keuangan dan asuransi	3,05	3,24	3,25	3,12	3,71
L	Real estate	2,76	2,71	2,69	2,69	2,79
M,N	Jasa perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi pemerintahan. Pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,39	7,05	6,88	6,66	7,21
P	Jasa pendidikan	3,54	3,54	3,53	3,59	3,81
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,96	0,94	0,97	0,98	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,20	1,21	1,22	1,25	1,29
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2021.*

**Tabel 2. 20 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen) 2016–2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan.	3,80	6,05	3,58	2,60	-0,45
B	Pertambangan dan penggalian	8,00	6,12	3,59	8,16	-7,45
C	Industri pengolahan	6,21	5,32	3,37	5,04	0,28
D	Pengadaan listrik dan gas	17,27	4,53	1,73	6,01	8,24
E	Pengadaan air. Pengelolaan sampah. Limbah dan daur ulang	4,10	4,09	0,24	3,73	4,18
F	Konstruksi	8,38	7,61	4,11	8,83	-16,02
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	7,25	8,01	5,43	5,89	-2,62
H	Transportasi dan pergudangan	5,07	5,53	4,66	4,47	-31,17
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	9,74	5,97	5,39	4,87	0,72
J	Informasi dan komunikasi	8,20	7,50	5,11	4,98	11,83
K	Jasa keuangan dan asuransi	11,85	10,11	5,53	1,49	16,25
L	Real estate	6,16	5,44	4,30	5,61	1,79
M,N	Jasa perusahaan	6,62	5,04	5,87	6,14	-0,49
O	Administrasi pemerintahan. Pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,69	1,54	1,05	3,06	1,58
P	Jasa pendidikan	5,38	6,50	5,18	6,91	1,07
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,69	5,77	5,89	5,99	-0,35
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,83	6,37	5,40	6,10	-1,19
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,30</b>	<b>6,27</b>	<b>4,04</b>	<b>4,26</b>	<b>-3,49</b>

*Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2021.*



Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2021.

**Grafik 2. 1 Perbandingan PDRB atas ADHB dan ADHK menurut pengeluaran**

### b. PDRB per kapita

PDRB per kapita Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 19.267,21 ribu. Dengan membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bima. PDRB per kapita Kabupaten Bima atas dasar harga berlaku Tahun 2017 menjadi Rp. 20.942,33 ribu, sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2019 terus meningkat dan sudah mencapai sebesar Rp. 23.806,73 ribu, Pada tahun 2020 besaran PDRB Perkapita mengalami penurunan menjadi 23.150,28 ribu.

**Tabel 2. 21 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima, 2016-2020**

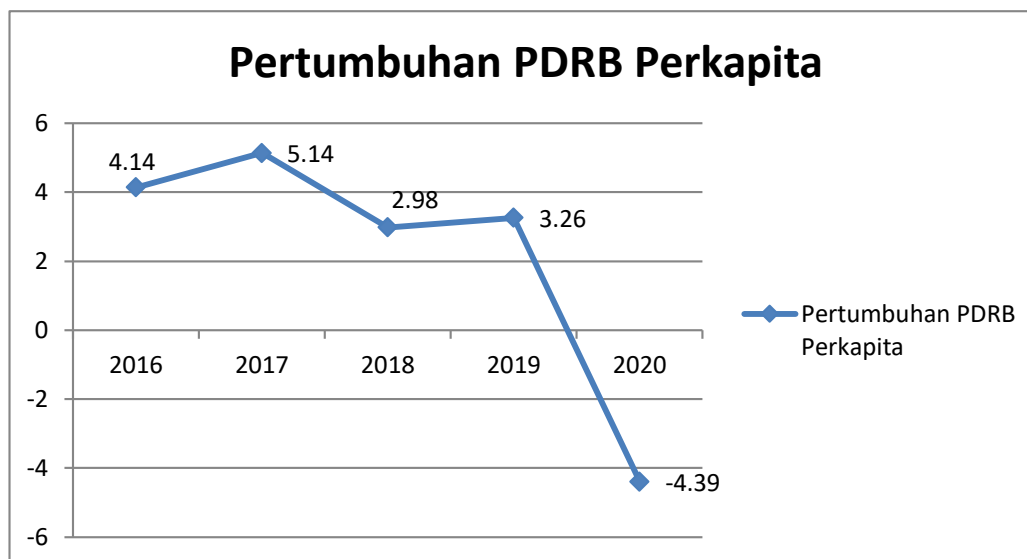
Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
- ADHK	7.143,34	7.590,91	7.897,8	8.233,8	7.946,6
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	19.267,21	20.942,33	22.384,92	23.806,73	23.150,28
- ADHK	15.073,84	15.848,49	16.321,08	16.852,75	16.112,37
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK	4,14	5,14	2,98	3,26	(4,39)



Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
Jumlah penduduk (org)	473.890	478.967	483.901	488.577	493.198
Pertumbuhan penduduk	1,11	1,07	1,03	0,97	1,19

\*) Angka Sementara

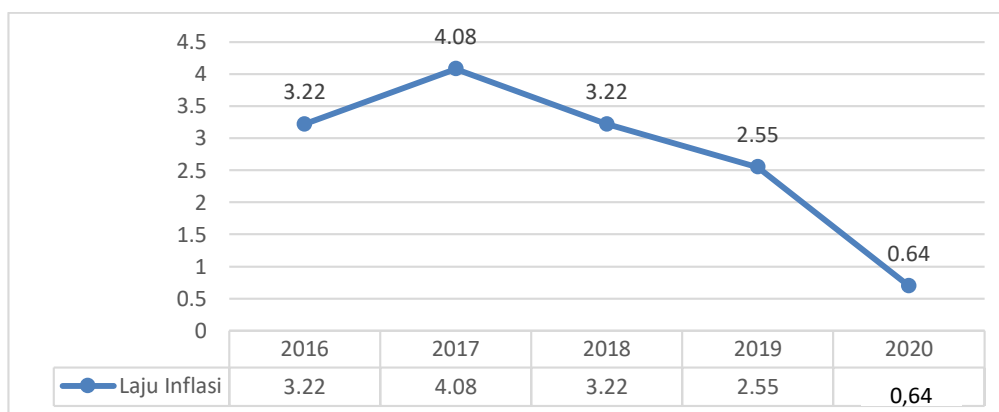
\*\*) Angka Sangat Sementara



Grafik 2. 2 Pertumbuhan PDRB Perkapita 2016 – 2020

### c. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi Tahunan di Bima dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2020.

Grafik 2. 3 Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan grafik 2.3 dapat diketahui bahwa laju inflasi Kabupaten Bima kurun waktu 2016 – 2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2016 laju inflasi Kabupaten Bima adalah sebesar 3,22%, Tahun 2017 mengalami kenaikan yakni dengan nilai inflasi sebesar 4,08%, kemudian turun lagi 3,22% pada Tahun 2018, pada Tahun





2019 turun menjadi sebesar 2,55% dan pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,64%.

#### **d. Penduduk Miskin**

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda penting dalam pembangunan nasional ataupun daerah. Untuk itu langkah strategis percepatan penanggulangan kemiskinan perlu direncanakan dan ditindak lanjuti secara bersama-sama. Persentase penduduk miskin menunjukkan trend yang semakin menurun, dari Tahun 2016 penurunan ini mengalami perlambatan yang disebabkan kemiskinan yang tersisa merupakan kategori sangat miskin dan bersifat multidimensi, oleh karenanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi penduduk miskin melalui berbagai program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat keberpihakan (affirmative) kepada masyarakat miskin.

**Tabel 2. 22 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Dengan Target Daerah Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Bima	15.31	15.10	14.84	14,76	14.49
2	Target RPJMD	15.78	14.72	13.66	12,60	11,54

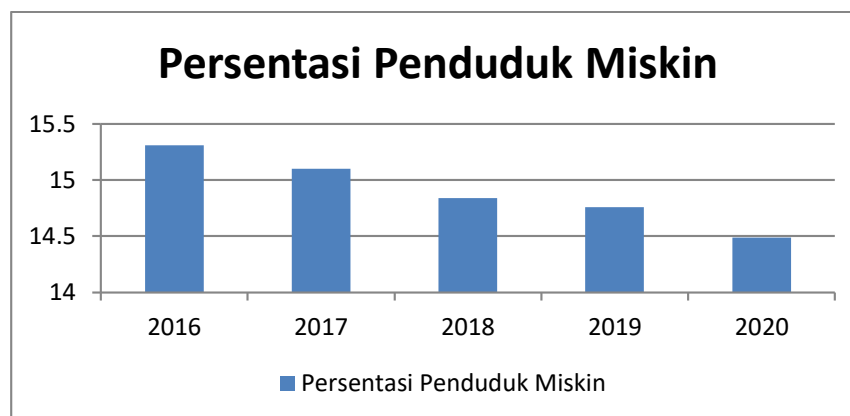
**Sumber data: BPS Kab. Bima, Tahun 2021.**

Angka kemiskinan di Kabupaten Bima juga semakin menurun dari waktu ke waktu dari 15,31% pada Tahun 2016 turun menjadi 14,49 % pada Tahun 2020, artinya pemerintah Kabupaten Bima dalam 4 Tahun terakhir mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 0,82 %. Hal ini menggambarkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bima meningkat, sehingga penduduk miskin terus berkurang dari 72.360 jiwa pada Tahun 2016, berkurang menjadi 71.32 jiwa pada tahun 2020, Penurunan angka kemiskinan berkat dukungan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan oleh pemerintah. Angka kemiskinan Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel 2.23.

**Tabel 2. 23 Angka Kemiskinan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (Jiwa)	473.890	478.967	483.901	488.577	493.198
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	72.360	72.137	71.649	72.115	71.32
<b>% Penduduk Miskin</b>	<b>15.31</b>	<b>15.10</b>	<b>14.84</b>	<b>14.76</b>	<b>14.49</b>

**Sumber data: BPS Kabupaten Bima, Tahun 2021.**



**Grafik 2. 4 Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan Tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

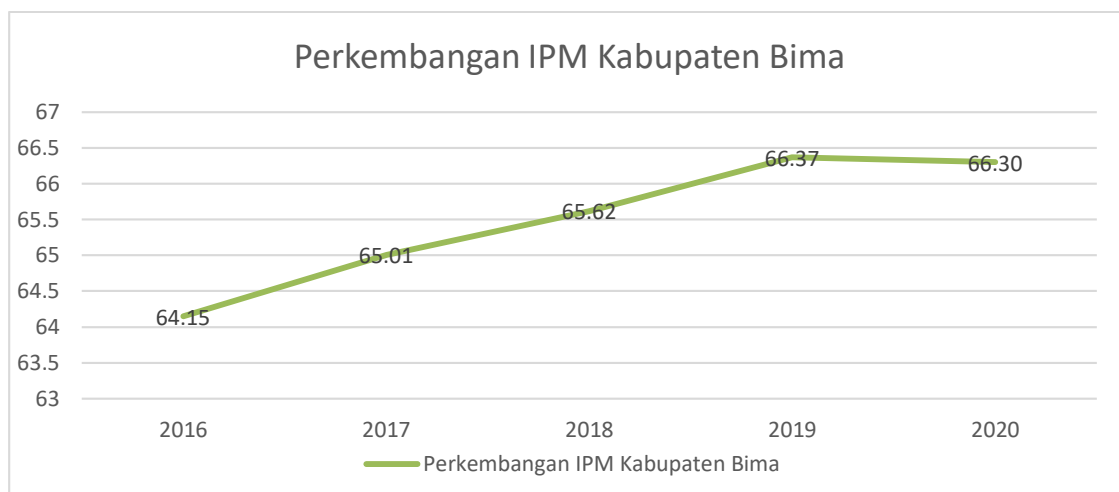
### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil perhitungan IPM Kabupaten Bima merupakan daerah yang mempunyai kriteria pembangunan manusia menengah atas dalam pembangunan manusia. Hal ini didasarkan pada kriteria pencapaian IPM pada Tahun 2016 mencapai angka 64.15 dan Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,22 % sehingga meningkat menjadi 66,37 dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,30. Perkembangan IPM Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.24.

**Tabel 2. 24 Perkembangan IPM (%) Dengan Target Daerah Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target RPJMD	Capaian Kab.Bima	Target RPJMD	Capaian Kab.Bima	Target RPJMD	Capaian Kab.Bima	Target RPJMD	Capaian Kab.Bima	Target RPJMD	Capaian Kab.Bima
Perkembangan IPM Kab. Bima	65.56	64.15	66.26	65.01	67,01	65.62	67,81	66.37	68,30	66,30

*Sumber data: BPS Provinsi NTB, Tahun 2020.*



**Grafik 2. 5 Perkembangan IPM (%) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

Indeks pembangunan Manusia (IPM) di pengaruhi oleh beberapa indikator sebagai berikut :

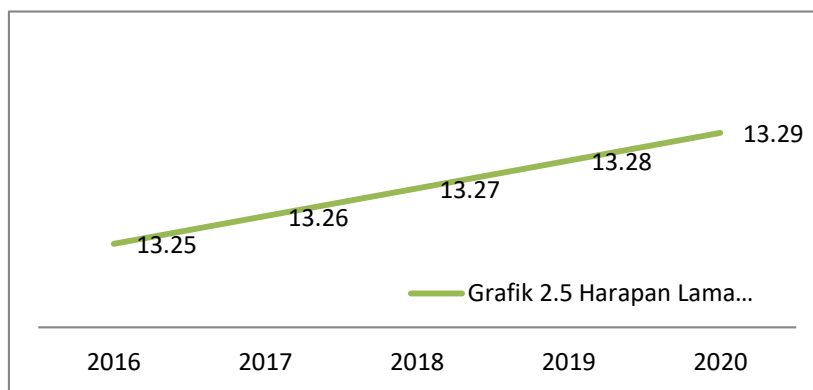
**a. Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa Tahun 2020 harapan lama sekolah di Kabupaten Bima telah mencapai 13,29 Tahun. hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa mendatang adalah 13.29 Tahun. Harapan lama sekolah Kabupaten Bima tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.25.

**Tabel 2. 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Tingkat	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bima	13.25	13.26	13.27	13,28	13,29

*Sumber data: BPS NTB, Tahun 2020.*



Sumber: BPS NTB, Tahun 2020.

**Grafik 2. 6 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

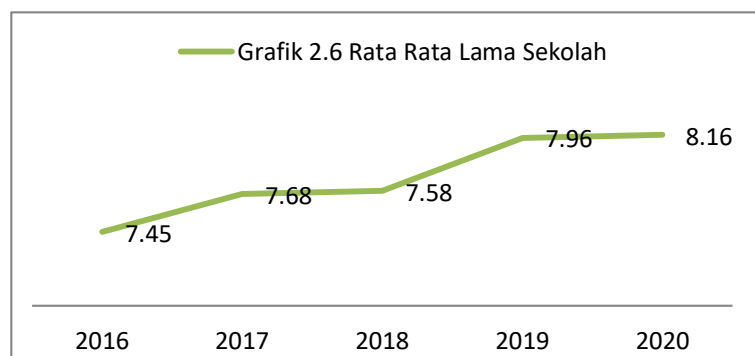
### b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bima juga meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bima adalah sebesar 7,45 tahun meningkat menjadi 7,78 tahun pada Tahun 2020. Dengan dukungan program wajib belajar 12 Tahun serta keaksaraan fungsional, diperkirakan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bima Tahun 2021 akan meningkat menjadi 8.36 (target akhir RPJMD Kabupaten Bima). Namun rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bima masih tergolong rendah dibandingkan dengan angka nasional yang telah mencapai diatas 8 Tahun. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bima tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada table 2.26.

**Tabel 2. 26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Tingkat	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bima	7.45	7.68	7,58	7,77	7,78

Sumber: Bappeda Kab. Bima, Tahun 2020.



Sumber data: BPS NTB, Tahun 2020.

**Grafik 2. 7 Rata-rata Lama Sekola Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**



### c. Angka Usia Harapan Hidup

Berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau serta upaya agar masyarakat memiliki pola hidup bersih dan sehat, pada akhirnya akan tercermin dari umur harapan hidup masyarakatnya. Penduduk yang sehat akan tercermin pada penduduk yang memiliki umur panjang atau umur panjang akan tercapai apabila penduduk itu sehat.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di bidang kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bima pada Tahun 2016 berada pada angka 65.13% dan pada Tahun 2020 berada pada angka 66.33%. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Provinsi NTB baru mencapai 66.48% pada Tahun 2020.

Angka tersebut memberikan gambaran bahwa angka harapan hidup Kabupaten Bima masih rendah dibandingkan angka harapan hidup Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Bima masih membutuhkan perhatian serius sehingga perlu dipacu dan ditingkatkan lagi guna mengejar target pembangunan kesehatan mencapai kinerja maksimal yaitu mencapai umur harapan hidup yang setinggi-tingginya atau target yang diharapkan yaitu rata-rata penduduk dapat mencapai umur 85 Tahun.

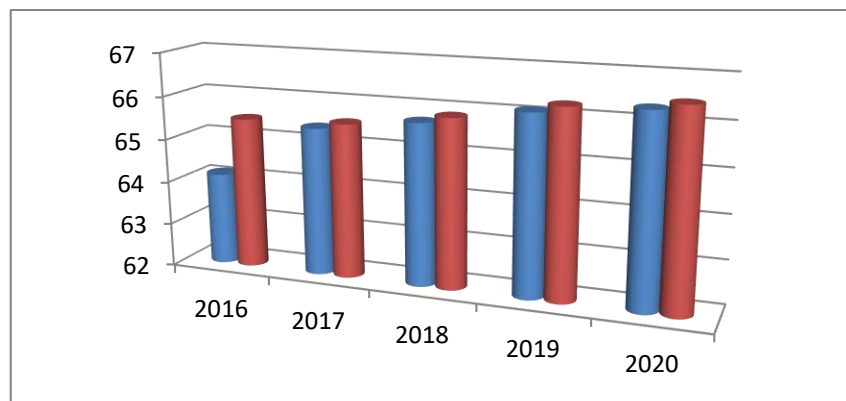
Namun angka harapan hidup Kabupaten Bima patut diapresiasi, karena angka harapan hidup Kabupaten Bima sudah melampaui Target Akhir RPJMD yakni sebesar 65,86 Tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.27.

**Tabel 2. 27 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Bima dan Provinsi NTB  
Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	
	Kabupaten Bima	NTB
2016	65.13	65.48
2017	65.40	65.55
2018	65.71	65.87
2019	66.11	66.28
2020	66.33	66.48

*Sumber: BPS NTB, Tahu 2020.*





Sumber: BPS NTB, Tahun 2020.

**Grafik 2. 8 AHH Kabupaten Bima dan Provinsi NTB  
Tahun 2016 – 2020**

#### d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita Kabupaten Bima tahun 2016 - 2019 terakhir mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 7.585.000,- Tahun 2016 menjadi 8.821.000,- di Tahun 2019, namun pada Tahun 2020 menurun menjadi 8.468.000,- hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, namun dengan adanya Covid 19 sedikit menurun. Pengeluaran per kapita Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

**Tabel 2. 28 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bima dan Provinsi NTB  
Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (ribu)	
	Kabupaten Bima	NTB
2016	7.585	9.580
2017	8.006	9.877
2018	8.354	10.284
2019	8.821	10.640
2020*	8.468	10.350

Sumber: BPS NTB, Tahun 2021.

#### e. Rasio Penduduk yang Bekerja

Angka pengangguran di Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dengan jumlah penduduk usia kerja 315.454 jiwa dan angkatan kerja sebanyak 101.951 jiwa dengan jumlah pengangguran mencapai 6.308 jiwa atau 2,59 %, namun di Tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami kenaikan sekitar 0,3% menjadi 2,89% dari jumlah penduduk usia kerja sebanyak

378.109 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pengangguran Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada table 2.29.

**Tabel 2. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	Total Angkatan Kerja (Jiwa)	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	TPAK (%)	TPT (%)
2016	315.454	207.195	6.308	101.951	-	-	2,59
2017	323.846	242.885	3,821	295.267	155.121	-	1,18
2018	329.076	236.229	12.073	285.499	43.577	75.45	4.86
2019	333.497	241.735	7.148	248.883	84.614	74.63	2,87
2020	378.109	248.447	7.395	255.842	98.178	72.27	2,89

*Sumber: BPS NTB, Tahun 2020.*

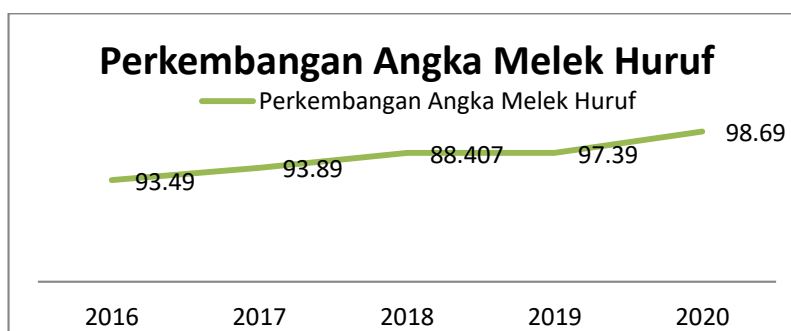
## 2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,91%, dari 92,38% Tahun 2016 menjadi 98,69% pada Tahun 2020. Angka melek huruf di Kabupaten Bima Tahun 2021 diharapkan mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka melek huruf Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada table 2.30.

**Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Tingkat	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bima	93,49	93,89	88,40	97,39	98,69

*Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2021.*



*Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2021.*

**Grafik 2. 9 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**



### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bima diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras. gotong royong. penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas yang terus dijaga adalah keberadaan grup kesenian daerah, dewan kesenian daerah dan lembaga adat, baik dari segi jumlah maupun intensitas kegiatannya yang terus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang.

Adapun jenis kesenian tradisional yang merupakan warisan sejarah dan budaya di Kabupaten Bima dapat dilihat pada table 2.31.

**Tabel 2. 31 Jenis Kesenian tradisional Kabupaten Bima**

Kesenian tradisional	Uraian/jenis
• Kesenian Tari dan lagu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tari Klasik : Katubu, toga, lensara, lenggo, sere, kanja, sagele.</li> <li>- Tari Kontemporer : Tari rimpu, tari pata angi, tari munarombedi, tari ndawinara, mpa'a ro mpije, mpa'a o'o, tari ajo honggo, tari pako tana, tari kalero.</li> <li>- Soka Sari, lenggo, lengsara, karaenta, ere/kanja, kantumbu, toja, kalero, hadrah, sagele.</li> </ul>
• Kesenian Permainan rakyat :	Mpa'a manca, sila, bango, lepi wei, weha ani dan sampari, gantao.
• Kebudayaan	U'a pua, rimpu, pacoa jara.

**Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bima, Tahun 2020.**

Pembinaan olah raga selama ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih, pembina olahraga,



pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Jumlah fasilitas olah raga baik untuk bola voli, sepak bola, renang, bola basket, bulu tangkis dan lapangan lainnya sebanyak 239 unit yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bima.

Adapun fasilitas olah raga yang ada di Kabupaten Bima dapat dilihat dalam tabel 2.32.

**Tabel 2. 32 Ketersediaan Fasilitas Olah Raga Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Kecamatan	Lapangan Olahraga				
		Bola	Basket	Volly	Bulu Tangkis	Renang
1	Monta	6	3	12	4	0
2	Bolo	4	3	11	4	0
3	Woha	4	3	14	4	1
4	Belo	6	2	10	5	0
5	Wawo	2	1	8	2	1
6	Sape	6	5	15	5	1
7	Wera	5	2	6	3	0
8	Donggo	3	1	5	2	0
9	Sanggar	3	2	5	2	0
10	Ambalawi	3	2	7	4	0
11	Langgudu	4	3	11	3	0
12	Lambu	5	4	13	3	1
13	Madapangga	4	2	11	3	1
14	Tambora	2	0	5	1	0
15	Soromandi	4	2	6	1	0
16	Parado	3	1	7	1	0
17	Lambitu	1	0	4	1	0
18	Palibelo	6	3	13	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	<b>39</b>	<b>158</b>	<b>50</b>	<b>6</b>

*Sumber: Dikbudpora Kab. Bima, Tahun 2021.*

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum meliputi pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Pelayanan dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan/hajat hidup masyarakat meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial. Sementara pelayanan penunjang antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman



modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

#### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak dasar terkait dengan pelayanan pendidikan. Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian angka melek huruf (AMH), Angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan SD/MI dan Angka kelulusan SLTP, serta target capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Bima.

**Tabel 2. 33 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bima dalam Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019		2020	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka melek huruf (AMH)	%	93,49	93,89	88,4	97,39	88,08	98,69	88,56
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,45	7,68	7,58	7,96	7,77	8,16	7,78
3	Angka kelulusan SD/MI	%	99,08	100	97,91	99,65	96,45	100	100
4	Angka kelulusan SLTP	%	99,76	100	97,37	99,85	98,77	99	100

**Sumber: Dikbudpora Kab. Bima, Tahun 2020.**

**Tabel 2. 34 Target capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target (%)	Batas Waktu Pencapaian	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	1 Tahun	18,27%





No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target (%)	Batas Waktu Pencapaian	Capaian
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	1 Tahun	-
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	1Tahun	-

**Sumber: Laporan Realisasi SPM Kab. Bima, Tahun 2020.**

Indikator utama dalam mengukur kinerja urusan wajib pendidikan antara lain: angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah, rasio guru dibanding murid, dan jumlah guru murid jenjang pendidikan dasar:

#### a. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 dapat dilihat seperti pada tabel 2.35.

**Tabel 2. 35 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Jenjang Pendidikan	% Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Paket A	110,16	109,91	116,63	115,62	113,8
2	SMP/MTs/Paket B	116,35	117,32	91,67	92,69	93.71
3	SMA/MA/SMK	98,28	-	98,44	96,05	97.64

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2021.**

Tingkat partisipasi kasar baik anak usia Sekolah Dasar atau sederajat (usia 7 – 12 Tahun) di Kabupaten Bima telah mencapai angka lebih dari 100%. Sedangkan anak usia Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan anak usia Sekolah Menengah Atas atau sederajat belum mencapai 100% dan sedikit mengalami penurunan.

#### b. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Jumlah siswa yang telah menamatkan sekolah pada semua jenjang pendidikan tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2016



jumlah siswa yang menamatkan pendidikan jenjang pendidikan SD dan SMP mencapai 18.090 orang siswa, jumlah ini terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 16.245 orang siswa. Adapun jumlah siswa yang telah menamatkan sekolah jenjang SD dan SMP Kabupaten Bima Tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel 2.36.

**Tabel 2. 36 Jumlah Siswa yang Tamat Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Klasifikasi Sekolah	Jumlah Siswa yang Tamat (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020**
1.	SD Sederajat	9.682	9.323	8.945	8.739	8.719
2.	SMP Sederajat	8.408	8.278	8.078	7.776	7.526
<b>Total</b>		18.090	17.601	17.023	16.515	16.245

**Sumber: Dikbudpora Kab. Bima, Tahun 2020.**

Ket : \*\* Angka sangat sementara

### c. Angka Partisipasi Murni

Tingkat partisipasi murni Kabupaten Bima Tahun 2016 -2020 anak usia Sekolah Dasar atau sederajat telah mencapai 99%, sedangkan anak usia Sekolah Menengah Pertama atau sederajat Kabupaten Bima belum mencapai angka 90% di Tahun 2020. Angka partisipasi murni anak usia Sekolah Dasar atau sederajat pada Tahun 2016 mencapai 99,74%, dan terus meningkat sampai tahun 2018 mencapai 99,98%, namun pada Tahun 2019 dan 2020 menurun menjadi 99,20% dan 99,19%. Sedangkan anak usia Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dari tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan. Tahun 2016 APM mencapai 94,27%, dan di Tahun 2020 turun menjadi sebesar 88,96%. Perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 dapat dilihat seperti pada tabel 2.37.

**Tabel 2. 37 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2019**

No	Jenjang Pendidikan	% Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Paket A	99,74	99,78	99,98	99,20	99,19
2	SMP/MTs/Paket B	94,27	95,07	89,21	89,02	88,96
3	SMA/MA/SMK	-	-	-	77,73	77,38

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2021.**

### d. Rasio guru/murid

Ketersediaan tenaga pengajar di Kabupaten Bima pada semua jenjang pendidikan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena adanya guru yang memasuki usia pensiun setiap tahun dan ada kebijakan



pemerintah pusat yang menghentikan sementara penerimaan PNS baru (termasuk guru). Adanya penurunan jumlah guru PNS dari tahun ke tahun mempengaruhi rasio guru dengan murid. Pada Tahun 2016 rasio guru dengan murid SD/MI adalah 1:7 dan menjadi 1:15 pada Tahun 2020. Begitu juga halnya dengan tingkat SMP/MTS, dimana rasio guru dengan murid 1:7 pada Tahun 2016 menjadi 1:19 pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya rasio guru dan murid menurut jenjang pendidikan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.38.

**Tabel 2. 38 Rasio Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	7	8	25	25	15
2	SMP	7	7	18	18	19

**Sumber: Dikbudpora Kab. Bima, Tahun 2020.**

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak dasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan capaian pelaksanaan kinerja urusan bidang kesehatan diukur melalui indikator kinerja daerah serta realisasi capaian SPM kesehatan Kabupaten Bima yang dapat dilihat pada tabel 2.39 dan 2.40

**Tabel 2. 39 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019		2020	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka harapan hidup	Tahun	64,48	65,55	65,71	65,46	66,28	65,66	66,33
2	Prevalensi balita gizi buruk	%	7,29	7,6	2,37	2,8	2,15	6,2	1,9
3	Jumlah kematian ibu melahirkan	kasus	9	8	8		5		10
4	Jumlah kematian bayi	kasus	80	74	79		79		76

**Sumber: BPS NTB, Tahun 2020.**

**Tabel 2. 40 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2020**



No.	Indikator	Sasaran ( A )	Hasil / Realisasi (B)	Capaian % ( B/A )
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4	11.092	10.599	95,56
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.588	10.067	95,08
3.	pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	10.084	10.037	100,37
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	39.455	35.858	90,88
5.	Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kls.1 dan kls 7)	58.078	48.009	82,66
6.	Pelayanan Kesehatan usia produktif (usia 15-59 tahun) yg mendapat scrining kesehatan sesuai dengan standar	299.061	277.592	92,82
7.	Pelayan kesehatan terhadap uasia lanjut	47.195	20.194	42,79
8.	Pelayanan kesehatan penderita Hypertensi	21.263	21.263	100
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus ( DM )	2.903	2.903	100
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	1.284	1.102	85,82
11.	Pelayanan Kesehatan penderita TBC	1.549	542	34,99
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	12.470	6.460	51,8

**Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bima, Tahun 2020.**

Dari data yang terdapat pada tabel realisasi pencapaian SPM Kabupaten Bima diatas terdapat beberapa kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima, yaitu :

1. Permasalahan Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dihadapi sebagai berikut :
  - a. Pemanfaatan alokasi anggaran kesehatan yang belum efektif dan efisien dalam meningkatkan capaian program;
  - b. Masih belum meratanya distribusi penempatan tenaga kesehatan;
  - c. kompetensi tenaga kesehatan masih relative rendah;
  - d. kesadaran masyarakat/tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan kesehatan masih relative rendah, baru mencapai 70%;
  - e. Status ketenagaan kesehatan terutama di desa-desa masih banyak yang pegawai sukarela tanpa ikatan;
  - f. Proses pembangunan di RSUD Bima yang masih berjalan sehingga menyebabkan alur pelayanan di RSUD Bima sedikit terganggu;
  - g. Untuk jumlah Mobil Ambulance masih kurang dikarena kanting kat rujukan yang semakin tinggi;



- h. Alat kesehatan yang masih kurang, seperti di Ruang OK, NICU dll.
- 2. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pemerataan distribusi penempatan tenaga kesehatan, yang diperkuat dengan SK/peraturan kepala daerah;
  - b. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dengan melibatkan lintas sector terkait;
  - c. Peningkatan SDM Aparatur Kesehatan melalui diklat formal, informal, dan fungsional;
  - d. Peningkatan alokasi dana untuk program kegiatan strategis lainnya, serta peningkatan status tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja petugas melalui pengangkatan pegawai honor/sukarela menjadi pegawai tidak tetap (PTT) daerah;
  - e. Dilaksanakannya pengadaan untuk sarana dan prasarana yang sesuai dengan tingkat kebutuhan RSUD Bima;
  - f. Mempercepat proses pembangunan itu sendiri untuk mengatasi jumlah pasien di RSUD Bima.

Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan diselenggarakan oleh 2 perangkat daerah, yaitu dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah Kabupaten Bima dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

**a. Dinas Kesehatan**

Indikator untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib kesehatan antara lain Angka Kematian Bayi. Angka Kematian Ibu Melahirkan. Kasus Gizi Buruk. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah Tenaga Medis dan Peramedis dan cakupan pelayanan sanitasi dan air bersih.

Angka Kematian Bayi Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan, tahun 2016 angka kematian bayi 80 kasus dan tahun 2020 turun menjadi 64 kasus, sedangkan untuk Angka Kematian Ibu dan Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif. Kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bima masih cukup tinggi. Dengan berbagai program dan kebijakan, pemerintah Kabupaten Bima belum mampu menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya kegiatan persalinan





yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Untuk lebih jelasnya terkait indikator kesehatan dapat dilihat seperti pada tabel 2.41.

**Tabel 2. 41 Indikator kesehatan di Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi	80	74	79	79	76
2	Jumlah Kematian Ibu	9	8	8	5	10
3	Penanganan HIV dan AIDS	17	20	27	30	28
4	Prevalensi Gizi Buruk Klinis	0.06	0.03	0.06	0.06	0.05
5	Cakupan Jamban Keluarga (%)	81,14	85,17	87,44	90,02	59.80
6	Persentase balita gizi buruk yang dirawat (%)	100	100	100	100	100
7	Jumlah posyandu	616	633	641	652	664
8	Jumlah Puskesmas	21	21	21	21	21
9	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	-	-	-	-	-
10	Rasio rumah sakit persatuan penduduk	2	2	2	2	2
11	Angka kelangsungan hidup bayi (lahir hidup)	9.923	10.263	10.496	10.149	10,135
12	Jumlah Pustu	90	90	90	90	90
13	Jumlah Poskesdes	144	144	134	144	144

**Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bima, Tahun 2021.**

#### **b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima**

Pada Tahun 2020 jumlah pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima sebanyak 54,331 orang, meliputi rawat inap 12,133 orang, rawat jalan 34,827 orang dan pasien gawat darurat 7,371 orang. Angka kunjungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.42.

**Tabel 2. 42 Angka kunjungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020**

No.	Jenis Kunjungan	Satuan	Target	Jumlah
1	Rawat Inap	Pasien	12,932	12,133
2	Rawat Jalan	Pasien	66,435	34,827
3	Pasien Gawat Darurat	Pasien	16,236	7,371
.	<b>Total</b>			<b>54,331</b>

**Sumber: RSUD Bima, Tahun 2020.**



**Tabel 2. 43 Kinerja pelayanan Rawat Inap Kabupaten Bima Tahun 2020**

No.	Keterangan	Satuan	Target	Jumlah
<b>I Data Dasar</b>				
1	Jumlah Tempat Tidur	Tempat Tidur	190	152
2	Jumlah Pasien	Pasien	95603	54,331
3	Pasien Hidup	Pasien		9,658
4	Pasien Mati	Pasien		500
5	Hari Perawatan	Hari		43,943
6	Lama Rawat (Total)	Hari	16568	37,411
<b>II Indeks Kegiatan</b>				
1	BOR %	%	87.20%	78.98%
2	T.O.I (hari)	Hari	0.3	1.15
3	L.O.S (hari)	Hari	3.1	3.68
4	B.T.O (kali)/Tahun	Kali)/Tahun	85	66.82
5	G.D.R (per 1.000)	Per 1.000	25/1000	49.22
6	N.D.R (per 1.000)	Per 1.000	45/1000	28.74

**Sumber: RSUD Bima, Tahun 2020.**

Standar Pelayanan :

B.O.R :	60-85 persen (Pemanfaatan Tempat Tidur)
T.O.I :	1-3 Hari(Angka Penggantian Interval)
L.O.S :	6-9 hari (Lama Masa Perawatan)
B.T.O :	40-50 kali (Angka Perputaran Tempat Tidur)
G.D.R :	45 Maksimum per 1.000 (Angka Kematian Umum)
N.D.R :	25 Maksimum per 1.000 (Angka Kematian Bersih)

**Tabel 2. 44 Pelayanan langsung kepada keluarga Pasien BPJS  
RSUD Bima Tahun 2019**

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Jumlah
1	Pasien Rawat Jalan	Pasien	-
2	Pasien Rawat Inap	Pasien	11.839
3	Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Pasien	13.629
4	Pasien yang dirujuk	Pasien	-
5	Pasien yang dioperasi	Pasien	3.693

**Sumber: RSUD Bima, Tahun 2020.**

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah bidang Pekerjaan Umum yang tertuang dalam indikator kinerja RPJMD Tahun 2016 – 2020 dan target capaian SPM pekerjaan umum. Adapun capaian indikator kinerja RPJMD terdiri dari jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan cakupan air bersih di perkotaan dan



perdesaan, sebagaimana tertera pada tabel 2.45, sedangkan target capaian SPM pekerjaan umum tertuang pada tabel 2.46 berikut.

**Tabel 2. 45 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2018			2019		2020	
				2017	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	38,25	43,87	43.50	44,41	45	45,5	45,75	51,58
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	73,7	76,71	20	24,84	25	26,8	30	49,25
3	Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	%	30	39,65	39.50	40,95	40,38	43,08	41,25	43,47

**Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima. Tahun 2020.**

**Tabel 2. 46 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	40,79%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	3,87%

**Sumber: Laporan Realisasi SPM Kab. Bima, Tahun 2020.**

#### **a. Jaringan Jalan**

Penataan perhubungan darat di Kabupaten Bima dilaksanakan melalui pembangunan sarana jalan untuk menjangkau luas wilayah 4.389.40 Km<sup>2</sup>. Panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2020 adalah 831.61 Km, sesuai Surat Keputusan Bupati Bima Tahun 2017, dengan rincian kondisi jalan baik 288,56 Km, sedang 24,08 Km, rusak 52,28 Km dan rusak berat sepanjang 466,70 Km. Sementara itu jalan kabupaten memiliki tingkat kemantapan di bawah 50%. Adapun kondisi jalan Kabupaten Bima Tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada Tabel 2.47.



**Tabel 2. 47 Kondisi Jalan Kabupaten Bima  
dengan Status Jalan Kabupaten Tahun 2016 - 2020**

No	KEADAAN JALAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jenis Permukaan					
	a. Aspal	409.71	434.34	434.34	434.34	469.56
	b. Kerikil	82.54	77.84	77.84	77.84	73.59
	c. Tanah/Puru	296.87	319.43	319.43	319.43	288.44
	d. Lainnya	-	-	-	-	
	Jumlah	789.12	831.61	831.61	831.61	831.61
2	Kondisi Jalan					
	a. Baik	284.60	288.56	288.56	288.56	349.75
	b. Sedang	12.20	24.08	24.08	24.08	79.17
	c. Rusak	21.82	52.28	52.28	52.28	72.92
	d. Rusak Berat	488.06	466.70	466.70	466.70	329.75
	e. Tidak Dirinci	-	-	-	-	
	Jumlah	789.12	831.61	831.61	831.61	831.61
3	Kelas Jalan					
	a. Kelas I					
	b. Kelas II					
	c. Kelas III					
	d. Kelas IIIa	789.12	831.61	831.61	831.61	831.61
	e. Kelas IIIb					
	f. Kelas IIIc					
	g. Kelas Tdk Dirinci					
	Jumlah	789.12	831.61	831.61	831.61	831.61

Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.

## b. Jembatan

Jembatan yang terdapat di Kabupaten Bima Tahun 2020 adalah sebanyak 179 unit dengan total panjang jembatan 1.890,3 Meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.48.

**Tabel 2. 48 Jembatan di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	KLASIFIKASI	Panjang (meter)	Jumlah (unit)
1	Jembatan Nasional	-	-
2	Jembatan Provinsi	-	-



No	KLASIFIKASI	Panjang (meter)	Jumlah (unit)
3	Jembatan Kabupaten	1.890,30	179

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Tahun 2020.*

### c. Jaringan Irigasi

Daerah irigasi di Kabupaten Bima berjumlah 127 daerah irigasi pedesaan dan irigasi setengah teknis dan teknis 41 daerah irigasi. Luas areal daerah irigasi terbagi dalam 3 jenis yaitu luas daerah irigasi baku yaitu luas keseluruhan yang di airi, luas area potensial adalah luas daerah potensial yang dapat dimanfaatkan dan luas area fungsional yang sudah dimanfaatkan. Luas areal daerah irigasi baku Kabupaten Bima adalah 57.994 Ha, dimana luas area yang berpotensi dan sudah dimanfaatkan adalah seluas 48.618 Ha. Untuk lebih jelasnya luas areal daerah irigasi Kabupaten Bima Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.49.

**Tabel 2. 49 Luas Areal Daerah Irigasi di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)		
		Baku	Potensial	Fungsional
1	Madapangga	6.304	5.762	5.762
2	Bolo	3.761	3.391	3.391
3	Donggo	3.106	2.221	2.221
4	Sanggar	2.214	1.756	1.756
5	Tambora	4.055	3.805	3.805
6	Monta	4.825	4.563	4.563
7	Parado	2.762	2.351	2.351
8	Woha	4.378	2.415	2.415
9	Palibelo	2.169	2.119	2.119
10	Belo	5.023	4.493	4.493
11	Wera	3.206	3.027	3.027
12	Ambalawi	4.336	2.636	2.636
13	Sape	3.290	2.710	2.710
14	Lambu	2.145	1.720	1.720
15	Wawo	3.562	3.412	3.412
16	Langgudu	2.174	1.553	1.553
17	Soromandi	85	85	85
18	Lambitu	599	599	599
<b>Jumlah</b>		<b>57.994</b>	<b>48.618</b>	<b>48.618</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Tahun 2021.*





Sementara itu kondisi Jaringan Irigasi di Kabup,aten Bima pada umumnya masih merupakan saluran irigasi tanah yang pengelolaanya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tani sehingga tingkat kehilangan air pada saluran masih cukup tinggi dan belum mampu melayani air irigasi secara optimal baik pada daerah hulu maupun pada daerah hilir.

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bima tahun 2020, 27,48% dalam kondisi baik, sisanya sebesar 72,52 dalam kondisi rusak. Jaringan irigasi terpanjang ada di Kecamatan Madapangga dengan Panjang 90.917 Meter sesuai dengan luas area yang harus diairi 5.762 Ha, sedangkan yang terpendek ada di Kecamatan Lambitu sepanjang 430 Meter. Untuk kondisi prasarana irigasi Kabupaten Bima Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.50.

**Tabel 2. 50 Kondisi Prasarana Irigasi di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Kecamatan	Kondisi (M)			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Madapangga	25.573	13.559	51.785	90.917
2	Bolo	18.170	8.569	26.523	53.262
3	Donggo	13.987	6.656	23.729	44.371
4	Sanggar	11.254	4.445	13.934	29.633
5	Tambora	8.166	4.093	15.030	27.289
6	Monta	17.225	10.621	43.440	71.286
7	Parado	6.150	3.778	14.557	24.485
8	Woha	12.036	7.977	34.302	54.315
9	Palibelo	15.334	7.997	30.615	53.947
10	Belo	13.019	5.607	18.756	37.383
11	Wera	13.931	6.307	21.811	42.049
12	Ambalawi	12.274	7.813	32.002	52.089
13	Sape	23.430	11.680	43.557	78.668
14	Lambu	17.090	9.487	35.365	61.942
15	Wawo	12.698	9.047	36.420	58.164
16	Langgudu	17.606	5.855	19.894	43.355
17	Soromandi	2.829	1.618	6.338	10.784
18	Lambitu	1.440	529	2.331	4.300
<b>Jumlah</b>		<b>225.859</b>	<b>125.638</b>	<b>470.389</b>	<b>821.886</b>
<b>%</b>		<b>27,48</b>	<b>15,29</b>	<b>57,23</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Tahun 2020.*

#### **d. Penataan Ruang**

Perhitungan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih cukup baik, dimana rasio ketaatan terhadap RTRW sampai tahun 2019 masih 0,99%. Untuk rasio ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bima tahun 2016 – 2019 lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.51.

**Tabel 2. 51 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bima Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Realisasi RTRW	72	80	90	90
2.	Rencana Peruntukan RTRW	90	90	91	91
3.	Rasio (1./2.)	0.80	0,88	0.99	0.99

**Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bima, Tahun 2020.**

#### **4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Mewujudkan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab urusan bidang perumahan dan permukiman. Masyarakat Kabupaten Bima masih membutuhkan rumah cukup banyak. Kebutuhan rumah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari sisi kualitas perumahan, Kabupaten Bima masih dihadapkan pada banyaknya perumahan yang tidak sesuai dengan standar perumahan yang sehat. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni tersebut dipenuhi baik melalui bantuan perumahan dari Kemeterian Perumahan Rakyat, pengembang swasta, maupun perorangan.

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Bima diukur dengan indikator kinerja luas kawasan kumuh, sebagaimana tabel 2.52 dan target pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana pada table 2.53.

**Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan kumuh	%	3,21	7,43	41,28	41,28	42,24

**Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Bima, Tahun 2021.**



**Tabel 2. 53 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realiasi
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-

**Sumber: Laporan Realisasi SPM Kab. Bima, Tahun 2020.**

## **5. Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat diukur dari capain indikator SPM dan capain indikator RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi:

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Target pencapaian standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal :



**Tabel 2. 54 Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	26%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	10,47%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	8,46%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	8,46%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	

**Sumber: Laporan Realisasi SPM Kab. Bima, Tahun 2020.**

Sedangkan capaian indikator kinerja pembangunan daerah bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 terdiri dari:

**a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Polisi Pamong Praja)**

Kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat, dapat dilihat dari rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, dimana Tahun 2016 rasionya sebesar 13,17 naik pada Tahun 2020 menjadi sebesar 20,46 artinya terdapat sekitar 20 anggota



Pol PP dalam setiap 10.000 penduduk. Untuk perkembangan rasio Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.55.

**Tabel 2. 55 Perkembangan Rasio Polisi Pamong Praja terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No	Uraian	T A H U N				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	595	465	852	952	1.052
2.	Jumlah penduduk	473.890	478.967	483.901	488.577	514.105
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	13,17	15,12	17,6	17,95	20,46

**Sumber: Dinas Satpol PP Kab. Bima, Tahun 2020.**

#### **b. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk**

Kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan, dilihat dari rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk, di mana Tahun 2016 rasionya sebesar 1,69 atau sebanyak 80 orang anggota linmas meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 1,98 atau sebanyak 100 orang anggota linmas. Artinya terdapat sekitar 1-2 anggota linmas dalam setiap 10.000 penduduk. Perkembangan rasio linmas Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.56.

**Tabel 2. 56 Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	80	100	100	100	100
2.	Jumlah penduduk	473.890	478.967	483.901	488.577	514.105
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	1.69	2.09	2.07	1,89	1,95

**Sumber: Dinas Satpol PP Kab. Bima, Tahun 2020.**





## **6. Urusan Wajib Sosial**

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengurangi timbulnya permasalahan sosial, keadaan di Kabupaten Bima menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Selain itu juga menangani dan melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan melibatkan masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan bidang sosial yang dilakukan pemerintah adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial agar hidup layak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Prioritas penanganan ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan PMKS, diantaranya adalah kemiskinan, keterlantaran. Kecacatan, keterpencilan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Meskipun penanganan kesejahteraan sosial terus diupayakan namun hasilnya belum mampu menekan jumlah PMKS yang menyebabkan PMKS terus berkembang. Masih cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bima dan kurangnya penanganan PMKS mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan di dibidang kesejahteraan sosial.

Penanganan permasalahan sosial selain pemerintah ada dari masyarakat yaitu potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial (PSKS) antara lain; Karang taruna, Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) dan kalangan Dunia Usaha (DU).

Ketersediaan prasarana sosial sebagai PSKS merupakan dukungan dalam mengatasi permasalahan PMKS agar bisa memenuhi kebutuhan secara layak. Jumlah prasarana sosial di Kabupaten Bima untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.57.



**Tabel 2. 57 Jumlah Prasarana Sosial Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Sarana Sosial	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU)	0	0	2	4	6
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	21	25	27	30	32
3	Panti rehabilitasi	1	1	1	1	1
4	Rumah Singgah	0	0	0	0	0
5	LKS Paca	11	11	11	14	18
<b>Jumlah (unit)</b>		<b>33</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>57</b>

**Sumber: Dinas Sosial Kab. Bima, Tahun 2021.**

Sedangkan capaian indikator kinerja SPM bidang social berdasarkan Permendagri no. 100 Tahun 2018 Tentang standar pelayanan minimal dapat dilihat pada table 2.58.

**Tabel 2. 58 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantardi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantardi Luar Panti	2020	30	28,5
	Luar Panti skala kabupaten	Persentase(%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kabupaten	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2020	30	37
		Persentase(%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2020	30	69
		Persentase(%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemisdi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2020	-	-
	Luar Panti skala kab	Persentase(%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten	2020	100	99,65
		Persentase(%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten	2020	100	-

*Sumber: Laporan Realisasi SPM Kab. Bima, Tahun 2020.*

### 2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Dasar

#### 1. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang tertuang dalam 31 indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016 - 2021 yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana target dan capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.59.

**Tabel 2. 59 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2016	2017	2018		2019		2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Menurunnya angka Pengangguran	%	3,98	1,56	3,8	4,86	3,5	2,87	3,3	2,89

*Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.*

#### Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun. ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun



ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua.

Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan. Tahun 2016 angka ketergantungan Kabupaten Bima sebesar 62,97%, Tahun 2020 menurun menjadi 61,28%. Yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Bima mempunyai tanggungan sebanyak 62 orang yang belum produktif dan dianggap tidak berproduktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.60.

**Tabel 2. 60 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah penduduk usia <15 Tahun	155.772	155.121	155.561	145.051	135.996
Jumlah penduduk usia >64 Tahun	27.331	28.579	29.464	30.256	31.158
Jumlah penduduk usia tidak produktif	183.103	183.700	185.025	175.307	167.154
Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	290.781	295.267	298.025	328.251	346.951
Rasio ketergantungan (%)	<b>62.97</b>	<b>62.21</b>	<b>61.90</b>	<b>61,61</b>	<b>61,28</b>

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.**

## **2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Bima sejak Tahun 2016 sudah menunjukkan angka yang bagus dan angka itu konsisten sampai dengan Tahun 2020. Tahun 2020 diharapkan angka tersebut akan meningkat sehingga semakin banyak perempuan yang menempati posisi-posisi strategis baik di eksekutif maupun di legislatif. Jumlah perempuan pada Lembaga pemerintahan Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.61.

**Tabel 2. 61 Jumlah Perempuan pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

<b>No</b>	<b>Jumlah Perempuan pada Lembaga pemerintahan</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Eksekutif					



a. Eselon II	2	2	2	2	1
b. Eselon III	17	17	17	24	13
c. Eselon IV	175	175	175	193	217
d. Eselon V	14	14	14	3	8
e. Staf	1.398	1.398	1.398	1.112	282
f. Guru	2.151	2.151	2.151	2.250	1.551
g. Total jumlah pegawai	3.759	3.759	3.759	3.584	1.971
2 Legislatif/Total Anggota DPRD Kab. Bima	4	6	6	3	3
3 KPU Kab. Bima	2	2	2	2	2

**Sumber: BPS Kab. Bima, Tahun 2020.**

Kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Bima tahun 2020 adalah sebanyak 108 kasus, yang terbanyak adalah pelecehan sebanyak 49 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Bima Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.62.

**Tabel 2. 62 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Bima tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kasus			Jumlah
		KDRT	Penganiayaan	Pelecehan	
1	Madapangga	2	1	5	8
2	Bolo	0	1	4	5
3	Donggo	2	1	3	6
4	Sanggar	3	5	6	14
5	Tambora	0	0	0	0
6	Monta	3	2	2	7
7	Parado	1	3	5	9
8	Woha	0	0	2	2
9	Palibelo	0	2	2	4
10	Belo	4	2	2	8
11	Wera	4	0	2	6
12	Ambalawi	2	4	3	9
13	Sape	0	0	4	4
14	Lambu	3	0	0	3
15	Wawo	0	3	3	6
16	Lambitu	4	0	1	5
17	Soromandi	0	3	3	6
18	Langgudu	0	2	2	4
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>106</b>

**Sumber: Dinas DP3AP2KB Kab. Bima, Tahun 2021.**





### 3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Tingkat pemenuhan konsumsi pangan masyarakat merupakan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Bima yang diukur berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Selama ini upaya penganeekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor. namun masih ditemui berbagai masalah. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan adalah : (1) belum tercapainya skor mutu beragam dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, sosial dan daya terima, (5) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Masih adanya kasus keracunan yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang mutu dan keamanan pangan, sehingga perlu adanya peningkatan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dapat dikurangi melalui pengembangan jejaring keamanan pangan, meningkatkan pengetahuan petani, kelompok tani dan pedagang dalam penanganan mutu pangan di masyarakat adanya hasil pertanian yang bersertifikat dan berlabel, diketahuinya kandungan residu produk pangan segar, sayuran dan buah-buahan serta meningkatnya kewaspadaan keamanan pangan.

**Tabel 2. 63 Skor Pola Pangan Harapan 2016-2022 Kabupaten Bima**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor Maks	2016	2017	2018	2019	2020
			Skor PPH	Skor PPH	Skor PPH	Skor PPH	Skor PPH
1	Padi-padian	25	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	2.5	0.7	0.2	1.1	0.3	0.3
3	Pangan Hewani	24	14.9	24	18.4	24	24
4	Minyak dan Lemak	5	3.6	4	5	4.1	3.8
5	Buah/biji berminyak	1	0.5	2.9	0.3	0.6	0.4
6	Kacang-kacangan	10	6.3	5.1	10	3.4	8.0
7	Gula	2.5	1	1.3	0.6	1.5	1.4
8	Sayuran dan buah	30	19.8	19.1	20.7	22.3	18.2
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>71.79</b>	<b>79.56</b>	<b>80.99</b>	<b>81.2</b>	<b>81.1</b>

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bima.*

### 4. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil saat ini dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pelaksana admin dukcapil, serta terbatasnya infrastruktur



pendukung/fasilitas IT sehingga data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia belum terintegrasi dalam suatu sistem data base yang mudah diakses untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya dan komitmen meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Tahun 2017 telah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu terhadap aparatur pengelola SIAK dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sosialisasi tentang penerapan elektornik KTP (E-KTP). Dengan adanya perubahan kewenangan pencetakan E-KTP yang semula dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sekarang telah dialihkan ke Pemerintah Daerah, maka diharapkan pada Tahun 2020 semua penduduk wajib KTP di Kabupaten Bima dapat menggunakan E-KTP.

Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.64.

**Tabel 2. 64 Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KTP	346.716	362.350	364.164	382.700	336.991
2	Akta kelahiran	282.836	163.937	342.417	349.668	532.110
3	Akta Pengakuan dan Pengesahan anak	13	-	-	-	-
4	Akta Kematian	103	115	8.12%	200	
5	Kartu Keluarga	145.613	116.101	94.54%	159.982	110.861
6	Jumlah penduduk wajib KTP	380.736	401.542	385.337	397.414	381.056
7	(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	91.59%	90.23%	96.8%	96.30%	88,44%
10	Akte Kelahiran Gratis (usia 0 s/d 60 hr)	145.552	-	93.18%	93.22	-

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2020.**

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2016 – 2019 rasio jumlah penduduk yang memiliki KTP terus mengalami kenaikan yaitu dari 91,59% menjadi 96,30%, namun ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 88,44%. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran juga semakin meningkat, tahun 2016



jumlah akte kelahiran sebanyak 282.836 lembar naik menjadi 532.110 lembar. Kenaikan ini disebabkan adanya penerapan program pemerintah dengan sistim jemput bola atau KTP keliling dan pembuatan akte kelahiran yang bekerjasama dengan Bidan Desa.

## **5. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Dokumen ini menegaskan bahwa perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan yang dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf dan mutu hidup masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan mata rantai yang tak terputus. Untuk dapat memutus rantai kemiskinan diperlukan intervensi guna memberikan kekuatan kepada kelompok miskin agar dapat keluar dari kemiskinannya. Hal ini mendesak dilakukan mengingat kemiskinan sangat potensial menimbulkan efek bola salju, rendahnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunnya ketertiban umum, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sampai kepada menurunnya kualitas generasi mendatang. Kondisi tiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang spesifik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama pembangunan di Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan Review Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD Kabupaten Bima disusun pertama kali oleh TKPKD pada Tahun 2006. Mengingat kondisi masyarakat miskin yang semakin kronis dan terjerat krisis akibat harga minyak dunia dan data kemiskinan yang dinamis, maka dipandang perlu dilakukan Review SPKD Tahun 2016 - 2020.

Strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.



Kemiskinan di Kabupaten Bima masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Statistik pada Tahun 2020 penduduk miskin Kabupaten Bima sebanyak 71.320 jiwa atau 14.49% dari jumlah penduduk sebanyak 493.198 jiwa, menurun sebanyak 1.595 jiwa atau 0.82% dari Tahun 2016 penduduk miskin sebanyak 72.360 jiwa atau 15.31% dari jumlah penduduk sebanyak 473.890 jiwa. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun jumlah PKK Kabupaten Bima tahun 2020 adalah 210 unit terdiri dari PKK tingkat kabupaten sebanyak 1 unit, PKK tingkat kecamatan 18 unit dan PKK tingkat desa sebanyak 191 desa.

Posyandu Aktif Posyandu adalah suatu wadah pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk



pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu, yaitu: 1). Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) hamil, melahirkan, dan nifas, 2). Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), 3). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera, 4). Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Adapun jumlah posyandu Kabupaten Bima Tahun 2020 adalah 661 unit yang tersebar diseluruh desa di Kabupaten Bima.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya.

BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa. Karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa dari berbagai elemen.

Jumlah BUMDes yang sudah terbentuk di Kabupaten Bima sampai tahun 2020 adalah sebanyak 189 unit, dengan jumlah BUMDes aktif sebanyak 156 unit sedangkan 35 unit tidak aktif.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal mengurangi angka kemiskinan dapat tergambar pada table jumlah desa jumlah desa mandiri, berkembang, dan maju berikut :





**Tabel 2. 65 Jumlah Desa Mandiri, Berkembang, Maju, Dan Tertinggal**

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Desa Mandiri	Jumlah	1	1
2	Desa Maju	Jumlah	22	24
3	Desa Berkembang	Jumlah	97	99
4	Desa Tertinggal	Jumlah	69	65
5	Desa Sangat Tertinggal	Jumlah	2	2
6	Persentase BUMDes Aktif	%		85
7	Persentase Realisasi Dana Desa	%	100	100
8	Jumlah Desa yang mendapatkan Dana Insentif Desa (DINDA)	Jumlah	20	20

**Sumber: Dinas DPMDDES Kab.Bima**

## 6. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pencapaian Peserta KB Baru (PB) di Kabupaten Bima dari tahun ke tahun terus meningkat, tercatat pada Tahun 2016 sebanyak 8.690 PB dan pada Tahun 2019 menjadi 7.932 Peserta KB Baru. Begitu juga halnya dengan peserta KB aktif dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 jumlah peserta KB Aktif (PA) mencapai 77.726 PA, meningkat menjadi 77.777 PA pada Tahun 2019.

Dari jenis alat kontrasepsi yang digunakan meliputi IUD, MOP/MOW, Implant, Suntikan, Pil dan Kondom/OVG. Alat kontrasepsi suntikan paling banyak diminati oleh peserta KB yang mencapai lebih dari 50% dari total peserta KB setiap tahunnya. Capaian peserta KB baru Kabupaten Bima tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.66.

**Tabel 2. 66 Pencapaian peserta KB baru Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2019**

No	Indikator Peserta KB Baru	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2022
1	Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) pada peserta KB baru	10.338	10.338	47%	7.815	8.843
2	Peserta KB baru atau realisasi PPM	8.690	8.690	46%	7.932	
3	% Peserta KB Baru thd PPM	83,65	83,65	100	101,5	73.346

**Peserta KB Aktif**



No	Indikator Peserta KB Baru	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2022
1	Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) pada peserta KB Aktif	79.279	79.279	79.279	79,96	
2	Pasangan Usia Subur	96.993	96.993	99.033	96.700	
3	Peserta KB Aktif	77.726	77.726	79.223	77.777	81.381
4	% Peserta KB Aktif thd PPM	-	-	-	97,27	110.95
5	% Peserta KB Aktif thd PUS	80,14	80,14	79.99	80,43	81.50
6	Peserta Program KB Pria	1890	1890	-	1.658	1.518
7	Jenis Kontrasepsi yang digunakan					
	- IUD	12.883	12.883	6.452	10.242	10.710
	- MOP/MOW	1.153	1.153	1.095	1.440	1.416
	- Implant	20.735	20.735	10.899	22.754	24.123
	- Suntikan	38.002	38.002	18.985	39.097	40.843
	- Pil	3.055	3.055	1.568	2.810	2.968
	- Kondom / OVG	1.636	1.636	1.011	1.434	1.321

Sumber: BP3AP2KB Kab. Bima, Tahun 2020.

## 7. Urusan Wajib Perhubungan

Indikator untuk mengukur kinerja atas urusan wajib perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bima hingga Tahun 2020 terdiri dari terminal angkutan darat sebanyak 7 unit, pelabuhan laut sebanyak 1 unit dan bandar udara sebanyak 1 unit, dan angkutan penyebrangan rakyat sebanyak 86 unit. Untuk lebih jelasnya jenis sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.67.

**Tabel 2. 67 Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal angkutan darat	7	7	7	7	7
2	Pelabuhan laut	1	1	1	1	1
3	Bandar Udara	1	1	1	1	1



No	Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kendaraan angkutan umum					
4	a. Bis trayek dalam kabupaten	234	230	225	225	155
	b. Bis AKAP	24	24	24	24	1
	c. Truk	1.344	1.234	1.230	1.233	2.300
	d. Bemo	40	36	36	37	25
5	Angkutan penyeberangan rakyat	79	79	79	86	86

**Sumber:** Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Bima, Tahun 2020.

## 8. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Gambaran tentang jumlah media komunikasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima adalah media cetak lokal sebanyak 17 media, media elektronik sebanyak 2 lokal, institusi pers sebanyak 1 buah dan wartawan sebanyak 109 orang.

Upaya pembangunan informasi yang dilakukan oleh Pemkab Bima pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut :

- Tercapainya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- Membangun kesadaran demokrasi dalam pemerintahan;
- Meningkatkan respon dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Bima adalah:

- 1) *Radio Wireless Acces Point 1* berfungsi baik untuk mengirim frekuensi layanan internet dan Komunikasi Data ke Dinas Dikpora, BP4K dan BKD;
- 2) *Radio Wireless Acces Point 2* berfungsi baik untuk mengirim frekuensi layanan internet dan Komunikasi Data ke Setda (Bagian Humas Protokol, Bagian Keuangan dan Bagian Umum);
- 3) *Radio Wireless Station* pada Dinas Dikpora, BP4K, BKD dan Setda berfungsi baik menerima frekuensi layanan internet dan komunikasi data;



- 4) *Radio Wireless Hotspot* berfungsi baik untuk melayani internet gratis di Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Dikpora, BP4K dan SETDA;
- 5) *Jaringan Kabel UTP* berfungsi baik sebagai media layanan internet dan komunikasi data secara internal pada Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Dikpora, BP4K, BKD dan Setda (Bagian Humas Protokol, Bagian Keuangan dan Bagian Umum);
- 6) *Tower* sebagai tempat pemasangan Radio Wireless di Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Dikpora, BP4K dan SEDA dalam kondisi baik;
- 7) *Komputer 12 unit* pada Media Center berfungsi baik untuk akses internet gratis bagi seluruh pegawai dan masyarakat;
- 8) *Infrastruktur JARKOMDA* (Jaringan Komunikasi Daerah) sebagai cikal bakal jaringan komunikasi data sampai ke tingkat kecamatan dan desa telah mengintegrasikan 5 SKPD pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2019 akan bertambah 20 SKPD serta bisa menghubungkan seluruh SKPD sampai ke tingkat kecamatan.

## 9. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bima Tahun 2020 diarahkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat secara nyata sehingga dapat memperkuat ketahanan daerah Kabupaten Bima disegala bidang. Pembangunan disektor Koperasi dan UKM pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dengan perkembangan jumlah koperasi dan jumlah anggota yang dapat dilihat pada tabel 2.68.

**Tabel 2. 68 Jumlah Koperasi Tahun 2016 - 2020**

No	Jumlah koperasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Koperasi	279	273	278	288	261
1	a. Koperasi Aktif	218	222	238	258	211
	b. Koperasi tidak aktif	61	51	50	30	50
2	Jumlah anggota	49.869	48.828	49.346	49.361	49.137
3	RAT dengan jumlah	123	139	138	151	84
4	Jumlah pengelola	1.958	1.895	1.936	1.976	2.010

**Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bima, Tahun 2020.**



Secara komulatif jumlah koperasi Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2016 jumlah koperasi sebanyak 279 unit dengan koperasi aktif sebanyak 218 unit, hingga Tahun 2020 jumlah koperasi dan koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 261 unit dengan koperasi aktif sebanyak 211 unit. Peningkatan ini didukung oleh pembinaan kelembagaan koperasi yang semakin baik yang ditunjukkan dengan angka koperasi aktif sebesar 89% dan juga pada sisi lain bahwa perkembangan perkoperasian didukung dengan penyediaan bantuan dari pemerintah, selain itu semakin meningkatnya kesadaran anggota dan masyarakat akan manfaat dan eksistensi mereka dalam berkoperasi. Untuk terwujudnya koperasi dan UKM yang aktif dan berkualitas telah dilakukan upaya :

1. Melakukan bimbingan teknis terhadap berbagai aspek, baik aspek organisasi, manajemen/tata laksana dan usaha UKM;
2. Fasilitas bagi perkuatan modal KUKM;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan organisasi dan usaha koperasi melalui kegiatan monitoring serta penilaian klasifikasi dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
4. Melakukan koordinasi dengan berbagai dinas instansi teknis yang sangat terkait dalam upaya pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Struktur permodalan koperasi dan UKM terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu modal sendiri dan modal luar. Nilai modal koperasi sendiri lebih besar nilainya dari modal luar. Total nilai aset Koperasi Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 162.107.000,- tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 220.406.570,-. Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur permodalan koperasi dan PKM Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.69.

**Tabel 2. 69 Struktur Permodalan Koperasi dan PKM Tahun 2016-2020**

No	Jenis Modal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Modal sendiri (dalam ribu)	113.616	127.395.103	139.891.221	143.800.841	149.918.297
2	Modal Luar (dalam ribu)	48.527	47.920.635	47.034.173	33.493.254	31.440.966
3	Asset (dalam ribu)	162.107	192.815.043	199.478.166	214.329.249	220.406.570

**Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, Tahun 2020.**





## 10. Urusan Wajib Penanaman Modal

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2019 salah satunya adalah peranan investasi. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Kabupaten Bima masih rendah.

Dalam pengertian makro ekonomi, investasi secara fisik adalah akumulasi modal yang besarnya dapat dicerminkan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Investasi atau PMTB berasal dari berbagai instansi baik pemerintah, swasta (Penanaman Modal Asing, PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN) maupun rumah tangga (masyarakat).

Adapun perkembangan kegiatan investasi menurut sektor berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada table 2.70.

**Tabel 2. 70 Perkembangan PMTB Kabupaten Bima  
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2019\* (Rp. Ribu)**

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian	55.900.000,00	120.876,80	3.625.669, 14	498.287,20
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	60.580,00	3.674.200,00	5.746.451,00	0,00
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Perdagangan Hotel & Restoran	260.000,00	21.094.620,00	5.480.000,00	3.280.000,00
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Jasa – Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PMTB Kab. bima</b>		<b>376.480,00</b>	<b>24.889.696,80</b>	<b>14.852.120,14</b>	<b>7.150.242,15</b>

**Sumber: DMPTSP Kab. Bima, Tahun 2021.**

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Bima dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 71 Perkembangan Rencana Investasi Kabupaten Bima Tahun 2020**

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA/ KBLI	INVESTASI		Ket
			RENCANA	REALISASI	
1.	PT. Bangun Adi Karya	▪ Real estate yang dimiliki sendiri atau sewa	6,750,000,000	6,750,000,000	Aktif, tahap operasi
2.	PT. Bima Pondok Indah	▪ Real estate yang dimiliki sendiri atau sewa	500,000,000	500,000,000	Aktif, tahap operasi
3.	PT. Trimitra Woha Indonesia	▪ Kontruksi gedung tempat tinggal	6,500,000,000	6,500,000,000	Aktif, tahap operasi
4.	CV. Nusra Barat	▪ Perumahan	32,187,000,000	32,187,000,000	Aktif, tahap operasi
5.	PT. Pesona Kalaki Mantika	▪ Jasa Perhotelan	11,665,000,000	11,665,000,000	Aktif, tahap operasi
6.	Yayasan Lembaga Darul Hikmah	▪ Hotel Melati	1,160,000,000	1,160,000,000	Aktif, tahap operasi
7.	PT.Santosa Utama Lestari	▪ Pengeringan Jagung	64,483,175,000	64,483,175,000	Aktif, tahap operasi
8.	PT. Bima Timur Raya	▪ SPBU Modula	1,000,000,000	-	Proses Izin
<b>Total</b>			124,245,175,600		

*Sumber: DMPTSP Kab. Bima, Tahun 2021.*

## 11. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan olahraga di Kabupaten Bima, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang penting antara lain belum adanya kesinambungan dan sinergitas pola pembibitan. Pembinaan dan pemanduan atlit olahraga, lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Kabupaten Bima telah melaksanakan pembinaan terhadap klub olahraga pelajar serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan Nasional. Pembinaan olah raga selama ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, peningkatan



kemampuan atlit, pelatih. dan pembina olahraga, dan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup menggembirakan baik di tingkat regional maupun nasional. tetapi progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga serta sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Bima. meskipun belum memiliki sarana dan prasana yang belum ideal sesuai dengan standar nasional bahkan internasional, tetapi sarana dan prasarana olah raga yang ada sudah cukup membantu dalam upaya kemampuan atlit, pelatih. dan pembina olahraga. Hingga Tahun 2019 jumlah fasilitas olah raga baik untuk Bola Voli, Sepak Bola, Renang. Bola Basket, Bulu Tangkis, dan lapangan lainnya sebanyak 239 unit yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima.

## **12. Urusan Wajib Kebudayaan**

Keberagaman budaya di Kabupaten Bima, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pada pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus mampu sebagai pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di Kabupaten Bima.

Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain adalah pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat ditingkat kabupaten mengirimkan duta seni pelajar dan parade seni budaya ditingkat nasional di anjungan NTB TMII Jakarta serta penyelenggaraan pekan seni pelajar ditingkat SD, SLTP dan SLTA maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah ditingkat pelajar.

Pelestarian benda cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kabupaten Bima telah dilaksanakan melalui kegiatan konservasi dan penataan terhadap benda-benda cagar budaya dan bangunan bersejarah. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah cagar budaya dan bangunan bersejarah baik yang bergerak maupun tidak bergerak terdokumentasi di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bima seperti Kawasan cagar budaya di Kabupaten Bima terdapat pada :

- a. Kecamatan Wawo (Megalitik Lesung Batu, Wadu Sigi, Kompleks rumah adat (Lengge). Pesanggarahan Oi Wobo;
- b. Kecamatan Lambitu (Perkampungan Tradisional Sambori).
- c. Kecamatan Langgudu (Bekas tapak kaki);



- d. Kecamatan Lambu (sumur tembaga);
- e. Kecamatan Wera (Nakara Perunggu, Makam Rato Wara Bewi, Wadu Nocu, Gua Sangiang);
- f. Kecamatan Donggo (perkampungan tradisional Mbawa, Makam kuno, Wadu Tunti, Uma Leme, Makam La Ncahu, Makam La Hil, Kompleks Dana Mbojo, Wadu Ntori, Pesanggrahan, Situs Wadu Kopa);
- g. Kecamatan Soromandi (Kompleks Wadu Pa'a);
- h. Kecamatan Sape (Wadu Tunti, Temba Romba, bekas tapak kaki, Wadu Sura, Makam kuno);
- i. Kecamatan Sanggar (Situs Bukit Kaniki, Situs Bukit Henca, Makam Kuno, Situs Lawangkuning, bekas tapak kaki, Situs Gua La Hami, Rasa Mantoi, Wadu Nocu, Makam Raja Sanggar, Gua Abarahi, Sarkopagus);
- j. Kecamatan Madapangga (Bekas candi);
- k. Kecamatan Bolo (Wadu Genda);
- l. Kecamatan Monta (Gua Doro Parewa, Makam Kuno);
- m. Kecamatan Parado (Arca Gajah);
- n. Kecamatan Belo (Nekara Batu, Sarkofagus, Tapak Kaki);
- o. Kecamatan Woha (Wadu Bara Sila, Temba Ndori).

Disamping itu, Kabupaten Bima juga memiliki kelompok-kelompok kesenian rakyat yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

### **13. Urusan Wajib Perpustakaan**

Pengembangan budaya baca masyarakat serta memotivasi pendirian perpustakaan desa, dilakukan dengan memberikan pembinaan dan menyalurkan buku bantuan kepada perpustakaan desa dan Kecamatan.

Perpustakaan memiliki peranan yang strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan, Informasi, studi, teknologi, seni, rekreasi dan juga berfungsi sebagai bagian dari pemberdayaan potensi masyarakat desa/kelurahan. Sementara sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip yang telah tersedia di Kabupaten Bima hingga Tahun 2019 adalah terdiri dari perpustakaan daerah sebanyak 1 unit, Pelayanan Perpustakaan Masyarakat (UPPM) 3 unit, perpustakaan sekolah 185 unit dan perpustakaan keliling sejumlah 2 unit, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 191 unit. Dari angka tersebut rasio jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk adalah 4.415 orang/perpustakaan. Jumlah UPPM dan perpustakaan



daerah diperkirakan akan terus bertambah pada Tahun 2019 karena masih ada 15 kecamatan yang belum memiliki UPPM serta masih banyaknya sekolah baik tingkat SD maupun SMP yang belum memiliki perpustakaan sekolah.

#### **14. Urusan Wajib Kearsipan**

Penyelenggaraan pengelolaan arsip dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. Oleh karenanya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen-kearsipan menjadi suatu hal yang penting. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan dilaksanakan melalui bimbingan teknis, meliputi bintek pengelolaan arsip dinamis bagi pengelolaan arsip di SKPD pada setiap tahun. Dengan semakin banyaknya arsip yang telah dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan beberapa SKPD yang akan menyerahkan arsip inaktifnya, maka diperlukan penambahan sarana prasarana kearsipan.

Jumlah pengunjung perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2019 adalah sejumlah 12.747 dan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 8.268 judul sedangkan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 19.009 exp.

#### **2.3.3 Fokus Urusan Pilihan**

##### **1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Potensi sumber daya laut di Kabupaten Bima meliputi lahan budidaya seluas 6.814.9 Ha, terdiri dari budidaya perairan umum seluas 1.008 Ha (baru dimanfaatkan 0.01 Ha atau 0.001%) dan perairan payau/tambak seluas 5.748 Ha (baru dimanfaatkan 1.585.2 Ha atau 27%), perairan tawar seluas 58.90 Ha (baru dimanfaatkan 11.16 Ha atau 18.95%, dan serta perairan laut untuk perikanan tangkap seluas 322.904 Ha (baru dimanfaatkan 284.704 Ha atau 88.17%).

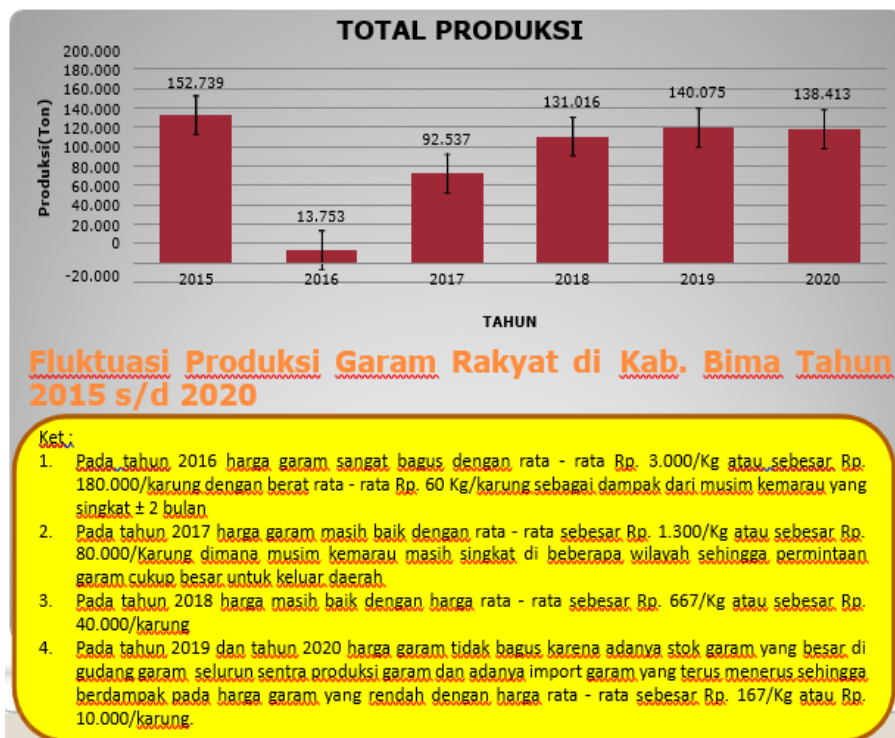
Produksi ikan basah hasil tangkapan di perairan laut Tahun 2019 sebesar 55.772,70 Ton dan untuk budidaya laut 211.592,00 Ton, budidaya air tawar 179, 50 Ton dan budidaya air payau 9.192,00 Ton.

Budidaya kerang mutiara dilakukan oleh 6 (enam) perusahaan dengan luas areal 2.527 Ha dengan total produksi sebesar 150 Kg. Namun demikian masih tersedia lahan potensial untuk pengembangan budidaya mutiara seluas 2.904,5 Ha.

Luas Potensi lahan budidaya garam di Kabupaten Bima lebih kurang 4.675 Ha. Dari luas lahan tersebut, yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 1.778,02 Ha



dengan produksi rata-rata 120 Ton/Ha dan jumlah petani sekitar 7.000 orang. Sampai saat ini dari rata-rata produksi garam Kabupaten Bima yang mencapai 111.000 Ton/Tahun, baru sekitar 2.000 - 3.000 Ton/tahun yang mampu diserap oleh industri pengolahan garam. Data selengkapnya bisa dilihat di grafik 2.10 dan tabel 2.72.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima, Tahun 2020

Grafik 2. 10 Total Produksi Garam Kabupaten Bima

Tabel 2. 72 Potensi Pemanfaatan Lahan Pugar di Kabupaten Bima

TARGET & CAPAIAN PROGRAM PUGaR KAB. BIMA s/d 2020							
No	Tahun	Integrasi Lahan PUGaR (Ha)	Total Produksi Garam (ton)	Realisasi Produksi Garam (%)			Harga Garam di Pinggir Jalan Raya (Rp./sak)
				KP 1	KP 2	KP 3	
1	2015	0	152.739	0 %	60 %	40 %	5.000 s/d 12.000
2	2016	5	13.753	1 %	70 %	29 %	70.000 s/d 180.000
3	2017	20	92.537	5 %	70 %	25 %	30.000 s/d 80.000
4	2018	184	139.102	15 %	80 %	5 %	10.000 s/d 40.000
5	2019	207	140.075	17 %	79 %	4 %	3.000 s/d 15.000
6	2020	17	138.413	18 %	79 %	3 %	3.000 s/d 15.000
Jumlah		433					

**Ket:**

1. Peningkatan kuantitas produksi garam setelah adanya penerapan integrasi lahan sebesar 120 Ton/Ha/Tahun dibandingkan dengan menggunakan sistem konvensional dengan produksi sebesar 80 ton/Ha/Tahun
2. Adapun kualitas garam yang dihasilkan untuk lahan integrasi yaitu K1 dan K2 sedangkan untuk sisem konvensional masih dengan kualitas K3

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima, Tahun 2020.



Sementara itu potensi pengembangan budidaya di Kabupaten Bima lainnya yaitu budidaya rumput laut dengan potensi areal pengembangan seluas 2.128 Ha, namun yang telah dimanfaatkan 268 Ha dengan capaian produksi 147,8 Ton rumput laut kering. Dalam hal ini juga terdapat potensi budidaya kepiting dengan areal pengembangan seluas 3.8 Ha, budidaya teripang dengan potensi budidaya seluas 3.8 Ha dan budidaya mutiara dengan potensi areal pengembangan seluas 2.904,5 Ha.

## **2. Urusan Pilihan Pariwisata**

Perkembangan kondisi pariwisata di Kabupaten Bima tahun menunjukkan gejala positif yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, terutama wisatawan lokal. Pada Tahun 2016 kunjungan wisata sebanyak 77.702 wisatawan yang terdiri dari domestic sebanyak 77.192 wisatawan dan mancanegara sebanyak 510 wisatawan dan terus meningkat hingga mencapai 92.335 wisatawan pada tahun 2019 namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 45.149 wisatawan, penurunan ini terjadi dampak dari adanya COVID 19. Berdasarkan data Dinas pariwisata, perkembangan kondisi kunjungan wisata di Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada table 2.73.

**Tabel 2. 73 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kab. Bima**

Wisatawan:	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Domestik	77.192	87.301	90.668	90.735	45.075
Mancanegara	510	490	1.598	1.600	74
<b>Jumlah</b>	<b>77.702</b>	<b>87.791</b>	<b>92.266</b>	<b>92.335</b>	<b>45.149</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Bima, Tahun 2020.*

## **3. Urusan Pilihan Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bima, dimana Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Bima adalah petani. Selain itu sektor ini merupakan sektor yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bima, karena merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Urusan pilihan pertanian terbagi dalam pertanian tanaman pangan dan perkebunan.



#### **a. Pertanian Tanaman Pangan**

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bima terdiri Padi dan Palawija. Produksi tanaman padi Kabupaten Bima kurun waktu 2016 – 2020 mengalami penurunan, dari 389.598 ton di tahun 2016 dengan produktivitas 88.06 kw/Ha, menjadi 315.498 ton di tahun 2020 dengan 46,73 Kw/Ha. Sedangkan untuk tanaman palawija, komoditi jagung merupakan komoditi unggulan dimana produksinya dari tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan yaitu dari 193.344 ton pada tahun 2016 menjadi 403.399 ton pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya tentang produksi dan produksi padi dan palawija Kabupaten Bima tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.74.



**Tabel 2. 74 Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Komoditi	Tahun									
		Produksi (Ton)					Produktivitas (kw/ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	389.598	353.661	362.230	376.786	315.498	88.06	59,17	44,33	45,66	46,73
2	Jagung	193.344	299.442	443.257	504.877	403.399	66.15	68,05	68,05	65,61	65,41
3	Kedelai	38.363	25.945	22.748	5.401	3.007	13.19	14,22	14,19	9,80	9,80
4	Kacang tanah	18.216	16.125	13.371	13.373	12.016	17.05	11,80	13,69	13,373	10,89
5	Kacang hijau	3.811	2.174	818	288	815	17.17	17,44	17,47	6,12	6,13
6	Ubi kayu	6.679	2.701	-	1.601	3.340	190.50	153,00		184,53	184,53
7	Ubi jalar	421	113	252	-	1.767	74.86	129,38	129.38	-	132,74

**Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bima, Tahun 2021.**

## b. Perkebunan

Komoditi perkebunan Kabupaten Bima adalah jambu mete, kelapa, kopi dan kemiri. Komoditi perkebunan Kabupaten Bima dari tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan rata-rata lebih dari 50%. Hal ini disebabkan adanya pergeseran penggunaan lahan perkebunan terutama kemiri menjadi tanaman jagung. Tahun 2016 jumlah komoditi kemiri Kabupaten Bima adalah sebesar 2.051,04 ton, turun sebesar 53,93% di tahun 2020 menjadi 944,87 ton. Begitu juga dengan komoditi lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.75.

**Tabel 2. 75 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No.	Jenis Komoditi	Tahun (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jambu Mete	2.876,12	1.875,17	210,5	215	1.779,29
2.	Kelapa	1.810,14	911,72	34,8	35,7	844,04
3.	Kopi	455,72	337,94	278	225	290,84
4.	Kemiri	2.051,04	943,26	215,6	-	944,87
Jumlah		7.193,02	4.068,09	738,90	475,70	3.859,04

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Bima, Tahun 2021.*

## c. Peternakan

Luas wilayah Kabupaten Bima yang berpotensi untuk pemanfaatan peternakan sekitar 198.523 Ha atau sebesar 45.23% dari luas Kabupaten Bima, dengan daya tampung sebanyak 452.497 animal unit. Akan tetapi jumlah ternak yang ada pada saat ini baru mencapai 204.073 animal unit atau sebesar 54% dari daya tampung lahan. Untuk itu masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi peternakan.

Populasi ternak di Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 kenunjukan peningkatan baik dari populasi ternak besar maupun ternak unggas. Untuk ternak besar di dominasi oleh kambing dengan pupulasi di tahun 2020 sebesar 238.131 ekor diikuti oleh ternak sapi dengan jumlah produksi sebesar 213.873 ekor, sedangkan populasi terkecil adala kuda dengan populasi 3.447 ekor. Ternak unggas di dominasi oleh ayam ras dengan populasi di tahun 2020 sebesar 2.383.241 ekor. Perkembangan populasi ternak dan unggas di Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.76.





**Tabel 2. 76 Perkembangan Populasi Ternak Besar dan Unggas Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020						
No.	Jenis Ternak (ekor)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ternak Besar						
1	Sapi	177.701	178.368	195.921	204.722	213.873
2	Kerbau	14.093	11.694	10.806	10.491	10.597
3	Kuda	5.635	2.706	3.474	3.139	3.447
4	Kambing	211.617	217.612	224.772	229.271	238.131
5	Domba	11.264	1.457	9.497	8.553	8.724
Unggas						
1	Ayam Ras	1.016.350	1.277.275	1.946.229	2.213.800	2.383.241
2	Ayam Kampung	526.150	482.738	540.505	569.531	613.332
3	Itik	28.755	22.168	30.542	30.497	36.410

**Sumber: Dinas Peternakan Kab. Bima, Tahun 2020.**

Produksi daging Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 2.484 Ton Tahun 2016, menjadi 3.592 Ton di Tahun 2020. Namun produksi daging ternak besar mengalami penurunan sebesar 127 Ton, dari 755 Ton pada tahun 2016 menjadi 583 Ton Tahun 2020.

Produksi telur Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah produksi telur Kabupaten Bima sebesar 320 Ton, naik menjadi 385 Ton tahun 2020. Untuk perkembangan produksi daging dan telur Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.77.

**Tabel 2. 77 Perkembangan produksi daging dan telur Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

No.	Produksi	Tahun (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Daging						
1	Sapi	588	399	335	402	474
2	Kerbau	61	48	24	27	32
3	Kambing	29	32	35	42	44
4	Domba	1	2	2	2	1
5	Kuda	76	45	28	33	32
Sub Jumlah		755	526	424	506	583
1	Ayam Ras	743	1.459	1.422	1.621	1.742
2	Ayam Bukan Ras	546	501	561	591	636
3	Itik	26	20	27	27	33



No.	Produksi	Tahun (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.315</b>	<b>1.980</b>	<b>2.010</b>	<b>2.239</b>	<b>2.411</b>
1	Jeroan Semua jenis	414	505	479	544	598
	<b>Total Prod Daging</b>	<b>2.484</b>	<b>3.011</b>	<b>2.913</b>	<b>3.289</b>	<b>3.592</b>
	<b>Telur</b>					
1	Telur Ayam Ras	0	0	0	0	0
2	Telur Ayam Kampung	199	182	204	215	232
3	Telur Itik	121	93	129	128	153
	<b>Total prod Telur</b>	<b>320</b>	<b>275</b>	<b>333</b>	<b>343</b>	<b>385</b>

*Sumber: Dinas Peternak Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bima, Tahun 2020.*

Adapun penyebaran hewan per kecamatan di Kabupaten Bima tahu 2020 dapat dilihat pada tabel 2.78.

**Tabel 2. 78 Populasi Ternak per Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2020**

No	Kecamatan	Unggas			Ternak besar				
		Ayam pedaging	Ayam buras	Itik	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1	Monta	610.651	56.887	3.584	13.633	180	159	13.463	671
2	Parado	-	27.661	4.848	7.412	435	85	5.544	108
3	Bolo	666.700	49.704	7.280	11.903	84	288	15.603	211
4	Madapangga	311.115	25.215	1.118	12.198	402	253	9.750	266
5	Woha	37.275	41.142	3.948	8.226	229	268	25.293	848
6	Belo	2.100	11.173	898	3.864	96	105	15.534	659
7	Palibelo	37.905	20.249	3.985	5.722	103	190	9.954	914
8	Wawo	94.920	83.557	924	14.666	1.402	280	19.754	686
9	Langgudu	1.733	34.496	1.745	15.052	995	119	18.322	448
10	Lambitu	-	11.274	-	4.398	505	93	2.922	56
11	Sape	368.708	36.439	4.381	10.714	351	468	7.558	1.383
12	Lambu	1.523	37.134	66	18.462	507	146	18.563	741
13	Wera	64.500	71.110	2.869	21.679	3.131	197	28.281	314
14	Ambalawi	3.570	41.481	41	12.447	505	32	12.415	449
15	Donggo	45.990	11.564	-	10.924	187	283	5.229	358
16	Soromandi	130.830	27.258	144	12.615	479	147	13.969	264
17	Sanggar	5.723	15.720	253	18.323	809	225	8.778	285
18	Tambora	-	11.269	326	11.636	197	110	7.200	63
	<b>Jumlah</b>	<b>2.383.241</b>	<b>613.332</b>	<b>36.410</b>	<b>213.873</b>	<b>10.597</b>	<b>3.447</b>	<b>238.131</b>	<b>8.724</b>

*Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima 2021*



Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani peternak, pemerintah Kabupaten Bima memberikan bantuan ternak. Bantuan ternak yang diberikan dari tahun 2016 – 2020 terdiri berbagai jenis ternak dan unggas dengan total bantuan sebesar 42.202 ekor. Untuk lebih jelasnya jumlah bantuan ternak pemerintah Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.79.

**Tabel 2. 79 Jumlah Bantuan Ternak Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sapi	215	278	117	255	24	889
2	Kerbau	0	0	0	0	0	0
3	Kambing	540	348	300	356	85	1.629
4	Kuda	28	6	12	12	0	58
5	Ayam Buras	1.830	18.148	1.080	7.700	10.868	39.629
6	Entok	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.613</b>	<b>18.780</b>	<b>1.509</b>	<b>8.323</b>	<b>10.977</b>	<b>42.202</b>

*Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bima, Tahun 2021.*

#### **4. Urusan Pilihan Perdagangan**

Jumlah usaha perdagangan dalam skala besar memang masih sangat kecil. tetapi sangat potensial untuk terus berkembang karena didukung oleh ketersediaan potensi wilayah dan potensi-potensi lainnya. Jenis komoditi yang umumnya diperdagangkan di sejumlah pasar lokal. regional maupun nasional meliputi komoditi pertanian. perkebunan. kehutanan. perikanan. peternakan. dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

##### **a. Perkembangan unit usaha di Kabupaten Bima**

Adapun pembangunan sektor industri di Kabupaten Bima diarahkan pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Program Penataan Struktur Industri. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri. Adapaun perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai investasi sektor industri Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.80.

**Tabel 2. 80 Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Sektor Industri Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Jumlah/Nilai pada				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan	5.900	5.925	5.959	6.036	9.477
2	Jumlah Tenaga Kerja	14.586	14.661	14.754	14.928	20.848
3	Nilai Investasi (Ribu)	59.219.321	60.272.617	61.809.003	63.447.853	751.378.200

*Sumber: Disperindag Kab. Bima, Tahun 2021***b. Perkembangan SIUP yang diterbitkan di Kabupaten Bima**

Perkembangan SIUP yang diterbitkan di Kabupaten Bima dari Tahun 2016 - 2020 terus mengalami kenaikan. Jumlah SIUP yang diterbitkan tahun 2016 adalah sebanyak 8.310, menjadi 9.477 di tahun 2020. Jumlah siup yang diterbitkan secara komulatif Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.81.

**Tabel 2. 81 Jumlah SIUP yang Diterbitkan Secara Komulatif di Kabupaten Bima**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pedagang Kecil	7.878	8.241	8.667	8.770	8.881
2	Pedagang Menengah	376	397	435	453	488
3	Pedagang Besar	56	60	88	90	108
	Jumlah	<b>8.310</b>	<b>8.698</b>	<b>9.190</b>	<b>9.313</b>	<b>9.477</b>

*Sumber : Disperindag Kab. Bima, Tahun 2021.***c. Perkembangan Perusahaan yang Terdaftar di Kabupaten Bima**

Perkembangan Perusahaan eyang Terdaftar di Kabupaten Bima dari Tahun 2013-2019 adalah sebagai mana yang terdapat pada tabel 2.82.

**Tabel 2. 82 Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Kab. Bima**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT	81	85	93	94	112
2	CV	586	206	651	665	211
3	Firma	5	5	5	5	6
4	Koperasi	202	205	209	210	211
5	Perorangan	6.346	6707	7.137	7.233	7.344



No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Badan Usaha Lain	150	152	155	155	155
<b>Jumlah</b>		<b>7.370</b>	<b>7.758</b>	<b>8.250</b>	<b>8.362</b>	<b>8.732</b>

*Sumber: Disperindag Kab. Bima, Tahun 2020.*

## 5. Urusan Pilihan Perindustrian

Perkembangan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bima tahun 2016 -2020 mengalami peningkatan, dari 1.288 unit tahun 2016 menjadi 1.345 unit tahun 2020. Jumlah ijin usaha yang diterbitkan di Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.83.

**Tabel 2. 83 Jumlah ijin usaha yang diterbitkan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020**

No	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Kecil	1.285	1.306	1.332	1.354	1.344
2	Industri Menengah	3	3	3	0	0
3	Industri Besar	-	-	-	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>1.288</b>	<b>1.309</b>	<b>1.335</b>	<b>1.341</b>	<b>1.345</b>

*Sumber: Disperindag Kab. Bima, Tahun 2020*

## 6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Di Kabupaten Bima hingga Tahun 2019 terdapat 7 daerah tujuan transmigrasi meliputi daerah transmigrasi Waworada, Laju, Doro O'o, Oi Tui, Mpuri, daerah transmigrasi baku, dan Sori Panihi 1 (SP1 s/d SP7). Tahun 2019, jumlah kepala keluarga yang ikut program transmigrasi dengan tujuan daerah transmigrasi Kabupaten Bima sebanyak 2.697 KK. Untuk lebih jelasnya perkembangan unit pemukiman transmigrasi Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.84.

**Tabel 2. 84 Unit Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No	Nama UPT	Jumlah KK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Waworada	158	158	158	158	158
2	Laju	268	268	268	268	268
3	Doro O'o	116	116	116	116	116





No	Nama UPT	Jumlah KK				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	OiTui	250	250	250	250	250
5	Madapang ga/Mpuri	200	200	200	200	200
6	Baku	230	230	230	230	230
7	SP. 1 SoriPanihi	200	200	200	200	200
8	SP. 2 Sori Panihi	250	250	250	250	250
9	SP. 3 Sori Panihi	250	250	250	250	250
10	SP. 4 Sori Panihi	200	200	200	200	200
11	SP. 5 Sori Panihi	200	200	200	200	200
12	Kimtrans SP. 6	375	375	375	375	375
<b>Jumlah</b>		<b>2.697</b>	<b>2.697</b>	<b>2.697</b>	<b>2.697</b>	<b>2.697</b>

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bima, Tahun 2020.*

#### **2.3.4. Urusan Penunjang**

##### **1. Urusan Perencanaan dan Pembangunan**

Program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bima mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu penjabaran terhadap UU Nomor 25 Tahun 2004 juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kabupaten Bima dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dalam Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut dari keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Kabupaten Bima telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun



2016-2021 yang dijabarkan setiap tahunnya melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Disamping itu program perencanaan daerah juga diimplementasikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2020 program perencanaan daerah yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Program kerjasama pembangunan;
2. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;
4. Program Kajian, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Program perencanaan pembangunan daerah;
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
7. Program perencanaan sosial dan budaya;
8. Program pengembangan data dan informasi;
9. Program Perencanaan Tata Ruang.

Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan wajib perencanaan pembangunan sampai dengan Tahun 2020 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bima antara lain RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan antara lain: Buku Pembangunan Bima dalam angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku PDRB, dan Profil Daerah;
3. Teridentifikasinya dan terkoordinasinya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bima, baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.



## 2. Urusan Keuangan

Pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem secara komprehensif dan tersusun atas dasar potensi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.85.

**Tabel 2. 85 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Bima  
Tahun 2016 - 2020**

TAHUN	PAD	Pertumbuhan ( % )	Pendapatan (Rp.)	Proporsi PAD Thd Pendapatan
2016	108.391.236.944.00	-1.12	1.623.870.195.569.00	6.67
2017	120.447.644.671,00	11.12	1.639.840.143.342,50	7.34
2018	195.312.168.175,39	61.67	1.778.713.865.742,07	10.98
2019	153.601.808.792,72	22,66	1.890.805.429.232,40	8.63
2020	131.585.549.042,49	-14,33	1.743.933.453.901,49	7,54

**Sumber: BPPKAD Kabupaten Bima, Tahun 2021.**

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain ;

1. Terbatasnya sumber pendapatan daerah dan belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan baru;
2. Masih perlunya peningkatan standar sarana dan prasarana pelayanan dan terbatasnya SDM terutama pada unit pelayanan yang ada di daerah;
3. Belum optimalnya BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
4. Belum optimalnya potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah;
5. Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa peraturan daerah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.

Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka mengantisipasi kekurangan penerimaan pendapatan daerah, maka Pemerintah



Kabupaten Bima mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembiayaan dari potensi daerah. Upaya yang dilakukan adalah pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, ekstensifikasi wajib pajak/ wajib retribusi, serta meningkatkan kualitas aparat, melalui :

1. Peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah dipetakan secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan sarana dan sarana pelayanan, serta transparansi pengelolaan pendapatan;
2. Ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan;
3. Koordinasi secara intensif dengan OPD pengelola PAD.

Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bima diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bima. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD. Pengelolaan kas penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum seperti yang diharapkan, dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, sehingga kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih belum seperti yang diharapkan.

Struktur pendapatan Kabupaten Bima terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sampai saat ini PAD Kabupaten Bima hanya memberikan kontribusi sebesar 8,63%\* dalam struktur Pendapatan Daerah.

### **3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima didukung PNS sebanyak 8.439 orang pada Tahun 2016, dan mengalami pengurangan jumlah PNS Tahun 2020 menjadi 7.882 orang hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun maupun mutasi ke daerah lain.

**Tabel 2. 86 Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Bima Tahun 2016- 2020**

No	Tingkat Pendidikan PNS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	76	37	21	22	11
2	SMP	80	53	8	37	28
3	SMA	2.958	2.347	1.891	2.907	1.387
4	Diploma	1.474	1.915	1.520	1.032	1.282
5	S1	3.732	3.820	4.495	3.833	4.889
6	S2/S3	119	152	183	200	285
	<b>Total</b>	<b>8.439</b>	<b>8.324</b>	<b>8.118</b>	<b>8.031</b>	<b>7.882</b>

**Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bima, Tahun 2021.**

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan SD – Diploma di Kabupaten Bima dari tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan, sedangkan untuk jenjang pendidikan S1 dan S2/S3 mengalami peningkatan. Adanya penurunan jumlah PNS pada tingkat SD. SMP. SMA. dan Diploma, disamping ada yang memasuki masa pensiun tetapi juga ada beberapa PNS yang telah selesai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada Tahun 2019 ada penambahan PNS melalui Test penerimaan PNS melalui formasi tenaga pendidikan sebanyak 163 orang, Tenaga kesehatan 36 orang dan tenaga teknis 42 orang, sehingga total penerimaan PNS Kabupaten Bima pada Tahun 2019 sebanyak 241 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.87.

**Tabel 2. 87 Jumlah PNS Kabupaten Bima Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2020**

Golongan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
I	67	64	40	29	23
II	1.635	1.714	1.411	1.325	1107
III	4.182	4.141	3.916	4.180	4271
IV	2.555	2.405	2.751	2.479	2481
Jumlah	<b>8.439</b>	<b>8.324</b>	<b>8.118</b>	<b>8.031</b>	<b>7882</b>

**Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bima, Tahun 2021.**

Berdasarkan tabel 2.87, jumlah PNS berdasarkan golongan kepangkatan pada Tahun 2020 terbanyak adalah golongan III yaitu sebesar 4.271 orang mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu sebanyak 4.182 orang. Selanjutnya PNS golongan IV pada Tahun 2016 sebanyak 2.555 orang menurun menjadi 2.481 orang pada Tahun 2020. PNS Golongan II pada Tahun 2016 sebanyak 1.635 orang menurun dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.107





orang. PNS Golongan I pada Tahun 2020 sebanyak 23 orang jumlahnya menurun dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebanyak 67 orang. Melihat kondisi tersebut pegawai golongan III dan IV yang kebanyakan berada pada level manager/midle management masih sangat dominan jumlahnya dibandingkan dengan pegawai golongan I dan II selaku unsur staf pelaksana. Secara teoritis idealnya komposisi urutan kekuatan pegawai yang baik pada lembaga instansi pemerintah adalah berbentuk piramida, artinya semakin ke atas posisi golongan pangkat pegawai komposisinya semakin mengerucut atau mengecil bukan sebaliknya.

Kondisi demikian pada akhirnya akan menyulitkan dalam pembinaan dan pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karier pegawai. Karena susunan kekuatan pegawai yang ada tidak lagi berbentuk seperti piramida. namun komposisinya berbentuk piramida terbalik bahkan seperti berbentuk kubah. menggelembung ditengah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan. baik teknis maupun fungsional dan bimbingan teknis (bimtek) maupun pendidikan formal melalui program tugas belajar dan ijin belajar. Upaya peningkatan tersebut secara nyata diwujudkan dengan penyediaan anggaran peningkatan SDM aparatur baik pada instansi pengelola kepegawaian maupun yang tersebar pada masing-masing OPD.

Dalam kesempatan apel diberikan pembinaan-pembinaan kepegawaian. antara lain masalah kedisiplinan jam dinas maupun dalam berpakaian dinas, selain itu juga dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT) pada semua OPD se-Kabupaten Bima sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di bidang kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Bima telah membentuk 4 (empat) perangkat daerah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dibentuklah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu, serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.



## **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### **1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kabupaten Bima terkait dengan kemampuan ekonomi daerah, salah satunya dapat dilihat dari indikator: pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Bima adalah yang terendah jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi NTB. Meskipun demikian, perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Bima cenderung meningkat dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019. Secara teori, meningkatnya peningkatan pengeluaran rumah tangga disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dalam rumah tangga tersebut. Selain oleh faktor pendapatan, keadaan ini juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti tingkat harga barang-barang di pasar umum, jumlah barang-barang konsumsi tahan lama, tingkat bunga bank, perkiraan tentang masa depan, dan kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bima pada periode 2017-2019 terus meningkat, namun masih di bawah pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Bima dari tahun 2017–2020 adalah 5,77% yaitu dari Rp. 8.006 rb menjadi Rp. 8.468 rb. Untuk lebih jelas tentang pengeluaran per kapita Kabupaten Bima Tahun 2017–2020 dapat dilihat pada tabel 2.88.

**Tabel 2. 88 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bima dan Provinsi NTB Tahun 2017 – 2020**

No	Uraian	Pengeluaran Per Kapita (ribu)				Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	
1	Kabupaten Bima	8.006	8.354	8.631	8.468	5,77
2	Propinsi NTB	9.877	10.284	10.640	10.351	4,79

**Sumber: BPS Prov.NTB, Tahun 2020.**

Pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Pada umumnya, jika pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih besar dibanding pengeluaran untuk konsumsi non makanan, maka rumah tangga tersebut tergolong belum mampu atau belum sejahtera. Kebutuhan non makanan terdiri dari: perumahan, pendidikan, pakaian, transportasi, kegiatan sosial, kesehatan, penerangan, rokok/tembakau, rekreasi.

## **2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Kabupaten Bima merupakan salah satu poros dari koridor transportasi Nasional yang menghubungkan Pulau Jawa-Bali-Lombok-Sumbawa-Flores dan Sumba. Jaringan jalan nasional yang melintasi Kabupaten Bima merupakan bagian jaringan jalan lintas Sumbawa yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumbawa. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bima secara umum telah menjangkau keseluruhan wilayah, bahkan Kabupaten Bima telah merintis jalan lingkaran utara dan selatan yang memudahkan konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

Ketersediaan jalan merupakan bagian pokok dalam distribusi barang dan akan menjamin lancarnya arus manusia dan barang. Disamping itu keberadaan jaringan jalan juga membantu sektor lainnya seperti sosial, budaya, ekonomi, keamanan untuk berkembang. Total panjang jalan (meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota) di Kabupaten Bima sampai Tahun 2019 adalah sepanjang 1.283,33 Km, dengan rincian berdasarkan status pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat adalah sepanjang 86,69 Km, Pemerintah Provinsi NTB sepanjang 365,03 Km, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bima adalah sepanjang 831,61 Km.



Untuk menunjang kelancaran transportasi darat, terdapat 7 (tujuh) buah terminal angkutan darat termasuk terminal tipe C. Terminal Dara sebagai terminal utama yang ada di Kota Bima merupakan terminal Tipe B tapi berfungsi layaknya terminal AKAP type A karena melayani rute antar Kota Bima dengan hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bima, Antar Kabupaten dalam propinsi (AKDP) dan antar Kabupaten antar propinsi (AKAP). Transportasi darat masih memegang peranan penting dalam mobilitas barang dan manusia di Kabupaten Bima, tidak hanya di dalam wilayah Kabupaten Bima sendiri, tetapi juga antar Kabupaten baik dalam provinsi maupun antar provinsi bahkan antar pulau sampai ke Kabupaten-Kabupaten besar di Pulau Jawa. Jumlah penumpang Bus yang pada Tahun 2018 adalah sebanyak 121.212 orang.

Disamping transportasi darat, Kabupaten Bima dapat dilalui dengan transportasi laut. Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting pada perekonomian Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya mobilitas orang dan barang baik yang keluar maupun masuk Kabupaten Bima yang menggunakan transportasi laut, yaitu melalui Pelabuhan Bima. Pelabuhan Bima saat ini masih memegang peranan yang penting sebagai pintu gerbang perekonomian, tidak hanya bagi Kabupaten Bima tapi juga wilayah sekitar. Sebagai pelabuhan penumpang, pelabuhan ini menjadi penghubung bagi kawasan timur Indonesia dengan rute yang dilayani antara lain Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Transportasi Udara juga memegang peranan yang sangat penting pada perekonomian Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya mobilitas orang dan barang baik yang keluar maupun masuk Kabupaten Bima yang menggunakan transportasi udara, yaitu melalui Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Maskapai penerbangan yang pernah melayani dari dan menuju Bima adalah Garuda Indonesia Airline, NAM air dan Wings Air dengan frekuensi penerbangan setiap hari. Namun dengan adanya pandemic COVID 19, frekwensi penerbangan Kabupaten Bima Tahun 2020 mengalami penurunan dan hanya maskapai penerbangan Wings Air yang beroperasi.

### **3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu indikator yang mendukung iklim berinvestasi yang kondusif. Kabupaten Bima adalah salah satu daerah yang nyaman untuk melakukan investasi baik itu pada kegiatan pertanian,



perikanan, kehutanan, peternakan, pariwisata, perdagangan, transportasi dan kegiatan jasa yang lainnya. Salah satu faktor yang mendukung kondisinya Kabupaten Bima untuk berinvestasi adalah bisa dilihat dari angka kriminalitas yang menurun sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019. Jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Bima tercermin dari kasus tindak pidana di sejumlah kecamatan. Tahun 2016 sebanyak 411 kasus turun menjadi 6 kasus pada Tahun 2019.

Dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan berinvestasi adalah telah ditetapkannya beberapa kawasan strategis yang potensial untuk dikembangkan sebagaimana dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima seperti kawasan Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri; kawasan Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri. Disamping itu, kemudahan berinvestasi juga juga didukung dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan bentuk pelayanan perizinan satu pintu. Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu didukung dengan teknologi informasi dan terjaminnya kepastian waktu dan biaya.

## **2.5 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021**

Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diukur melalui indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan targetnya untuk periode satu tahun dan lima tahun. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pembangunan di daerah. Indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan adalah indikator *outcome* yang merupakan akumulasi dari berbagai *output* pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Bima **"Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah "Religius, Aman, Makmur, Amanah Dan Handal"**". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan Kabupaten Bima sebagai berikut :



1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
2. Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum;
3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Laporan ini menyajikan pencapaian indikator kinerja daerah mulai level visi, misi, sasaran dan realisasi capaian indikator kinerja utama. Indikator kinerja daerah yang diukur berdasarkan misi sebagai berikut;



**Tabel 2. 89 Evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2020**

**VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH “RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL”**

**Misi 1 : Meningkatkan Masyarakat yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat**

**Tujuan 1 : Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Kehidupan Beragama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Selisih (Capaian 2019-2021)	Ket
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1.	Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	1 Persentase peningkatan pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	100	104,9	100	98,54	89,88	100	84,92	100	77,5	100	62,17	100	25	Mendekati Target
		2 Persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah haji	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	Melampaui Target

**Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Nyaman dengan Mengedepankan Penegakan Supremasi Hukum**

**Tujuan 2 : Terwujudnya ketertiban dan rasa aman masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Rata-rata Capaian (%)	Ket
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2.	Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat	3 Persentase menurunnya pelanggaran ketertiban	%	95	80	86	85	79	75	72	75	65	65	65		Melampaui/ Mencapai Target
		4 Persentase menurunnya konflik horizontal	%	96	180	86	85	56	100	36	39	16	25	16		Mendekati Target
3	Terciptanya kondisi aman bencana	5 Menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana	%	80	75	72	60	64	64	56	56	48	58	40		Mendekati Target



*"Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"*

**Misi 3 : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana dan Prasarana Berbasis Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Tujuan 3 : Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan							2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Rata-rata Capaian	Ket
					2016		2017		2018							(%)	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
4	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	6	Persentase penduduk miskin semakin berkurang	%	15,78	15,33	14,72	15,1	13,66	14,84	12,6	14,76	11,54	14,49	10,47		Mendekati Target
		7	Persentase Menurunnya angka Pengangguran	%	4,4	3,98	4	1,56	3,8	4,86	3,5	2,87	3,3	2,89	3		Melampaui/ Mencapai Target

**Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran wilayah sesuai arahan tata ruang**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Selisih (Capaian 2019-2021)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
5	Meningkatnya aksesibilitas sarana dan prasarana daerah	8	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	34.00	34,66	42,5	43,39	43,5	44,41	45	45,5	45,75	51,58	48	2,5	Melampaui Target
		9	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	15	15	15	15,54	20	24,84	25	26,8	30	49,25	35	8,2	Melampaui Target
		10	Persentase wilayah yang teraliri listrik	%	60	67	70	78	80	84	90	93,81	100	97,37	100	6,19	Melampaui Target
		11	Persentase wilayah yang terlayani moda transportasi	%	16,75	13,5	15,18	14,8	13,61	13,6	12,04	15,18	10,47	10,47	8,9	6,28	Mendekati Target
		12	Persentase wilayah yang terlayani akses internet	%	80,63	95	84,5	100	88,37	100	92,24	96,85	96,11	96,86	100	3,15	Melampaui Target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Selisih (Capaian 2019-2021)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
6	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi	13	Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	%	39	39	39	39,65	39,5	40,95	40,38	43,08	41,25	43,47	42	1,08	Melampaui Target
7	Meningkatnya kualitas lingkungan	14	Luas kawasan kumuh Yang tertangani	%	3,27	3,21	7,93	7,43	12,59	41,28	18,66	41,28	23,28	41,28	23,32	17,96	Melampaui Target
		15	Persentase sampah yang dikelola	%	0,05	0,01	0,19	3,04	0,33	11,5	0,47	13,76	0,61	16,35	0,75	13,01	Melampaui Target

**Tujuan 5 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Selisih (Capaian 2019-2021)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
8	Meningkatnya sektor ekonomi daerah	16	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	5,73	5,3	5,82	6,27	5,91	4,06	6,02	4,29	6,12	-3,49	N/A		Mendekati Target
		17	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	6,67	6,79	7,34	11,31	8,01	6,91	8,68	8,63*	9,35	7,55	10		Mendekati Target
		18	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	%	44,76	44,16	43	44,15	42,5	44,22	41	43,5	40,05	45,28	40		Mendekati Target
		19	Kontribusi Koperasi, UMKM terhadap PDRB	%	2,8	3,35	3,66	4,88	4,52	4,82	5,38	6,59	5,52	5,57	5,38		Melampaui Target
		20	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	15,72	15,67	15,97	16,04	16,22	16,25	16,47	16,59	16,72	BPS	16,97		Melampaui Target
9	Tercukupinya	21	Skor Pola	%	83,36	76,75	86,2	79,56	80,69	80,99	81,19	81,19	98,65	82,19	82,19		Mencapai



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Selisih (Capaian 2019-2021)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
																	Target
	ketersediaan pangan		Pangan														

**Misi 4 : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah dengan Mengedepankan Rasa Tanggung Jawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

**Tujuan 6 : Terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel dan melayani**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Rata-rata Capaian (%)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
10	Terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas	22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0,00	10	20	84,76	40	81,72	60	80,39	80	89,26	100		Melampaui/ Mencapai Target
		23	Level APIP	Level	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3		Melampaui/ Mencapai Target
		24	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Melampaui/ Mencapai Target
		25	Peringkat LPPD	Peringkat	144	149	100	-	90	139	80	Pusat	70	Pusat	50		Belum Rilis Data
		26	Nilai LKJIP	Nilai	60,1	58,13	60,1	60,41	62	61,12	63	Pusat	64	Pusat	65		Belum Rilis Data

**Misi 5 : Membangun Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing**

**Tujuan 7 : Terwujudnya kualitas hidup masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Rata-rata Capaian (%)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
11	Meningkatnya kualitas pendidikan	27	Angka melek huruf (AMH)	%	92,38	93,49	94,79	93,89	96,09	88,4	97,39	88,08	98,69	92,04	100		Mendekati Target
		28	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,36	7,45	7,56	7,68	7,76	7,58	7,96	7,77	8,16	7,78	8,36		Mendekati Target
		29	Angka kelulusan SD/MI	%	99,08	99,08	99,2	100	99,35	97,91	99,65	96,45	100	100	100		Melampaui/ Mencapai Target
		30	Angka kelulusan SLTP	%	99,76	99,76	97,79	100	99,81	97,37	99,85	98,77	99	100	100		Melampaui/ Mencapai Target
12	Meningkatnya kualitas kesehatan	31	Angka usia harapan hidup	Tahun	64,9	64,86	65,06	65,13	65,26	65,71	65,46	66,11	65,66	66,33	65,86		Melampaui/ Mencapai Target
		32	Prevalensi balita gizi buruk	%	7	7,29	6,8	7,6	6,6	2,37	6,4	2,15	6,2	1,9	6		Melampaui/ Mencapai Target
		33	Angka kematian ibu melahirkan	%	90,54	79,09	80,48	77,94	70,42	76,21	60,36	49,26	50,3	51,55	40,24		Mendekati Target
		34	Angka kematian bayi	%	8,46	7,8	7,6	7,21	6,85	7,52	6,17	7,64	5,55	7,9	4,99		Mendekati Target
13	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	35	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi	Orang	6	6	10	10	16	7	18	35	20	2	45		Mendekati Target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir periode RPJMD (2021)	Rata-rata Capaian (%)	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
		36	Jumlah Desa Swasembada/Maju	Desa	0	20	7	8	15	12	22	16	29	22	37		Mendekati Target

Keterangan:

	Melampaui / Mencapai Target Tahun 2020	19
	Mendekati Target Tahun 2020	15
	Belum Ada Rilis Data Tahun 2020	2



### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk mengetahui gambaran kondisi keuangan suatu daerah maka dapat dilihat dari postur APBD yang terdiri dari pos pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang terdiri dari target pendapatan yang harus dicapai, belanja program dan non program yang dilaksanakan dan pos pembiayaan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penyusunan APBD berbasis kinerja yang berorientasi pada prinsip *money follows program* yang intinya bahwa besaran alokasi anggaran ditentukan oleh target kinerja yang hendak dicapai pada suatu program.

Keuangan daerah yang terbatas dalam APBD haruslah dikelola dengan optimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan visi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengelolaan keuangan yang baik adalah akan tercermin dalam pencapaian prestasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Pemerintah Kabupaten Bima secara berturut-turut sejak 2016-2020 mendapatkan predikat pengelolaan keuangan tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Pengelolaan keuangan tersebut meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Bima telah mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tentunya ke depan kualitas pengelolaan keuangan harus terus diperbaiki dalam mewujudkan tujuan inti dari pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada indikator hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Secara umum dari postur APBD selama 5 tahun terakhir, 2016- 2020 kapasitas fiskal Kabupaten Bima masih belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal yang disebabkan terbatasnya sumber pendanaan dari dalam daerah dan masih bergantung pada sumber dana transfer. Upaya penguatan sumber pendanaan dari dalam daerah melalui peningkatan PAD dan menggenjot dana transfer yang berbasis program/kinerja yang menjadi perhatian utama ke depan.

Untuk itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan masa lalu dibutuhkan untuk mengetahui gambaran perkembangan dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan menganalisa seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah pada masa yang akan datang.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya. Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang



dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan tentang perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama kurun waktu 2016-2020. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bima tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :





**Tabel 3. 1 Postur APBD Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>108,391,236,943.52</b>	<b>120,447,644,671.00</b>	<b>195,312,168,175.39</b>	<b>139,520,631,473.00</b>	<b>153,601,808,792.72</b>	<b>11,07</b>
a	Pendapatan Pajak Daerah	11,760,868,144.00	11,013,802,144.00	11,013,802,144.00	15,312,152,144.00	19,918,021,900.00	12,92
b	Pendapatan Retribusi Daerah	18,752,595,000.00	22,082,093,500.00	18,967,093,500.00	25,690,803,000.00	28,171,166,230.00	12,10
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,354,399,088.52	4,572,000,000.00	5,157,996,544.00	5,157,996,544.00	5,436,412,244.00	3,92
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73,523,374,711.00	82,779,749,027.00	160,173,275,987.39	253.963.415.476,97	100,076,208,418.72	15,35
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,332,953,520,453.84</b>	<b>1,308,607,256,000.00</b>	<b>1,348,167,296,865.68</b>	<b>1,363,127,883,865.68</b>	<b>1,364,993,326,865.68</b>	<b>7,99</b>
a	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	42,425,079,753.84	66,951,982,000.00	43,919,966,865.68	37,910,379,865.68	36,288,770,865.68	5,03
b	Dana Alokasi Umum	895,038,270,000.00	895,038,270,000.00	880,920,216,000.00	906,012,508,000.00	926,611,508,000.00	2.90
c	Dana Alokasi Khusus	395,490,170,700.00	346,617,004,000.00	423,327,114,000.00	419,204,996,000.00	402,093,048,000.00	43,08
<b>III</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>182,525,438,171.50</b>	<b>210,785,242,671.50</b>	<b>235,234,400,701.00</b>	<b>334,550,488,172.00</b>	<b>372,210,293,574.00</b>	<b>8.22</b>
a	Dana Hibah	3,082,817,585.00	2,306,620,085.00	6,598,000,000.00	87,682,649,000	87,682,649,000.00	274.48
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,720,484,586.50	42,720,484,586.50	46,860,253,701.00	49,028,024,172.00	58,411,757,574.00	10.03
c	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
d	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	3.950.810.714,00	155,258,138,000.00	156,526,147,000.00	185,618,739,000.00	189,457,306,000.00	1.71
e	Dana Insentif Daerah	0.00	7,500,000,000.00	25,250,000,000.00	12,221,076,000.00	36,658,581,000.00	77.01
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1,623,870,195,568.86</b>	<b>1,639,840,143,342.50</b>	<b>1,778,713,865,742.07</b>	<b>1,837,199,003,510.68</b>	<b>1,890,805,429,232.40</b>	<b>6,78</b>



*"Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"*

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,087,767,709,868.86</b>	<b>1,032,043,601,963.95</b>	<b>1,013,151,104,690.08</b>	<b>1,048,405,730,980.68</b>	<b>1,108,188,124,815.92</b>	<b>0.45</b>
a	Belanja Pegawai	845,396,159,673.14	750,965,087,699.55	726,454,937,199.28	729,383,220,779.71	737,586,632,116.35	-2.58
b	Belanja Hibah	16,094,532,000.00	21,033,664,000.00	25,990,864,000.00	26,606,200,000.00	75,665,240,000.00	48.20
c	Belanja Bantuan Sosial	1,350,000,000.00	1,468,000,000.00	885,000,000.00	920,000,000.00	880,000,000.00	-6.27
d	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,051,346,314.40	3,309,677,064.40	3,594,138,203.00	4,100,272,414.40	4,808,918,813.00	9.69
e	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	218,075,671,881.32	252,267,173,200.00	251,226,165,287.00	283,896,037,786.57	286,747,333,886.57	5.85
f	Belanja Tidak Terduga	3,800,000,000.00	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-2.59
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>546,026,701,475.00</b>	<b>629,891,296,584.00</b>	<b>846,957,482,747.00</b>	<b>845,343,272,530.00</b>	<b>814,369,165,634.00</b>	<b>9.19</b>
a	Belanja Pegawai	78,367,659,600.00	91,802,811,500.00	96,412,524,400.00	109,893,783,057.00	113,123,412,958.00	7.82
b	Belanja Barang dan Jasa	192,768,190,559.00	268,802,530,290.00	348,984,835,840.00	379,241,492,279.00	379,811,918,067.00	15.62
c	Belanja Modal	274,890,851,316.00	269,285,954,794.00	401,560,122,507.00	356,207,997,194.00	321,433,834,609.00	5.21
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1,633,794,411,343.86</b>	<b>1,661,934,898,547.95</b>	<b>1,860,108,587,437.08</b>	<b>1,893,749,003,510.68</b>	<b>1,922,557,290,449.92</b>	<b>4.82</b>



*“Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”*

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum- buhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20,024,215,775.00</b>	<b>29,994,755,205.45</b>	<b>88,694,721,695.01</b>	<b>63,950,000,000.00</b>	<b>40,651,861,217.52</b>	<b>36.23</b>
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15,484,215,775.00	29,054,755,205.45	87,944,721,695.01	63,200,000,000.00	39,901,861,217.52	45.07
b	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	40,000,000.00	940,000,000	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	445.96
c	Penerimaan Piutang Daerah	4,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>10,100,000,000.00</b>	<b>7,900,000,000.00</b>	<b>7,300,000,000.00</b>	<b>7,400,000,000.00</b>	<b>8,900,000,000.00</b>	<b>-1.55</b>
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,100,000,000.00	6,900,000,000.00	7,000,000,000	7,100,000,000.00	7,900,000,000.00	2.27
b	Dana Bergulir Koperasi	0.00	1,000,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	1,000,000,000.00	52.67
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>9,924,215,775.00</b>	<b>22,094,755,205.45</b>	<b>81,394,721,695.01</b>	<b>56,550,000,000.00</b>	<b>31,751,861,217.52</b>	<b>63.33</b>
	<b>LPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2016-2020.*

**Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>110,079,232,349.29</b>	<b>188,203,814,216.05</b>	<b>120,342,972,756.52</b>	<b>135,874,141,560.57</b>	<b>131,585,549,042.49</b>	<b>11,17</b>
a	Pendapatan Pajak Daerah	<b>10,467,511,721.88</b>	<b>12,750,626,765.00</b>	<b>14,852,363,146.00</b>	<b>16,084,288,190.00</b>	<b>13,861,845,567.00</b>	<b>8,19</b>
b	Pendapatan Retribusi Daerah	<b>12,567,753,774.00</b>	<b>16,144,271,138.00</b>	<b>13,292,909,504.00</b>	<b>21,676,155,573.00</b>	<b>18,640,585,262.00</b>	<b>14,96</b>
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan	<b>4,701,432,312.00</b>	<b>5,032,680,249.81</b>	<b>4,358,917,483.00</b>	<b>4,743,194,244.92</b>	<b>6,002,248,597.07</b>	<b>7,25</b>



*"Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"*

No	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<b>82,342,534,541.41</b>	154,276,236,063.24	87,838,782,623.52	93,370,503,552.65	93,080,869,616.42	12,57
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1,347,776,476,902.00	1,269,755,514,037.00	1,329,968,127,945.00	1,348,821,946,185.00	1,254,603,995,069.00	<b>-1,65</b>
a	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	<b>75,773,039,244.00</b>	<b>61,764,579,062.00</b>	<b>37,049,193,015.00</b>	<b>32,950,057,637.00</b>	38,117,847,000.00	-13,47
b	Dana Alokasi Umum	<b>895,038,270,000.00</b>	879,315,326,000.00	876,388,641,503.00	909,112,358,000.00	832,124,683,000.00	-1,71
c	Dana Alokasi Khusus	<b>376,965,167,658.00</b>	328,675,608,975.00	416,530,293,427.00	406,759,530,548.00	384,361,465,069.00	1,52
<b>III</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	162,559,688,219.66	228,911,925,290.00	292,924,607,435.81	327,667,703,559.00	357,853,249,790.00	<b>22,46</b>
a	Dana Hibah	<b>5,106,640,699.39</b>	<b>20,809,046,336.00</b>	<b>65,847,611,986.81</b>	<b>76,367,839,900.00</b>	<b>70,259,197,300.00</b>	132,98
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	<b>35,386,040,270.27</b>	45,344,740,954.00	45,050,134,724.00	59,570,586,659.00	53,285,175,490.00	12.29
c	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	<b>344,871,250.00</b>	0	0	0	0	
d	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	<b>121,722,136,000.00</b>	155,258,138,000.00	156,776,860,725.00	185,618,739,000.00	187,393,169,000.00	11.97
e	Dana Insentif Daerah	<b>0</b>	7,500,000,000.00	25,250,000,000.00	6,110,538,000.00	46,915,708,000.00	232.16
<b>TOTAL REALISASI PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1,620,415,397,470.95</b>	<b>1,686,871,253,543.05</b>	<b>1,743,235,708,137.33</b>	<b>1,812,363,791,304.57</b>	<b>1,744,042,793,901.49</b>	<b>1.91</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1,014,951,386,128.49	972,084,233,172.49	973,244,441,475.00	1,033,463,068,076.00	1,191,847,393,173.89	<b>4.37</b>
<b>I</b>	<b>a Belanja Pegawai</b>	<b>776,111,631,990.00</b>	<b>695,649,500,150.00</b>	<b>691,787,947,146.00</b>	<b>704,879,487,444.00</b>	<b>729,157,542,508.85</b>	-1.40
	<b>b Belanja Hibah</b>	<b>15,899,123,416.00</b>	21,290,719,928.50	26,432,343,700.00	40,036,455,000.00	155,922,981,638.00	99.75
	<b>c Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>469,800,000.00</b>	1,879,445,000.00	679,500,000.00	700,400,000.00	638,200,000.00	57.60



*"Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"*

No	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
d	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,051,346,218.00	3,733,271,379.00	1,914,531,164.00	2,484,994,984.00	3,457,800,452.00	10.64
e	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	218,489,706,504.49	248,079,665,064.99	251,203,149,465.00	283,328,230,648.00	284,737,530,949.04	7.02
f	Belanja Tidak Terduga	929,778,000.00	1,451,631,650.00	1,226,970,000.00	2,033,500,000.00	17,933,337,626.00	222.07
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>589,902,191,038.00</b>	<b>690,817,714,223.00</b>	<b>844,683,872,137.34</b>	<b>789,431,452,113.43</b>	<b>561,308,516,835.30</b>	<b>0.49</b>
a	Belanja Pegawai	77,634,002,497.00	96,131,292,572.00	97,279,475,676.00	103,759,018,172.82	78,733,784,750.00	1.89
b	Belanja Barang dan Jasa	195,931,069,836.00	303,101,821,833.00	350,748,942,429.30	369,538,111,171.51	226,551,786,121.30	7.79
c	Belanja Modal	316,337,118,705.00	291,584,599,818.00	396,655,454,032.04	316,134,322,769.10	256,022,945,964.00	-2.78
<b>TOTAL REALISASI BELANJA DAERAH</b>		<b>1,604,853,577,166.49</b>	<b>1,662,901,947,395.49</b>	<b>1,817,928,313,612.34</b>	<b>1,822,894,520,191.43</b>	<b>1,118,033,624,366.40</b>	<b>2.36</b>
<b>I</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>126,482,519,640.63</b>	<b>130,570,212,505.03</b>	<b>148,139,520,311.59</b>	<b>67,150,164,750.58</b>	<b>57,739,165,787.72</b>	<b>-13.00</b>
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	126,325,585,459.63	130,527,215,468.03	147,309,518,652.59	66,846,914,836.58	49,224,435,863.72	-16.20
b	Pinjaman dalam negeri	0.00	0.00	0.00			
C	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	156,934,181	42,997,037	830,001,659.00	303,249,914.00		422.20
d	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00		8,228,146,600.00	0.00



*"Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"*

No	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>II</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11,240,458,526.39</b>	<b>7,230,000,000.00</b>	<b>6,600,000,000.00</b>	7,395,000.000,00	<b>8,728,146,600.00</b>	<b>-6,47</b>
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,240,458,526.39	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	7,100,000,000.00	500,000,000.00	-6,64
b	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228,146,600.00	
c	Dana Bergulir Koperasi	0.00	930,000,000.00	300,000,000.00	295,000,000.00	0.00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>115,242,061,114.24</b>	<b>123,340,212,505.03</b>	<b>141,539,520,311.59</b>	<b>67,150,164,750.58</b>	<b>49,434,435,839.72</b>	<b>-10,80</b>
	<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>130,803,881,419</b>	<b>147,309,518,652.59</b>	<b>66,846,914,836.58</b>	<b>56,619,435,863.72</b>	<b>336.498.888.272,94</b>	<b>-17,78</b>

*Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2016-2020.*

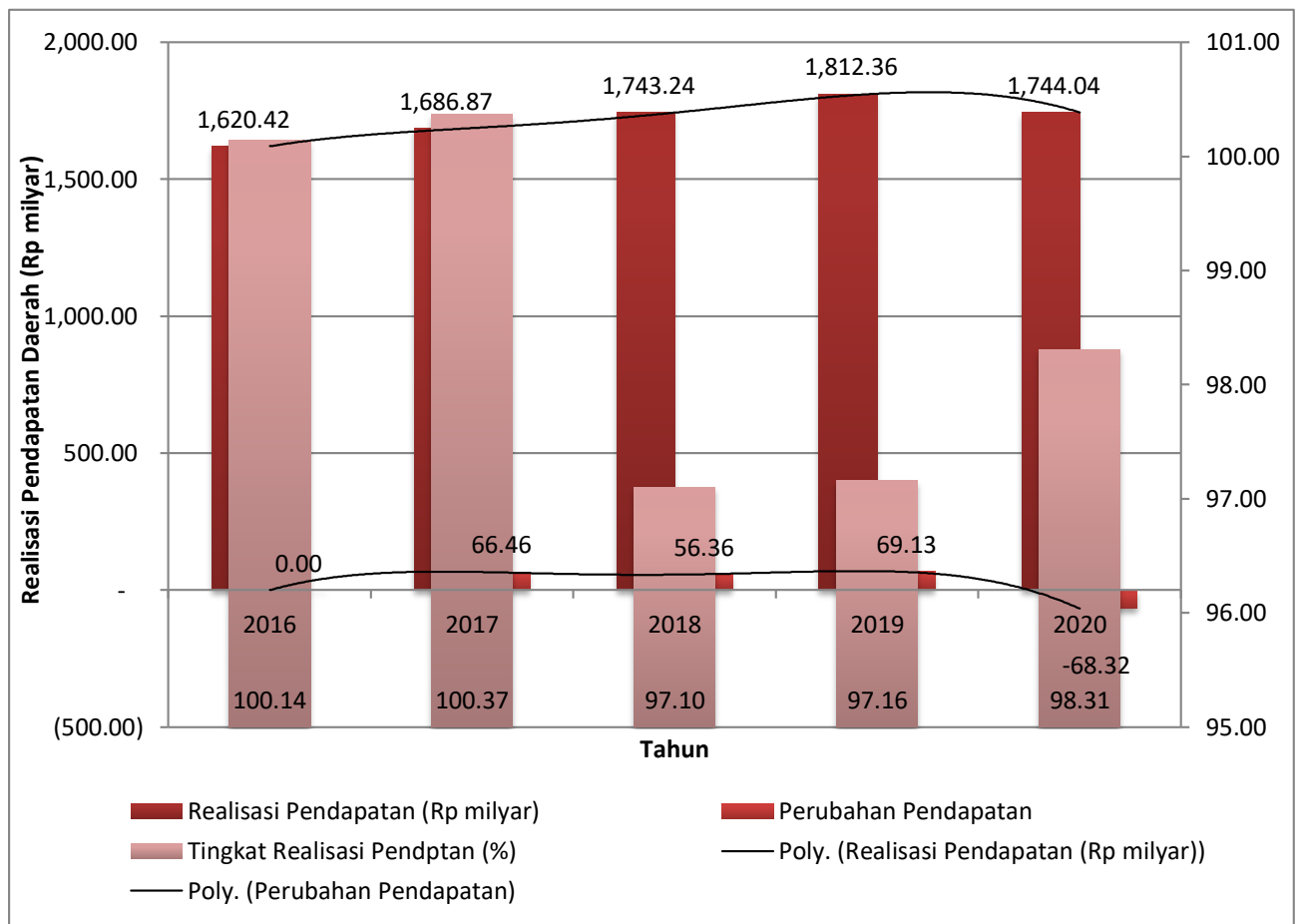




## A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah mengalami peningkatan selama Tahun 2016 – 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik 3.1 berikut. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan kondisi awal Tahun 2016 dan kondisi akhir Tahun 2020 maka terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 123,62 milyar atau tumbuh rata-rata Rp 30,90 milyar setiap tahunnya atau 1,91 persen.

**Grafik 3. 1 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bima dan Perubahannya Selama Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2016-2021. (Diolah)

Berdasarkan grafik 3.1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah mengalami kenaikan antara 56,36 milyar – 69,13 milyar antara Tahun 2016-2019. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis dari Rp 1,812,36 Tahun 2019 menjadi Rp 1.744,04 milyar atau menurun sebesar Rp 407,27 milyar. Penurunan yang sangat mencolok pada tahun 2020 disebabkan kebijakan pemerintah yang terus melakukan pemotongan dana transfer melalui kebijakan *refocusing* akibat menurunnya penerimaan negara sebagai dampak langsung pandemi covid 19. Di samping itu juga dipengaruhi oleh penurunan target beberapa



pos PAD. Beberapa dana transfer yang menurun yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dilihat dari tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah, realisasi APBD Kabupaten Bima selama kurun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang sangat baik, yakni di atas 97 persen. Artinya penetapan target pendapatan daerah telah mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarakan perkiraan yang rasional, terukur dan dapat dicapai.

### 1) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menetapkan target PAD, Pemerintah Kabupaten Bima senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3. 3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp Milyar)  
Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

Pos Pendapatan Asli	Tahun						
Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Kenaikan	%
Pajak Daerah	10.47	12.75	14.85	16.08	13.86	3.39	8.11
Retribusi Daerah	12.57	16.14	13.29	21.68	18.64	6.07	12.08
Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.70	5.03	4.36	4.74	6.00	1.30	6.92
Lian-Lain PAD yang sah	82.34	154.28	87.84	93.37	93.08	10.74	3.26
TOTAL	110.08	188.20	120.34	135.87	131.59	21.51	4.88

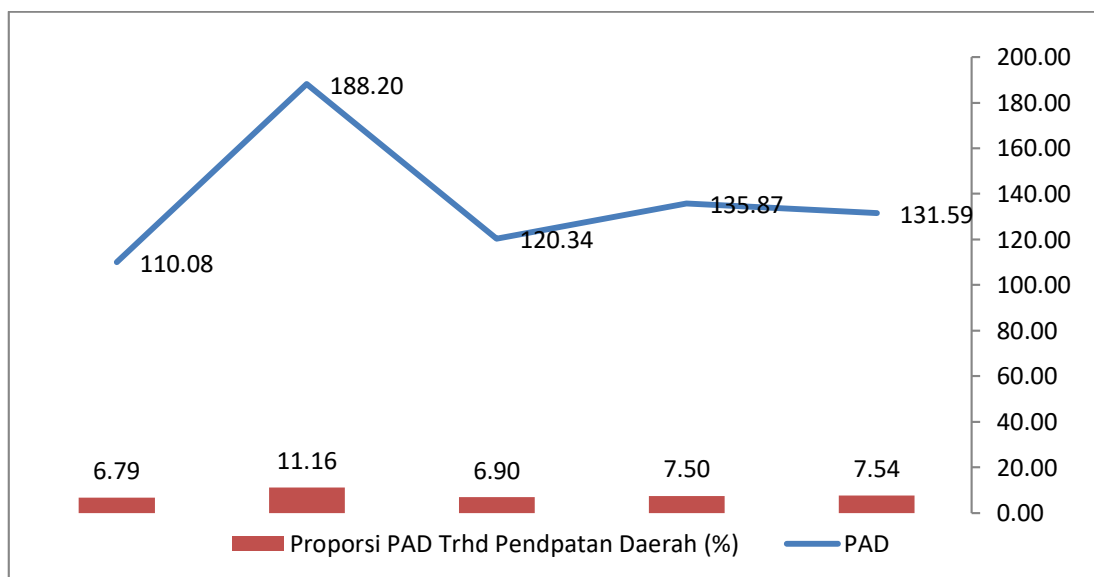
**Sumber: BPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)**

Realisasi PAD Kabupaten Bima selama 2016 – 2020, mengalami fluktuasi naik dan turun. Rata-rata pertumbuhan realisasi pos PAD pada Tahun 2016 - 2020 sebesar 4,88%. Komponen pertumbuhan tertinggi ditempati oleh Lain –lain retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan adalah 12,08% diikuti oleh pajak daerah rata-rata sebesar 8,11%, sedangkan yang mengalami pertumbuhan yang paling rendah

ditempati oleh pos hasil kekayaan daerah yg dipisahkan sebesar 3,26 persen. Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar selama kurun waktu 2016 - 2020 adalah pos lain-lain PAD yang sah yang mengalami kenaikan Rp 10,74 milyar diikuti retribusi daerah sebesar Rp6,7 milyar.

Kontribusi pos PAD terhadap total pendapatan daerah masih cukup minim yaitu berkisar pada angka 6,79% – 11,16%. Kontribusi PAD tersebut mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2016 PAD sebesar Rp 110,08 milyar atau 6,79% terus meningkat sampai pada tahun 2020 sebesar Rp 131,59 milyar atau 7,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.2.

**Grafik 3. 2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp Milyar) dan Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**



**Sumber: BPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan berkat dilakukan upaya intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran data potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala;
- Merevisi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti peraturan daerah sebelumnya yang sudah berlaku sejak Tahun 2011 dimana akan dilakukan perubahan tarif dan penambahan jenis sumber PAD;
- Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Devisi Pencegahan PT. Bank NTB Syariah, Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten



Bima dalam penerapan aplikasi smart tax (pajak pintar yang berbasis teknologi informasi);

- d) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan disetiap kecamatan tentang berbagai aturan dan jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, seperti penghargaan kepada juru pungut Pajak Bumi dan Bangunan disetiap desa yang berprestasi yaitu mereka yang mampu memberikan kontribusi tertinggi nilai pajaknya setiap tahun;
- f) Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g) Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.

## 2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah untuk menunjang program pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

Komponen pos dana perimbangan yang memberikan kontribusi terbesar selama kurun waktu 2016 - 2020 adalah Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk lebih jelasnya realisasi dana perimbangan dapat dilihat pada table 3.4.

**Tabel 3. 4 Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Rp Milyar)**

Uraian	Tahun (%)						Perubahan	%
	2016	2017	2018	2019	2020			
DBH Pajak/ Bukan Pajak	75.77	61.76	37.05	32.95	38.12	-37.66	-12.42	
DAU	895.04	879.32	876.39	909.11	832.12	-62.91	-1.76	
DAK	376.97	328.68	416.53	406.76	384.36	7.40	0.49	
<b>TOTAL</b>	<b>1,347.78</b>	<b>1,269.76</b>	<b>1,329.97</b>	<b>1,348.82</b>	<b>1,254.60</b>	<b>-93.17</b>	<b>-1.73</b>	

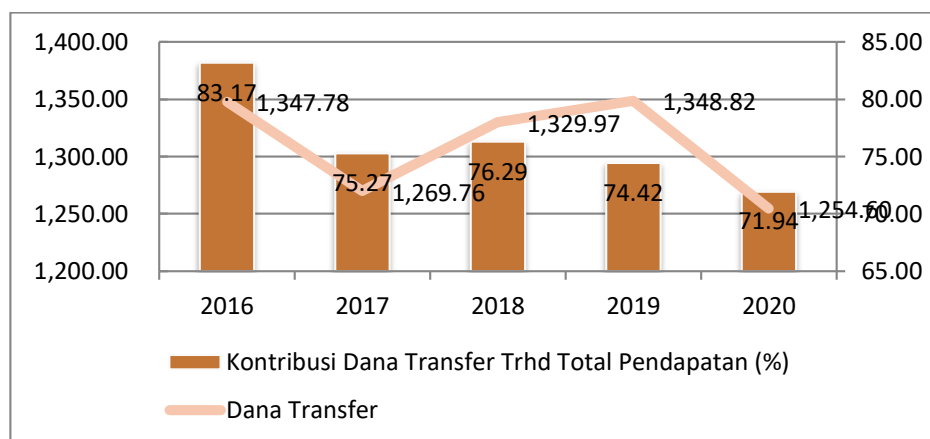
*Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)*

Realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Bima pada kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan pertumbuhan yang negatif yakni sebesar Rp 93,17 milyar

atau minus 1,73%. Selama kurun waktu tersebut hanya Dana Alokasi Khusus yang mengalami pertumbuhan yang positif karena adanya kebijakan pemerintah yang alokasinya berbasis pada usulan (proposal) program pemerintah daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dari pemerintah pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/ pencairan DAU/DAK.



Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)

**Grafik 3. 3 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (Rp Milyar) dan Kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

Berdasarkan grafik 3.3. di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bima selama kurun 2016-2020 masih sangat bergantung pada dana perimbangan (transfer). Kontribusi dana transfer mencapai angka 71,94 persen pada Tahun 2020, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada Tahun 2016 yang masih sangat tinggi yakni 83,17 persen. Tantangan bagi daerah ke depan adalah perubahan kebijakan dana transfer yang semakin menurun yang berimbas pada terganggunya pendanaan pembangunan di daerah.

### 3) Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya,



(3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (4) Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah, dan (5) Dana Insentif Daerah.

Realisasi penerimaan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan tren kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,46%. Pada Tahun 2016 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 162,559,688,219.66, naik menjadi Rp 357.853.249.790,00 di Tahun 2020. Komponen yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Pusat dengan besaran antara 52,37% - 74,88%, namun demikian secara tren mengalami penurunan dari 74,88% di Tahun 2016, menjadi 52,37%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padat tabel 3.5

**Tabel 3. 5 Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun					Perubahan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Hibah	5.11	20.81	65.85	76.37	70.26	65.15
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.39	45.34	45.05	59.57	53.29	17.90
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34
Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah Pusat	121.72	155.26	156.78	185.62	187.39	65.67
Dana Insentif Daerah	0.00	7.50	25.25	6.11	46.92	46.92
<b>TOTAL</b>	<b>162.56</b>	<b>228.91</b>	<b>292.92</b>	<b>327.67</b>	<b>357.85</b>	<b>195.29</b>

**Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)**

Realisasi pendapatan daerah dari pos lain- lain pendapatan daerah yang sah pada kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni terjadi kenaikan sebesar Rp 195,29 milyar. Terdapat tiga pos anggaran yang sangat menonjol yakni Dana Alokasi Desa dari pemerintah Pusat, hibah, dan Dana Insentif Daerah. Ketiga pos ini sangat menunjang percepatan pembangunan desa dan perbaikan pelayanan publik mengingat Dana Insentif Daerah diperoleh tergantung dari prestasi dan kinerja pembangunan daerah.





Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

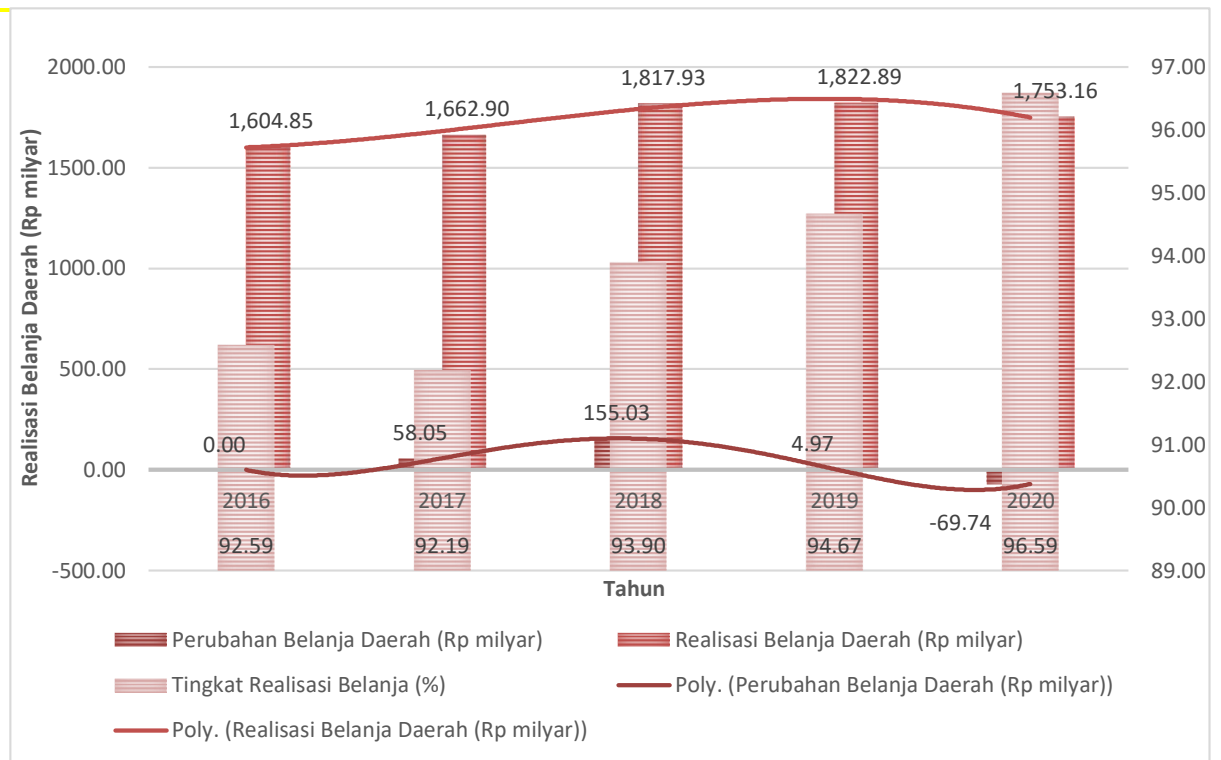
## **B. Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Kebijakan pendapatan yang diarahkan utk optimalisasi PAD (PBBP2, BPHTB, Retribusi Kesehata, Kekayaan Daerah, Pendapatan lain-lain);
2. Belanja Pegawai ditetapkan menurun secara proporsional;
3. Belanja Langsung diarahkan untuk mencapai target RPJMD khususnya yang memiliki pelayanan minimum;
4. Kebijakan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan ditambah dana insentif desa (DINDA) sebagai kebijakan khusus yang diarahkan bagi desa yang memiliki BUMDes berkinerja baik;
5. Kebijakan pembiayaan untuk penguatan PAD dan ekonomi melalui penyertaan modal dan dana bergulir.

Pada struktur APBD, anggaran belanja diklasifikasi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

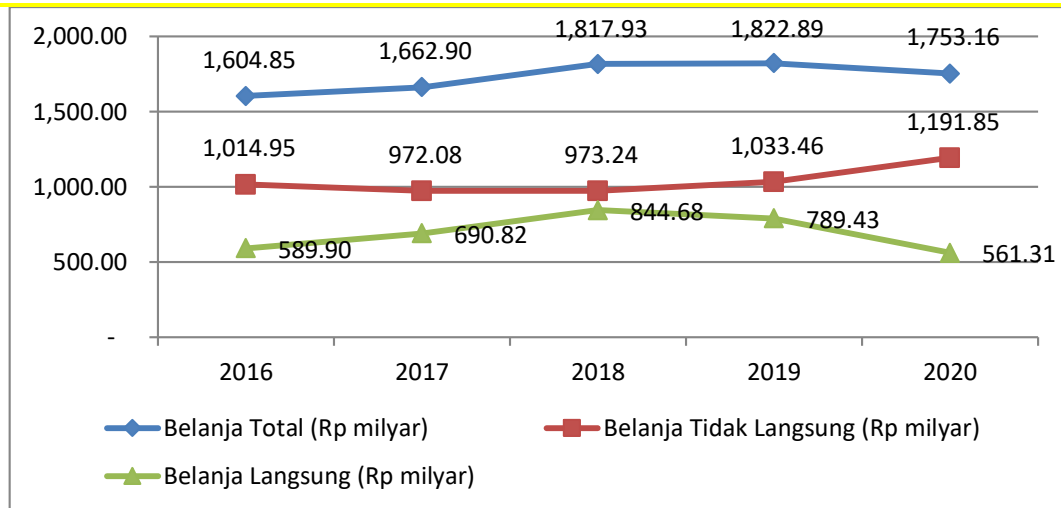


Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)

**Grafik 3. 4 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (dalam milyar Rupiah)**

Berdasarkan grafik 3.4 belanja daerah Kabupaten Bima pada tahun 2016 - 2020 mengalami tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,32%. Kenaikan realisasi belanja terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp 155,03 milyar dan terkecil terjadi pada Tahun 2019 sebesar Rp 4,97 milyar. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup mencolok yakni Rp 68,94 milyar yang disebabkan adanya kebijakan *refocussing* yang diambil pemerintah sehingga berdampak menurunnya dana transfer yang selanjutnya mempengaruhi realisasi beberapa pos belanja.

Dilihat dari realisasi anggaran belanja berkisar 92,19% - 96,59 % yang artinya penyerapan anggaran belanja daerah sangat baik karena berada di atas 90-an persen.



Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)

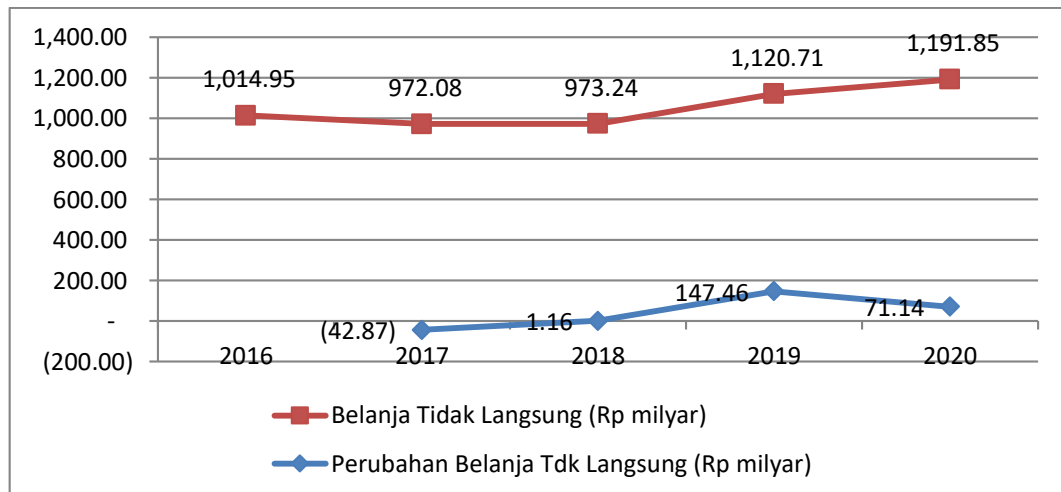
**Grafik 3. 5 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Dalam Milyar Rupiah)**

Berdasarkan grafik 3.5 komponen belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari 2019 – 2020 yang disebabkan pengalihan belanja hibah program pada belanja langsung ke belanja tidak langsung. Di samping meningkatnya hibah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020.

### 1) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan komponen belanja yang disediakan yang tidak berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Rincian Belanja Tidak Langsung terdiri dari 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Hibah, 3) Belanja Bantuan sosial, 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa, dan 6) Belanja Tak Terduga.

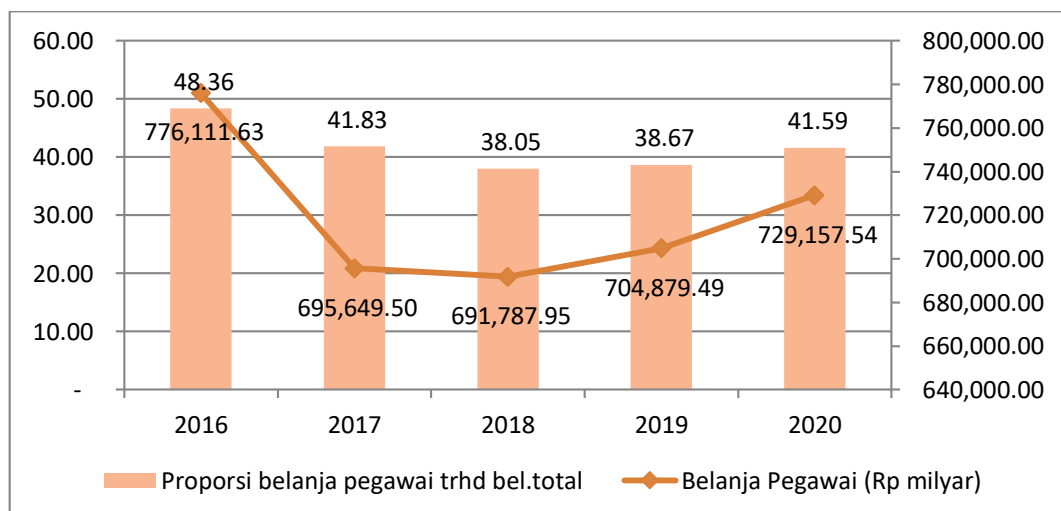
Realisasi komponen belanja tidak langsung terbesar didominasi oleh Belanja Pegawai. Namun realisasinya terus menurun seiring banyaknya pegawai yang pension dan rekrutmen pegawai baru yang jumlahnya relative kecil dinandingkan kebutuhan daerah. Kenaikan gaji juga merupakan variable utama penentu realisasi belanja pegawai yang dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020) hanya terjadi pada Tahun 2019.



Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)

**Grafik 3. 6 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Dalam Milyar Rupah)**

Berdasarkan grafik 3.6 belanja tidak langsung cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan realiasi dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp 42,87 milyar, kemudian meningkat dari Rp 1,16 milyar Tahun 2018 sampai menjadi sebesar Rp 71,14 milyar Tahun 2020. Penurunan realisasi Tahun 2017 disebabkan efisiensi belanja pegawai. Sementara kenaikan belanja tidak langsung pada Tahun 2019 bersumber dari kenaikan gaji pegawai, hibah dan bantuan keuangan kepada desa.



Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)

**Grafik 3. 7 Realisasi Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan lainnya) dan Proporsi Terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Dalam Milyar Rupah)**



Berdasarkan grafik 3.7 di atas belanja pegawai mengalami penurunan apabila dibandingkan kondisi 2020 terhadap 2016 terjadi trend yang menurun, dari Rp 776,11 milyar menjadi Rp 729,15 milyar. Hal itu sejalan juga dengan rasio belanja pegawai terhadap belanja total yang terus menurun dari 48,36 persen tahun 2016 menjadi 41,49 persen Tahun 2020. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan efisiensi belanja pegawai untuk diarahkan ke belanja yang dapat berdampak pada pelayanan dan kebutuhan publik.

## **2) Belanja Langsung (BL)**

Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah artinya belanja tersebut langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi yang telah ditetapkan. Belanja Langsung terdiri dari:

### **➤ Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada kelompok belanja langsung ini merupakan belanja honorarium/jasa yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan pemerintah daerah.

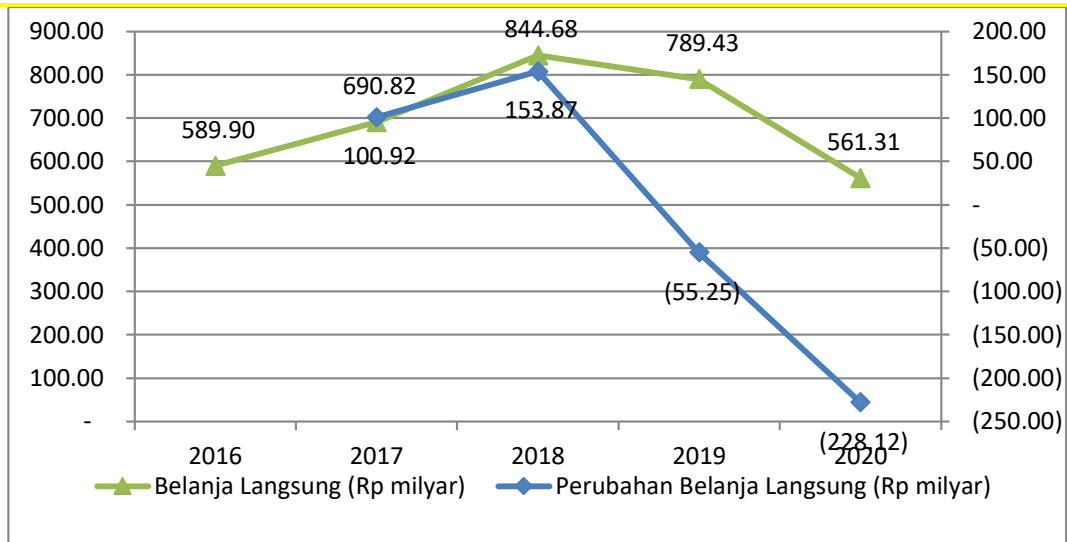
### **➤ Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada kelompok belanja langsung merupakan belanja pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau tidak memenuhi standar kapitalisasi sebagai aset tetap, serta belanja pemakaian jasa dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **➤ Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal pada kelompok Belanja Langsung ini merupakan belanja pengadaan dan/atau pembangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau memenuhi kriteria aset tetap guna mendukung operasional pemerintah daerah.

Target Belanja Langsung Kabupaten Bima tahun 2016 – 2020 rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 9,19%, dengan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 0,49%.



Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021. (Diolah)

**Grafik 3. 8 Realisasi dan Perubahan Belanja Langsung Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)**

Berdasarkan grafik 3.8, belanja langsung cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2017-2018 terjadi peningkatan realisasi dari Rp 100,92 milyar menjadi Rp 153,87 milyar. Namun terjadi penurunan pada Tahun 2019 sebesar Rp 55,25 milyar dan menurun lagi Tahun 2020 sebesar Rp 228,12 milyar. Hal tersebut disebabkan tidak terealisasinya beberapa pos belanja modal yang telah dianggarkan antara lain masjid agung Bima dan pos lainnya. Komponen belanja yang mengalami penurunan sejak 2018-2020 yang disebabkan terbatasnya dana transfer dari pusat terutama Dana Alokasi Khusus yang dipotong langsung oleh kementerian teknis.

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus anggaran.

Jika APBD diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD diperkirakan dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut.





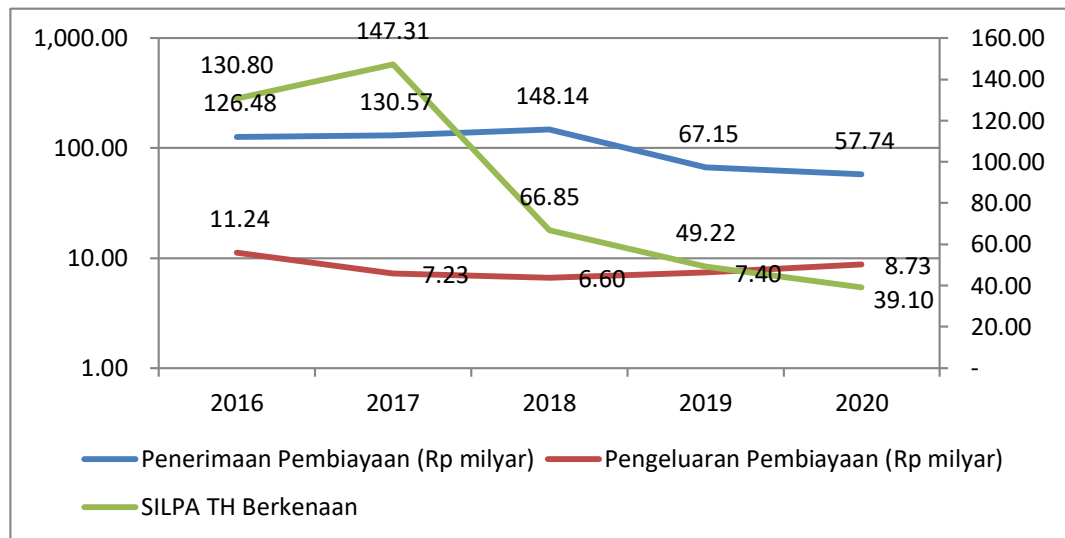
Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Ralisasi pembiayaan daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada table 3.6.

**Tabel 3. 6 *Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020***

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto
		Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Daerah	
1	2016	126,482,519,640.63	11,240,458,526.39	115,242,061,114.24
2	2017	130,570,212,505.03	7,230,000,000.00	123,340,212,505.03
3	2018	148,139,520,311.59	6,600,000,000.00	141,539,520,311.59
4	2019	67,150,164,750.58	7,395,000,000.00	59,755,164,750.58
5	2020	57,739,165,787.72	8,728,146,600.00	49,011,019,187.72

**Sumber: BPKAD Kab. Bima, Tahun 2020.**

Berdasarkan tabel 3.6 penerimaan pembiayaan pada Tahun 2016 masih cukup tinggi, namun terus meneus menurun sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya penyerapan anggaran daerah. Sebaliknya untuk pengeluaran pembiayaan relatif stabil yang diarahkan untuk penyertaan modal daerah dan dana bergulir untuk menggerakkan ekonomi mayarakat mellaui investasi daerah.



Sumber: BPKAD Kab. Bima, Tahun 2016-2020. (Diolah)

**Grafik 3. 9 Realisasi Pos Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rupiah)**

Melihat tren grafik 3.9 di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bima telah mengambil kebijakan yang tepat dan hati-hati (prudent) terhadap pengelolaan keuangan di mana sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkecaraan menunjukkan angka yang positif dan cenderung menurun, dari Rp 130,80 milyar tahun 2016 menjadi Rp 39,10 milyar tahun 2020. Meskipun kebijakan penyusunan anggaran menggunakan sistem defisit yang ditutup dengan pembiayaan netto, namun dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bima selalu mampu menghasilkan anggaran yang surplus.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan tiga pos dalam pengelolaan keuangan di daerah yaitu kondisi asset, kewajiban dan ekuitas dana. Berikut ini kondisi pertumbuhan pos-pos neraca di Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020.

Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan tiga pos utama yaitu asset, kewajiban dan ekuitas daerah. Berikut ini gambaran umum neraca Daerah Kabupaten Bima yang disajikan menurut pos pembentuknya.



**Tabel 3. 7 Neraca dan Pertumbuhan Masing-Masing Pos Neraca Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertum- buhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>ASET</b>	<b>2,117,024,551,641.83</b>	<b>2,164,346,598,475.99</b>	<b>2,308,185,077,511.52</b>	<b>2,524,415,074,449.68</b>	<b>2,690,543,655,162.21</b>	<b>6.58</b>
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>171,380,106,616.48</b>	<b>160,250,224,907.96</b>	<b>190,700,397,678.76</b>	<b>118,250,224,060.85</b>	<b>89,190,162,066.09</b>	<b>(24.58)</b>
I	a Kas	126,539,246,163.21	131,429,371,151.53	147,326,998,609.08	66,665,523,146.58	49,255,029,658.46	(26.12)
	b Piutang	36,333,328,527.44	22,018,825,827.43	34,510,483,353.68	41,812,684,376.27	30,977,967,084.63	(25.91)
	c Persediaan	8,507,531,925.83	6,802,027,929.00	8,862,915,716.00	9,772,016,538.00	8,957,165,323.00	(8.34)
II	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>60,657,418,527.20</b>	<b>71,392,453,642.61</b>	<b>76,709,425,800.64</b>	<b>84,677,172,878.77</b>	<b>87,219,616,034.61</b>	<b>3.00</b>
	a Investasi Non Permanen	1,583,920,771.00	1,046,843,192.00	1,567,624,576.50	1,034,419,583.50	395,525,007.80	61.76)
	b Investasi Permanen	59,073,497,756.20	70,345,610,450.61	75,141,801,224.14	83,642,753,295.27	86,824,091,026.81	3.80
III	<b>ASET TETAP</b>	<b>1,880,306,185,744.28</b>	<b>1,928,407,768,593.12</b>	<b>2,039,346,583,153.04</b>	<b>2,300,571,961,120.98</b>	<b>2,490,697,123,061.43</b>	<b>8.26</b>
	a Tanah	491,771,275,983.67	507,990,117,271.67	473,866,149,675.67	496,809,300,486.67	505,707,074,280.67	1.79
	b Peralatan dan Mesin	386,112,096,674.37	415,703,186,868.06	328,139,843,716.67	374,874,253,452.04	440,483,542,128.82	17.50
	c Gedung dan Bangunan	632,041,396,748.59	848,694,208,267.16	858,361,122,876.16	1,051,301,935,759.88	1,177,765,257,406.88	12.03
	d Jalan, Irigasi dan Jaringan	747,849,680,992.15	848,633,026,292.15	1,081,904,754,107.14	1,236,957,387,581.46	1,333,089,735,581.47	7.77
	e Aset Tetap Lainnya	49,203,365,445.53	34,584,589,904.00	44,502,656,849.20	53,877,525,869.20	60,981,568,942.03	13.19
	f Konstruksi Dalam Pengerjaan	47,712,183,350.00	182,873,420,750.33	128,634,100,995.00	71,356,019,643.11	81,693,862,900.00	14.49



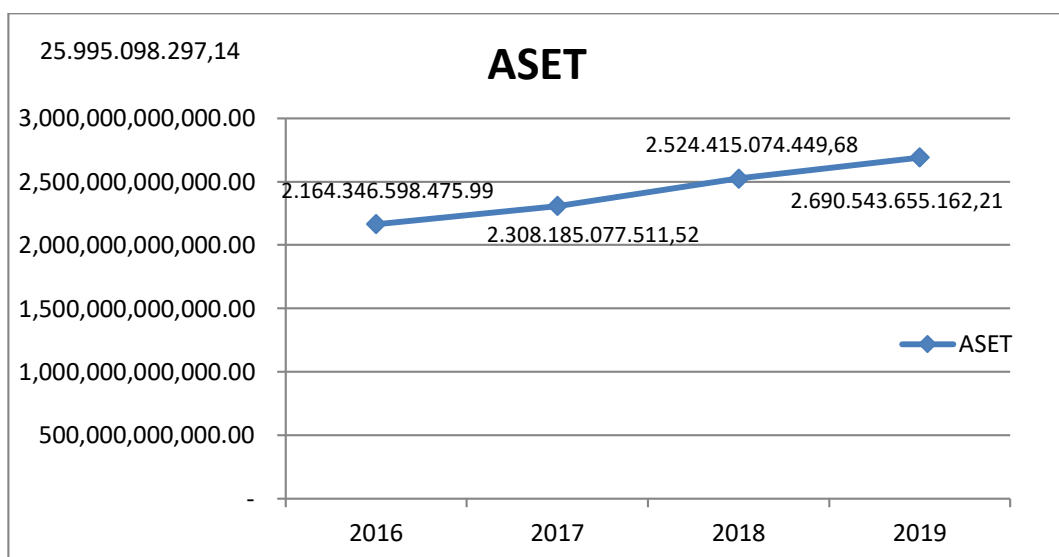
No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertum- buhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
g	Akumulasi Penyusutan	(474,383,813,450.03)	(910,070,780,760.25)	(876,062,045,066.80)	(984,604,461,671.38)	(1,109,023,918,178.44)	12.64
IV	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>4,680,840,753.87</b>	<b>4,296,151,332.30</b>	<b>1,428,670,879.08</b>	<b>20,915,716,389.08</b>	<b>23,436,754,000.08</b>	<b>12.05</b>
a	Tagihan Penjualan Angsuran	1,595,880.00	1,595,880.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0,00
b	Tuntutan Ganti Rugi	693,580,702.43	706,192,440.43	499,541,222.43	499,541,222.43	489,541,222.43	(2.00)
c	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
d	Aset Tak Berwujud	357,811,111.11	288,555,555.55	221,276,665.67	133,236,665.67	109,531,666.67	(17.79)
e	Aset Lain-Lain	3,627,853,060.33	3,299,807,456.32	707,847,990.98	20,282,933,500.98	22,837,676,110.98	12.60
B	<b>I KEWAJIBAN</b>	<b>20,065,071,508.27</b>	<b>25,995,098,297.14</b>	<b>13,400,263,526.00</b>	<b>1,141,982,386.00</b>	<b>4,898,536,579.00</b>	<b>328.95</b>
a	Kewajiban Jangka Pendek	20,065,071,508.27	25,995,098,297.14	13,400,263,526.00	1,141,982,386.00	4,898,536,579.00	328.95
b	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	<b>I EKUITAS DANA</b>	<b>2,096,959,480,133.56</b>	<b>2,138,351,500,178.85</b>	<b>2,294,784,813,985.52</b>	<b>2,523,273,092,063.68</b>	<b>2,685,645,118,583.21</b>	<b>6.43</b>
a	Ekuitas Dana Lancar	2,096,959,480,133.56	2,138,351,500,178.85	2,294,784,813,985.52	2,523,273,092,063.68	2,685,645,118,583.21	6.43
b	Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS</b>		<b>2,117,024,551,641.83</b>	<b>2,164,346,598,475.99</b>	<b>2,308,185,077,511.52</b>	<b>2,524,415,074,449.68</b>	<b>2,690,543,655,162.21</b>	<b>6.58</b>

Sumber: BPKAD Kab. Bima, Tahun 2020.



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dari kurun waktu 2016 – 2019, jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 6,58%. Kenaikan Berikut ini gambar pertumbuhan aset yang dimiliki.



Sumber: BPKAD Kabupaten Bima

**Grafik 3. 10 Pertumbuhan Aset Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019**

Berdasarkan proporsi pos aset daerah, pos aset yang paling tinggi adalah pos aset tetap dengan rata-rata persentase adalah sebesar 90,29% dari total aset, sedangkan yang paling rendah adalah pos aset lainnya yaitu rata-rata sebesar 0,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.8.

Jenis aset tetap adalah dalam bentuk: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah yang paling besar adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan.



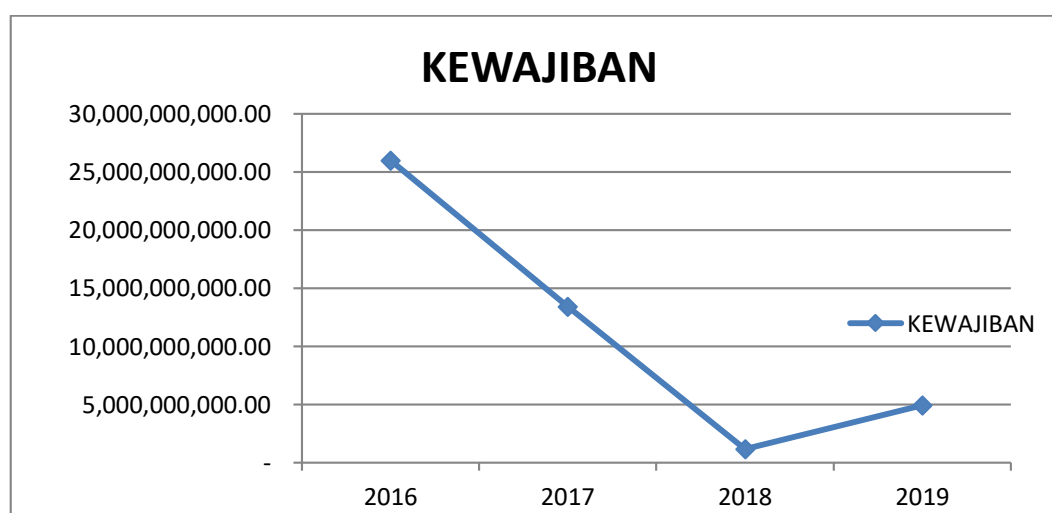
**Tabel 3. 8 Proporsi Pos Aset terhadap Total Aset Kabupaten Bima Tahun 2016-2019**

Uraian	Tahun				Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	
Aset Lancar	7,40	8,26	4,68	3,31	5,92
Investasi Jangka Panjang	3,30	3,32	3,35	3,24	3,30
Aset Tetap	89,10	88,35	91,13	92,57	90,29
Aset Lainnya	0,20	0,06	0,83	0,87	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Sumber: BPKAD Kabupaten Bima**

### A. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019 adalah kewajiban jangka pendek, artinya adalah kewajiban yang jangka waktu penyelesaiannya maksimal satu periode atau satu tahun. Kewajiban Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2018 terus menunjukkan penurunan yaitu dari Rp 25.995.098.297,14 pada Tahun 2016, menurun menjadi Rp 1.141.262.526,00 pada Tahun 2018. Namun pada Tahun 2019 sedikit meningkat menjadi Rp 4.898.536.579,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.11.



**Sumber: BPKAD Kabupaten Bima**

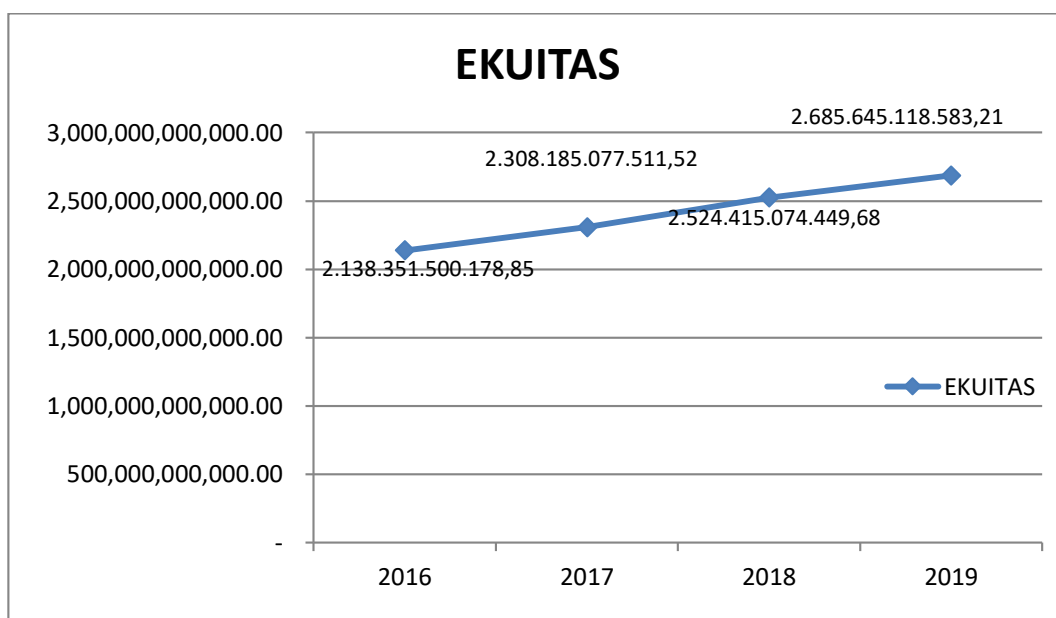
**Grafik 3. 11 Perkembangan Kewajiban Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019**





## B. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah ekuitas Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2019 menunjukkan hal yang positif dan terus bertumbuh, dengan rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 6,42%, Tahun 2016 ekuitas Kabupaten Bima sebesar Rp 2.138.351.500.178,85 dan meningkat menjadi Rp 2.685.645.118.583,21 pada Tahun 2019. Berikut ini perkembangan ekuitas Kabupaten Bima pada Tahun 2016 – 2019:



Sumber: BPKAD Kabupaten Bima

Grafik 3. 12 Perkembangan Ekuitas Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2019

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Bima sebagian besar diperuntukan untuk Belanja Tidak Langsung terutama untuk pemenuhan kebutuhan aparatur atau gaji pegawai. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2016-2020 proporsi belanja aparatur mengalami fluktuatif dari, Tahun 2016 belanja pegawai Kabupaten Bima sebesar Rp 845.396.159.673,14, Tahun 2017 turun menjadi Rp 750.965.087.699,55 seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur adanya sebagian yang selama ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota,



mulai Tahun 2017 beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi antara lain: pendidikan menengah, bidang ESDM, bidang rehabilitasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta bidang ketenagakerjaan. Dengan beralihnya kewenangan tersebut membawa konsekuensi terjadinya penurunan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Penurunan ini terjadi hingga Tahun 2018 yaitu menjadi Rp 726.454.937.199,28. Tahun 2019 – 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi Rp 729.383.220.779,71 Tahun 2019 dan Rp 737.586.632.116,35 Tahun 2020, kenaikan terjadi dengan adanya kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala dan dengan adanya pengangkatan ASN baru.

### **3.2.2 Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 3.9.

**Tabel 3. 9 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Netto
1	2016	126.482.519.640,63	11.240.458.526,39	115.242.061.114,24
2	2017	130.570.212.505,03	1,661,934,898,547.95	123.340.212.505,03
3	2018	148.139.520.311,59	1,860,108,587,437.08	141.539.520.311,59
4	2019	67.150.164.750,68	1,893,749,003,510.68	67.150.164.750,58
5	2020	57.739.165.787,72	1,922,557,290,449.92	49.434.435.839,72

**Sumber: BPKAD Kab. Bima, Tahun 2020.**

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 3.10.



**Tabel 3. 10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi pendapatan daerah	1.620.415.397.470,95	1.686.871.253.543,05	1.743.235.708.137,33	1.812.363.791.304,57	1.744.042.793.901,49
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.604.853.577.166,89	1.662.901.947.395,49	1.817.928.313.612,34	1.822.894.520.191,43	1.118.033.624.366,40
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.240.458.526,39	7.230.000.000,00	6.600.000.000,00	7.395.000.000,00	8.728.146.600,00
4	Devisit Riil	4,321,361,778	16,739,306,148	-81,292,605,475	-17,925,728,887	-18,634,903,708



### **3.3 Kerangka Pendanaan**

#### **3.3.1 Proyeksi Keuangan Tahun 2021 – 2026**

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran keuangan daerah dimasa datang baik berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah dengan nilai perkiraan yang terukur secara rasional dan dihitung berdasarkan tren rata-rata pertumbuhan yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir

Hasil perhitungan proyeksi pendapatan daerah dan belanja Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 dapat terlihat pada tabel 3.11 menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 4,19% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan perkembangan Pendapatan Transfer relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80% dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhan sebesar 1,09% sehingga proyeksi Pendapatan pertumbuhan Rata-rata sebesar 2.84%, sedangkan Proyeksi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan 2.86%, Belanja Modal proyeksi rata-rata pertumbuhan rata-rata 5,57%, Belanja Tidak Terduga proyeksi rata-rata pertumbuhan 7.41%, sedangkan Belanja Transfer Modal proyeksi rata-rata pertumbuhan rata-rata 1,50% sehingga Belanja daerah diproyeksi rata-rata pertumbuhan 2,78%.

Proyeksi keuangan dengan mempertimbangkan seperangkat regulasi tersebut merumuskan pentingnya perubahan kebijakan anggaran dari anggaran pemerintah yang tertuang dalam APBN, sampai dengan perubahan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD.

Perubahan kebijakan anggaran tersebut dipayungi dengan aturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut memberikan payung hukum tertinggi dalam kondisi darurat agar Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, melakukan langkah-langkah cepat dalam perubahan anggaran. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan:



- 1) Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk melakukan perubahan alokasi antar program;
- 2) Perubahan alokasi;
- 3) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian, Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Inpres tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran.



**Tabel 3. 11 Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bima Tahun 2021 - 2026**

No	Komponen Pendapatan	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>154,093,206,361.00</b>	<b>160,853,540,309.05</b>	<b>167,979,836,852.50</b>	<b>175,316,744,528.79</b>	<b>182,925,150,752.48</b>	<b>190,873,832,541.84</b>
01	Pendapatan Pajak Daerah	22,808,614,000.00	23,808,614,000.00	24,880,001,630.00	25,875,201,695.20	26,910,209,763.10	27,986,618,153.53
02	Pendapatan Retribusi Daerah	26,077,913,400.00	26,577,913,400.00	27,109,471,668.00	27,651,661,101.36	28,135,565,170.63	28,613,869,778.53
03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,319,789,327.00	6,635,778,793.35	6,967,567,733.02	7,315,946,119.67	7,681,743,425.65	8,065,830,596.93
04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98,886,889,634.00	103,831,234,115.70	109,022,795,821.49	114,473,935,612.56	120,197,632,393.19	126,207,514,012.85
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,584,004,439,845.00</b>	<b>1,629,510,267,719.84</b>	<b>1,677,956,663,958.40</b>	<b>1,730,328,254,252.46</b>	<b>1,778,578,572,985.21</b>	<b>1,825,695,958,791.93</b>
01	Transfer Pemerintah Pusat	1,527,112,458,000.00	1,569,108,050,595.00	1,613,827,630,036.96	1,662,242,458,938.07	1,706,291,184,099.92	1,748,949,181,202.42
02	Transfer Antar Daerah	56,891,981,845.000	60,402,217,124.84	64,129,033,921.44	68,085,795,314.39	72,286,688,885.29	76,746,777,589.51
<b>4.3</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>87,906,649,000.00</b>	<b>88,805,211,450.00</b>	<b>89,748,702,022.50</b>	<b>90,739,367,123.63</b>	<b>91,779,565,479.81</b>	<b>92,871,773,753.80</b>
01	Pendapatan Hibah	17,971,249,000.00	18,869,811,450.00	19,813,302,022.50	20,803,967,123.63	21,844,165,479.81	22,936,373,753.80
02	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	69,935,499,000.00	69,935,400,000.00	69,935,400,000.00	69,935,400,000.00	69,935,400,000.00	69,935,400,000.00
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1,826,004,295,206.00</b>	<b>1,879,169,019,478.89</b>	<b>1,935,685,202,833.40</b>	<b>1,996,384,365,904.87</b>	<b>2,053,283,289,217.50</b>	<b>2,109,441,565,087.58</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,275,078,713,423</b>	<b>1,314,772,686,441</b>	<b>1,354,224,529,419</b>	<b>1,423,595,170,459</b>	<b>1,433,355,683,520</b>	<b>1,474,506,040,753</b>
01	Belanja Pegawai	894,267,888,826.00	864,130,076,880.46	879,252,353,225.86	892,441,138,524.25	908,058,858,448.43	923,949,888,471.27
02	Belanja Barang dan Jasa	367,271,929,397.00	390,308,245,160.82	412,775,198,644.67	423,413,958,576.90	459,404,145,055.94	482,374,352,308.73
04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Belanja Hibah	37,715,852,000.00	38,470,169,040.00	39,239,572,420.80	83,634,797,973.22	40,220,561,713.32	41,226,075,774.64
06	Belanja Bantuan Sosial	20,823,043,200.00	21,864,195,360.00	22,957,405,128.00	24,105,275,384.40	25,672,118,284.39	26,955,724,198.61
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>280,980,729,343.00</b>	<b>285,407,140,050.70</b>	<b>303,048,060,591.59</b>	<b>295,073,650,859.15</b>	<b>323,627,120,167.51</b>	<b>377,845,991,387.75</b>
01	Belanja Modal Tanah	9,875,000,000.00	9,914,500,000.00	10,112,790,000.00	9,235,045,800.00	9,927,674,235.00	10,126,227,719.70
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,452,674,787.00	91,241,728,282.74	95,803,814,696.88	100,594,005,431.72	105,623,705,703.31	110,904,890,988.47
03	Belanja Modal Gedung dan	124,752,806,500.00	125,871,626,662.50	134,682,640,528.88	119,683,035,508.93	137,635,490,835.27	140,388,200,651.97





No	Komponen Pendapatan	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bangunan						
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56,531,248,056.00	58,010,060,505.46	62,061,134,740.84	65,164,191,477.88	71,028,968,710.89	79,000,996,520.65
05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	369,000,000.00	378,225,000.00	387,680,625.00	397,372,640.63	411,280,683.05	425,675,506.95
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2,700,000,000.00</b>	<b>2,916,000,000.00</b>	<b>3,149,280,000.00</b>	<b>3,401,222,400.00</b>	<b>3,673,320,192.00</b>	<b>3,967,185,807.36</b>
01	Belanja Tidak Terduga	2,700,000,000.00	2,916,000,000.00	3,149,280,000.00	3,401,222,400.00	3,673,320,192.00	3,967,185,807.36
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>291,394,852,440.00</b>	<b>294,642,776,191.50</b>	<b>299,086,546,713.35</b>	<b>303,597,456,370.60</b>	<b>308,922,963,699.93</b>	<b>314,341,918,444.38</b>
01	Belanja Bagi Hasil	4,731,152,740.00	4,825,775,794.80	4,922,291,310.70	5,020,737,136.91	5,121,151,879.65	5,223,574,917.24
02	Belanja Bantuan Keuangan	286,663,669,700.00	289,817,000,396.70	294,164,255,402.65	298,576,719,233.69	303,801,811,820.28	309,118,343,572.14
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1,850,154,295,206.00</b>	<b>1,897,738,603,083.47</b>	<b>1,959,508,416,724.26</b>	<b>2,025,667,500,088.52</b>	<b>2,070,579,087,579.50</b>	<b>2,130,661,163,392.70</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>31,750,000,000.00</b>	<b>28,309,583,604.58</b>	<b>35,074,213,890.87</b>	<b>42,161,784,183.65</b>	<b>32,172,245,862.00</b>	<b>38,406,685,930.12</b>
01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31,000,000,000.00	27,559,583,604.58	34,324,213,890.87	41,411,784,183.65	31,422,245,862.00	37,656,685,930.12
02	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7,600,000,000.00</b>	<b>9,740,000,000.00</b>	<b>11,251,000,000.00</b>	<b>12,878,650,000.00</b>	<b>14,876,447,500.00</b>	<b>17,187,114,625.00</b>
01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,600,000,000.00	8,740,000,000.00	10,051,000,000.00	11,558,650,000.00	13,292,447,500.00	15,286,314,625.00
05	Dana Bergulir	0.00	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	1,320,000,000.00	1,584,000,000.00	1,900,800,000.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>24,150,000,000.00</b>	<b>18,569,583,604.58</b>	<b>23,823,213,890.87</b>	<b>29,283,134,183.65</b>	<b>17,295,798,362.00</b>	<b>21,219,571,305.12</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*Sumber: BPPKAD Kab. Bima, Tahun 2021 (Diolah)*



### **3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Belanja daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2016 - 2020 mengalami tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,32%. Kenaikan realisasi belanja terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp 155,03 milyar dan terkecil terjadi pada Tahun 2019 sebesar Rp 4,97 milyar. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup mencolok yakni Rp 68,94 milyar yang disebabkan adanya kebijakan *refocussing* yang diambil pemerintah sehingga berdampak menurunnya dana transfer yang selanjutnya mempengaruhi realisasi beberapa pos belanja.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bima dan dengan adanya dampak pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan adanya tekanan anggaran (*fiscal distress*). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi Covid-19, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir Tahun 2020 pandemi ini akan mereda, maka baru Tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas; dan
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat.



### **3.4 Alternatif Sumber Pendanaan Lain Pembangunan**

Pendapatan Daerah mengalami peningkatan selama Tahun 2016 – 2020 terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 123,62 milyar atau tumbuh rata-rata Rp 30,90 milyar setiap tahunnya atau 1,91 persen.

Realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Bima pada kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan pertumbuhan yang negatif yakni sebesar Rp 93,17 milyar atau minus 1,73%. Selama kurun waktu tersebut hanya Dana Alokasi Khusus yang mengalami pertumbuhan yang positif karena adanya kebijakan pemerintah yang alokasinya berbasis pada usulan (proposal) program pemerintah daerah.

Untuk percepatan pembangunan tersebut Kabupaten Bima dapat mendapatkan sumber dana alternatif antara lain dalam rangka mempercepat pembangunan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bima akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota lainnya, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

#### **3.4.1 Sumber APBN**

Pembangunan Kabupaten Bima selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana hiba daerah dan tugas pembantuan serta dana khusus lainnya.

#### **3.4.2 Kerjasama Antar Kabupaten/Kota**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota lainnya. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.



### **3.4.3 Pinjaman Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah;



9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

#### **3.4.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Bima dengan sumber pendanaan lain tersebut diatas untuk membiaya pembangunan infrastruktur dengan tujuan :

##### **1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan**

Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan/Wilayah di Kabupaten Bima, mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut.

##### **2. Upaya Mengurangi Kesenjangan antara wilayah**

Percepatan pengembangan desa-desa terpencil, terisolir, yang disesuaikan dengan karakteristik budaya, adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.



### **3. Perbaikan Pelayanan Dasar Untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah**

Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.

### **4. Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital Untuk Mendorong Pembangunan Daerah**

Peran TIK sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Bima.

### **5. Penguatan Konektivitas**

Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah disekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antar wilayah.





## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala daerah, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Bima merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bima**

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bima dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar Perangkat Daerah sesuai bidang urusan pemerintahan. FGD yang dilaksanakan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja, yang dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah.

Berikut merupakan permasalahan pembangunan secara umum yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah:.

- 1) Ketaatan nilai budaya dan kearifan lokal masih rendah;
- 2) Masih terjadi konflik horizontal antar masyarakat;
- 3) Masih adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Masih rendahnya mutu pendidikan;



- 5) Masih rendahnya SDM pendukung fasilitas kesehatan;
- 6) Angka kemiskinan masih tinggi;
- 7) Pembangunan infrastruktur belum berbasis kawasan dan masih ada kesenjangan antar wilayah;
- 8) Masih rendah penerapan SPM;
- 9) Angka pengangguran masih tinggi;
- 10) Sarana prasarana pertanian belum efektif dalam menunjang produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian;
- 11) Belum terbentuk kawasan pertanian, peternakan, perikanan secara terpadu;
- 12) Masih rendahnya konsolidasi lahan untuk pemanfaatan ruang;
- 13) Masih kurang ruang terbuka hijau dan fasilitas lainnya yang ramah anak dan distabilitas;
- 14) Meningkatnya kerusakan hutan dan lahan;
- 15) Masih sering terjadi bencana Kebakaran;
- 16) Masih kurang Desa Mandiri;
- 17) Masih rendahnya kualitas dan daya saing UMKM;
- 18) Masih rendahnya pengelolaan persampahan;
- 19) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bima;
- 20) Belum adanya komoditas lokal yang menjadi branding prodak daerah;
- 21) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan;
- 22) Belum optimal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 23) Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis.

#### **4.2 Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dalam penyusunan RPJMD diidentifikasi dari berbagai sumber yaitu :

1. Permasalahan pembangunan Kabupaten Bima;
2. Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bima;



3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bima;
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kabupaten Bima sesuai RPJPD dan RTRW Kabupaten Bima;
5. KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

#### **4.2.1 Pertimbangan Penentuan Isu Strategis**

##### **4.2.1.1 Penelaahan Terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu strategis antara lain:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, stabilitas daerah (keamanan, ketertiban dan politik), kesadaran dan penegakan hukum;
2. Akses dan layanan pendidikan;
3. Akses dan layanan kesehatan;
4. Infrastruktur wilayah;
5. Ketahanan Pangan;
6. Kemiskinan dan pengangguran;
7. Kemandirian perekonomian daerah;
8. Penataan ruang, perumahan dan pemukiman;
9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah;
10. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
11. Pariwisata, pelestarian dan pengembangan seni budaya.



#### **4.2.1.2 Penelaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024**

Isu yang dihadapi secara nasional adalah kesehatan, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan. Dua tahun terakhir ini isu kesehatan menjadi isu nomor 1 (satu) di Indonesia maupun di dunia, dengan terjadinya pandemic covid-19. Penyebaran *covid-19* menjadi ancaman global, yang melintasi batas-batas negara yang pada akhirnya membatasi pergerakan /perjalanan masyarakat. Dampak dari pandemi ini menyebabkan aktivitas manusia sehingga pertumbuhan ekonomi rendah. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi ekonomi dunia lebih buruk dari angka perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya dan diperkirakan output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5%. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia, karena imbas dari ekonomi global juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara masih menghadapi permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan dasar;
2. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam;
2. Belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intra pulau dan antar pulau di Kepulauan Nusa Tenggara;
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan;
4. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah; dan
5. Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

#### **4.2.1.3 Penelaahan terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023**

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan pembangunan kekinian di Provinsi NTB serta dari hasil analisa isu strategis global maupun nasional,



maka dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 ada 10 (sepuluh) isu strategis yang ditetapkan:

1. Daerah Rawan Bencana, yang ditandai dengan:
  - a. Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana;
  - b. Terbatasnya sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
2. Penataan ruang, konektivitas, dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal, yang ditandai dengan:
  - a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal;
  - b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai;
  - c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata;
  - d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata;
  - e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal;
  - f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata;
  - g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan:
  - a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - b. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah;
  - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal;
  - d. Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat;
  - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik;
  - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal;
  - g. Pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan belum optimal;
  - h. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan.
4. Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah, yang ditandai dengan:
  - a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah;
  - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi;



- c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*;
  - d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar;
  - e. Belum meratanya SDM kesehatan;
  - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal;
  - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal;
  - h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun.
5. Mutu dan daya saing proses dan hasil pendidikan belum optimal, yang ditandai dengan:
- a. Rata-rata lama sekolah masih rendah;
  - b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi;
  - c. Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri belum sesuai;
  - d. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, dan mutu lulusan melalui nilai UN;
  - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata;
  - f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa;
  - g. Akses Pendidikan yang belum merata;
  - h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
6. Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan:
- a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun;
  - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal;
  - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, lahan, pesisir dan laut;
  - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi legal sumber daya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah.
7. Pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi relatif lambat, yang ditandai dengan:
- a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan;
  - b. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata;
  - c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor;





- d. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah;
  - e. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang;
  - f. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan;
  - g. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal;
  - h. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal;
  - i. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal.
8. Pembangunan pariwisata melambat karena dampak pandemi Covid-19, yang ditandai dengan:
- a. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat;
  - b. Potensi pariwisata belum dikelola secara optimal terutama pada kawasan strategis dan desa;
  - c. Adanya penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat pandemi Covid-19.
9. Industrialisasi Produk Unggulan Daerah belum optimal, yang ditandai dengan:
- a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal.
  - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal.
  - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.
  - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang.
  - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal.
  - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal.
10. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Damai secara optimal, yang ditandai dengan:
- a. Indeks Demokrasi masih rendah.
  - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial.
  - c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan.
  - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi.



#### **4.2.1.4 Penelaahan Terhadap RTRW Kabupaten Bima**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa rencana tata ruang dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pada tahun kelima, tepat pada Tahun 2016, RTRW Kabupaten Bima telah dilakukan pengkajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bima yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Berdasarkan rekapitulasi hasil akhir penilaian terhadap RTRW Kabupaten Bima, bahwa secara kuantitatif, RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031 memiliki nilai kurang dari 85 yang berarti kualitasnya buruk. Sementara dari penilaian secara kualitatif, RTRW Kabupaten Bima masuk dalam Tipologi 5, dimana kualitas RTRW-nya buruk, ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan pelaksanaan pemanfaatannya rendah. Dengan demikian, maka RTRW kabupaten direkomendasikan untuk direvisi.

Oleh karena itu, berikut akan dijelaskan muatan rencana RTRW Kabupaten Bima, baik muatan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 maupun rancangan revisi yang akan diusulkan sebagai perubahan RTRW ke depannya.

##### **1) Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, terdapat penetapan pusat- pusat kegiatan yang meliputi meliputi :

1. PKWp di Kota Woha;
2. PKL terdiri atas Kore (Sanggar), O'o (Donggo), Naru (Sape), Sila (Bolo), Tangga (Monta), Maria (Wawo), dan Tawali (Wera);
3. PPK terdiri atas Karumbu (Langgudu), Cenggu (Belo), Kananta (Soromandi), Labuan Kananga (Tambora), Sumi (Lambu), Nipa (Amblawi), Kuta (Lambitu), Teke (Palibelo) , Parado Rato (Parado) dan Dena (Madapangga); dan
4. PPL terdiri atas Ntonggu Baru, Karampi, Wila Maci, Wadu Kopa, Oi Bura, Nggelu, Lere, Campa.



Sedangkan dalam rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bima, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kabupaten Bima dibagi menjadi 3 (tiga) hirarki, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Untuk PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) masih dilayani oleh PKW Raba di Kota Bima, sehingga untuk pusat kegiatan yang berskala nasional belum dimiliki oleh Kabupaten Bima.

Sesuai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima dan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdasarkan pada Permen ATR/BPN No. 11 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR, rencana sistem perkotaan yang berupa PKL yang ditetapkan di dalam wilayah Kabupaten Bima ada tiga, yaitu ;

- Perkotaan Woha (Kecamatan Woha);
- Perkotaan Sape (Kecamatan Sape); dan
- Perkotaan Kore (Kecamatan Sanggar).

## 2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, wilayah Kabupaten Bima dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan:

- a. Rencana pengembangan kawasan lindung dengan luas kurang lebih 140.790 Ha yang terbagi menjadi beberapa kawasan antara lain:
  1. Kawasan hutan lindung;
  2. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
  3. Kawasan perlindungan setempat;
  4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
  5. Kawasan rawan bencana alam; dan
  6. Kawasan lindung geologi.
- b. Rencana pengembangan kawasan budidaya dengan luas kurang lebih 298.149 Ha yang terbagi menjadi beberapa kawasan antara lain:
  1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
  3. Kawasan peruntukan pertanian;
  4. Kawasan peruntukan perikanan;
  5. Kawasan peruntukan pertambangan;



6. Kawasan peruntukan permukiman;
  7. Kawasan peruntukan industri;
  8. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
  9. Kawasan peruntukan lain.
- Sedangkan dalam rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bima, Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Bima meliputi:
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - Kawasan Perlindungan Setempat;
  - Kawasan Konservasi;
  - Kawasan Ekosistem Mangrove.
- Jenis kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Bima meliputi
- kawasan hutan produksi;
  - kawasan pertanian;
  - kawasan perikanan;
  - kawasan pertambangan dan energi;
  - kawasan permukiman;
  - kawasan peruntukan industri;
  - kawasan pariwisata;
  - kawasan pertahanan dan keamanan;
  - kawasan transportasi; dan
  - kawasan sumber daya air.





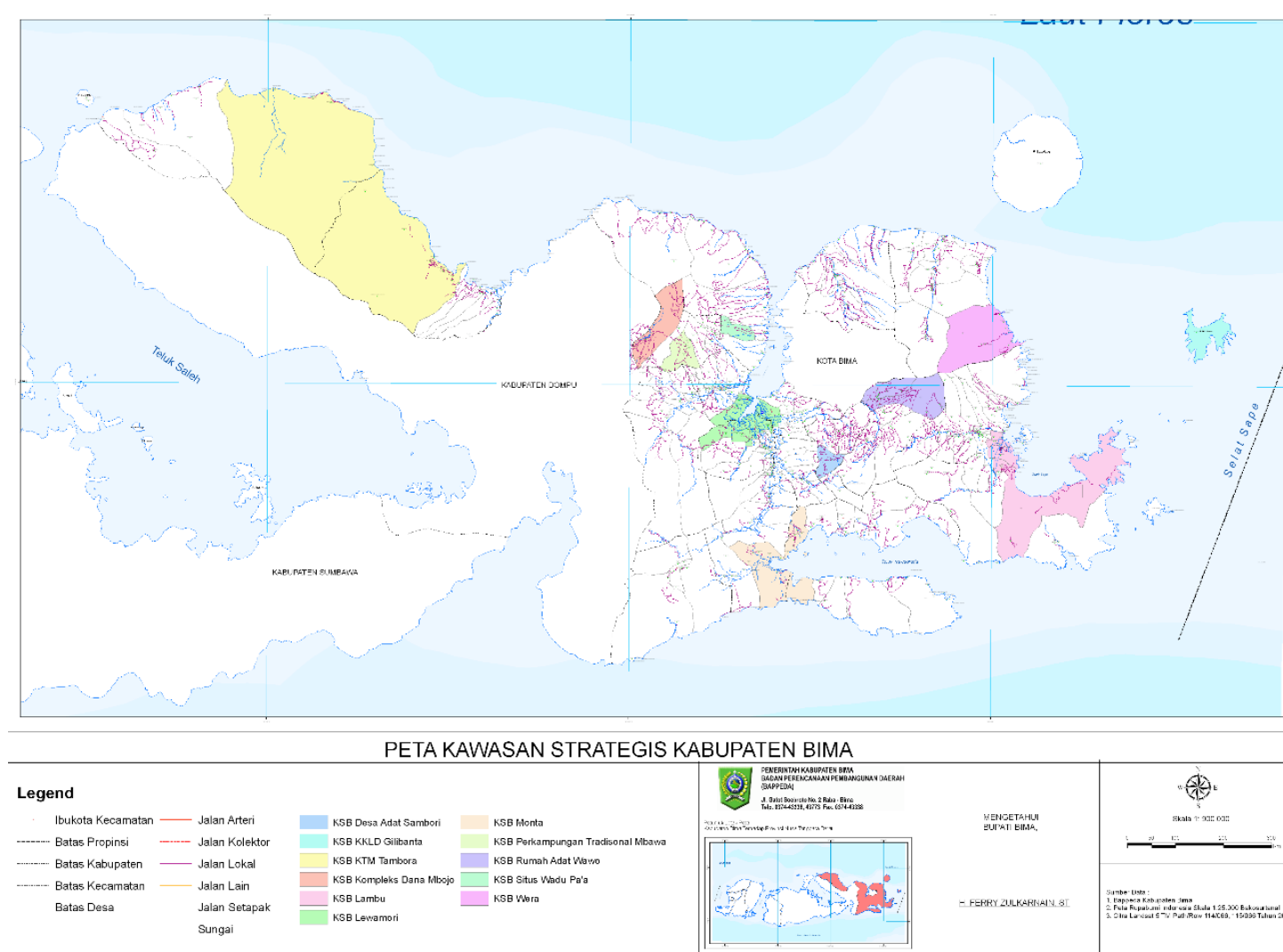
### 3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yaitu wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis kabupaten dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, antara lain:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bima yaitu:
  - Kawasan Strategis Lewamori meliputi Woha sebagai Ibukota Kabupaten Bima dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa;
  - Kawasan Minapolitan yang berpusat di Penapali Kecamatan Woha dan kawasan pariwisata di Pantai Kalaki;
  - Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora dengan sektor unggulan pertanian, peternakan, dan perkebunan;
  - Kawasan Strategis Wera yang meliputi Pai dan Oi Tui dengan sektor unggulan peternakan (sapi), perikanan (rumpuk laut) dan pariwisata;
  - Kawasan Strategis Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro O'o Waworada, Tolo Uwi, dsk dengan sektor unggulan perikanan (rumpuk laut), perikanan tangkap dan pariwisata (pantai Wane, Pantai Rontu); dan
  - Kawasan Strategis Lambu yang meliputi Sumi dan Nggelu dengan sektor unggulan peternakan (sapi), pertanian (jagung) dan perikanan tangkap.
- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gilibanta.
- c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Strategis Cagar Budaya yang meliputi :
  - Kompleks rumah adat-Wawo;
  - Perkampungan tradisional Sambori;
  - Perkampungan tradisional Mbawa-Donggo;
  - Kompleks Dana Mbojo-Donggo; dan
  - Situs Wadu Pa'a-Soromandi.



- d. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang meliputi :
- Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
  - Kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah uji coba sistem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem persenjataan;
  - Pembatasan dan penataan antara lahan terbangun disekitar pertahanan dan keamanan;
  - Penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan.



**Sumber: Bappeda Kabupaten Bima, Tahun 2021.**

**Gambar 4. 3 Peta Rencana Penetapan KSK Kabupaten Bima**

Sedangkan dalam rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bima, penetapan kawasan strategis kabupaten, antara lain:

1. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. Kawasan La Sakosa di Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Wera, Kecamatan Ambalawi, dan Kecamatan Wawo dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian, peternakan dan industri.

La Sakosa merupakan konsep integrasi yaitu Sape yang mewakili Sape, Lambu, Wawo, Teluk Waworada. Kemudian Komodo yang mewakili Pulau Gilibanta, Pulau Kelapa (Lambu), Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Sementara Sangiang menggambarkan Wera, Ambalawi, Pulau Sangiang, dan Asakota (Kota Bima). Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, NTT, dan Kota Bima), terkoneksi pada segala aspek pembangunan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, perhubungan, dan lain-lain. Selain itu Kawasan La Sakosa direncanakan sebagai kawasan pariwisata transit di mana wisatawan dapat singgah sedikit lebih lama untuk menikmati atraksi wisata di Kabupaten Bima;

- b. Kawasan Lewamori di Kecamatan Wohu, Kecamatan Bolo, dan Kecamatan Palibelo dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan-jasa, perikanan, pertanian dan industri;

- c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar dengan sektor unggulan pariwisata, peternakan, dan perikanan.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan, sehingga mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Fungsi perkotaan merujuk pada paradigma transmigrasi antara lain meliputi: pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri yang mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi barang produksi dan atau barang konsumsi, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, sarana pemerintahan, fasilitas umum.

Gunung Tambora telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional dan sebagai cagar biosfer dunia. Secara administrasi Gunung Tambora terletak di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, dengan luas area 2.071 km<sup>2</sup>.



Ditetapkannya Geopark Tambora dan sebagai cagar biosfer dunia akan memberi pengaruh terhadap perkembangan KTM Tambora, mulai terlihat aktivitas / kegiatan rohani yang ditandai dengan adanya yayasan hidayatullah, dermaga, serta wisatawan yang mulai berkunjung untuk melihat keindahan gunung tambora. Kelak diharapkan kawasan ini akan menjadi kutup pertumbuhan wilayah yang mampu memberikan pengaruh *trickle down effect* ke daerah-daerah hinterlandnya;

- d. Kawasan Pengembangan Sentra Tanaman Pangan Monta di Kecamatan Monta, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Belo dan Kecamatan Woha dengan sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.

Kawasan ini dipandang akan memberikan peranan besar dalam mendorong pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bima di masa mendatang. Posisinya yang memiliki potensi pertanian tanaman padi dan bawang merah, menjadikan Kecamatan Monta dan sekitarnya sebagai kawasan potensial untuk pengembangan kawasan Tanaman Pangan. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan Monta tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Monta, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Belo dan Kecamatan Woha.

Aktivitas pertanian di Kawasan ini menjadi salah satu stimulan bagi pertumbuhan kawasan karena pertanian merupakan *leading industry* yang mampu mempercepat pertumbuhan kawasan. Sebagai *urban catalyst*, aktivitas pertanian memberi dampak yang baik bagi perekonomian Kecamatan Monta dan sekitarnya. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah produksi tanaman pangan di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dari berbagai sektor, bukan hanya sektor pertanian menjadi salah satu alasan pemilihan konsep pertanian terpadu.

Pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis lingkungan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah di kawasan ini. Pembangunan yang dilakukan, berfokus pada sektor pertanian termasuk peternakan, perikanan pariwisata dan perdagangan dan jasa dengan mengandalkan konsep pembangunan berkelanjutan antara sosial, ekonomi dan lingkungan. Berkembangnya aktivitas pertanian di Kecamatan Monta dan sekitarnya, berdampak kepada semua aspek yang ada seperti perumahan (*public housing*), perdagangan dan jasa, transportasi serta ruang terbuka.



e. Kawasan Koridor Sila - Madapangga di Kecamatan Bolo dan Kecamatan Madapangga dengan fungsi utama perdagangan-jasa dan industri.

f. Kawasan Industri Madapangga di Kecamatan Madapangga, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Bolo, dan Kecamatan Donggo dengan sektor unggulan pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Kabupaten Bima sebagai salah satu wilayah agraris yang memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan penumbuhan dan pengembangan sektor perindustrian. Pergeseran posisi kontributor ekonomi pembangunan merupakan salah satu indikasi awal adanya tren aktifitas ekonomi yang bergeser dari sektor (basis) pertanian ke arah pengembangan konversi komoditi. Fenomena ini merupakan tuntutan kemajuan pembangunan dan merupakan langkah yang tepat dalam melakukan akselerasi pembangunan yang akan berjalan apa adanya jika hanya mengandalkan sektor basis.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan industri Kabupaten Bima merupakan salah satu langkah strategis untuk menyikapi arus pembangunan ekonomi yang semakin menuntut fleksibilitas produksi unggulan daerah dalam persaingan pasar lokal, regional dan global.

Kawasan Industri Madapangga direncanakan meliputi wilayah Kecamatan Madapangga, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Bolo, dan Kecamatan Donggo dengan sektor unggulan pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

2. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

- a. Kawasan Rumah Adat Maria di Kecamatan Wawo;
- b. Kawasan Perkampungan tradisional Sambori di Kecamatan Lambitu;
- c. Kawasan Perkampungan tradisional Mbawa di Kecamatan Donggo;
- d. Kawasan Pasanggrahan Donggo di Kecamatan Donggo;
- e. Kawasan Situs Wadu Pa'a di Kecamatan Soromandi.

3. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem DAS Jangka di Kecamatan Wawo, Kecamatan Sape dan Sekitarnya;
- b. Kawasan Ekosistem DAS Towan di Kecamatan Sanggar dan Sekitarnya;
- c. Kawasan Ekosistem DAS Pelaparado di Kecamatan Parado, Kecamatan Monta dan Sekitarnya;
- d. Kawasan Ekosistem DAS Kambu di Kecamatan Sanggar dan Sekitarnya;





- e. Kawasan Ekosistem DAS Balambon di Sanggar dan Sekitarnya;
- f. Kawasan Ekosistem DAS Rontu di Kecamatan Wawo dan Sekitarnya;
- g. Kawasan Ekosistem DAS Campa di Kecamatan Madapangga, Kecamatan Bolo dan Sekitarnya;
- h. Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Kecamatan Lambu.

#### **4.2.1.5 Penelaahan terhadap RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006-2025**

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bima dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, dibutuhkan strategi-strategi makro.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan pembangunan daerah, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun, strategi makro pencapaian pembangunan 20 tahun mendatang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri
  - a. Peningkatan kualitas SDM;
  - b. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana dasar yang tersedia untuk menunjang proses pembangunan daerah;
  - c. Pengelolaan potensi sumber-sumber perekonomian daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah secara intensif mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, untuk menurunkan angka kemiskinan;
  - e. Menjalin kemitraan dengan seluruh stakeholders yang terkait dengan perekonomian daerah;
  - f. Meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana fisik, ekonomi, dan sosial;
  - g. Meningkatkan ketertiban dan kerekatan sosial.
2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
  - a. Peningkatan kualitas pendidikan untuk guru-guru agama melalui pendidikan formal dan informal;
  - b. Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat dengan penyebarluasan informasi dakwah keagamaan;



- c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk kelancaran peningkatan pemahaman, pendalaman, dan pengamalan agama bagi masyarakat;
  - d. Peningkatan peran dan fungsi tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah;
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan;
  - f. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah;
  - g. Pembinaan forum kerjasama sosial kemasyarakatan bidang keagamaan.
3. Pemerintahan Yang Baik
- a. Penataan kembali lembaga pemerintahan daerah dan lembaga peradilan daerah;
  - b. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi lembaga untuk sehingga tercipta suatu tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas KKN dalam kerangka pelayanan prima;
  - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
  - d. Penerapan 10 (sepuluh) prinsip good governance.
4. Pertanian Berkelanjutan
- a. Penataan dan penguatan kelembagaan dan para pelaku dalam pengembangan sektor pertanian berkelanjutan;
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengembangan produk pertanian;
  - c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - d. Peningkatan kualitas SDM;
  - e. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan produksi pertanian;
  - f. Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
5. Pembangunan Berwawasan Lingkungan
- a. Optimalisasi penggunaan SDA secara berkelanjutan
  - b. Pengembangan iptek dan teknologi yang ramah lingkungan
  - c. Penegakan supremasi hukum tentang pembangunan berwawasan lingkungan
- Pengembangan sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan pencapaian keadaan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dengan mewujudkan Kabupaten Bima yang maju, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan religius, dalam



penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maju dalam pertanian berkelanjutan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, merupakan hasil rumusan perencanaan strategis jangka panjang yang menjalin keterkaitan antara aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Secara umum, keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri
  - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan untuk seluruh lapisan masyarakat;
  - b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas;
  - d. Masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia;
  - e. Optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
  - f. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya.
2. Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
  - a. Terwujudnya masyarakat sejahtera yang menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. Terciptanya kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah;
  - c. Berfungsinya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai dan berkualitas;
  - d. Meningkatnya aktifitas keagamaan dalam menunjang terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas;
3. Agenda Pemerintahan Yang Baik
  - a. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
  - b. Terwujudnya profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip good governance;
  - c. Terwujudnya supremasi hukum dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan hukum daerah;



- d. Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah dengan diterapkannya PP 8/2003 tentang struktur kelembagaan daerah;
  - e. Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana pembangunan daerah.
4. Agenda Pertanian Berkelanjutan
- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian daerah;
  - b. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
  - c. Terwujudnya kondisi eksisting penggunaan lahan pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya akses masyarakat tani terhadap pasar domestik regional, nasional, maupun internasional.
5. Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan
- a. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan;
  - b. Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas berbagai sarana prasarana, teknologi, permodalan yang berdaya guna dalam pengembangan SDA;
  - c. Terwujudnya penataan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup;
  - d. Tertatanya ruang wilayah untuk mendukung keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

#### **4.2.1.6 Penelaahan Terhadap RPJMD Daerah Lain**

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara administratif, Kabupaten Bima berbatasan langsung dengan 2 (dua) daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Batas wilayah administratif Kabupaten Bima dengan Kota Bima berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 dan Batas wilayah administratif Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016. Secara geografis luas wilayah daratan



Kabupaten Bima adalah 4.389 Km<sup>2</sup>. Dan luas wilayah perairan laut Kabupaten Bima seluas 3.760,33 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 4. 1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan  
RPJMD Kab. Bima dengan RPJMD Kota Bima dan RPJMD Kab. Dompu**

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH</b>		
<b>KABUPATEN BIMA</b>	<b>KOTA BIMA</b>	<b>KABUPATEN DOMPU</b>
1. Memperkuat Karakter masyarakat Bima yg religius melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan.	1. Pembangunan Pendidikan	1. Peningkatan layanan pendidikan masyarakat
2. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yg aman dan harmonis	2. Pembangunan Kesehatan	2. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan utk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan	3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	3. Pengembangan pariwisata 4. Pembangunan dan pemantapan infrastruktur strategis 5. Peningkatan cakupan layanan air bersih 6. Penataan fasilitas perkotaan
4. Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah		7. Peningkatan kualitas produk hukum daerah, koordinasi penegakan hukum dan kesadaran hukum
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat mitigasi Bencana	4. Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	8. Pengembangan agribisnis 9. PIJAR
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan melayani	5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	10. Pengembangan dan peningkatan kualitas pengamalan agama; 11. Pengembangan seni budaya lokal
7. Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yg sehat dan unggul	6. Pemantapan Infrastruktur , Perumahan Rakyat	12. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja 13. Penguatan kapasitas fiskal
	7. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	14. Pengarusutamaan gender
	8. Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	



#### **4.2.2 Isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu global, isu nasional, isu regional, SDGs, capaian kinerja RPJMD tahun lalu, dan penelaahan terhadap visi – misi bupati terpilih, diidentifikasi terdapat 11 isu strategis jangka menengah Daerah Kabupaten Bima. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, sangat membutuhkan koordinasi dan kolaborasi.

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Ketaatan pada nilai-nilai budaya serta keagamaan;
2. Mutu Pendidikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan daya saing;
3. Sektor unggulan pertanian, perikanan dan peternakan belum memberikan pengaruh yang optimal dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat;
4. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai akibat pandemi covid-19;
6. Masih tingginya angka kemiskinan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah;
7. Belum terwujudnya konektivitas dan penataan ruang antara wilayah;
8. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata belum berbasis kawasan;
9. Menurunnya kualitas dan daya dukung Lingkungan serta sistem penanggulangan bencana belum optimal;
10. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni dan sarana permukiman lainnya;
11. Pelaksanaan penguatan UMKM belum berjalan optimal;
12. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal.

Penentuan isu strategis daerah mempertimbangkan isu strategi nasional, isu strategi hasil kajian KHLS, dengan dapat disandingkan kesesuaian atau sinergitas isu-isu tersebut pada tabel 4.2. Sinergisitas Isu Strategis Nasional, Provinsi, KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Bima dibawah ini.





**Tabel 4. 2 Sinergisitas Isu Strategis Nasional, Provinsi, KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Bima**

<b>Isu Strategis Nasional</b>	<b>Isu Strategis Provinsi</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten</b>
Pembangunan Manusia: - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah Rawan Bencana, yang ditandai dengan: a. Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana. b. Terbatasnya sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama, stabilitas daerah (keamanan, ketertiban dan politik), keadaan dan penegakan hukum	- Mutu Pendidikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan daya saing - Masih rendahnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat - Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni dan sarana permukiman lainnya
Pembangunan Ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman	Penataan Ruang, Konektivitas, dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal	Akses dan layanan pendidikan	- Sektor unggulan pertanian, perikanan dan peternakan belum memberikan pengaruh yang optimal dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat - Terjadinya penurunan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai akibat Pandemi Covid-19 - Angka kemiskinan yang mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah masih rendah - Pelaksanaan penguatan UMKM belum berjalan optimal
Pembangunan Kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan	Akses dan layanan kesehatan	Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan



<b>Isu Strategis Nasional</b>	<b>Isu Strategis Provinsi</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten</b>
- Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan	Optimal,		pariwisata belum berbasis kawasan
Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman	Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah, yang	Infrastruktur Wilayah	- Belum terwujudnya konektivitas dan Penataan ruang antara wilayah;  - Menurunnya kualitas dan daya dukung Lingkungan serta sistim Penanggulangan Bencana belum Optimal
Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik	Mutu dan Daya Saing Proses dan Hasil Pendidikan Belum Optimal	Ketahanan Pangan	Rendahnya Kesadaran Hukum dan Ketaatan pada nilai-nilai budaya serta keagamaan
	Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal	Kemiskinan dan Pengangguran	
	Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat	Kemandirian Perekonomian Daerah	
	Pembangunan Pariwisata melambat karena dampak Pandemi Covid-19	Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman	
	Industrialisasi Produk Unggulan Daerah belum optimal	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	
	Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Damai secara optimal	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	;



Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten
		Pariwisata, Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

---

Visi dan misi adalah gambaran keadaan atau yang ingin dicapai Kabupaten Bima selama kepemimpinan kepala daerah terpilih dalam pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati. Visi dan misi akan menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

Sesuai dengan amanat pasal 263 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program kepala daerah yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan program perangkat daerah dan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



## 5.1 Visi

Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Visi pembangunan Kabupaten Bima untuk periode RPJMD 2021-2026 merupakan visi kepala daerah terpilih pasangan **Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE** dan **H. DAHLAN M. NOER**.

Visi Kepala Daerah terpilih tersebut sebagai berikut **"Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)"**. Mengingat RPJMD periode 2021-2026 adalah merupakan RPJMD periode ke 2 (dua) kepala daerah terpilih, maka di dalam pelaksanaannya merupakan pemantapan terhadap capaian RPJMD periode sebelumnya, sehingga dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat terwujud kondisi yang diharapkan sesuai dengan gambaran visi tersebut diatas. Perumusan dan penjelasan lebih lanjut terhadap Visi dimaksud dijabarkan dalam pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. **Religius**: Gambaran yang diharapkan terhadap ketaatan masyarakat Kabupaten Bima pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya mbojo sehingga terbentuk masyarakat yang religius;
2. **Aman**: Harapan untuk terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang mampu menegakkan keamanan dan ketertiban wilayah sehingga tercipta kehidupan yang harmonis;
3. **Makmur**: Terciptanya masyarakat yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar;
4. **Amanah**: Terselenggaranya sistem pemerintahan di Kabupaten Bima yang transparan, akuntabel dan melayani dalam menghadapi tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik;
5. **Handal**: Terwujudnya sumber daya manusia kabupaten bima yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi.

## 5.2 Misi

Sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Bima tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 sebagai berikut :



1. Mewujudkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur kebudayaan Bima;
2. Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
5. Membangun sumber daya manusia yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutaman gender.

Penggambaran selengkapnya keterkaitan antara visi dengan misi Kabupaten Bima tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5. 1 Keterkaitan antara Visi dengan Misi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal).</b>	<b>Religius</b>	Misi 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur kebudayaan Bima.</li> </ul>
	<b>Aman</b>	Misi 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia.</li> </ul>
	<b>Makmur</b>	Misi 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>
	<b>Amanah</b>	Misi 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel</li> </ul>
	<b>Handal</b>	Misi 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sumber daya manusia yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutaman gender.</li> </ul>





### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 melalui misi yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran masing-masing misi diuraikan penjelasan dibawah:

- **MISI I** : Mewujudkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur kebudayaan Bima, dengan **tujuan**: "Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia" dengan **sasaran**: Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif, toleran dan egaliter.
- **MISI II** : Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia, dengan **tujuan**: "Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat" dengan **sasaran**: Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial.
- **MISI III** : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat" dengan **tujuan**:
  1. Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dengan **sasaran**: Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan;
  2. Meningkatkan ekonomi daerah berdaya saing dengan **sasaran**:
    - a. Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan;
    - b. Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi.
- **MISI IV** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dengan **tujuan**: Mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih, dengan **sasaran**: Terciptanya pelayanan publik yang profesional, prima dan berkualitas.
- **MISI V** : Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, dengan **tujuan** "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat" dengan **sasaran** :
  - a. Meningkatnya kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - b. Meningkatnya kualitas kesehatan; dan
  - c. Terwujudnya pemerintahan dan masyarakat inovatif.



#### 5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima adalah tuntutan yang perlu diperhatikan terhadap untuk menjaga konsistensi penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program pembangunan. Berawal dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut kedalam matriks konsistensi visi, misi tujuan dan sasaran tersebut dalam matrik di bawah ini.

**Tabel 5. 2 Matriks Konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal).</b>			
<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>Misi 1:</b> Meningkatkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai – nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur kebudayaan Bima	Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter
<b>2</b>	<b>Misi 2:</b> Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia	Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial
<b>3</b>	<b>Misi 3:</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyar	Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan
		Meningkatkan ekonomi daerah berdaya saing	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan
			Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi
<b>4</b>	<b>Misi 4:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya pelayanan publik yang profesional, prima dan berkualitas
<b>5</b>	<b>Misi 5:</b> Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
			Masyarakat inovatif



Konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bima dalam rangka pencapaian target perlu diperhatikan konsistensi terhadap target indikator tujuan sesuai dalam tabel 5.3 dan target indikator sasaran sesuai dalam tabel 5.4. Perhatikan tabel di bawah ini:



**Tabel 5. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan,**

**Indikator Tujuan dan Target**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah "Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"**

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir (2026)
		Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima</b>								
Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	83.33	86.33	89.33	91.67	94.00	96.33
<b>Misi II : Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia</b>								
Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Persentase menurunnya pelanggaran ketertiban	65	60	55	50	45	40	35
<b>MISI III : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdaya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat</b>								
Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Persentase penduduk miskin (%)	14,49	14,10	13,70	13,30	12,90	12,50	12,00
Meningkatkan Ekonomi Daerah Berdaya Saing	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,99	4,80	4,60	4,30	4,00	3,70	4,99
<b>MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel</b>								
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	CC	CC	BB	BB



TUJUAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir (2026)
		Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender								
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,30	66,60	67,05	67,65	68,4	69,25	70,25

**Tabel 5. 4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah "Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal"**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir (2026)
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima</b>									
Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif, toleran dan egaliter	Terbangun Masjid Agung Bima Sebagai Pusat Kajian Keagamaan dan Budaya Bima	0	80	100				
		Persentase Tempat Ibadah sebagai Tempat Kajian Keagamaan Kecamatan dan Desa	2.11	2.34	2.92	3.51	4.68	5.85	7.02



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir (2026)
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Misi II : Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia</b>									
Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial	Jumlah Desa Sadar Hukum	2	4	6	8	9	10	15
<b>MISI III : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdaya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat</b>									
Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	Pertumbuhan ekonomi daerah (%)	-3,49	0,77	4,56	5,03	5,63	6,05	6,25
		PDRB Kontribusi sektor Komoditas Unggulan (%)	45,28	45,50	45,80	46,00	46,18	46,36	46,54
		Skor pola pangan harapan	81,10	81,91	82,73	83,56	84,39	85,24	86,09
		Rasio Gini	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23
Meningkatkan Ekonomi Daerah Berdaya Saing	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan	Persentase kemantapan jalan (%)	51,58	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
		Persentase jaringan irigasi berfungsi baik (%)	43,47	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	55,00
		Cakupan Akses rumah tangga terlayani air bersih	77,93	81	84	88	92	96	100
		Cakupan rumah tangga terlayani sanitasi layak	76	77	82,75	88,5	94,25	100	100
		Indeks kualitas lingkungan hidup	62.38	62.94	63.47	63.84	64.20	64.60	65.00
		Tingkat kapasitas penanggulangan	59	62	65	68	71	74	77



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir (2026)
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bencana							
	Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	8	10	12	14	16	18	20
MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel									
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Baik dan Bersih	Terciptanya pelayanan publik yang profesional, Prima dan Berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Sakip	B	B	B	B	BB	BB	BB
		Persentase pencegahan korupsi (%)	75	75	80	85	90	93	95
		Indeks keterbukaan informasi	63,40	75	80	85	90	93	98
MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender									
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Angka Melek Huruf (AMH)	92,04	94,20	96,50	98,07	99,31	100	100
		Rata – Rata Lama Sekolah	7,78	7,80	7,82	7,84	7,87	7,89	7,90
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,29	13,31	13,32	13,34	13,36	13,37	13,38
		Prestasi Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional	2	4	6	8	10	12	14
		Prestasi Atlet Tingkat Provinsi dan Nasional	2	5	8	11	13	15	17
	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,33	67,75	69,42	72,93	73,21	74,6	75





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir (2026)
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prevalensi Balita Stunting (%)	25,50	24,9	21,5	20,5	19,5	18,5	17,5
	Terwujudnya Pemerintahan dan Masyarakat Inovatif	Indeks Pembangunan gender (IPG)	91,08	92	93	94	95	96	97



## **BAB VI**

# **STRATEGI , ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Perumusan strategis dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk/sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka perbaikan kinerja perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Bima 2021-2026.

### **6.1 Strategi**

Strategi merupakan pemikiran-pemikiran konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah merupakan gambaran harapan dan keinginan kehidupan masyarakat di masa yang akan datang yang lebih baik dari saat sekarang. Harapan dan keinginan dapat dicapai apabila visi dan misi tersebut lebih realistis sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang sudah dan sedang terjadi serta kecenderungan ataupun kemungkinan perkembangan di masa depan. Untuk



mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi baik bersifat umum maupun strategis berdasarkan tujuan dan sasaran. Strategi umum merupakan strategi pembangunan di tingkat kabupaten dan sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan arah kebijakan RPJMD. Sedangkan strategis berdasarkan tujuan dan sasaran mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Strategis berdasarkan tujuan dan sasaran selanjutnya berfungsi sebagai rujukan perangkat daerah untuk melaksanakan program berdasarkan sasaran RPJMD.

### **6.1.1 Strategi Umum**

Strategi umum merupakan langkah dan kebijak Kabupaten Bima dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan. Sesuai hal tersebut perlu dilakukan analisis terhadap kondisi obyektif eksternal dan internal yang mempengaruhi periode pelaksanaan RPJMD. Sesuai hasil analisis SWOT dalam penentuan alternative strategi maka dapat diperoleh rumusan 6 (enam) strategi pembangunan Kabupaten Bima yang akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan budaya;
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang menjunjung tinggi supermasi Hukum;
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan tersedianya infratsruktur yang berkualitas dengan memperhatikan arahan tata ruang, daya dukung lingkungan dan mintigasi bencana;
5. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan afirmasi pada pembentukan karakter, penguatan daya saing, pengarusutamaan gender perlindungan sosial serta perlindungan perempuan dan anak.



### 6.1.2 Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Selain strategi umum diatas maka dirumuskan juga strategis berdasarkan tujuan dan sasaran yang berguna sebagai bijkn dalam melaksanakan program perangkat daerah. Strategi ini menjelaskan pilihan kebijak untuk memilih program dan kegiatan agar dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran ini disajikan dalam tabel 6.1. berikut ini.



**Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Kabupaten Bima**

**Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal).”**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>MISI 1 : Meningkatkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai – Nilai Keagamaan Serta Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Bima</b>		
<b>Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia</b>	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang harmonis, dan menjunjung tinggi nilai budaya, dan keagamaan
<b>Misi II : Mewujudkan Masyarakat yang Kondusif dan Harmonis dengan Mengedepankan Prinsip Hak Asasi Manusia</b>		
<b>Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat</b>	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial	Mewujudkan Keamanan dan ketertiban umum yang menjunjung tinggi supremasi Hukum.
<b>MISI III Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdaya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat</b>		
<b>Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja</b>	Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	Menciptakan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan Komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran
<b>Meningkatkan ekonomi daerah berdaya saing</b>	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan	Meningkatkan tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas memperhatikan daya dukung lingkungan dan Mitigasi Bencana sesuai arahan Tata ruang
	Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
		dan komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran
<b>MISI IV : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel</b>		
<b>Mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih</b>	Terciptanya pelayanan publik yang profesional, prima dan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
<b>MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender</b>		
<b>Meningkatnya kualitas hidup masyarakat</b>	Meningkatnya kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan afirmasi pada pembentukan karakter, penguatan daya saing, pengarusutamaan gender perlindungan social serta perlindungan perempuan dan anak.
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	
	Terwujudnya Pemerintahan dan Masyarakat Inovatif	



## **6.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima disusun berdasarkan strategi umum yang menjadi arah pelaksanaan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan ini selanjutnya menjadai pedoman untuk penyusunan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rumuasan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bima berasarkan strategi umum digambarkan pada tabel 6.2 dibawah ini.





**Tabel 6. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bima**

**Visi : "Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)."**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>MISI 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Memahami dan mengamalkan Nilai – Nilai Keagamaan Serta Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Bima</b>			
Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang harmonis, dan menjunjung tinggi nilai budaya, dan keagamaan	Menguatkan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur Dana Mbojo.
<b>Misi II : Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia</b>			
Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial	Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui terbentuknya desa sadar hukum
<b>MISI III Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat</b>			
Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan.
			Mendorong terbentuknya kawasan pariwisata yang mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Nasional
Meningkatkan ekonomi daerah berdaya saing	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan	Meningkatkan tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana sesuai arahan tata ruang	Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan kawasan strategis kabupaten
			Mempercepat pengembangan kawasan ibu kota Kabupaten Bima melalui penataan kawasan permukiman, perdagangan, pusat pemerintahan dan kawasan pendukungnya



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penguatan peran masyarakat dalam mencegah penurunan daya dukung lingkungan
			Meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap mintigasi bencana yang berbasis kearifan lokal
			Meningkatkan pengendalian Penataan ruang dan lahan
			Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
	Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Mewujudkan kemudahan berusaha dan berInvestasi
MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel			
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya pelayanan publik yang profesional, prima dan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Melanjutkan penataan kelembagaan dan organisas pemerintah yang lebih efektif dan efisien
			Meningkatkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender			
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan afirmasi pada pembentukan karakter, penguatan daya saing, pengarusutamaan gender perlindungan sosial serta perlindungan perempuan dan	Meningkatkan akses dan Kualitas layanan pendidikan
			Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olah raga ditingkat lokal, Nasional, dan Internasional
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.		Meningkatkan akses dan Kualitas Layanan Kesehatan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		anak.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam manajemen pemerintahan, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan perekonomian, manajemen investasi dan manajemen, pariwisata
	Terwujudnya Pemerintahan dan Masyarakat Inovatif		Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan yang mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran

**Tabel 6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima**

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Peningkatan ketahanan ekonomi dan investasi daerah melalui perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan dasar	Penguatan Kapasitas SDM Berdaya Saing Dan pemenuhan kebutuhan dasar berkelanjutan	Peningkatan kualitas Kawasan perkotaan, Perdesaan dan konektifitas wilayah melalui Penataan Kawasan Permukiman, Perdagangan, Pusat Pemerintahan dan Kawasan Pendukungnya	Penguatan kemampuan ekonomi daerah melalui kerjasama stakeholder penting yang mendukung pembangunan	Mewujudkan Kabupaten Bima yang sejahtera, aman, harmonis menuju Bima Yang Sehat dan berdaya Saing



### 6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bima, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan berdasarkan janji politik Bupati Bima dan wakil Bupati Bima periode tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bima yang: **Religius, Aman, Makmur, Amanah, dan Handal** maka disusun 5 (Lima) **agenda pokok** yang merupakan implementasi janji politik yang selanjutnya akan diturunkan sebagai program prioritas perangkat daerah. Agenda pokok pembangunan sebagaimana maksud diatas dapat digambarkan sebagai berikut

1. Bima Yang Aman dan Harmonis
2. Bima Yang Sehat dan Berdaya Saing
3. Bima Yang Sejahtera
4. Bima Kembali Hijau
5. Bima Inovatif dan Melayani

Keterkaitan antara 5 (Lima) agenda pokok pembangunan tersebut dengan program perangkat daerah sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar seluruh janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selanjutnya disajikan keterkaitan antara agenda pokok dengan program pembangunan sesuai nomenkalatur urusan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dibawah ini:



**Tabel 6. 4 Keterkaitan Misi, Program Unggulan dan Program Kepmen Nomor 050-3708 Tahun 2020**

NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
<b>VISI " Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)"</b>					
<b>MISI 1: Meningkatkan Masyarakat Yang Memahami dan Mengamalkan Nilai – Nilai Keagamaan Serta Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Bima</b>					
1	Bima Yang Aman dan Harmonis	Meguatkan Karakter masyarakat Bima yg religius melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan	Membangun Pusat Kajian pengembangan nilai keislaman dan kebudayaan bima (di masjid agung, Mesjid Kecamatan dan desa) melalui kegiatan-kegiatan : a. Lanjutan pembangunan mesjid agung; b. Perpustakaan masjid agung / Literasi keagamaan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dikbupora
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengembangan Kebudayaan	Dikbupora
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dikbupora
				Program Pengelolaan Permuseuman	Dikbupora
				Program Pengembangan Kurikulum	Dikbupora
			Meningkatkan kualitas pesantren & organisasi keagamaan dengan mengadakan kegiatan-	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
			kegiatan: a. Pembinaan majelis dan orsos; b. Pelaksanaan GPS (Gerakan Pesantren Sehari)/Gerakan Toilet Bersih; c. Jumat khusu' d}. Imtaq gabungan; d. Hibah Masjid/Musholah /Organisasi Keagamaan; e. Peningkatan Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama); f. Pengembangan wisata religi	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
			Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, petugas masjid, dan rumah ibadah lainnya melalui kegiatan-kegiatan: a. Diklat Guru Ngaji, da'i; b. MTQ STQ kecamatan/kabupaten/Provinsi; c. Insentif guru ngaji, marbot, da'i, bilal, dan pengurus rumah ibadah lainnya melalui dana desa.	Program Pemberdayaan sosial Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Dinas Sosial Kecamatan Sekretariat Daerah
<b>Misi II : Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia</b>					



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
	Bima Yang Aman dan Harmonis	Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yg aman dan harmonis	Penanggulangan konflik sosial dan penyalahgunaan napza melalui kegiatan-kegiatan: a. Pembinaan dan pencegahan konflik horizontal b. Pemetaan dan deteksi dini potensi konflik c. Operasi pencegahan peredaran NAPZA; d. Sosialisasi bahaya NAPZA; e. Sekolah bebas narkoba, kampung bebas narkoba.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	POLPP
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinkes
			Memaksimalkan peran forum kewaspadaan dini masyarakat, lembaga adat, dan desa sadar hukum melalui kegiatan-kegiatan: a. Optimalisasi kelembagaan kewaspadaan dini masyarakat; b. Pembentukan dan peningkatan peran lembaga adat; c. Peningkatan kapasitas kesadaran hukum; d. Operasi penegakkan peraturan daerah	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DP3AP2KB
				Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
				Program Peningkatan Ketenteraman	POLPP





NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
				Dan Ketertiban Umum	
<b>MISI III Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat</b>					
2	Bima Yang Sejahtera	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan utk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.	Melahirkan produk hukum yang memudahkan investasi untuk mendorong industrialisasi berbasis komoditi unggulan (sapi, bawang, garam dan ikan) dengan membuat Regulasi pro investasi (Perda industrialisasi).	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Dinas Perindag
				Program Pengendalian Izin usaha industri kabupaten/kota	Dinas Perindag
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	DLH
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Dinas Perindag
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat " Fasilitsi dan Koordinasi Hukum"	Sekretariat Daerah
			Mencetak wirausaha muda melalui kegiatan-kegiatan: a. Pelatihan dan manajemen usaha (Siperkasa) dan Kupu-kupu; b. Pemanfaatan rumah produksi, promosi tenun	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
			dan rumah kemasan;	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
			c. Pemberian dukungan peralatan dan modal usaha;	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			d. Fasilitasi e-commerce;	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			e. Fasilitasi perizinan usaha.	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pemberdayaan Sosial "Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat (Adat)	Dinas Sosial
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peerternakan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian "Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian)	Dinas Peternakan
				Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Dinas Perindag



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
				Program penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Dinas Perindag
			Optimalisasi kartu tani dan kartu usaha pelaku perikanan melalui Peningkatan jumlah pemilik kartu tani dan kartu pelaku usaha perikanan.	Program Perizinan Usaha Pertanian "Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota"	Dinas Pertanian
				Program penyuluh pertanian (Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa)	Dinas Pertanian/Dinas Peternakan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian "Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian)	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Penerbitan Tanda Daftar Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil)	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk asuransi tanaman, asuransi ternak dan asuransi	Program Perizinan Usaha Pertanian "Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota"	Dinas Peternakan



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
			<p>nelayan budidaya dan menjadikan ternak sebagai jaminan pinjaman perbankan melalui usaha-usaha:</p> <p>a. Mendorong regulasi terkait ternak sebagai jaminan perbankan;</p> <p>b. Meningkatkan jumlah penerima asuransi.</p>	Program Hubungan Industrial "Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UMKM
				Program Perekonomian Dan Pembangunan "Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian" (Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil)	Sekretariat Daerah
		Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah	<p>Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan:</p> <p>a. Penetapan RIPDA;</p> <p>b. Pembangunan desa wisata bahari;</p> <p>c. Pengembangan desa wisata budaya;</p> <p>d. Peningkatan kapasitas POKDARWIS</p>	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten	<p>Penataan kawasan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan melalui percepatan Revisi dokumen RTRW,</p>	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
		dan Kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah	penyusunan dokumen RDTR dan RBTL serta Penataan kawasan kantor bupati (ruang terbuka hijau, penataan taman, peningkatan ruas jalan, dan penataan lampu jalan)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat mitigasi Bencana	Penataan kawasan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan melalui percepatan Revisi dokumen RTRW, penyusunan dokumen RDTR	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH





NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
			dan RBTL serta Penataan kawasan kantor bupati (ruang terbuka hijau, penataan taman, peningkatan ruas jalan, dan penataan lampu jalan)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLH
				Program Pengelolaan Persampahan	DLH
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	DLH
				Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
			Memaksimalkan pengelolaan BUMD dan BUMDes berbasis potensi unggulan melalui pemanfaatan SDA dan potensi-potensi keunggulan dan kearifan lokal.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMDes
				Program Peningkatan Penataan Desa	DPMDes
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
<b>MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel</b>					



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
4	Bima yang Inovatif dan Melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan melayani	Peningkatan PAD melalui penertiban dan pemanfaatan aset daerah (Kerjasama pihak ketiga BOT, dan BUMD pengelola aset daerah).	Program Perekonomian Dan Pembangunan "Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian" (Kordinasi Singkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan Blud Dan Bumd)	Sekretariat Daerah
			Mendekatkan dan mempermudah pelayanan publik berbasis wilayah dan sistem informasi pemerintah melalui kegiatan-kegiatan: a. Pembentukan pusat data Kabupaten Bima (data kependudukan, kemiskinan, sosial dan data-data pembangunan lainnya); b. Pemenuhan jaringan telekomunikasi pada daerah blank spot untuk kemudahan akses data dan informasi; c. Mendorong penetapan Peraturan Bupati untuk pembentukan UPT Dukcapil.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
				Program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	SETWAN
				Program Penyelenggaraan Dan Pengawasan	Inspektorat
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah	BPPKAD
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Program Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DUKCAPIL
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMDES
MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender					
5	Bima Yang Sehat dan Berdaya Saing	Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yg sehat dan unggul	Meyediakan anggaran beasiswa pendidikan untuk pemuda dan siswa berprestasi yang mengharumkan nama daerah.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dikbudpora
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dikbudpora
			Fasilitasi percepatan berdirinya perguruan tinggi negeri berbasis potensi daerah.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
			Menyediakan beasiswa bagi aparatur pemerintah daerah (dokter, guru dan asn) melalui kegiatan-kegiatan: a. Peningkatan kapasitas	Program Kepegawaian Daerah	BKD



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
			SDM Aparatur (pemberian beasiswa dan pelaksanaan bimtek); b. Pelatihan dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.		
			Memberikan tunjangan kinerja bagi ASN dan perangkat pemerintah daerah lainnya (kader posyandu dan ketua RT) melalui kegiatan: a. Peningkatan tunjangan kinerja bagi ASN; b. Pemberian insentif bagi kader posyandu, ketua RT, dan kader PKK.	Program Kepegawaian Daerah	BKD
			Meningkatkan standar kualitas dan pelayanan rumah sakit, puskesmas, pustu dan sekolah melalui: a. Peningkatan status Rumah Sakit Spondosia dan puskesmas; b. Peningkatan standar pelayanan puskesmas; c. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; d. Pengembangan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Perlindungan Perempuan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dikbudpora Dinkes dan RSUD Dinkes dan RSUD DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB



NO	Agenda Pokok Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program 050-3708 Tahun 2020	Perangkat Daerah
			keluarga;	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3AP2KB
			e. Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik berbasis profesional;	Peningkatan Pelayanan Blud	Dinkes
			f. Redistribusi tenaga pendidik dan kesehatan secara proporsional dan merata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes dan RSUD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes dan RSUD
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes dan RSUD
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes dan RSUD
				Program Pengembangan Kurikulum	DIKBUDPORA
			Meningkatkan kesejahteraan tenaga tenaga kontrak (guru dan tenaga kesehatan) melalui rekrutment tenaga P3K untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dikbudpora/Dinkes
				Program Pengelolaan Pendidikan	Dikbudpora
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKD
				Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	Dikbudpora



#### **6.4 Keterpaduan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program**

Keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program daerah yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026, tersaji pada tabel 6.5. dibawah ini:



**Tabel 6. 5 Keterpaduan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program**

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
<b>VISI " Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)"</b>								
<b>MISI 1: Meningkatkan Masyarakat Yang Memahami dan Mengamalkan Nilai – Nilai Keagamaan Serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima</b>								
1	Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang harmonis, dan menjunjung tinggi nilai budaya, dan keagamaan	Menguatkan Karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Luhur Dana Mbojo.	Menguatkan Karakter masyarakat Bima yg religius melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan	Membangun Pusat Kajian pengembangan nilai keislaman dan kebudayaan bima (di masjid agung, Mesjid Kecamatan dan desa) melalui kegiatan-kegiatan: a. Lanjutan pembangunan mesjid agung; b. Perpustakaan masjid agung / Literasi keagamaan.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Penataan Bangunan Gedung Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman	Dikbupora Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Dikbupora Dikbupora Dikbupora





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Pengembangan Kurikulum	Dikbupora
						Meningkatkan kualitas pesantren & organisasi keagamaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan:	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
						a. Pembinaan majelis dan orsos;	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
						b. Pelaksanaan GPS (Gerakan Pesantren Sehari)/Gerakan Toilet Bersih;	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
						c. Jumat khusu';		
						d. Imtaq gabungan;		
						e. Hibah Masjid/Musholah /Organisasi Keagamaan;		
						f. Peningkatan Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);		



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						g. Pengembangan wisata religi		
						Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, petugas masjid, dan rumah ibadah lainnya melalui kegiatan-kegiatan:	Program Pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
						a. Diklat Guru Ngaji, da'I;	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
						b. MTQ STQ kecamatan/kabupaten/Provinsi;	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
						c. Insentif guru ngaji, marbot, da'I, bilal, dan pengurus rumah ibadah lainnya melalui dana desa.		
	Meningkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial	Mewujudkan Keamanan dan ketertiban umum yang menjunjung	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui	Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yg aman dan	Penanggulangan konflik sosial dan penyalahgunaan napza melalui kegiatan-kegiatan:	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bakesbangpol

[illegible]



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							kesehatan masyarakat	
						Memaksimalkan peran forum kewaspadaan dini masyarakat, lembaga adat, dan desa sadar hukum melalui kegiatan-kegiatan:	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
						a. Optimalisasi kelembagaan kewaspadaan dini masyarakat;	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Bakesbangpol
						b. Pembentukan dan peningkatan peran lembaga adat;	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
						c. Peningkatan kapasitas kesadaran hukum;		
						d. Operasi penegakkan peraturan		



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						daerah.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DP3AP2KB
							Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
							Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	POLPP
<b>MISI III Mewujudkan kemandirian ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat</b>								
2	Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	Menciptakan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan Komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis melalui Peningkatan Nilai Tambah hasil pertanian, perikanan, dan Pertambangan.	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan utk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.	Melahirkan produk hukum yang memudahkan investasi untuk mendorong industrialisasi berbasis komoditi unggulan (sapi, bawang, garam dan ikan) dengan membuat Regulasi pro investasi (Perda industrialisasi).	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Dinas Perindag
							Program Pengendalian Izin usaha industri kabupaten/kota	Dinas Perindag
							Program	DLH



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Dinas Perindag
							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						Mencetak wirausaha muda melalui kegiatan-kegiatan:	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						a. Pelatihan dan manajemen usaha (Siperkasa) dan Kupu-kupu;	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat " Fasilitas dan Koordinasi Hukum"	Sekretariat Daerah
						b. Pemanfaatan rumah produksi, promosi tenun dan rumah kemasan;	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						c. Pemberian dukungan peralatan dan modal usaha;	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
						d. Fasilitasi e-commerce;		
						e. Fasilitasi perizinan usaha.		
							Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Pemberdayaan Sosial "Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat (Adat)"	Dinas Sosial
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peerternakan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
							Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian "Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian)	Dinas Peternakan
							Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Dinas Perindag
							Program penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Dinas Perindag
						Optimalisasi kartu tani dan kartu usaha pelaku perikanan melalui Peningkatan jumlah pemilik kartu tani dan kartu pelaku usaha perikanan.	Program Perizinan Usaha Pertanian "Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah	Dinas Pertanian



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Kabupaten/Kota"	
							Program penyuluh pertanian (Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa)	Dinas Pertanian/Dinas Peternakan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian "Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian)	Dinas Pertanian
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Penerbitan Tanda Daftar Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil)	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk asuransi tanaman, asuransi ternak dan asuransi nelayan budidaya dan menjadikan ternak sebagai jaminan pinjaman perbankan melalui usaha-usaha: a. Mendorong regulasi terkait ternak sebagai jaminan	Program Perizinan Usaha Pertanian "Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota"	Dinas Peternakan
							Program Hubungan Industrial "Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						perbankan; b. Meningkatkan jumlah penerima asuransi.	Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"	
							Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UMKM
							Program Perekonomian Dan Pembangunan "Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian" (Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil)	Sekretariat Daerah
				Mendorong terbentuknya kawasan Pariwisata yang mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan	Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan: a. Penetapan RIPDA;	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
							Program Pengembangan Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
				Nasional	strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah	b. Pembangunan desa wisata bahari; c. Pengembangan desa wisata budaya; d. Peningkatan kapasitas POKDARWIS	Transmigrasi  Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  Program Pemasaran Pariwisata  Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Transmigrasi  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Pariwisata  Dinas Pariwisata
3	Meningkatkan ekonomi daerah berdaya saing	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan	Meningkatkan tersedianya infrastuktur dasar yang berkualitas memperhatikan daya dukung lingkungan dan	Meningkatkan Konektifitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan kawasan strategis Kabupaten	Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan	Penataan kawasan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan melalui percepatan Revisi dokumen RTRW, penyusunan dokumen RDTR	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
		lingkungan	Mintigasi Bencana sesuai arahan Tata ruang	Mempercepat pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Bima melalui Penataan Kawasan Permukiman, Perdagangan, Pusat Pemerintahan dan Kawasan Pendukungnya	strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah	dan RBTL serta Penataan kawasan kantor bupati (ruang terbuka hijau, penataan taman, peningkatan ruas jalan, dan penataan lampu jalan)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penguatan Peran Masyarakat Dalam Mencegah penurunan daya dukung lingkungan			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatkan Kapasitas masyarakat terhadap Mintigasi Bencana yang berbasis kearifan lokal			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkat pengendalian			Program Pengelolaan	DLH





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
				Penataan ruang dan lahan			Persampahan	
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
					Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat mitigasi Bencana	Penataan kawasan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan melalui percepatan Revisi dokumen RTRW, penyusunan dokumen RDTR dan RBTL serta Penataan kawasan kantor bupati (ruang terbuka hijau, penataan taman, peningkatan ruas jalan,dan penataan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
							Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						lampu jalan)	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DLH
							Program Pengelolaan Persampahan	DLH
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	DLH
							Program Penanggulangan Bencana	BPBD
							Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
							Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
		Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	Menciptakan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan pariwisata dan Komoditas unggulan yang berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Mewujudkan Kemudahan berusaha dan berInvestasi		Memaksimalkan pengelolaan BUMD dan BUMDes berbasis potensi unggulan melalui pemanfaatan SDA dan potensi-potensi keunggulan dan kearifan lokal.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Penataan Desa Program Perekonomian Dan Pembangunan	DPMDes DPMDes Sekretariat Daerah
<b>MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel</b>								
4	Mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya pelayanan publik yang profesional, prima dan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Melanjutkan Penataan Kelembagaan dan organisasi Pemerintah yang lebih efektif dan efisien	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan melayani	Peningkatan PAD melalui penertiban dan pemanfaatan aset daerah (Kerjasama pihak ketiga BOT, dan BUMD pengelola	Program Perekonomian Dan Pembangunan "Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian"	Sekretariat Daerah



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						asset daerah).	(Kordinasi Singkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan Blud Dan Bumd)	
				Meningkatkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis Elektronik		Mendekatkan dan mempermudah pelayanan publik berbasis wilayah dan sistem informasi pemerintah melalui kegiatan-kegiatan:	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
						a. Pembentukan pusat data Kabupaten Bima (data kependudukan, kemiskinan, sosial dan data-data pembangunan lainnya);	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
						b. Pemenuhan jaringan telekomunikasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						pada daerah blank spot untuk kemudahan akses data dan informasi;	Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah	BAPPEDA
						c. Mendorong penetapan Peraturan Bupati untuk pembentukan UPT Dukcapil.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
							Program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	SETWAN
							Program Penyelenggaraan Dan Pengawasan	Inspektorat
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
							Program Pengelolaan Barang Milik	BPPKAD



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Daerah	
							Program Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah	BPPKAD
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
							Program Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL
							Program Pencatatan Sipil	DUKCAPIL
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMDES
<b>MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender</b>								
5	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan afirmasi pada pembentukan karakter, Penguatan daya saing, pengarusutamaan gender Perlindungan social serta perlindungan perempuan dan Anak	Meningkatkan akses dan Kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yg sehat dan unggul	Meyediakan anggaran beasiswa pendidikan untuk pemuda dan siswa berprestasi yang mengharumkan nama daerah.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dikbudpora
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dikbudpora
				Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olah raga ditingkat lokal, Nasional, dan Internasional		Fasilitasi percepatan berdirinya perguruan tinggi negeri berbasis potensi daerah.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	<u>BAPPEDA</u>



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
						Menyediakan beasiswa bagi aparatur pemerintah daerah (dokter, guru dan asn) melalui kegiatan-kegiatan: a. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur (pemberian beasiswa dan pelaksanaan bimtek); b. Pelatihan dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.	Program Kepegawaian Daerah	BKD



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.		Meningkatkan akses dan Kualitas Layanan Kesehatan		Memberikan tunjangan kinerja bagi ASN dan perangkat pemerintah daerah lainnya (kader posyandu dan ketua RT) melalui kegiatan: a. Peningkatan tunjangan kinerja bagi ASN; b. Pemberian insentif bagi kader posyandu, ketua RT, dan kader PKK.	Program Kepegawaian Daerah	BKD
				Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah dalam Manajemen Pemerintahan, Manajemen Pertanian dan		Meningkatkan standar kualitas dan pelayanan rumah sakit, puskesmas, pustu dan sekolah melalui: a. Peningkatan status Rumah Sakit Sondosia	Program Pengelolaan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dikbudpora Dinkes dan RSUD



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
				Kelautan, Manajemen Kawasan Perekonomian, Manajemen Investasi dan Manajemen, Pariwisata		dan puskesmas; b. Peningkatan standar pelayanan puskesmas; c. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; d. Pengembangan pendidikan keluarga; e. Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik berbasis profesional; f. Redistribusi tenaga pendidik dan kesehatan secara proporsional dan merata.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Perlindungan Perempuan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Peningkatan Pelayanan Blud	Dinkes dan RSUD DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB Dinkes



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
							Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes dan RSUD
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes dan RSUD
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes dan RSUD
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes dan RSUD
							Program Pengembangan Kurikulum	DIKBUDPOR A
		Terwujudnya Pemerintahan dan Masyarakat		Meningkatkan daya saing Ketenagakerjaan yang mendukung		Meningkatkan kesejahteraan tenaga tenaga kontrak (guru dan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dikbudpora/ Dinkes





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Janji KDH Terpilih	Program	Perangkat Daerah
		Inovatif		percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran		tenaga kesehatan) melalui rekrutment tenaga P3K untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	Dikbudpora BKD Dikbudpora



## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

---

### **7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berubah mulai dari pendapatan, belanja maupun pengeluaran.

Adapun beberapa pengertian dalam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang harus dipahami bersama, antara lain :

- a. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- c. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- d. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- e. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau



pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Belanja daerah diarahkan untuk belanja wajib yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk urusan wajib pelayanan dasar dan pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan juga untuk pencapaian visi, misi dan program-program unggulan serta untuk pembelajaan rutin dan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perencanaan kinerja program. korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program - program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*) dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah Kabupaten Bima menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya *mandatory* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. RPJMD Kabupaten Bima dinyatakan bahwa urusan kesehatan minimal 10% dari belanja langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0.16% dari total belanja daerah.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun



menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun baik untuk belanja tidak langsung maupun untuk belanja langsung.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bima**

No	Komponen Pendapatan	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,275,078,713,423</b>	<b>1,314,772,686,441</b>	<b>1,354,224,529,419</b>	<b>1,423,595,170,459</b>	<b>1,433,355,683,520</b>	<b>1,474,506,040,753</b>
01	Belanja Pegawai	894,267,888,826.00	864,130,076,880.46	879,252,353,225.86	892,441,138,524.25	908,058,858,448.43	923,949,888,471.27
02	Belanja Barang dan Jasa	367,271,929,397.00	390,308,245,160.82	412,775,198,644.67	423,413,958,576.90	459,404,145,055.94	482,374,352,308.73
04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Belanja Hibah	37,715,852,000.00	38,470,169,040.00	39,239,572,420.80	83,634,797,973.22	40,220,561,713.32	41,226,075,774.64
06	Belanja Bantuan Sosial	20,823,043,200.00	21,864,195,360.00	22,957,405,128.00	24,105,275,384.40	25,672,118,284.39	26,955,724,198.61
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>280,980,729,343.00</b>	<b>285,407,140,050.70</b>	<b>303,048,060,591.59</b>	<b>295,073,650,859.15</b>	<b>323.627,120,167.51</b>	<b>377,845,991,387.75</b>
01	Belanja Modal Tanah	9,875,000,000.00	9,914,500,000.00	10,112,790,000.00	9,235,045,800.00	9,927,674,235.00	10,126,227,719.70
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,452,674,787.00	91,241,728,282.74	95,803,814,696.88	100,594,005,431.72	105,623,705,703.31	110,904,890,988.47
03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124,752,806,500.00	125,871,626,662.50	134,682,640,528.88	119,683,035,508.93	137,635,490,835.27	140,388,200,651.97
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56,531,248,056.00	58,010,060,505.46	62,061,134,740.84	65,164,191,477.88	71,028,968,710.89	79,000,996,520.65
05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	369,000,000.00	378,225,000.00	387,680,625.00	397,372,640.63	411,280,683.05	425,675,506.95
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2,700,000,000.00</b>	<b>2,916,000,000.00</b>	<b>3,149,280,000.00</b>	<b>3,401,222,400.00</b>	<b>3,673,320,192.00</b>	<b>3,967,185,807.36</b>
01	Belanja Tidak Terduga	2,700,000,000.00	2,916,000,000.00	3,149,280,000.00	3,401,222,400.00	3,673,320,192.00	3,967,185,807.36
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>291,394,852,440.00</b>	<b>294,642,776,191.50</b>	<b>299,086,546,713.35</b>	<b>303,597,456,370.60</b>	<b>308,922,963,699.93</b>	<b>314,341,918,444.38</b>
01	Belanja Bagi Hasil	4,731,152,740.00	4,825,775,794.80	4,922,291,310.70	5,020,737,136.91	5,121,151,879.65	5,223,574,917.24
02	Belanja Bantuan Keuangan	286,663,669,700.00	289,817,000,396.70	294,164,255,402.65	298,576,719,233.69	303,801,811,820.28	309,118,343,572.14
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1,850,154,295,206.00</b>	<b>1,897,738,603,083.47</b>	<b>1,959,508,416,724.26</b>	<b>2,025,667,500,088.52</b>	<b>2,070,579,087,579.50</b>	<b>2,130,661,163,392.70</b>

Tabel 7-2

## Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bima Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	18.27 %	20 %	157,525,510,800	30 %	176,428,572,096	40 %	197,600,000,748	50 %	221,312,000,837	60 %	247,869,440,938	80 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Standarisasi kurikulum pendidikan	100 %	100 %	134,400,000	100 %	150,528,000	100 %	168,591,360	100 %	188,822,323	100 %	211,481,002	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	250 orang	250 orang	140,000,000	255 orang	156,800,000	258 orang	175,616,000	260 orang	196,689,920	265 orang	220,292,710	265 orang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terlaksannnya pengendalian perizinan pendidikan	10 %	15 %	67,200,000	20 %	75,264,000	25 %	84,295,680	30 %	94,411,162	35 %	105,740,501	35 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		

1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat	75 %	80 %	62,566,696,015	85 %	58,823,365,616	90 %	75,705,702,178	95 %	83,276,272,396	100 %	91,603,899,635	100 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	70 %	75 %	87,591,745,764	80 %	98,102,755,256	85 %	109,875,085,887	95 %	123,060,096,193	100 %	137,827,307,736	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas SDM Tenaga Kesehatan	60 %	65 %	201,599,680	70 %	225,791,641	75 %	252,886,638	85 %	283,233,035	100 %	317,220,999	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Data Perizinan yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	70 %	75 %	734,476,960	85 %	822,614,195	95 %	921,327,899	100 %	1,031,887,246	100 %	1,155,713,716	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan derajat kesehatan Keluarga	70 %	80 %	4,811,103,360	85 %	5,388,435,763	90 %	6,035,048,055	95 %	6,759,253,821	100 %	7,570,364,280	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam berfungsi baik	47 %	47 %	39,100,253,602	49 %	40,000,000,000	51 %	42,000,000,000	53 %	45,000,000,000	55 %	50,000,000,000	55 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum	10 %	12 %	17,799,358,675	14 %	19,000,000,000	16 %	22,000,000,000	18 %	24,000,000,000	20 %	26,000,000,000	25 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya pengelolaan Persampah Regional	100 %	100 %	7,000,000,000	100 %	9,000,000,000	100 %	11,000,000,000	100 %	14,000,000,000	100 %	17,000,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	65 %	68 %	7,811,197,000	70 %	8,000,000,000	75 %	10,000,000,000	80 %	12,000,000,000	85 %	14,000,000,000	90 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase system drainase berfungsi dengan baik	60 %	65 %	2,700,000,000	68 %	4,000,000,000	70 %	8,000,000,000	75 %	10,000,000,000	85 %	12,000,000,000	85 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur permukiman di kawasan strategis	80 %	85 %	7,500,000,000	90 %	8,000,000,000	95 %	9,000,000,000	100 %	11,000,000,000	100 %	13,000,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya penataan bangunan gedung	85 %	90 %	35,000,000,000	95 %	38,000,000,000	100 %	40,000,000,000	100 %	45,000,000,000	100 %	49,000,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase penataan bangunan pada kawasan	65 %	70 %	8,500,000,000	75 %	9,500,000,000	85 %	10,000,000,000	95 %	12,000,000,000	100 %	14,000,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ PUPR
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi panjang jalan dalam keadaan mantap	57 %	59 %	60,836,216,398	60 %	68,136,562,366	62 %	76,312,949,850	66 %	85,470,503,832	88 %	95,726,964,292	70 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga kerja Konstruksi bersertifikat	7 %	7 %	84,000,000	9 %	94,080,000	11 %	105,369,600	13 %	118,013,952	15 %	132,175,626	15 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	3	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penurunan kasus pelanggaran penataan ruang	100 %	100 %	2,200,000,000	100 %	2,400,000,000	100 %	2,600,000,000	100 %	2,800,000,000	100 %	3,000,000,000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>															
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Cakupan rumah layak huni	100 %	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,200,000,000	100 %	1,400,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman tertangani	50 %	55 %	200,000,000	60 %	250,000,000	65 %	300,000,000	70 %	400,000,000	75 %	500,000,000	80 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh tertangani	80 %	80 %	16,000,000,000	85 %	17,000,000,000	90 %	18,000,000,000	95 %	20,000,000,000	100 %	22,000,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan utilitas perumahan	80 %	88 %	800,000,000	90 %	1,000,000,000	94 %	1,200,000,000	98 %	1,400,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	6		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan layanan perizinan pengembang perumahan	100 %	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	500,000,000	100 %	650,000,000	100 %	700,000,000	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>															
1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100 %	390,753,300	100 %	418,106,031	100 %	447,373,453	100 %	478,689,595	100 %	512,197,867	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3		PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Tingkat kapasitas penanggulang an bencana	8.46 %	10 %	2,588,178,630	12 %	3,000,000,000	14 %	4,000,000,000	16 %	5,000,000,000	18 %	5,000,000,000	20 %	0	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah

1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	8.46 %	8.46 %	1,600,000,000	10 %	1,800,000,000	12 %	1,900,000,000	14 %	2,000,000,000	15 %	2,200,000,000	20 %	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah/Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamata n
1	6		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>															
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Meningkatnya Daya Atau Kekuatan individu, lembaga dan komunitas	100 %	100 %	418,330,000	100 %	460,163,000	100 %	506,179,300	100 %	556,797,230	100 %	612,476,953	100 %	0	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan	100 %	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	280,000,000	100 %	300,000,000	100 %	320,000,000	100 %	0	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan	44.83 %	48 %	1,014,721,125	52 %	1,116,193,238	54 %	1,227,812,561	58 %	1,350,593,817	60 %	1,485,653,199	60 %	0	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Memulihkan dan mengembangk an kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial	99.65 %	100 %	635,030,000	100 %	698,533,000	100 %	768,386,300	100 %	845,224,930	100 %	929,747,423	100 %	0	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	100 %	410,905,000	100 %	451,995,500	100 %	497,195,050	100 %	546,914,555	100 %	601,606,011	100 %	0	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penanganan taman makam pahlawan	Tah un	1 Ta hun	141,707,500	1 Tahun	155,878,250	1 Ta hun	171,466,075	1 Tah un	188,612,683	1 Tah un	207,473,951	Tahu n	0	Dinas Sosial
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															

2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	100 %	100 %	396,000,000	100 %	435,600,000	100 %	479,160,000	100 %	527,076,000	100 %	579,783,600	%	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	100 %	100 %	880,000,000	100 %	968,000,000	100 %	1,064,800,000	100 %	1,171,280,000	100 %	1,288,408,000	%	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Melalui Perjanjian Kerja Bersama	45 Perusahaan	45 Perusahaan	400,000,000	47 Perusahaan	500,000,000	49 Perusahaan	800,000,000	51 Perusahaan	880,000,000	52 Perusahaan	980,000,000	55 Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga PUG yang aktif	100 %	100 %	340,000,000	100 %	380,000,000	100 %	400,000,000	100 %	420,000,000	100 %	460,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/ pendampingan perlindungan perempuan	30 %	40 %	541,450,000	60 %	600,000,000	65 %	750,000,000	70 %	850,000,000	90 %	950,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	100 %	100 %	161,912,133	100 %	173,245,982	100 %	185,373,200	100 %	198,349,325	100 %	212,233,777	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender dan Anak	100 %	100 %	32,100,000	100 %	34,347,000	100 %	36,751,290	100 %	39,323,880	100 %	42,076,552	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	114,490,000	100 %	122,504,300	100 %	131,079,601	100 %	140,255,173	100 %	150,073,035	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	404,460,000	100 %	432,772,200	100 %	463,066,254	100 %	495,480,892	100 %	530,164,554	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	9		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>															
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	tercapainya kemandirian pangan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi	100 %	100 %	785,565,000	100 %	864,121,500	100 %	950,533,650	100 %	1,045,587,015	100 %	1,150,145,717	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	terlaksananya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	100 %	1,268,454,000	100 %	1,395,299,400	100 %	1,534,829,340	100 %	1,688,312,274	100 %	1,857,143,501	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	terlaksananya penanganan kerawanan pangan	100 %	100 %	515,933,000	100 %	567,526,300	100 %	624,278,930	100 %	686,706,823	100 %	755,377,505	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan

2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	terlaksana pengawasan keamanan pangan	100 %	100 %	105,545,000	100 %	116,099,500	100 %	127,709,450	100 %	140,480,395	100 %	154,528,435	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	1 0		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>															
2	1 0	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pengelolaan izin lokasi di kabupaten bima	20 %	20 %	200,000,000	22 %	250,000,000	24 %	260,000,000	26 %	270,000,000	30 %	280,000,000	30 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima/Perkim
2	1 0	4	PROGRAM PENYELESAIA N SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten yang tertangani melalui medias	80%	80 %	200,000,000	95 %	250,000,000	98 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima/Perkim
2	1 0	5	PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	100 %	100 %	300,000,000	100 %	340,000,000	100 %	360,000,000	100 %	380,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima/Perkim
2	1 0	1 0	PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH	Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah	100 %	100 %	250,000,000	100 %	270,000,000	100 %	290,000,000	100 %	320,000,000	100 %	340,000,000	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima/Perkim
2	1 1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>															
2	1 1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100 %	100 %	225,000,000	100 %	250,000,000	100 %	270,000,000	100 %	290,000,000	100 %	310,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	3	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan terhadap desa di wilayah sempadan sungai dan perilaku usaha	100 %	100 %	350,000,000	100 %	370,000,000	100 %	390,000,000	100 %	410,000,000	100 %	415,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terjaganya kelestarian hutan	20 %	25 %	75,000,000	30 %	100,000,000	35 %	150,000,000	40 %	200,000,000	50 %	300,000,000	50 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pelayanan perijinan PPLH	100 %	100 %	250,000,000	100 %	280,000,000	100 %	300,000,000	100 %	320,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui lembaga MHA	100 %	100 %	30,000,000	100 %	50,000,000	100 %	70,000,000	100 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	75,000,000	100 %	80,000,000	100 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup	60 %	65 %	250,000,000	70 %	300,000,000	80 %	400,000,000	90 %	520,000,000	100 %	580,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	100 %	100 %	50,000,000	100 %	70,000,000	100 %	75,000,000	100 %	82,000,000	100 %	85,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	10 %	20 %	1,670,000,000	25 %	1,700,000,000	30 %	1,850,000,000	35 %	1,900,000,000	40 %	195,000,000	40 %	0	Dinas Lingkungan Hidup



2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	1	2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	100 %	1,736,766,158	100 %	1,910,442,773	100 %	2,101,487,051	100 %	2,311,635,756	100 %	2,542,799,331	100 %	0	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	1	2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya pelayanan, Penyelenggara an, Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	100 %	100 %	1,736,766,158	100 %	1,910,442,773	100 %	2,101,487,051	100 %	2,311,635,756	100 %	2,542,799,331	100 %	0	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	1	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan serta Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	100 %	457,000,000	100 %	480,000,000	100 %	500,000,000	100 %	520,000,000	100 %	540,000,000	100 %	0	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	1	2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUK AN	Terlaksananya penyusunan profil kependudukan	100 %	100 %	90,000,000	100 %	100,000,000	100 %	120,000,000	100 %	150,000,000	100 %	180,000,000	100 %	0	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	1	3	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa	100 %	100 %	96,299,465	100 %	103,040,428	100 %	110,253,257	100 %	117,970,986	100 %	126,228,954	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	1	3	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	100 %	42,800,000	100 %	45,796,000	100 %	49,001,720	100 %	52,431,840	100 %	56,102,069	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	1	3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH N DESA	Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	100 %	1,816,374,274	100 %	1,943,520,473	100 %	2,079,566,906	100 %	2,225,136,589	100 %	2,380,896,150	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

2	1	5	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarak an Desa	100 %	100 %	812,795,701	100 %	869,691,400	100 %	930,569,798	100 %	995,709,683	100 %	1,065,409,361	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	1	2	PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan / Angka Kelahiran Total (TFR)	100 %	100 %	5,207,136,805	100 %	5,500,000,000	100 %	5,800,000,000	100 %	6,000,000,000	100 %	5,200,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) & Jumlah Desa Yang Memiliki Peraturan Pendewasaan Usia Perkawinan	100 %	100 %	2,423,622,760	100 %	2,593,276,353	100 %	2,774,805,698	100 %	2,969,042,097	100 %	3,176,875,044	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %	100 %	157,290,000	100 %	168,300,300	100 %	180,081,321	100 %	192,687,013	100 %	206,175,104	100 %	0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	cakupan desa yang belum terlayani moda transportasi umum	100 %	100 %	1,477,998,500	100 %	1,625,798,350	100 %	1,788,378,185	100 %	1,967,216,004	100 %	2,163,937,604	100 %	0	Dinas Perhubungan

			JALAN (LLAJ)															
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	cakupan desa yang belum terlayani moda transportasi umum	Desa	17 Desa	5,290,197,000	19 Desa	5,819,216,700	21 Desa	6,401,138,370	25 Desa	7,041,252,207	30 Desa	7,745,377,428	Desa	0	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik	100 %	100 %	957,300,000	100 %	977,300,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,200,000,000	100 %	1,250,000,000	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Layanan Berbasis TIK Yang Terintegrasi	45 %	50 %	927,640,000	60 %	930,000,000	75 %	950,000,000	90 %	970,000,000	100 %	980,000,000	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Pelayanan lizin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	880,000,000	100 %	968,000,000	100 %	1,064,800,000	100 %	1,171,280,000	100 %	1,288,408,000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	60 %	75 %	149,996,000	88 %	160,000,000	95 %	180,000,000	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah kesehatan koperasi yang berkualitas	60 %	65 %	173,040,000	70 %	200,000,000	80 %	250,000,000	88 %	280,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	50 %	65 %	390,304,000	70 %	420,000,000	85 %	480,000,000	90 %	500,000,000	100 %	550,000,000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas terhadap Koperasi Aktif	323 k oper asi	323 oper asi	200,000,000	450 ko perasi	250,000,000	600 kop eras i	300,000,000	700 kd perasi	350,000,000	900 ko perasi	400,000,000	2973 koper asi	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing, daya tawar, daya tarik	50 %	65 %	530,587,000	70 %	510,175,050	85 %	701,701,308	90 %	806,956,504	100 %	927,999,979	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	8	PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	UKM yang tangguh dan mandiri	100 %	100 %	50,182,000	100 %	55,200,200	100 %	60,720,220	100 %	66,792,242	100 %	73,471,466	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	1	2	PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan nilai Investasi yang ditanamkan	837 i zin	840 zin	435,000,000	880 izi n	450,000,000	900 izin	500,000,000	950 izi n	550,000,000	1000 i zin	500,000,000	1000 izin	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terselenggara nya Promosi Penanaman Modal	100 %	100 %	225,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	320,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	680,000,000	100 %	680,000,000	100 %	700,000,000	100 %	730,000,000	100 %	800,000,000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	5	PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi	100 %	100 %	680000000	100 %	780000000	100 %	800000000	100 %	850000000	100 %	880000000	100 %	0	

2	1	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %	175,000,000	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	1	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	1	9	2	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya SDM Kepemudaan	60% %	65 %	1,219,200,000	70 %	1,241,504,000	75 %	1,278,484,480	80 %	1,431,902,618	90 %	1,603,730,932	90 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	1	9	3	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Meningktnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	45 %	50 %	44,000,000	55 %	2,289,280,000	60 %	2,563,993,600	70 %	2,871,672,832	80 %	3,216,273,572	80 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	1	9	4	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N	Persentase Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan	75 %	80 %	112,000,000	85 %	125,440,000	90 %	140,492,800	95 %	157,351,936	100 %	176,234,168	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	2	0	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainnya Penyelenggara an Statistik Sektoral	100 %	100 %	115,000,000	100 %	135,000,000	100 %	145,000,000	100 %	150,000,000	1000 %	170,000,000	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	2	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tercapainnya Penyelenggara an Persandian Daerah	35 %	35 %	204,807,000	45 %	250,000,000	50 %	280,000,000	55 %	300,000,000	65 %	350,000,000	65 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2	2	2	2	PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN	Pelestarian dan pengmbangan kebudayaan serta nilai keberagaman	%	100 %	812,000,000	100 %	909,440,000	100 %	1,018,572,800	100 %	1,140,801,536	100 %	1,277,697,720	%	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	2	2	3	PROGRAM PENGEMBANG AN KESENIAN TRADISIONAL	Program Pengembang n Kesenian Tradisional	65 %	70 %	369,600,000	75 %	413,952,000	80 %	463,626,240	85 %	519,261,389	100 %	581,572,755	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

2	2	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Peninggalan sejarah	0 %	100 %	196,000,000	100 %	219,520,000	100 %	245,862,400	100 %	275,365,888	100 %	308,409,795	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terpelihara dan terkelolanya Cagar Budaya	65 %	70 %	260,288,000	80 %	291,522,560	85 %	326,505,267	95 %	365,685,899	100 %	409,568,207	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	2	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Museum dan Peninggalan Sejarah lainnya	70 %	75 %	750,400,000	80 %	840,448,000	85 %	941,301,760	90 %	1,054,257,971	100 %	1,180,768,928	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Di Kabupaten	%	100 %	9,662,089,300	100 %	10,338,435,551	100 %	11,062,126,040	100 %	11,836,474,862	100 %	12,665,028,103	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100 %	100 %	110,000,000	100 %	150,000,000	100 %	170,000,000	100 %	196,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip Dinamis yang terpelihara	100 %	100 %	198,000,000	100 %	200,000,000	100 %	220,000,000	100 %	250,000,000	100 %	270,000,000	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terkelolanya Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan baik	%	100 %	50,000,000	100 %	52,898,000	100 %	64,500,860	100 %	66,215,920	100 %	68,051,035	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															

3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan jumlah usaha dan industri perikanan	%	100 %	2,457,525,840	100 %	2,703,278,424	100 %	2,973,606,266	100 %	3,270,966,893	100 %	3,598,063,582	%	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	%	100 %	3,017,756,335	100 %	3,319,531,969	100 %	3,651,485,165	100 %	4,016,633,682	100 %	4,418,297,050	%	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sumber Daya KP Bebas Dari Illegal Fishing	100 %	100 %	95,000,000	100 %	100,000,000	100 %	120,000,000	100 %	150,000,000	100 %	180,000,000	100 %	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan jumlah produksi Pengolahan dan Pemasaran yang diantar pulau (antar daerah/ekspor)	%	100 %	531,723,500	100 %	584,895,850	100 %	643,385,435	100 %	707,723,979	100 %	778,496,376	%	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	2	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik pariwisata	100 %	100 %	660,000,000	100 %	680,000,000	100 %	700,000,000	100 %	750,000,000	100 %	800,000,000	100 %	0	Dinas Pariwisata
3	2	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rasio Jumlah Destinasi yang di pasarkan	%	100 %	374,500,000	100 %	400,715,000	100 %	428,765,050	100 %	458,778,604	100 %	490,893,106	%	0	Dinas Pariwisata
3	2	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Terlaksananya Pengembangan riset dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	100 %	100 %	110,000,000	100 %	120,000,000	100 %	140,000,000	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	0	Dinas Pariwisata
3	2	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina	2 kelompok	4 kelompok	110,000,000	6 kelompok	140,000,000	8 kelompok	180,000,000	10 kelompok	200,000,000	12 kelompok	240,000,000	12 kelompok	0	Dinas Pariwisata



3	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah produksi tanaman pangan	%	100 %	1,503,055,994	100 %	1,683,422,713	100 %	1,885,433,438	100 %	2,111,685,451	100 %	2,365,087,705	100 %	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100 %	296,505,715	100 %	326,156,287	100 %	358,771,915	100 %	394,649,107	100 %	434,114,017	100 %	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan jumlah ternak yang divaksin	45 %	50 %	447,706,578	65 %	492,477,236	85 %	541,724,959	95 %	595,897,455	100 %	655,487,201	100 %	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100 %	738,976,560	100 %	827,653,747	100 %	926,972,197	100 %	1,038,208,860	100 %	1,162,793,924	100 %	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksannnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100 %	1,000,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	peningkatan produksi peternakan	%	100 %	199,211,980	100 %	219,133,178	100 %	241,046,496	100 %	265,151,145	100 %	291,666,260	100 %	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	peningkatan jumlah penyuluh dalam pendampingan petani/kegiatan pertanian	%	100 %	4,567,000,000	100 %	4,567,000,000	100 %	4,567,000,000	100 %	4,567,000,000	100 %	4,567,000,000	100 %	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Penerbitan Izin Perusahaan	%	100 %	42,800,000	100 %	45,796,000	100 %	49,001,720	100 %	52,431,840	100 %	56,102,069	100 %	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3	3	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) yang memadai	%	100 %	1,177,802,500	100 %	1,260,248,675	100 %	1,348,466,082	100 %	1,442,858,708	100 %	1,543,858,818	100 %	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a	%	100 %	195,542,500	100 %	209,230,475	100 %	223,876,608	100 %	239,547,971	100 %	256,316,329	100 %	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	6	PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN	Cakupan IKM yang terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikasi (halal, Balai POM,PIRT,hak merk dan lain- lain)	%	100 %	53,500,000	100 %	57,245,000	100 %	61,252,150	100 %	65,539,801	100 %	70,127,587	100 %	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	3	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	%	100 %	866,165,000	100 %	926,796,550	100 %	991,672,309	100 %	1,061,089,370	100 %	1,135,365,626	100 %	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	3	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRAS I	Teridentifikasin ya Potensi Kawasan Transmigrasi	100 %	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	3	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRAS I	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Transmigrasi	100 %	100 %	150,000,000	100 %	170,000,000	100 %	190,000,000	100 %	220,000,000	100 %	250,000,000	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi yang Maju dan Mandiri	100 %	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat transmigrasi yang mandiri	%	100 %	450,000,000	100 %	550,000,000	100 %	550,000,000	100 %	650,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4	1		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>															
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	18,258,253,087	100 %	20,258,253,087	100 %	24,258,253,087	100 %	26,000,000,000	100 %	28,258,253,087	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5,370,000,000	100 %	5,370,000,000	100 %	7,370,000,000	100 %	8,370,000,000	100 %	9,370,000,000	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
4	2		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>															
4	2	1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	%	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	cakupan pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan tiap tahun	%	100 %	12,649,540,000	100 %	13,535,007,800	100 %	14,482,458,346	100 %	15,496,230,430	100 %	16,580,966,560	%	0	Sekretariat DPRD
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5	1		<b>PERENCANAAN</b>															
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi tingkat kabupaten	100 %	100 %	2,485,000,000	100 %	2,885,000,000	100 %	3,085,000,000	100 %	3,285,000,000	100 %	3,485,000,000	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan	%	100 %	2,700,500,000	100 %	2,970,550,000	100 %	3,267,605,000	100 %	3,594,365,500	100 %	3,953,802,050	%	0	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2		<b>KEUANGAN</b>															
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	297,843,179,977	100 %	300,000,000,000	100 %	347,843,179,977	100 %	357,843,179,977	100 %	377,843,179,977	100 %	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terinventarisir nya Barang Milik Daerah (Aset)	100 %	100 %	2,236,700,000	100 %	2,536,700,000	100 %	2,836,700,000	100 %	3,036,700,000	100 %	3,236,700,000	100 %	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah blangko yang diterbitkan	100 %	100 %	2,536,000,000	100 %	2,836,000,000	100 %	3,136,000,000	100 %	3,336,000,000	100 %	3,536,000,000	100 %	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah/ Dispenda
5	3		<b>KEPEGAWAIAN</b>															
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksananya Fungsi Kepegawaian Daerah	%	100 %	1,786,900,000	100 %	1,911,983,000	100 %	2,045,821,810	100 %	2,189,029,337	100 %	2,342,261,390	100 %	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	4		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>															

5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	%	100 %	2,054,956,400	100 %	2,198,803,348	100 %	2,352,719,582	100 %	2,517,409,953	100 %	2,693,628,650	100 %	0	Badan Kepegawaian Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	1		INSPEKTORAT DAERAH															
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah	%	100 %	3,509,763,710	100 %	3,755,447,170	100 %	4,018,328,472	100 %	4,299,611,465	100 %	4,600,584,267	100 %	0	Inspektorat Kabupaten Bima
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Pengawasan wilayah pemerintah daerah	%	100 %	471,213,662	100 %	504,198,618	100 %	539,492,522	100 %	577,256,998	100 %	617,664,988	100 %	0	Inspektorat Kabupaten Bima
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN															
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100 %	17,655,000	100 %	18,890,850	100 %	20,213,210	100 %	21,628,134	100 %	23,142,104	100 %	0	Kecamatan Ambalawi

7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas, efektifitas dan efisiensi Pelayanan	%	100 %	23,540,000	100 %	25,187,800	100 %	26,950,946	100 %	28,837,512	100 %	30,856,138	100 %	0	Kecamatan Wawo
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik	%	100 %	17,655,000	100 %	18,890,850	100 %	20,213,210	100 %	21,628,134	100 %	23,142,104	100 %	0	Kecamatan Lambitu
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100 %	23,540,000	100 %	25,187,800	100 %	26,950,946	100 %	28,837,512	100 %	30,856,138	100 %	0	Kecamatan Parado
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas, Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	19,260,000	100 %	20,608,200	100 %	22,050,774	100 %	23,594,328	100 %	25,245,931	100 %	0	Kecamatan Madapangga
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya a Program Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100 %	26,750,000	100 %	28,622,500	100 %	30,626,075	100 %	32,769,900	100 %	35,063,793	100 %	0	Kecamatan Monta
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	%	100 %	32,100,000	100 %	34,347,000	100 %	36,751,290	100 %	39,323,880	100 %	42,076,552	100 %	0	Kecamatan Woha
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat yang diberdayakan	%	100 %	48,150,000	100 %	51,520,500	100 %	55,126,935	100 %	58,985,820	100 %	63,114,828	100 %	0	Kecamatan Sape
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100 %	41,730,000	100 %	44,651,100	100 %	47,776,677	100 %	51,121,044	100 %	54,699,517	100 %	0	Kecamatan Wera

			PUBLIK															
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas, Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	21,400,000	100 %	22,898,000	100 %	24,500,860	100 %	26,215,920	100 %	28,051,035	100 %	0	Kecamatan Donggo
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas, Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	19,260,000	100 %	20,608,200	100 %	22,050,774	100 %	23,594,328	100 %	25,245,931	100 %	0	Kecamatan Sanggar
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas, Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	21,400,000	100 %	22,898,000	100 %	24,500,860	100 %	26,215,920	100 %	28,051,035	100 %	0	Kecamatan Langgudu
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas, Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	25,145,000	100 %	26,905,150	100 %	28,788,511	100 %	30,803,706	100 %	32,959,966	100 %	0	Kecamatan Lambu
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Publik	%	100 %	15,515,000	100 %	16,601,050	100 %	17,763,124	100 %	19,006,542	100 %	20,337,000	100 %	0	Kecamatan Tambora
7	1	2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Publik	%	100 %	16,050,000	100 %	17,173,500	100 %	18,375,645	100 %	19,661,940	100 %	21,038,276	100 %	0	Kecamatan Soromandi
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat yang diberdayakan	%	100 %	35,845,000	100 %	38,354,150	100 %	41,038,941	100 %	43,911,666	100 %	46,985,483	100 %	0	Kecamatan Wawo



7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100 %	48,150,000	100 %	51,520,500	100 %	55,126,935	100 %	58,985,820	100 %	53,114,828	100 %	0	Kecamatan Bolo
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan	%	100 %	36,380,000	100 %	38,926,600	100 %	41,651,462	100 %	44,567,064	100 %	47,686,759	100 %	0	Kecamatan Palibelo
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	33,705,000	100 %	36,064,350	100 %	38,588,855	100 %	41,290,074	100 %	44,180,380	100 %	0	Kecamatan Ambalawi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya Ketentraman dan keamanan dalam kehidupan Masyarakat	%	100 %	25,680,000	100 %	27,477,600	100 %	29,401,032	100 %	31,459,104	100 %	33,661,242	100 %	0	Kecamatan Wawo
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	%	100 %	23,540,000	100 %	25,187,800	100 %	26,950,946	100 %	28,837,512	100 %	30,856,138	100 %	0	Kecamatan Lambitu
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	36,380,000	100 %	38,926,600	100 %	41,651,462	100 %	44,567,064	100 %	47,686,759	100 %	0	Kecamatan Parado
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	36,380,000	100 %	38,926,600	100 %	41,651,462	100 %	44,567,064	100 %	47,686,759	100 %	0	Kecamatan Madapangga
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tercapainnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	36,380,000	100 %	38,926,600	100 %	41,651,462	100 %	44,567,064	100 %	47,686,759	100 %	0	Kecamatan Monta

7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang ditangani	%	100 %	42,800,000	100 %	45,796,000	100 %	49,001,720	100 %	52,431,840	100 %	56,102,069	100 %	0	Kecamatan Woha
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	%	100 %	28,890,000	100 %	30,912,300	100 %	33,076,161	100 %	35,391,492	100 %	37,868,897	100 %	0	Kecamatan Belo
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	%	100 %	42,800,000	100 %	45,796,000	100 %	49,001,720	100 %	52,431,840	100 %	56,102,069	100 %	0	Kecamatan Sape
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	28,355,000	100 %	30,339,850	100 %	32,463,640	100 %	34,736,094	100 %	37,167,621	100 %	0	Kecamatan Wera
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	29,960,000	100 %	32,057,200	100 %	34,301,204	100 %	36,702,288	100 %	39,271,448	100 %	0	Kecamatan Donggo
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umumCakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	36,380,000	100 %	38,926,600	100 %	41,651,462	100 %	44,567,064	100 %	47,686,759	100 %	0	Kecamatan Sanggar

7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	35,310,000	100 %	37,781,700	100 %	40,426,419	100 %	43,256,268	100 %	46,284,207	100 %	0	Kecamatan Langgudu
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	32,100,000	100 %	34,347,000	100 %	36,751,290	100 %	39,323,880	100 %	42,076,552	100 %	0	Kecamatan Lambu
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	28,355,000	100 %	30,339,850	100 %	32,463,640	100 %	34,736,094	100 %	37,167,621	100 %	0	Kecamatan Tambora
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100 %	35,310,000	100 %	37,781,700	100 %	40,426,419	100 %	43,256,268	100 %	46,284,207	100 %	0	Kecamatan Soromandi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	%	100 %	28,355,000	100 %	30,339,850	100 %	32,463,640	100 %	34,736,094	100 %	37,167,621	100 %	0	Kecamatan Palibelo
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100 %	58,850,000	100 %	62,969,500	100 %	67,377,365	100 %	72,093,781	100 %	77,140,345	100 %	0	Kecamatan Bolo
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas, efektifitas dan efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	21,400,000	100 %	22,898,000	100 %	24,500,860	100 %	26,215,920	100 %	28,051,035	100 %	0	Kecamatan Belo

7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100 %	42,800,000	100 %	45,796,000	100 %	49,001,720	100 %	52,431,840	100 %	56,102,069	100 %	0	Kecamatan Ambalawi
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	%	100 %	32,635,000	100 %	34,919,450	100 %	37,363,812	100 %	39,979,278	100 %	42,777,828	100 %	0	Kecamatan Wawo
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan kualitas lembaga pemerintah desa	%	100 %	29,960,000	100 %	32,057,200	100 %	34,301,204	100 %	36,702,288	100 %	39,271,448	100 %	0	Kecamatan Lambitu
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Kualitas Lembaga Pemerintah Desa	%	100 %	34,775,000	100 %	37,209,250	100 %	39,813,898	100 %	42,600,870	100 %	45,582,931	100 %	0	Kecamatan Parado
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desa	%	100 %	40,125,000	100 %	42,933,750	100 %	45,939,113	100 %	49,154,850	100 %	52,595,690	100 %	0	Kecamatan Madapangga
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan pada pemerintahan desa	%	100 %	60,990,000	100 %	65,259,300	100 %	69,827,451	100 %	74,715,373	100 %	79,945,449	100 %	0	Kecamatan Woha
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100 %	69,550,000	100 %	74,418,500	100 %	79,627,795	100 %	85,201,741	100 %	91,165,862	100 %	0	Kecamatan Bolo
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan pada pemerintahan desa	%	100 %	48,792,000	100 %	52,207,440	100 %	55,861,961	100 %	59,772,298	100 %	63,956,359	100 %	0	Kecamatan Belo

7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan pada pemerintahan desa	%	100 %	58,850,000	100 %	52,969,500	100 %	67,377,365	100 %	72,093,781	100 %	77,140,345	100 %	0	Kecamatan Sape
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100 %	43,870,000	100 %	46,940,900	100 %	50,226,763	100 %	53,742,636	100 %	57,504,621	100 %	0	Kecamatan Wera
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desa	%	100 %	37,450,000	100 %	40,071,500	100 %	42,876,505	100 %	45,877,860	100 %	49,089,311	100 %	0	Kecamatan Donggo
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desa	%	100 %	34,775,000	100 %	37,209,250	100 %	39,813,898	100 %	42,600,870	100 %	45,582,931	100 %	0	Kecamatan Sanggar
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desa	%	100 %	34,775,000	100 %	37,209,250	100 %	39,813,898	100 %	42,600,870	100 %	45,582,931	100 %	0	Kecamatan Langgudu
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desa	%	100 %	37,985,000	100 %	40,643,950	100 %	43,489,027	100 %	46,533,258	100 %	49,790,586	100 %	0	Kecamatan Lambu
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Kualitas Lembaga Pemerintah Desa	%	100 %	36,380,000	100 %	38,926,600	100 %	41,651,462	100 %	44,567,064	100 %	47,686,759	100 %	0	Kecamatan Tambora
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Kualitas Lembaga Pemerintah Desa	%	100 %	38,520,000	100 %	41,216,400	100 %	44,101,548	100 %	47,188,656	100 %	50,491,862	100 %	0	Kecamatan Palibelo
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															

8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100 %	321,000,000	100 %	343,470,000	100 %	367,512,900	100 %	393,238,803	100 %	420,765,519	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	% LSM/Ormas yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah total LSM yang ada	%	100 %	988,735,640	100 %	1,057,947,135	100 %	1,132,003,434	100 %	1,211,243,675	100 %	1,296,030,732	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	%	100 %	449,400,000	100 %	480,858,000	100 %	514,518,060	100 %	550,534,324	100 %	589,071,727	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kegiatan usaha dibidang ekonomi sosial dan budaya yang dapat menjadi ketahanan daerah	%	100 %	561,750,000	100 %	601,072,500	100 %	643,147,575	100 %	688,167,905	100 %	736,339,659	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Jumlah konflik sosial yang di tangani	%	100 %	1,399,560,000	100 %	1,497,529,200	100 %	1,602,356,244	100 %	1,714,521,181	100 %	1,834,537,664	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X																		
X	X	X																

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	4,905,637,400	100 %	5,097,508,914	100 %	5,454,334,538	100 %	5,836,137,955	100 %	5,244,667,612	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja kelembagaan yang berkualitas	%	100 %	8,238,889,219	100 %	8,458,889,219	100 %	8,532,106,638	100 %	9,385,317,302	100 %	10,323,849,032	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	466,002,480,916	100 %	476,002,480,916	100 %	644,977,567,078	100 %	722,374,875,128	100 %	809,059,860,143	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi tahunan perangkat daerah	%	100 %	14,623,944,613	100 %	14,623,944,613	100 %	14,623,944,613	100 %	14,623,944,613	100 %	14,623,944,613	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi tahunan perangkat daerah	%	100 %	5,006,254,275	100 %	5,506,879,703	100 %	6,057,567,673	100 %	6,663,324,440	100 %	7,329,656,884	100 %	0	Dinas Sosial

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	8,520,479,501	100 %	8,620,479,501	100 %	8,720,479,501	100 %	8,770,479,501	100 %	8,788,479,501	100 %	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	66,439,775,489	100 %	67,439,775,489	100 %	68,439,775,489	100 %	71,439,775,489	100 %	73,439,775,489	100 %	0	Dinas Kesehatan
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	89,757,990,000	100 %	92,757,990,000	100 %	94,557,990,000	100 %	97,557,990,000	100 %	98,857,990,000	100 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	3,468,315,088	100 %	3,668,315,088	100 %	3,868,315,088	100 %	4,168,315,088	100 %	4,368,315,088	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	32,660,303,559	100 %	33,660,303,559	100 %	36,660,303,559	100 %	38,660,303,559	100 %	38,860,303,559	100 %	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	12,803,914,682	100 %	13,403,914,682	100 %	14,003,914,682	100 %	14,403,914,682	100 %	14,803,914,682	100 %	0	Dinas Pernakanan dan Kesehatan Hewan
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	%	100 %	12,932,590,288	100 %	13,032,590,288	100 %	13,232,590,288	100 %	13,432,590,288	100 %	13,832,590,288	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja



				baik														
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	6,192,901,488	100 %	5,626,404,592	100 %	7,090,252,914	100 %	7,586,570,618	100 %	8,117,630,561	100 %	0	Badan Kepegawaian Daerah
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	3,484,638,520	100 %	3,833,102,372	100 %	4,216,412,609	100 %	4,638,053,870	100 %	5,101,859,257	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	%	100 %	3,523,146,000	100 %	3,875,460,600	100 %	4,263,006,660	100 %	4,689,307,326	100 %	5,158,238,059	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	5,594,281,214	100 %	5,985,880,899	100 %	6,404,892,562	100 %	6,853,235,041	100 %	7,332,961,494	100 %	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	8,094,203,962	100 %	8,660,798,239	100 %	9,267,054,116	100 %	9,915,747,904	100 %	10,609,850,258	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	%	100 %	8,899,872,025	100 %	9,789,859,228	100 %	10,768,845,150	100 %	11,845,729,665	100 %	13,030,302,632	100 %	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	4,490,418,000	100 %	4,690,418,000	100 %	4,880,418,000	100 %	5,270,418,000	100 %	5,690,418,000	100 %	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	34,403,294,364	100 %	34,603,294,364	100 %	35,703,294,364	100 %	36,403,294,364	100 %	38,703,294,364	100 %	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	4,954,436,328	100 %	5,449,879,960	100 %	5,994,867,956	100 %	6,594,354,752	100 %	7,253,790,227	100 %	0	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	5,404,914,142	100 %	5,804,914,142	100 %	6,204,914,142	100 %	6,404,914,142	100 %	5,804,914,142	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	3,912,983,582	100 %	4,012,983,582	100 %	4,312,983,582	100 %	4,612,983,582	100 %	4,812,983,582	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	5,655,838,000	100 %	5,855,838,000	100 %	6,055,838,000	100 %	6,255,838,000	100 %	5,655,838,000	100 %	0	Dinas Pariwisata
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	8,686,449,600	100 %	8,886,449,600	100 %	9,186,449,600	100 %	9,486,449,600	100 %	9,686,449,600	100 %	0	Dinas Perhubungan

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	4,983,780,000	100 %	5,283,780,000	100 %	5,483,780,000	100 %	5,683,780,000	100 %	5,883,780,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	3,588,279,454	100 %	3,839,459,016	100 %	4,108,221,147	100 %	4,395,796,627	100 %	4,703,502,391	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaraan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	%	100 %	31,637,640,787	100 %	33,852,275,642	100 %	36,221,934,937	100 %	38,757,470,383	100 %	41,470,493,309	100 %	0	Sekretariat DPRD
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	45,405,000,000	100 %	47,522,932,116	100 %	52,275,225,327	100 %	57,502,747,860	100 %	63,253,022,646	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	8,628,121,978	100 %	9,232,090,516	100 %	9,878,336,853	100 %	10,569,820,432	100 %	11,309,707,863	100 %	0	Inspektorat Kabupaten Bima

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	%	100 %	1,969,150,211	100 %	2,106,990,726	100 %	2,254,480,077	100 %	2,412,293,682	100 %	2,581,154,240	100 %	0	Kecamatan Ambalawi
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pelayanan yang baik	%	100 %	2,298,843,640	100 %	2,459,762,695	100 %	2,631,946,083	100 %	2,816,182,309	100 %	3,013,315,071	100 %	0	Kecamatan Wawo
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi tahunan perangkat daerah	%	100 %	1,593,692,775	100 %	1,705,251,269	100 %	1,824,618,858	100 %	1,952,342,178	100 %	2,089,006,131	100 %	0	Kecamatan Lambitu
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Dokumen Evaluasi Tahunan Perangkat Daerah	%	100 %	1,612,409,429	100 %	1,725,278,089	100 %	1,846,047,555	100 %	1,975,270,884	100 %	2,113,539,846	100 %	0	Kecamatan Parado
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pengadministr asian Perkantoran, Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Skpd Serta Evaluasi Kinerja Skpd	%	100 %	2,707,403,666	100 %	2,896,921,923	100 %	3,099,706,457	100 %	3,316,685,909	100 %	3,548,853,923	100 %	0	Kecamatan Madapangga

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pencapaian Penganggaran Pengadministrasian Perkantoran, Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Skpd Serta Evaluasi Kinerja SKPD	%	100 %	2,141,196,474	100 %	2,291,080,227	100 %	2,451,455,843	100 %	2,623,057,752	100 %	2,806,671,795	100 %	0	Kecamatan Monta
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	2,697,111,122	100 %	2,885,908,901	100 %	3,087,922,524	100 %	3,304,077,100	100 %	3,535,362,497	100 %	0	Kecamatan Woha
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pengadministrasian Perkantoran, Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Skpd Serta Evaluasi Kinerja Skpd	%	100 %	2,712,822,039	100 %	2,902,719,582	100 %	3,105,909,952	100 %	3,323,323,649	100 %	3,555,956,305	100 %	0	Kecamatan Bolo
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	1,750,059,365	100 %	1,872,563,521	100 %	2,003,642,967	100 %	2,143,897,975	100 %	2,293,970,833	100 %	0	Kecamatan Belo
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas, efektifitas dan efisiensi Pelayanan Publik	%	100 %	26,750,000	100 %	28,622,500	100 %	30,626,075	100 %	32,769,900	100 %	35,063,793	100 %	0	Kecamatan Sape

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya a Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100 %	26,215,000	100 %	28,050,050	100 %	30,013,554	100 %	32,114,502	100 %	34,362,517	100 %	0	Kecamatan Wera
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pengadministrasian Perkantoran, Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Skpd Serta Evaluasi Kinerja Skpd	%	100 %	1,955,341,647	100 %	2,092,215,562	100 %	2,238,670,652	100 %	2,395,377,597	100 %	2,563,054,029	100 %	0	Kecamatan Donggo
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pengadministrasian Perkantoran, Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Skpd Serta Evaluasi Kinerja Skpd	%	100 %	1,938,129,520	100 %	2,073,798,586	100 %	2,218,964,487	100 %	2,374,292,002	100 %	2,540,492,442	100 %	0	Kecamatan Langgudu
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pengadministrasian Perkantoran, Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Skpd Serta Evaluasi Kinerja Skpd	%	100 %	2,165,164,474	100 %	2,316,725,987	100 %	2,478,896,806	100 %	2,652,419,583	100 %	2,838,088,954	100 %	0	Kecamatan Lambu
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi tahunan perangkat daerah	%	100 %	2,043,616,647	100 %	2,186,669,812	100 %	2,339,736,699	100 %	2,503,518,268	100 %	2,678,764,547	100 %	0	Kecamatan Tambora

X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Dokumen Evaluasi Tahunan Perangkat Daerah	%	100 %	2,238,298,433	100 %	2,438,298,433	100 %	2,638,298,433	100 %	2,738,298,433	100 %	2,838,298,433	100 %	0	Kecamatan Sanggar
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Dokumen Evaluasi Tahunan Perangkat Daerah	%	100 %	1,812,207,761	100 %	1,923,561,374	100 %	2,058,210,670	100 %	2,202,285,417	100 %	2,356,445,396	100 %	0	Kecamatan Palibelo
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Dokumen Evaluasi Tahunan Perangkat Daerah	%	100 %	1,797,720,910	100 %	1,923,561,374	100 %	2,058,210,670	100 %	2,202,285,417	100 %	2,356,445,396	100 %	0	Kecamatan Soromandi
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	%	100 %	4,764,027,022	100 %	5,097,508,914	100 %	5,454,334,538	100 %	5,836,137,955	100 %	6,244,667,612	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<b>Jumlah</b>				<b>1,919,382,619,650</b>		<b>2,020,168,153,462</b>		<b>2,345,512,537,600</b>		<b>2,554,668,989,477</b>		<b>2,789,208,922,395</b>			





## **BAB VIII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **8.1. Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah



bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Bima sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026

INDIKATOR	Kondisi Awal (2020)	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir (2026)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima							
Terbangun Masjid Agung Bima Sebagai Pusat Kajian Keagamaan dan Budaya Bima	N/A	80	100				
Persentase Tempat Ibadah sebagai Tempat Kajian Keagamaan Kecamatan dan Desa	N/A	2.34	2.92	3.51	4.68	5.85	7.02
Misi II : Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia							
Jumlah Desa Sadar Hukum	N/A	4	6	12	16	20	25
MISI III : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdaya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat							
Pertumbuhan ekonomi daerah (%)	-3,49	0,77	4,56	5,03	5,63	6,05	6,25
Kontribusi PDRB sektor Komoditas Unggulan (%)	45,28	45,50	45,80	46,00	46,18	46,36	46,54



INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
Skor pola pangan harapan	81,10	81,91	82,73	83,56	84,39	85,24	86,09
Rasio Gini	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23
Persentase kemantapan jalan (%)	51,58	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
Persentase jaringan irigasi berfungsi baik (%)	43,47	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	55,00
Cakupan Akses rumah tangga terlayani air bersih	77,93	81	84	88	92	96	100
Cakupan rumah tangga terlayani sanitasi layak	76	77	82,75	88,5	94,25	100	100
Indeks kualitas lingkungan hidup	62.38	62.94	63.47	63.84	64.20	64.60	65.00
Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	59	62	65	68	61	74	77
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	8	10	12	14	16	18	20
MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel							
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Sakip	B	B	B	B	BB	BB	BB
Persentase pencegahan korupsi (%)	75	75	80	85	90	93	95
Indeks keterbukaan informasi	63,40	75	80	85	90	93	98
MISI V: Membangun SDM yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender							
Angka Melek Huruf (AMH)	92,04	94,20	96,50	98,07	99,31	100	100
Rata – Rata Lama Sekolah	7,78	7,80	7,82	7,84	7,87	7,89	7,90
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,29	13,31	13,32	13,34	13,36	13,37	13,38
Prestasi Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional	2	4	6	8	10	12	14
Prestasi Atlet Tingkat Provinsi dan Nasional	2	5	8	11	13	15	17
Angka Harapan Hidup (tahun)	66,33	67,75	69,42	72,93	73,21	74,6	75
Prevalensi Balita Stunting (%)	25,50	24,9	21,5	20,5	19,5	18,5	17,5
Indeks Pembangunan gender (IPG)	91,08	92	93	94	95	96	97
Indeks Inovasi Daerah	42	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000



Penjelasan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bima Tahun 2021–2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terbangun Masjid Agung Bima Sebagai Pusat Kajian Keagamaan dan Budaya Bima

Merupakan penjabaran misi "Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima". Maka dilaksanakannya pembangunan masjid agung untuk meningkatkan kajian keagamaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

2. Persentase Tempat Ibadah sebagai Tempat Kajian Keagamaan Kecamatan dan Desa

Merupakan penjabaran misi "Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima". Maka difungsikan tempat ibadah sebagai tempat pelaksanaan kajian keagamaan pada tingkat kecamatan dan desa untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

3. Jumlah Desa Sadar Hukum

Penilaian kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 (empat) dimensi di antaranya:

- a) Dimensi akses informasi hukum, tingkat penilaian sebesar 20 %
- b) Dimensi implementasi hukum, tingkat penilaian sebesar 40%
- c) Dimensi akses keadilan, tingkat penilaian sebesar 20 %;
- d) Dimensi demokrasi dan regulasi, tingkat penilaian sebesar 20 %.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komponen IPM yang relatif paling reaktif mempengaruhi pencapaian IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pergerakan komponen lain, seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup; relatif lebih lambat kenaikannya. Salah satu komposit dari IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), mulai tahun 2018 berubah menjadi Umur Harapan Hidup (UHH), sesuai dengan metode perhitungan dari BPS. Pengeluaran per kapita per tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional, bahkan internasional. Padahal situasi kondisi perekonomian nasional, regional, dan internasional jauh di luar kewenangan pemerintah daerah.

5. Persentase Penduduk Miskin



Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah persentase penduduk kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau "tidak memiliki harta beda". Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

#### 6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkan kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan rumus berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

#### 7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi ini terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi atau dengan bahasa teknis perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses



terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya :

1. tanah dan kekayaan alam;
2. mutu tenaga kerja dan penduduk;
3. barang modal dan tingkat teknologi;
4. sistem sosial dan sikap masyarakat.

#### 8. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai koefisien gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Tabel 8. 2 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
04-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Rumus Gini Ratio:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Ket :

$f_i$  = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke  $i$ .

$Y_i$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke  $i$ .

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila  $GR = 0$ , ketimpangan



pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila  $GR = 1$  artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja

#### 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target dari setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam IKLH terdapat 3 indikator yang dijadikan sebagai alat ukur yaitu indeks pencemaran air sungai, indeks pencemaran udara, dan indeks tutupan hutan. Adapun penjelasan lengkap mengenai indikator dan parameter indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. 3 Tabel Indikator Kualitas Lingkungan

No.	Indikator Kualitas Lingkungan	Parameter
1.	Kualitas air sungai	Proporsi jumlah sampel air dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) $> 1$ terhadap total jumlah sampel
2.	Kualitas udara	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
3.	Tutupan lahan	Proporsi luas hutan primer dan sekunder terhadap luas kawasan hutan

#### 10. Inflasi

Pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang.

Penyebab inflasi karena banyak faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi berikutnya adalah perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi, dan terakhir penyebab inflasi karena



kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun 1998. Dampak inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. BPS menghitung inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau indeks pengeluaran. IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Data pengelompokan tersebut didapatkan BPS melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yang rutin dilakukan, baik per daerah maupun secara nasional.

#### 11. Skor Pola Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan





untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Deptan tahun 2001 yaitu :

- 1) Padi-padian 50%
- 2) Umbi-umbian 6%
- 3) Pangan hewani 12%
- 4) Minyak dan lemak 10%
- 5) Buah dan biji berminyak 3%
- 6) Kacang-kacangan 5%
- 7) Gula 5%
- 8) Sayur dan buah 6%
- 9) Lain-lain (bumbu) 3%.

Selanjutnya, berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (berasal dari 100% dibagi 3). Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk kelompok pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), total kontribusi energi (%AKG) adalah 74%. Bobot untuk kelompok pangan ini adalah 0.5 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 74%).
- 2) Untuk kelompok pangan sumber protein (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan total kontribusi energi 17%, diperoleh bobot 2.0 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 17%).

- 3) Untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan total kontribusi energi 6%, diperoleh bobot 5.0 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 6%).
- 4) Kelompok pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3% akan diperoleh bobot 0.0 yang berasal dari nilai 0% dibagi 3. Bobot 0.0 untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Gambar 8. 1 Pembobotan dalam Kelompok Pangan PPH



## 12. Opini BPK

Pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di dapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian, seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kriteria Opini mencakup :

- 1) Pembatasan lingkup Pembatasan terhadap lingkup audit terdiri atas :
  - a. Pembatasan oleh *auditee*. Hal ini terjadi karena *auditee* benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hal ini juga didukung oleh bukti-bukti secara tertulis dan disadari oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dan lain-lain) Hal ini terjadi pada saat auditor tidak mampu meyakini diri mereka sendiri terhadap kewajaran LK engan keterbatasan yang di luar kontrol pihak auditor maupun *auditee*.



- 2) Materialitas Tingkat materialitas diukur terhadap :
  - a. Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan Tingkat materialitas terhadap suatu akun hanya mempunyai konsekuensi maksimal pengecualian terhadap akun tertentu tersebut (apabila tidak dilakukan koreksi). Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap penyajian LK secara keseluruhan
  - b. Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan Tingkat materialitas ini dapat menghasilkan pendapat tidak wajar (tingkat maksimal, apabila tidak dapat dilakukan koreksi)
- 3) SPI yang memadai Pengukuran tingkat pengendalian intern dilakukan dengan membandingkan tingkat kesesuaian peng-aplikasi-an penyusunan dan pelaporan LK dengan standar akuntansi pemerintahan, standar pemeriksaan keuangan negara dan standar pemeriksaan akuntan publik (dalam hal-hal yang menjadi referensi SPKN) Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :
  - a. Pengukuran kuantitas tertentu Keadaan ini dapat dihitung dengan persentase tertentu, misalnya dengan persentase atas sampling jumlah BAST yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang.
  - b. Pengukuran kualitas yang memerlukan "judgement". Tingkat pengendalian ini misalnya terjadi pada tingkat kompetensi personil pelaksana.
- 4) Kesesuaian dengan SAP Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini :
  - a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
  - b. Efektivitas pengendalian intern;
  - c. Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU;
  - d. Pengungkapan yang memadai.
- 5) *Unqualified Opinion* (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan dengan kondisi :
  - a. Keempat kriteria yang menjadi kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi.
  - b. Semua koreksi yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh *auditee*.
  - c. Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan



pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa.

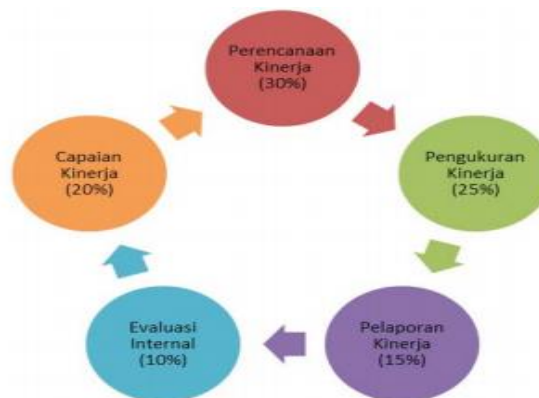
- 6) *Unqualified Opinion with Modified Wording* (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan)
  - a. Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi
  - b. Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan.
  - c. Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material)
- 7) *Qualified Opinion* (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian)
  - a. Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material)
  - b. Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh *auditee*.
  - c. Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material
- 8) *Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar)* Pada dasarnya, pendapat tidak wajar diberikan apabila auditor dapat meyakini bahwa penyajian LK tidak wajar, dengan kondisi :
  - a. Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu "kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan" dan "konsistensi pelaksanaan SAP".
  - b. Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh *auditee*.
- 9) *Disclaimer* Pendapat Tidak Memberi Pendapat diberikan pada saat auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa penyajian LK wajar atau tidak wajar, dengan kondisi-kondisi :
  - a. Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan
  - b. Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yang sangat material terhadap penyajian LK.
  - c. Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan

- d. Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

### 13. Nilai Sakip

Pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didapat dari hasil penjumlahan penilaian beberapa komponen SAKIP baik dari sisi pemenuhan, kualitas, maupun implementasinya. Berikut beberapa komponen serta bobot penilaian SAKIP, diantaranya:

Gambar 8. 2 Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP



### 14. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indikator Reformasi Birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks kemudahan berusaha, dan survei kepuasan masyarakat Implementasi Reformasi Birokrasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era milenial saat ini, mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat

sangat cepat sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk mencapai tujuan atau keadaan yang ingin dicapai terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa variabel atau area perubahan dalam komponen Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Gambar 8. 3 Komponen Indeks Reformasi Birokrasi



Penghitungan indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing variabel atau area perubahan berdasarkan pemenuhan, kualitas, dan implementasinya. Penilaian indeks reformasi birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu komponen proses (pengungkit) dengan bobot penilaian sebesar 60% dan komponen hasil dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang kemudian nilai reformasi birokrasi didapat dari penjumlahan pencapaian kinerja kedua komponen tersebut.

Adapun beberapa sub variabel dalam komponen proses (pengungkit) dapat dilihat sebagai berikut:





Gambar 8. 4 Sub variabel dalam komponen proses (pengungkit)

Sedangkan untuk pencapaian kinerja komponen hasil dapat dilihat dari beberapa sub variabel sebagai berikut:

Gambar 8. 5 Sub variabel pencapaian kinerja komponen hasil





## 15. Presentase Pencegahan Korupsi

Pada hakekatnya korupsi adalah merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan.

Jenis-jenis Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001) Merugikan keuangan negara; Suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan dan ;*Gratifikasi*.

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.

### 1. Strategi Preventif

Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi.

### 2. Strategi Detektif

Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi.

### 3. Strategi Represif

Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan strategi preventif, detektif dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen





bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (built in control), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat (wasmas) dan pengawasan legislatif (wasleg). Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan internal dan fungsional tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan menyusun petunjuk teknis operasional pemberantasan KKN sesuai surat Menteri PAN Nomor : 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk praktis bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)/ Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN/D dan Perbankan dalam upaya mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

#### 16. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. Menurut Clark, John dan Ken Guy (1997) dalam *Innovation and Competitiveness* bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi sering bersinggungan dengan penyimpangan, diskresi, keberanian melakukan spekulasi sehingga inovasi dan pelanggaran memiliki jarak yang sangat tipis. Jika berhasil, berbagai penyimpangan tersebut kemudian mendapat label sebagai inovasi, akan tetapi jika gagal akan mendapat stigma sebagai penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran, dan lainnya yang sering menjadi objek pemeriksaan lembaga audit atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan problematika yang demikian, sebenarnya pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi pemimpin ataupun



organisasi yang inovatif agar tidak mudah menjadi target 'kriminalisasi'.

Berdasarkan identifikasi dari tim Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal :

1. Masyarakat Indonesia makin terdidik, mengalami peningkatan pendapatan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, mengalami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka. Implikasinya, masyarakat akan semakin demanding untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah.
2. Pemerintah diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan value for money.
3. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga secara terus-menerus diharapkan mampu melakukan perubahan.
4. Pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme-mekanisme lama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional.
5. Pemerintah dituntut mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong competitiveness dunia usaha dalam menghadapi tantangan global sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan.
6. Pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik (LAN, 2013)

Sedangkan jenis inovasi dalam pelayanan publik antara lain mencakup :

- a) Product Innovation, misalnya produk baru dalam instrumen kesehatan di Rumah Sakit.
- b) Service Innovation, cara baru dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan, misalnya penyediaan formulir pajak melalui on-line
- c) Process Innovation, proses organisasi yang didesain dengan cara baru.



- d) Position Innovation, new context or 'customer', misalnya pelayanan baru bagi generasi muda.
- e) Strategic Innovation, tujuan baru bagi organisasi (misalnya: community policy).
- f) Governance Innovation, norma baru dalam pembuatan kebijakan untuk pelayanan publik inovatif (misal: public-private partnership).
- g) Rhetorical Innovation, konsep baru yang akan diimplementasikan dalam kebijakan publik (misal: carbon tax) (LAN, 2013).

#### 17. Indeks Keterbukaan Informasi

✓ Keterbukaan Informasi didasarkan pertimbangan :

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

✓ Keterbukaan Informasi bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;



- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- ✓ Informasi Publik yang dimiliki badan publik dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori:
- a. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, terdiri dari:
    - Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
    - Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
    - Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
  - b. Informasi Yang Dikecualikan

#### 18. Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Rumus perhitungannya *sebagai berikut* :

$$AMH\ 15+ = \frac{a}{b} \times 100\%$$

dengan:

a = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

b = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas



## 19. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

## 20. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia pada tahun 2016 sebesar 7,95 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

*Rumus yang dipakai untuk menghitung RLS :*

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$x_i$  = Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas



## 21. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu. AHH di hitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan UHH yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu, untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). UHH dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkungannya yang baik.

## 22. Prevalensi Balita Stunting

*Stunting* atau gagal tumbuh adalah suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan yang dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO.

Gizi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal. Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan dalam periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Periode emas dimulai sejak anak masih di dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang sering disebut dengan istilah "seribu hari pertama kehidupan anak". Kekurangan gizi yang terjadi pada periode emas tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah gagal tumbuh sehingga anak menjadi lebih pendek (*stunting*) dari standar.



Stunting berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, dan berpengaruh pada kualitas manusia di masa depan. Anak yang terkena stunting dapat terhambat perkembangan otaknya. Setelah ia dewasa, kecerdasan dan performa edukasinya menjadi tidak optimal, di samping bisa juga terkena risiko penyakit metabolik.

Prevalensi stunting anak balita di Indonesia cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%.. Di tahun 2019 angka prevalensi stunting nasional turun menjadi 27,67%.

### 23. Indeks Pembangunan Gender

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

$$\text{Rumusan menghitung IPG} = \text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$$

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.



## **8.2. Indikator Kinerja Daerah**

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bima sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan informasi yang menggambarkan keadaan riil atau nyata pada Kabupaten Bima yang disajikan ke dalam aspek dan bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel 8.4. berikut :



Tabel 8. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bima Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	-3,49	n/a	4,56	5,03	5,63	6,05	6,25	Setda	Bappeda, BPS
2	Inflasi	%	0,70	1,50	2,10	2,30	2,50	2,70	2,85	Setda	Bappeda, BPS
3	Persentase penduduk miskin	%	14,49	14.88	13,70	13,30	12,90	12,50	12,00	Setda	Bappeda, BPS
4	Indeks Gini	Point	0,36	n/a	0,29	0,28	0,26	0,25	0,23	Setda	Bappeda, Setda, BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	66,30	66,66	67,05	67,65	68,40	69,25	70,25	Setda	Bappeda, BPS
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	42,38	62,94	63,47	63,84	64,20	64,60	65	DLH	Setda, Bappeda
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	C	C	C	CC	CC	B	B	Setda	BKD
8	Nilai Eksport (Rp Milyar)	Rp	2,319	2.470	2.620	2.770	2.920	3.070	3.220	Disperindag	BPS, Bappeda
9	Indeks Pelayanan Publik	Point	NA	50	60	70	80	90	100	Setda	Bappeda, Setda, BPS
C	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	Pendidikan										
	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang memenuhi target	%	68	70,00	100	100	100	100	100	Dikbudpora	Bappeda, BPS
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,29	13,39	13,32	13,34	13,36	13,37	13,38	Dikbudpora	Bappeda, BPS
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,91	7,82	7,84	7,87	7,89	7,90	Dikbudpora	Bappeda, BPS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
12	Raport Mutu Pendidikan SD	Point	5,54	5,58	5,61	5,64	5,68	5,71	5,75	Dikbudpora	Bappeda, BPS
13	Raport Mutu Pendidikan SMP	Point	5,76	5,80	5,85	5,90	5,95	6,05	6,10	Dikbudpora	Bappeda, BPS
14	Angka melek huruf (AMH)	Point	88,56	89,46	96,50	98,07	99,31	100	100	Dikbudpora	Bappeda, BPS
16	Angka partisipasi murni SD/MI	Point	99,19	99,40	99,75	99,80	99,90	99,95	100	Dikbudpora	BKD, Bappeda
17	Angka partisipasi murni SMP/MTs	Point	96,37	97,20	97,89	98,17	99,36	99,80	100	Dikbudpora	BKD, Bappeda
21	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B	Unit	200	230	290	312	352	370	400	Dikbudpora	BKD
23	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B	Unit	60	70	80	90	110	120	130	Dikbudpora	BKD
<b>1.02 Kesehatan</b>											
26	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang memenuhi target	%	100	100	100	100	100	100	100	Dikes	Disos, Perkim, BLUD
28	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,33	66,50	67,10	67,50	67,90	68,30	68,70	Dikes	BPS, Bappeda
29	Prefalensi Balita <i>Stunting</i>	%	25,50	24,90	21,50	20,50	19,50	18,50	17,50	Dikes	DP3AP2KB, Bappeda
30	Menurunnya jumlah kematian ibu	Point	5	10	9	9	8	7	6	Dikes	DP3AP2KB, BLUD
31	Menurunnya jumlah kematian bayi	Point	52	76	75	74	73	72	71	Dikes	DP3AP2KB, BLUD
32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	45	45	50	50	50	50	50	Dikes	DiSos, BLUD
<b>1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>											
	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	Perkim	Setda, DPUPR, Dikes, DiSos, Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Bidang Pekerjaan Umum yang memenuhi target										a
33	Persentase Kemantapan jalan	%	51,58	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	DPUPR	Bappeda, DisHub
34	Persentase jaringan Irigasi berfungsi baik	%	43,45	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	55,00	DPUPR	Disperta, Bappeda
35	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Tata Ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR	Setda, Bappeda
36	Presentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	%	0	5,00	7,00	9,00	11,00	12,00	14,00	DPUPR	Disnakertrans
37	Cakupan Akses rumah tangga terlayani air bersih	%	77,93	81	84	88	92	96	100	Perkim	Setda, DPUPR, Dikes, DiSos, Bappeda
38	Cakupan rumah tangga terlayani sanitasi layak	%	76	77	82,75	88,5	94,25	100	100	Perkim	Setda, DPUPR, Dikes, DiSos, Bappeda
<b>1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>											
	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yang memenuhi target	%	100	100	100	100	100	100	100	Perkim	Setda, DPUPR, Dikes, DiSos, Bappeda
39	Penataan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	41,28	48,88	56,48	64,09	71,69	79,29	86,89	Perkim	Setda, DPUPR, Dikes, DiSos, Bappeda
40	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang terlayani	%		7,07	21,47	35,87	50,27	64,67	79	Perkim	Setda, DPUPR, Dikes, DiSos, Bappeda
<b>1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>											
42	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	90	80	85	90	95	100	100	SatPol PP	Setda, Kesbang Linmas

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
43	Persentase Penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbang Linmas	Setda, SatPol PP
44	Partisipasi politik masyarakat	%	70,3	85,3	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	Kesbang Linmas	DPMDes, Dukcapil, KPU
45	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	%	59	62	65	68	71	74	77	BPBD	Dinsos, DPUPR, Perkim, SatPol PP
46	Persentase jumlah korban jiwa/harta benda yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	Dinsos, DPUPR, Perkim, SatPol PP
47	Jumlah Desa Siaga Bencana	Desa	20	25	35	50	65	80	100	BPBD	Dinsos, SatPol PP, DPMDes
48	Persentase Informasi Rawan Bencana	%	0	25	35	50	65	80	100	BPBD	Dinsos, DPUPR, Perkim, SatPol PP, DPMDes
49	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	0	25	35	50	65	80	100	BPBD	Dinsos, DPUPR, Perkim, SatPol PP, DPMDes
<b>1.06 Sosial</b>											
50	Persentase PMKS yang Dibantu dan ditangani	%	55	57	59	61	63	65	67	Dinsos	
51	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	79	79	81	83	85	87	87	Dinsos	Dikes
52	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	%	99,65	100	100	100	100	100	100	Dinsos	BPBD
53	Jumlah Desa yang melaksanakan Verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Desa	18	38	54	72	90	108	126	Dinsos	DPMDes, Bappeda
<b>2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2.01	Tenaga Kerja										
54	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,89	1,58	4,60	4,30	4,00	3,70	3,50	Disnakertrans	BPS, Bappeda
55	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	120	80	82	84	85	100		Disnakertrans	BPS, Bappeda
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
56	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	52,62	n/a	62	63	64	65	66	DP3AP2KB	BPS, Bappeda
57	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	91,50	n/a	93	94	95	96	97	DP3AP2KB	BPS, Bappeda
58	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,75	21	22	23	24	25	26	DP3AP2KB	Depag, Bappeda, BPS
59	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	%	30	32	34	36	38	40	42	DP3AP2KB	BPS, Setda
60	Cakupan kabupaten /Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	81	83	86	88	90	92	DP3AP2KB	BPS, Bappeda, Setda
61	Peserta KB Aktif	%	82	83	84	85	86	87	88	DP3AP2KB	Dikes, Bappeda
62	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani/ditindaklanjuti	%	80	81	83	85	87	90	92	DP3AP2KB	SatPol PP, Kesbanglinmas, Dukcapil
2.03	Pangan										
63	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	81,10	81,91	82,73	83,56	84,39	85,24	86,09	Dinas Ketahanan Pangan	Disperta
64	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	190.238	194.994	199.869	204.866	209.987	215.237	220.618	Dinas Ketahanan Pangan	Disperta
65	Ketersediaan Energi PerKapita	Kkal/kapi ta/hari	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Dinas Ketahanan Pangan	Disperta, Disnak, DKP
66	Ketersediaan Protein	Gram/ka	57	63	63	63	63	63	63	Dinas Ketahanan	Disperta, Disnak,

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	PerKapita	pita/hari								Pangan	DKP
2.04	Lingkungan Hidup										
67	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	Point	250	265	350	400	425	450	450	DLH	DPMPTSP, DPUPR, Perkim
68	Jumlah lahan kritis yang ditangani	(Ha)	33,86	50	25.914,243	25.914243	25.914,243	25.914,243	100% (0 Ha) Lahan Kritis	DLH	Disperta, Bappedda
69	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%		33.305	36.693	38.520	40.382	43.738	45.825	DLH	Perkim,Dikes,DF MDes
70	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	Point	4	2	6	8	10	12	13	DLH	Setda,SatPol PP,DPMPTSP, DPUPR
2.05	Pertanahan										
71	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	NA	100	100	100	100	100	100	SETDA	DPUPR, PERKIM, SatPo PP,BPPKAD
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
72	Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	%	91,81	100	100	100	100	100	100	DisDukcapil	Diskominfo,DPM Des, Camat
73	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	%	98	100	100	100	100	100	100	DisDukcapil	Diskominfo,DPM Des, Camat
74	Persentase Akta Kematian	%	29,84	40	50	65	75	85	100	DisDukcapil	Diskominfo,DPM Des, Camat
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
75	Bumdes Aktif	%	82	85	89,5	90	95	95	95	DPMDes	Bappeda
76	Indeks Desa Membangun		0,63	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70	0,71	DPMDes	Bappeda, Setda
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
77	Pertumbuhan Penduduk	%	1.19	n/a	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	Disdukcapil	Bappeda, BPS
2.09	Perhubungan										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
78	Persentase konektivitas moda transportasi publik	%	0	0	20	20	20	20	20	Dishub	DPUPR,Bappeda
79	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Dishub	
80	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	189	151	200	200	200	200	200	Dishub	
81	Tersedianya Halte yang dilayani angkutan umum	Unit	0	0	2	2	2	2	2	Dishub	DPUPR
2.10	Komunikasi dan Informatika										
82	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	NA	-	9,68	19,35	25,81	32,26	38	Diskominfo	Setda
83	Indeks Keterbukaan informasi	Point	63,40	75	80	85	90	93	98	Diskominfo	Setda
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
84	Persentase Koperasi Aktif	%	78,99 %	93,36 %	99,53 %	96,51 %	95,76 %	100 %	100 %	Diskop-UKM	Bappeda
2.12	Penanaman Modal										
85	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Milyar	66,242,660,428	69,554,793,449	73,032,533,122	76,684,159,778	80,518,367,767	84,544,286,155	88,771,500,463	DPMPTSP	,Setda,DPUPR, BPPKAD,Bappeda
86	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	89,21	89,89	89,89	90,9	91,91	92,92	93,93	DPMPTSP	Setda
87	Jumlah Pendapatan dari hasil Retribusi	(Rp)	911,938,440	1,125,085,000	1,225,085,000	1,325,085,000	1,425,085,000	1,525,085,000	1,625,085,000	DPMPTSP	BPPKAD
88	Jumlah nilai investasi PMA	(Rp)	30,465,367,353	31,988,635,721	33,588,067,507	35,267,470,882	37,030,844,426	38,882,386,647	40,826,505,980	DPMPTSP	Setda,DPUPR, BPPKAD,Bappeda
89	Jumlah izin yang terbit	Bh	641	708	744	781	820	861	904	DPMPTSP	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga										
90	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	2	4	4	4	4	4	4	Dikbudpora	Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>										
91	Bima Satu Data	%	15	30	45	60	75	90	100	Diskominfo	BPS
92	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	NA	-	30	60	90	100	100	Diskominfo	Seluruh OPD
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>										
93	OPD yang menerapkan Tanda Tangan Digital	OPD	1	1	4	10	20	27	31	Diskominfo	Setda
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>										
94	Jumlah Cagar Budaya yang menjadi obyek wisata	Unit	4	5	5	6	7	8	8	Disbudpora	Dispar
95	Jumlah event kesenian tradisional yang diselenggarakan	Kali	4	4	4	4	4	4	4	Disbudpora	Setda, Dispar
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>										
96	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Pemustaka)	Orang	0	10.000	13.000	15.000	18.000	20.000	25.000	Dinas Perpustakaan	Disbudpora
97	Jumlah Digitalisasi Koleksi Deposit (Judul buku)	buah	0	30	35	40	45	50	55	Dinas Perpustakaan	Disbudpora
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>										
98	Jumlah Arsip yang dikelola dan dipelihara sesuai Standar	Lembar	0	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	Dinas Perpustakaan	Setda, Semua OPD
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>										
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
99	Produksi perikanan budidaya	Ton	188.000	196.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000	DKP	
100	Produksi perikanan tangkap	Ton	70.379,91	70.385,25	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	DKP	
101	Produksi garam	Ton	188.228	198.300	199.000	199.300	199.500	199.800	200.000	DKP	PD Wawo
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
102	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	11.870.000	401.900.000	100.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	180.000.000	Dinas Pariwisata	BPPKAD
103	Angka kunjungan wisatawan	orang	37.230	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	180.000	Dinas Pariwisata	
104	Jumlah Usaha terkait ekonomi kreatif	Klp.	20	35	50	70	90	115	115	Dinas Pariwisata	DisKopUKM,
<b>3.03 Pertanian</b>											
105	Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan & Perikanan	%	45,28	n/a	42,00	41,00	40,50	40,00	39,00	Disperta	BPS,Bapeda,DKP Disnak,Dinas Ketahanan Pangan
106	Nilai Tukar Petani	Point	>100	>100	>101	>101	>101	>102	>102	Disperta	BPS
107	Produksi Komoditi tanaman Pangan utama :									Disperta	Dinas Ketahanan Pangan
	- Padi	Ton	312.179	436.679	436.679	445.413	454.321	463.407	472.675		
	- Jagung	Ton	403.379	605.831	617.948	630.307	642.913	655.771	668.887		
	- Kedelai	Ton	3.077	12.033	12.273,66	12.519	12.770	13.025	13.285		
108	Produksi Komoditi Hortikultura unggulan:									Disperta	Dinas Ketahanan Pangan
	- Bawang merah	Ton	138,945	138,945	145.892,25	152.839,5	157.007,85	159.786,75	159.786,75		
	- Bawang putih	Ton	12,585	12,585	13.214,25	13.843,5	14.221,05	14.472,75	14.172,75		
	- Cabe besar	Ton	87	87	91,35	95,7	98,31	100	100		
	- Cabe rawit	Ton	525	525	551,25	577,5	593,25	603,75	603,75		
	- Kopi	Ton	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30		
<b>3.04 Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>											
109	Populasi Ternak									Dinas Peternakan	BPS
	- Sapi	Ekor	213.873	220.289	226.898	233.705	240.716	247.937	247.937		
	- Kerbau	Ekor	10.597	10.703	10.810	10.918	11.027	11.138	11.138		
	- Kuda	Ekor	3.447	3.482	3.516	3.552	3.587	3.623	3.623		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	- Kambing	Ekor	238.131	245.275	247.728	250.205	252.707	255.234	255.234		
	- Domba	Ekor	8.724	8.898	9.076	9.258	9.443	9.632	9.632		
	- Unggas	Ekor	3.040.372	3.161.987	3.288.466	3.420.005	3.556.805	3.669.078	3.669.078		
110	Produksi Daging	Ton	3.490	3.590	3.692	3.796	3.903	4.010	4.010	Dinas Pernakan	Dinas Ketahanan Pangan, Disperind ag
111	Konsumsi Daging	Ton	6,98	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	9,50	Dinas Pernakan	Dinas Ketahanan Pangan, Disperind ag
112	Terkendalnya pengeluaran ternak potong dan bibit	Ekor	9.419	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	Dinas Pernakan	Dinas Pertanian
113	Meningkatnya ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Ekor	79.897	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000	Dinas Pernakan	
114	Meningkatnya jumlah kelahiran hasil inseminasi buatan (IB)	Ekor	2.250	2.500	3.500	3.500	4.000	4.500	4.500	Dinas Pernakan	
115	Meningkatnya Jumlah Asuransi Ternak	Ekor	1.777	2.000	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	Dinas Pernakan	
<b>3.05 Perdagangan</b>											
116	Pengeluaran per kapita	Rp.000	8.468	8.495	8.500	8.550	8.600	8.650	8.700	DisPerindag	BPS, Bappeda
<b>3.06 Perindustrian</b>											
117	Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) dari kegiatan Diklat yang dilaksanakan	WUB	-	40	40	50	50	60	60	DisPerindag	Disnaker
118	Jumlah IKM yang dibina	IKM	-	40	60	60	70	70	70	DisPerindag	Diskop-UKM
119	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikasi (halal, Balai POM, PIRT, Hak Merk dan lain- lain)	IKM	25	20	20	22	23	25	25	DisPerindag	Diskop- UKM, Dikes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
3.07	Transmigrasi										
120	Cakupan Penempatan Transmigran	%	NA		82	85	87	90		Disnakertrans	Setda, DPUPR, Perkim, DPMdes, Dukcapil
4	URUSAN FUNGSI PENUNJANG										
4.01	Administrasi Pemerintahan										
121	Presentase kegiatan keagamaan	%	75	80	90	100	100	100	100	Setda	
122	Nilai EKPPD	Point/ level	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Setda	Inspektorat, Bappeda
123	Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda	Sekwan
124	Indeks Inovasi Daerah	Point	42	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Setda	
125	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda	Diskominfoستik, Seluruh OPD
126	Persentase naskah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	%	NA	75	80	90	100	100	100	Setda	Bappeda
127	Persentase evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	%	80	80	90	100	100	100	100	Setda	Bappeda, DPUPR, Perkim
128	Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP	%	56,86	84,89	100	100	100	100	100	Setda	DPUPR, Perkim
129	Persentase BUMD yang Sehat	%	62,7	75	87,5	100	100	100	100	Setda	BUMD
130	Persentase pengelolaan surat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
131	Persentase pemenuhan	%	75	80	90	90	90	100	100	Setda	DPUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	sarana dan prasarana RT sesuai standar										
132	Persentase pelayanan keprotokolan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda	SatPolPP,Dishub
133	Persentase kebijakan SDA/LH yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Setda	DLH
<b>4.02 Pengawasan</b>											
134	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	B	BB	BB	BB	Inspektorat	Setda
<b>4.03 Perencanaan</b>											
135	Persentase Usulan Masyarakat dalam RKPD	%	47	70	70	70	70	70	70	Bappeda	Setda,BPPKAD
136	Persentase target RKPD yang dicapai	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	Setda,BPPKAD
137	Persentase keselarasan dokumen RKPD terhadap dokumen RPJMD	%	85	95	95	95	95	95	95	Bappeda	Setda,BPPKAD
<b>4.04 Keuangan</b>											
138	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD	
139	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	7,55	7,65	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	BPPKAD	
<b>4.05 Kepegawaian</b>											
140	Indeks Profesionalisme ASN	Point	NA	70	75	75	80	80	85	BKD	Seluruh OPD
141	Persentase Penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur	%	14 kasus	100	100	100	100	100	100	BKD	Inspektorat, SatPolPP
142	Persentase data kepegawaian yang dimutakhirkan dalam SIMPEG	%	91	90	91	92	93	94	95	BKD	Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendamping
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
4.06	Pendidikan dan Pelatihan										
143	Persentase pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	%	100	100	100	100	100	100	100	BKD	Disnakertrans
4.07	Penelitian dan Pengembangan										
144	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (ditindaklanjuti)	%	NA	75	75	75	75	75	75	Bappeda	Kesbang Linmas
4.08	Pengawasan										
145	Presentase Pencegahan Korupsi	%	75	75	80	85	90	93	95	Inspektorat	Setda, BPPKAD
146	Persentase tindak lanjut temuan	%	84	85	86	87	88	89	90	Inspektorat	Setda, BPPKAD
147	Nilai APIP	Level	3	3	4	4	4	4	4	Inspektorat	Setda, Bappeda
148	Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Point	3,11	3,11	3,25	3,57	3,75	3,95	4	Inspektorat	Setda
4.09	Sekretariat Dewan										
149	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi PERDA	%	20	65	70	75	80	85	90	Sekwan	Setda
150	Persentase Pokok Pikiran Dewan Yang Terakomidir dalam APBD	%	50	50	80	85	85	85	90	Setwan	Setda,BPPKAD, Bappeda



## BAB IX

### PENUTUP

---

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis dengan melibatkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kabupaten Bima. Untuk menjamin pencapaian visi, misi dan program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, di dalam proses pembangunan di Kabupaten Bima akan tercipta kerjasama yang diistilahkan sebagai “kolaborasi” serta pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap Pemerintahan yang diistilahkan sebagai “desentralisasi” dengan harapan seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Bima akan bekerja penuh rasa tanggungjawab dan kelak meraih hasilnya bersama, mewujudkan Kabupaten Bima yang RAMAH “*Religius, Aman, Makmur, Amanah, dan Handal*”.

#### 1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan



berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bima periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bima harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
- b. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Bima yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
- d. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bima, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat



dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- e. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
- f. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjadi perubahan yang mendasar seperti : terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan/atau perubahan kebijakan nasional.
- h. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Bima tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

## 2. Pedoman Transisi

Dengan adanya rencana Pilkada serentak tahun 2024, masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bima yang seharusnya 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun saja namun ini tidak mempengaruhi periode RPJMD Tahun 2021–2026. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2021–2026 akan berakhir pada September 2026. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bima, penyusunan RKPD Kabupaten Bima Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2025-2045, penyelesaian target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bima dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta mengantisipasi perkembangan





pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Bima. Selanjutnya RKPD Kabupaten Bima Tahun 2026 menjadi bagian dari RPJMD periode berikutnya.

**BUPATI BIMA,**

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE**